



KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
DIREKTORAT JENDERAL PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN
PUSAT PENGELOLAAN DANA PEMBIAYAAN PERUMAHAN

Jl. Palatehan I No. 27 Kebayoran Baru, Jakarta Selatan - 12160, Telp. 021- 27510964 Fax: 021-7220050

Nomor : KU 0604-Pg/379
Lampiran : 1 (satu) berkas
Hal : Laporan Kinerja BLU PPDPP Tahun 2020

Jakarta, 14 Januari 2021

Kepada Yth.

Direktur Pengembangan Sistem dan Penyelenggaraan Pembiayaan
Ditjen Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan
di
Jakarta

Sehubungan dengan Peraturan Menteri PUPR Nomor 09/PRT/M/2018 tentang Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, bersama ini terlampir disampaikan Laporan Kinerja BLU PPDPP Tahun 2020 untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasama yang baik diucapkan terima kasih.

Direktur Utama,

Arief Sabaruddin
NIP. 19651130199031001

Tembusan :

1. Direktur Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan
2. Ketua Dewas BLU PPDPP



KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT

PUSAT PENGELOLAAN DANA PEMBIAYAAN PERUMAHAN



2020

LAPORAN KINERJA

PUSAT PENGELOLAAN DANA PEMBIAYAAN PERUMAHAN

KATA PENGANTAR

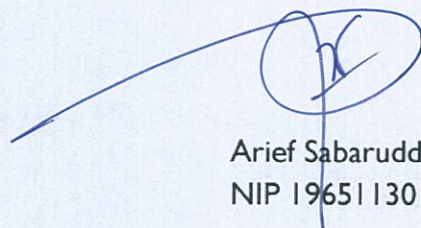
Badan Layanan Umum Pusat Pengelolaan Dana Pembiayaan Perumahan (BLU-PPDPP) merupakan salah satu unit kerja yang berada dalam koordinasi Direktur Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. Sebagai salah satu unit kerja instansi pemerintah yang memiliki tanggung jawab publik, BLU-PPDPP mempunyai kewajiban untuk menyusun Laporan Kinerja. Laporan Kinerja ini merupakan bukti komitmen dalam mewujudkan akuntabilitas instansi pemerintah.

Dalam laporan ini akan diperoleh informasi mengenai Penetapan Kinerja berikut sasaran kegiatan yang telah berhasil dicapai dan Kinerja kegiatan yang ada. Dalam waktu berjalan terdapat berbagai perubahan yang mempunyai pencapaian kinerja sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan yang dipengaruhi oleh perkembangan kondisi dan situasi yang dihadapi dan kebijakan-kebijakan dari Kementerian Keuangan dan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.

Laporan kinerja ini disusun dengan mengutamakan prinsip transparansi dan akuntabilitas agar berbagai pihak yang berkepentingan dapat memperoleh gambaran tentang hasil kinerja yang telah dilakukan oleh jajaran BLU-PPDPP.

Laporan kinerja PPDPP Tahun 2020 ini juga diharapkan menjadi masukan dalam penyusunan Laporan Kinerja Direktur Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat tahun 2020.

Jakarta, Januari 2021
Direktur Utama,



Arief Sabaruddin
NIP 196511301990031001

RINGKASAN EKSEKUTIF

Dalam laporan kinerja ini akan diperoleh informasi mengenai kinerja kegiatan yang telah berhasil dicapai PPDPP selama tahun 2020. Pada tahun 2020 juga bertepatan dengan adanya pandemic covid-19 yang merubah proses pencapaian kinerja yang sebelumnya dominan dilaksanakan secara tatap muka (*offline*) menjadi *online* melalui aplikasi *online meeting*. Penetapan Kinerja berikut sasaran dan indikator kinerjanya sebagai ukuran kuantitatif dan kualitatif atas pencapaian sasaran kegiatan yang ada. Walaupun seiring berjalannya waktu terdapat berbagai perubahan yang mempengaruhi pencapaian kinerja sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Dimana hal tersebut sangat dipengaruhi oleh kebijakan-kebijakan dari Kementerian Keuangan dan Pimpinan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.

Dalam rangka implementasi arah kebijakan investasi Pemerintah dalam tahun anggaran 2020 dianggarkan investasi untuk bantuan pembiayaan perumahan melalui dana bergulir Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) untuk 102.500 unit rumah. Untuk memenuhi target tersebut Sesuai Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2019 tentang APBN TA 2020, dialokasikan dana FLPP sejumlah Rp. 9.000.000.000.000,-. Hal tersebut tertuang dalam DIPA BA.999.03 dengan nomor: SP DIPA-999.03.1.984532/2020 yang telah ditetapkan pada tanggal 31 Desember 2019 dan direvisi pada tanggal 30 Juni 2020.

Realisasi penyaluran dana FLPP sampai dengan Bulan Desember 2020 sejumlah 109.253 unit atau telah mencapai 106,59% dari target sejumlah 102.500 unit dengan nilai FLPP sebesar Rp11.231.193.635.691,- atau mencapai 102,10% dari target sebesar Rp 11.000.000.000.000,-. Angka realisasi ini sudah termasuk penyaluran KPR Sejahtera yang bersumber dari dana talangan bank pelaksana sebanyak 14.580 unit dengan nilai Rp. 1.458.600.535.647,-. Jumlah pembiayaan penyaluran KPR Sejahtera FLPP tahun 2020 dimaksud berasal dari DIPA FLPP tahun 2020 sebesar Rp. 9.000.000.000.000,- dan pengembalian pokok FLPP yang diterima selama bulan Januari sampai dengan bulan Desember 2020 sebesar Rp. 3.039.264.699.363,- dan saldo awal dana FLPP tahun 2020 sebesar Rp 651.036.122.495,-. Sehingga saldo akhir dana FLPP tahun 2020 dengan total realisasi yang sudah termasuk dana talangan adalah Rp 1.459.107.186.168,-.

Sampai dengan bulan Desember 2020 Bank Pelaksana yang sudah menandatangani Perjanjian Kerjasama Operasional dengan Pusat Pengelolaan Dana Pembiayaan Perumahan sejumlah 42 (Empat Puluh Dua) bank pelaksana yang terdiri dari 8 (delapan) Bank Umum Nasional Konvensional, 3 (tiga) Bank Umum Nasional Syariah, 18 (delapan belas) Bank Pembangunan Daerah Konvensional, dan 13 (tiga belas) Bank Pembangunan Daerah Syariah.

Kinerja capaian penyaluran dana FLPP sampai dengan bulan Desember 2020 sejumlah 109.253 unit atau mencapai 106,59% dari target sejumlah 102.500 unit dan dengan nilai FLPP sebesar Rp. 11.231.193.635.691,- atau mencapai 102,10% dari target sebesar Rp. 11.000.000.000.000,-. Akumulasi secara total penyaluran dana FLPP dari tahun 2010 sampai dengan bulan Desember tahun 2020 sebanyak 764.855 unit dengan nilai FLPP sebesar Rp. 55.598.057.859.794,-. Angka realisasi ini sudah termasuk penyaluran KPR Sejahtera yang bersumber dari dana talangan bank pelaksana sebanyak 14.580 unit dengan nilai Rp 1.458.600.535.647,-.

Untuk mendukung operasionalisasi program FLPP, pembiayaan operasional layanan dilakukan dengan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang bersumber dari tarif dan pengelolaan dana. Realisasi penerimaan total PNBP di tahun 2020 hingga bulan Desember adalah sebesar Rp 435.042.780.741,- atau mencapai 161% dari target penerimaan PNBP tahun 2020 sebesar Rp 270.189.000.000,-. Akumulasi secara total penerimaan PNBP dari tahun 2010 sampai dengan bulan Desember tahun 2020 sebesar Rp 2.350.609.997.576,-. Sementara untuk realisasi belanja operasional dengan pembiayaan yang bersumber dari BA.033.08 tahun 2020 sampai dengan bulan Desember 2020 sebesar Rp 68.673.498.238,- atau mencapai 95,44% dari anggaran biaya operasional tahun 2020 sebesar Rp 71.953.524.000,-. Dari total belanja operasional tahun 2020 terdapat beban belanja tahun 2019 sebesar Rp 3.932.640,- yang disahkan pada tahun 2020 berdasarkan LHP BPK tahun 2019.

DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR.....	ii
RINGKASAN EKSEKUTIF.....	iii
DAFTAR ISI	v
DAFTAR LAMPIRAN	vi
DAFTAR TABEL.....	vii
DAFTAR GRAFIK	viii
DAFTAR GAMBAR.....	ix
BAB I PENDAHULUAN.....	I
1.1. Latar Belakang.....	I
1.2. Tugas Dan Fungsi.....	2
1.2.1. Kedudukan.....	2
1.2.2. Tugas.....	2
1.2.3. Fungsi.....	3
1.3. Struktur Organisasi.....	3
1.4. Isu strategis.....	10
BAB 2 PERENCANAAN KINERJA.....	12
2.1. Uraian Singkat Renstra.....	12
2.1.1. Kondisi Umum.....	12
2.1.2. Visi Dan Misi.....	13
2.1.3. Kegiatan-Kegiatan Strategis.....	17
2.2. Perjanjian Kinerja.....	17
2.3. Metode Pengukuran.....	21
2.4. Target Tahun Ini Menurut Rencana Strategis Bisnis.....	22
BAB 3 KAPASITAS ORGANISASI.....	24
3.1. Sumber Daya Manusia Pusat Pengelolaan Dana Pembiayaan Perumahan.....	24
3.2. Sarana Prasarana.....	29
3.3. Dipa Pusat Pengelolaan Dana Pembiayaan Perumahan.....	32
BAB 4 AKUNTABILITAS KINERJA.....	36
4.1. Capaian Kinerja Organisasi.....	36
4.2. Perbandingan Kinerja Organisasi.....	50
4.3. Realisasi Dan Evaluasi Pencapaian Anggaran Tahun 2020.....	53
4.4. Evaluasi Pencapaian Kinerja.....	59
BAB 5 P E N U T U P.....	66
LAMPIRAN.....	67

DAFTAR LAMPIRAN

Kontrak Kinerja DJBP Kemenkeu Dengan Dirut PPDPP Kementerian PUPR TA 2020
PK PPDPP Semula
PK PPDPP Revisi 1
PK PPDPP Revisi 2
DIPA 99 Semula
DIPA 99 Menjadi
DIPA 033 Semula
DIPA 033 Revisi 1
DIPA 033 Revisi 2
DIPA 033 Revisi 3
DIPA 033 Revisi 4
DIPA 033 Revisi 5
DIPA 033 Revisi 6
DIPA 033 Revisi 7
Laporan Barang Kuasa Pengguna 2020
BA Capaian Kinerja
Penghargaan
Catatan Hasil Reviu Laporan Kinerja BLU PPDPP 2020

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 2.1 Perjanjian Kinerja Dukungan Penyaluran Bantuan Pembiayaan Perumahan (BA.033.08).....	18
Tabel 2.2 Perjanjian Kinerja Penyaluran Bantuan Pembiayaan Perumahan (BA.999.08)	19
Tabel 2.3 Kontrak Kinerja Direktur Utama PPDPP dengan Dirjen Perbendaharaan (BA.999.03)	20
Tabel 3.1. Jumlah Pegawai PPDPP Menurut Status Kepegawaian.....	24
Tabel 3.2. Jumlah Pegawai PPDPP Menurut Menurut Jabatan	25
Tabel 3.3.....	26
Jumlah Pegawai PPDPP Menurut Tingkat Pendidikan.	26
Tabel 3.5. Jumlah Pegawai PNS Berdasarkan Kementerian.....	28
Tabel 3.7. Potensi dan Hambatan BLU PPDPP berdasarkan faktor <i>man, money, material, dan method</i>	34
Tabel 4.1. Capaian Kinerja Sasaran Strategis I.	37
Tabel 4.2. Capaian Kinerja Sasaran Strategis 2.	38
Tabel 4.3. Capaian Kinerja Sasaran Strategis 3.	40
Tabel 4.4. Capaian Kinerja Sasaran Strategis 4.	41
Tabel 4.5. Capaian Kinerja Sasaran Strategis 5.	43
Tabel 4.6. Capaian Kinerja Pengelolaan Dana Bergulir dan Pengembalian Pokok Tahun 2020.	45
Tabel 4.5. Capaian Program Kinerja Tahun 2020.....	47
Tabel 4.6. Kinerja Tahun 2019 dan 2020 Untuk Program Investasi Pemerintah (BA.999.03) ...	50
Tabel 4.7. Perbandingan Kinerja Tahun 2019 dan 2020 Untuk Operasional PPDPP (BA.033.08)	50
Tabel 4.8 Rincian Pendapatan Tahun 2019 dan 2020.....	52
Tabel 4.9 Perkembangan Pengelolaan Dana s.d 31 Desember 2020	52
Tabel 4.10. Realisasi Anggaran Operasional PPDPP Tahun 2020 (BA.033.08).....	53
Tabel 4.11. Realisasi Anggaran Dana Investasi PPDPP Tahun 2020 (BA.999.03).....	55
Tabel 4.12. Realisasi Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) berdasarkan Provinsi Tahun 2020.....	56
Tabel 4.13. Realisasi Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) berdasarkan Bank Pelaksana Tahun 2020.....	57
Tabel 4.13. Kinerja Dukungan Penyaluran Bantuan Pembiayaan Perumahan Tahun 2020	59
Tabel 4.14. Pengelolaan Dana Bergulir dan Pengembalian Pokok Tahun 2020.	62
Tabel 4.17. Analisis Pencapaian Kinerja dan Keuangan BLU PPDPP Tahun 2019-2020.....	63

DAFTAR GRAFIK

	Halaman
Grafik 4.1. Penyaluran Bantuan Pembiayaan Perumahan Tahun 2020 berdasarkan Target dan Realisasi.....	45
Grafik 4.2. Realisasi Penyaluran Bantuan Pembiayaan Perumahan Rumah Tapak dan Rumah Susun Tahun 2020 Per Bulan.....	46

DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 1 Struktur Organisasi BLU PPDPP.....	4
Gambar 3.1. Jumlah Pegawai PPDPP Menurut Status Kepegawaian	25
Gambar 3.4. Jumlah Pegawai Berdasarkan Interval Usia	28
Gambar 4.1 Persentase Kinerja Dukungan Penyaluran Bantuan Pembiayaan Perumahan Tahun 2020.....	61

BAB I

PENDAHULUAN

I.1. Latar Belakang.

Akuntabilitas telah menjadi perhatian utama dan menjadi tuntutan masyarakat yang semakin peduli serta semakin kritis terhadap pola penyelenggaraan pemerintahan. Hal ini membawa konsekuensi terhadap strategi-strategi yang harus dijalankan atau dilaksanakan oleh pemerintah. Hal mengenai akuntabilitas tak lepas dari isu-isu tentang aparatur pemerintah yang bersih dan berwibawa kembali menggema pada beberapa waktu belakangan ini. Berkembangnya persoalan akuntabilitas ini pada umumnya disebabkan oleh belum berjalannya mekanisme manajemen sektor publik yang baik di lingkungan instansi pemerintah. Disamping itu, belum sempurnanya implementasi aturan-aturan yang memberikan penghargaan dan sanksi (reward and punishment) bagi aparatur pemerintah menjadikan manajemen sektor publik selalu menjadi sorotan.

Untuk itu, guna mewujudkan pemerintahan yang handal, profesional dan bertanggung jawab diperlukan upaya yang komprehensif dari setiap unsur penyelenggara negara dalam menjalankan berbagai tugas dan fungsinya. Salah satu upaya tersebut adalah dengan menyediakan Laporan Kinerja di setiap akhir tahun anggaran sebagai bukti penilaian atas kemampuannya dalam pencapaian visi, misi dan tujuan sebagaimana yang telah ditetapkan.

Berbagai informasi yang terdapat dalam Laporan Kinerja dapat dipahami sebagai bentuk tanggung jawab publik setiap instansi pemerintah karena di dalamnya memuat rencana strategis, rencana kinerja tahunan, penetapan kinerja, capaian kinerja pada tahun yang bersangkutan dan akuntabilitas keuangan. Semua informasi tersebut dapat diakses publik sehingga masyarakat umum dapat mengetahui dan menilai kinerja yang telah dilakukan oleh suatu instansi pemerintah dalam rangka mendorong terciptanya akuntabilitas kinerja instansi pemerintah sebagai salah satu prasyarat terselenggaranya pemerintahan yang baik, bersih, amanah dan akuntabel.

Laporan Kinerja memberikan informasi mengenai pencapaian tujuan dan sasaran sebagai upaya terukur pencapaian misi yang mendukung pencapaian Rencana Strategis (Renstra) Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. Selain itu, Laporan Kinerja juga memuat informasi tentang kehematan (ekonomis), efisiensi dan efektivitas pemanfaatan dana publik terhadap jasa atau produk prima yang dihasilkan (*excellency*) dan yang dapat dirasakan oleh seluruh masyarakat tanpa terkecuali (*equity*).

Melalui akuntabilitas kinerja akan dapat dinilai kinerja instansi pemerintah baik jangka pendek (tahunan) maupun dalam kaitan tujuan jangka panjangnya. Dengan demikian akan tumbuh suatu kondisi semua organisasi pemerintah dapat merasakan kebutuhan yang mendasar akan informasi kinerja organisasinya melalui mekanisme akuntabilitas kinerja. Tanpa akuntabilitas kinerja dan evaluasinya, tidak mungkin diketahui secara tepat peta permasalahan dan tindakan-tindakan tepat bagaimana yang diperlukan untuk menyelesaikan permasalahan tersebut.

Pusat Pengelolaan Dana Pembiayaan Perumahan (PPDPP) merupakan bagian dari salah satu unit kerja pada instansi Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. Untuk itu, PPDPP wajib menyusun Laporan Kinerja yang memberikan informasi mengenai pencapaian misi sebagai upaya terukur mencapai tujuan dan sasaran yang mengacu pada Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2020-2024 Kementerian PUPR dan Ditjen Pembiayaan Perumahan serta berpedoman pada Rencana Strategis Bisnis (RSB) Tahun 2020-2024 PPDPP.

1.2. Tugas Dan Fungsi.

Berdasarkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 14/PRT/M/2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pusat Pengelolaan Dana Pembiayaan Perumahan, maka kedudukan, tugas, dan fungsi PPDPP sebagaimana diuraikan berikut ini:

1.2.1. Kedudukan.

PPDPP berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Menteri melalui Direktur Jenderal yang melaksanakan tugas dan fungsi di bidang pembiayaan infrastruktur pekerjaan umum dan perumahan dan dipimpin oleh Direktur Utama.

1.2.2. Tugas.

PPDPP mempunyai tugas melaksanakan penyaluran dan pengelolaan dana pembiayaan perumahan, serta pengembangan strategi bisnis dan pelayanan umum di bidang pengelolaan dana bergulir pembiayaan perumahan.

I.2.3. Fungsi.

Dalam melaksanakan tugas tersebut, PPDPP menyelenggarakan fungsi:

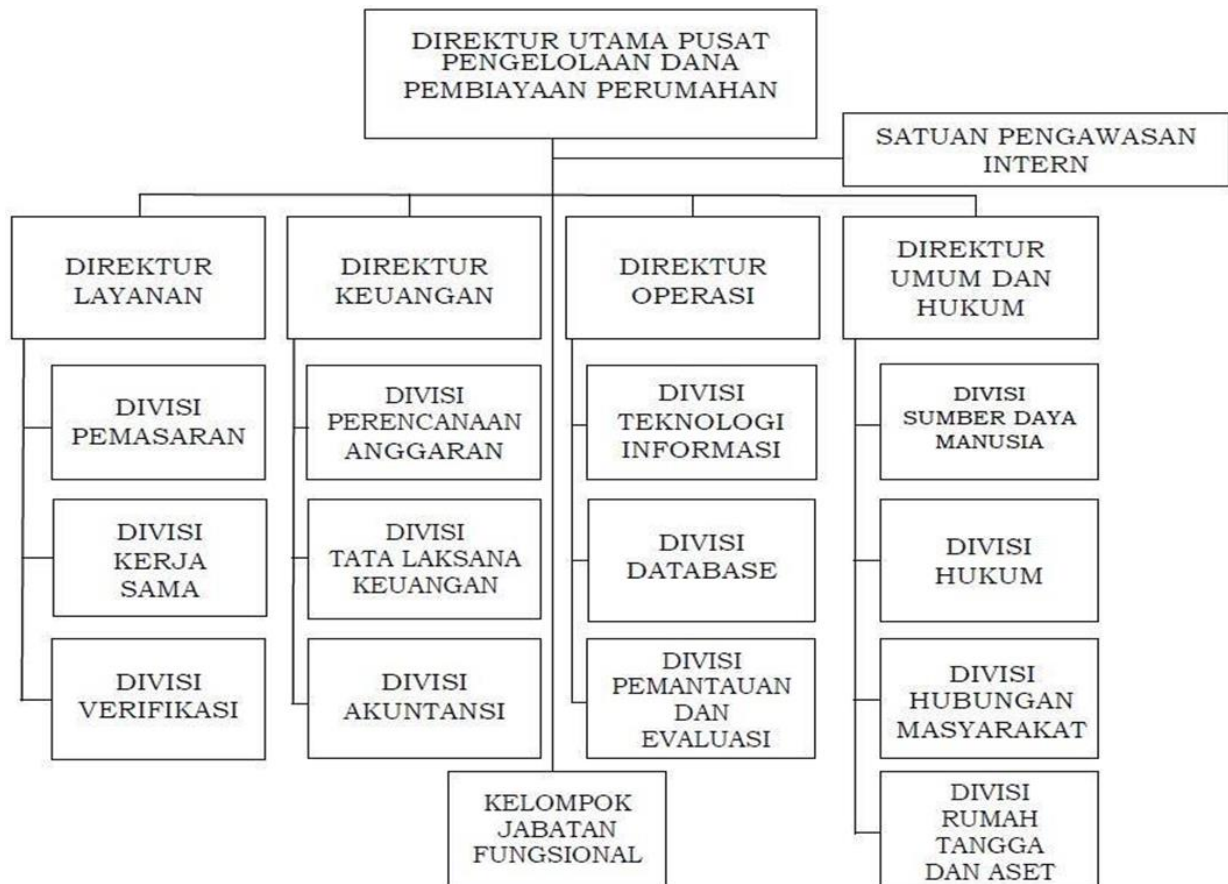
- 1) Pelayanan pembiayaan perumahan;
- 2) Pengelolaan keuangan;
- 3) Pengelolaan operasi kegiatan;
- 4) Pengelolaan urusan umum dan hukum;
- 5) Pelaksanaan pengawasan intern.

I.3. Struktur Organisasi.

Berdasarkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 14/PRT/M/2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pusat Pengelolaan dana Pembiayaan Perumahan, Pusat Pengelolaan Dana Pembiayaan Perumahan yang selanjutnya disingkat PPDPP adalah unsur pendukung yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat melalui Direktorat Jenderal Pembiayaan infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan. Dalam menjalankan organisasinya, BLU-PPDPP dipimpin oleh Kepala Satuan Kerja yang selanjutnya disebut Direktur Utama. Dalam menjalankan fungsinya PPDPP terdiri atas:

- a. Direktur Utama;
- b. Direktur Layanan;
- c. Direktur Keuangan;
- d. Direktur Operasi;
- e. Direktur Umum dan Hukum; dan
- f. Satuan Pengawasan Intern.

Gambar I
Struktur Organisasi BLU PPDPP.



Sumber: Peraturan Menteri PUPR Nomor 14/PRT/M/2019

A. Uraian Tugas Dewan Pengawas.

Dewan Pengawas mempunyai tugas melakukan pengawasan terhadap pengelolaan Pusat Pengelolaan Dana Pembiayaan Perumahan termasuk pelaksanaan RBA, RSB dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Dewan Pengawas dalam pelaksanaan tugasnya melaporkan kepada Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dan Menteri Keuangan secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam satu semester dan sewaktu-waktu apabila diperlukan.

Selanjutnya, berdasarkan Pasal 14 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 95/PMK.05/2016 tentang Dewan Pengawas Badan Layanan Umum, maka Dewan Pengawas memiliki kewajiban:

- 1) Memberikan pendapat dan saran secara tertulis kepada Menteri/Pimpinan Lembaga/Ketua Dewan Kawasan, Menteri Keuangan, dan Pejabat Pengelola BLU mengenai rencana strategis bisnis dan rencana bisnis dan anggaran yang disusun oleh Pejabat Pengelola BLU;
- 2) Melaporkan kepada Menteri/Pimpinan Lembaga/Ketua Dewan Kawasan dan Menteri Keuangan dalam hal terjadi gejala menurunnya kinerja BLU dan/atau penyimpangan atas ketentuan peraturan perundang-undangan;
- 3) Menyampaikan laporan pelaksanaan tugas Dewan Pengawas yang telah dilakukan kepada Menteri/Pimpinan Lembaga/Ketua Dewan Kawasan dan Menteri Keuangan paling sedikit 2 (dua) kali sekali dalam 1 (satu) tahun; dan
- 4) Menetapkan setiap keputusan Dewan Pengawas melalui rapat Dewan Pengawas yang diputuskan secara musyawarah untuk mufakat dan bersifat kolektif dan kolegial.

B. Uraian Tugas Pejabat Pengelola Pusat Pengelolaan Dana Pembiayaan Perumahan.

1) Direktur Utama.

Direktur Utama Pusat Pengelolaan Dana Pembiayaan Perumahan mempunyai tugas memimpin Pusat Pengelolaan Dana Pembiayaan Perumahan dalam pelaksanaan penyaluran dan pengelolaan dana pembiayaan perumahan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. Dalam melaksanakan tugasnya, Direktur Utama Pusat Pengelolaan Dana Pembiayaan Perumahan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan dan pengajuan dokumen Rencana Strategis Bisnis (RSB);
- b. penyiapan dan pengajuan dokumen Rencana Bisnis dan Anggaran (RBA);
- c. penyiapan dan pengajuan dokumen Standar Pelayanan Minimum (SPM);
- d. koordinasi pelaksanaan RSB dan RBA;
- e. penyusunan rencana kebutuhan, inventarisasi, dan penghapusan aset;
- f. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan;
- g. pelaksanaan kerjasama dengan instansi/lembaga;
- h. penyusunan dan penetapan tata kelola internal organisasi;
- i. pertanggungjawaban kinerja operasional dan keuangan.

2) *Direktur Layanan.*

Direktur Layanan mempunyai tugas memberikan pelayanan kepada lembaga keuangan dan pemangku kepentingan dalam penyaluran dan pengelolaan dana pembiayaan perumahan.

Dalam melaksanakan tugasnya, Direktur Layanan menyelenggarakan fungsi:

- a. Pelaksanaan sosialisasi dan promosi program pembiayaan perumahan;
- b. Pelaksanaan kerjasama dengan instansi/lembaga dalam hal Direktur Utama berhalangan.
- c. Pelaksanaan verifikasi tagihan pembiayaan perumahan.

Direktur Layanan membawahi :

- a. Divisi Pemasaran;
- b. Divisi Kerjasama; dan
- c. Divisi Verifikasi.

3) *Direktur Keuangan*

Direktur Keuangan mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan keuangan di lingkungan PPDPP. Dalam melaksanakan tugasnya, Direktur Keuangan menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyusunan Rencana Strategis Bisnis (RSB);
- b. Penyusunan Rencana Bisnis dan Anggaran (RBA) tahunan;
- c. Pelaksanaan rekonsiliasi posisi pembiayaan perumahan;
- d. Pembayaran tagihan lembaga keuangan;
- e. Pemantauan pelaksanaan penagihan angsuran;
- f. Pengelolaan dana;
- g. Pelaksanaan pembukuan sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku;
- h. Penyusunan laporan keuangan.

Direktur Keuangan membawahi :

- a. Divisi Perencanaan dan Anggaran;
- b. Divisi Tata Laksana Keuangan; dan
- c. Divisi Akuntansi.

4) *Direktur Operasi.*

Direktur Operasi mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan dan pengembangan teknologi informasi dan pendayagunaan data, serta melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan terhadap ketepatan sasaran pembiayaan perumahan. Dalam melaksanakan tugasnya, Direktur Operasi menyelenggarakan fungsi:

- a. Pengelolaan dan pengembangan teknologi informasi;
- b. Pendayagunaan dan pemeliharaan data; dan
- c. Pemantauan dan evaluasi terhadap ketepatan sasaran pembiayaan perumahan

Direktur Operasi membawahi:

- a. Divisi Teknologi Informasi;
- b. Divisi Database; dan
- c. Divisi Pemantauan dan Evaluasi.

5) *Direktur Umum dan Hukum.*

Direktur Umum dan Hukum mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan sumber daya manusia, hukum, kehumasan, rumah tangga dan aset. Dalam melaksanakan tugasnya, Direktur Umum dan Hukum menyelenggarakan fungsi:

- a. Pengelolaan sumber daya manusia;
- b. Pelaksanaan dukungan bidang hukum dan kepatuhan;
- c. Pelaksanaan kegiatan kehumasan;
- d. Pelaksanaan urusan rumah tangga; dan
- e. Pengelolaan aset.

Direktur Umum dan Hukum membawahi :

- a. Divisi Sumber Daya Manusia;
- b. Divisi Hukum;
- c. Divisi Hubungan Masyarakat ; dan
- d. Divisi Rumah Tangga dan Aset.

Satuan Pengawasan Intern

Satuan Pengawasan Intern mempunyai tugas melaksanakan pengawasan intern di lingkungan PPDPP. Satuan Pengawasan Intern bertanggung jawab kepada Direktur Utama.

Kelompok Jabatan Fungsional.

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Kelompok Jabatan Fungsional terdiri atas beberapa jabatan fungsional berdasarkan bidang keahlian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan dikoordinasikan oleh seorang pejabat fungsional yang ditunjuk oleh Direktur Utama. Jumlah pejabat fungsional ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja. Jenis dan jenjang jabatan fungsional diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

C. Susunan Pejabat Pengelola PPDPP.

Susunan Pejabat Pengelola PPDPP pada tahun 2019 sesuai dengan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat terdiri dari :

- a. Direktur Utama, Prof (R) Dr. Ir. Arief Sabaruddin, CES (1 Oktober 2019 - sekarang), SK Menteri PUPR No: 835/KPTS/M/2019.
- b. Direktur Layanan, Ir. Christ Robert Panusunan Marbun, M.Sc. (3 Juni 2020 – sekarang), SK Menteri PUPR No: 543/KPTS/M/2020
- c. Direktur Keuangan, Arief Rahman Hakim, S.Sos., M.P (21 Maret 2018 - sekarang), SK Menteri PUPR No: 835/KPTS/M/2019.
- d. Direktur Operasi, Martanto Boedi Joewono, S.E., M.M (1 Oktober 2019 – sekarang), SK Menteri PUPR No: 835/KPTS/M/2019.
- e. Direktur umum dan Hukum, Ir. Atik Niene Nierani Iskandar, M.Si (3 Juni 2020 – sekarang), SK Menteri PUPR No: 543/KPTS/M/2020

Satuan Pengawasan Intern:

- a. Ismail, M.Si, AK., CA (2 Mei 2017 – 11 September 2020), Keputusan Direktur Utama No.47 Tahun 2017 dan Surat Perintah Direktur Utama Nomor: 4310 Tahun 2020
- b. Siska Purnianti, S.H., M.Hum (15 Oktober 2020 – sekarang) sebagai plt. Kepala Satuan Pemeriksa Intern PPDPP, Surat Perintah Direktur Utama Nomor: 4310 Tahun 2020

Susunan Pejabat Kepala Divisi berdasarkan keputusan Direktur Utama PPDPP sebagai berikut :

- 1) Kepala Divisi Pemasaran, Alfian Arif;
- 2) Kepala Divisi Kerjasama, Umi Hardinajati;
- 3) Kepala Divisi Verifikasi, Luwi Wahyu Adi;
- 4) Kepala Divisi Perencanaan dan Penganggaran, Kurniawan Khristianto;
- 5) Kepala Divisi Tata Laksana Keuangan, Achmad Purwo Hardjanto;
- 6) Kepala Divisi Akuntansi, Dede Solihin;
- 7) Kepala Divisi Teknologi Informasi Moch. Ihsan;
- 8) Kepala Divisi Database, Fachri;
- 9) Kepala Divisi Pemantauan dan Evaluasi, Heru Wasisto;
- 10) Kepala Divisi Sumber Daya Manusia, Endang Sumarmi;
- 11) Kepala Divisi Hukum, Siska Purnianti;
- 12) Kepala Divisi Humas, Rozalinda Yahya;
- 13) Kepala Divisi Rumah Tangga dan Aset, Aisah Dewi Setiawati.

D. Susunan Dewan Pengawas PPDPP.

Berdasarkan Surat Keputusan Menteri PUPR Nomor:1395/KPTS/M/2020 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dewan Pengawas Badan Layanan Umum Pusat Pengelolaan Dana Pembiayaan Perumahan Kementerian PUPR dan telah disetujui oleh Surat Menteri Keuangan Nomor: S-III/MK.05/2020, susunan Dewan Pengawas PPDPP adalah sebagai berikut:

- 1) Ketua, Dr. Ir. Lana Winayanti, MCP;
- 2) Anggota, Ir. Arvi Argyantoro, MA;
- 3) Anggota, Putranta Setyanugraha, S.H., M.Si;
- 4) Anggota, Dr. Edy Gunawan, S.E., M.M;
- 5) Anggota, Achmad Saefuddin. S.H

1.4. Isu strategis.

Secara umum potensi dan permasalahan yang terkait dengan penyelenggaraan perumahan rakyat adalah pertumbuhan penduduk Indonesia yang terus meningkat menyebabkan kebutuhan akan perumahan baru semakin meningkat dari tahun ke tahun. Sementara itu, dari sisi penyediaan, jumlah rumah yang terbangun belum mampu memenuhi pertumbuhan itu sendiri. Dalam buku Perjalanan Lima Tahun Program Sejuta Rumah Direktorat Jenderal Penyediaan Perumahan Kementerian PUPR disebutkan bahwa Backlog kepemilikan perumahan di tahun 2014 sekitar 11,4 juta unit. Dalam lima tahun terakhir ada pengurangan baru sekitar 4,6 juta (per November 2019), tapi tak berarti sisanya persis di angka 6,8 juta. Ada kebutuhan baru karena pertumbuhan penduduk dan penambahan populasi keluarga baru. Maka, kebutuhan untuk membangun perumahan tidak akan pernah berhenti (Waluyo, Dwitri dkk, 2019:3-4).

Sementara menurut prediksi Kementerian PUPR pada awal 2020 masih akan terjadi defisit sebesar $\pm 7,6$ juta backlog kepemilikan rumah. Berdasarkan Outlook Penyediaan Perumahan 2019 penyebab backlog perumahan antara lain adalah karena antara supply dan demand akan kepemilikan rumah berbanding terbalik, yaitu ketersediaan rumah lebih rendah dibandingkan dengan kebutuhan, pembelian rumah dengan motif untuk dijadikan investasi menghambat pembelian rumah pertama oleh MBR, keterbatasan MBR untuk membeli/menyicil/menyewa rumah layak huni, lokasi yang kurang strategis dan jauh dari pusat aktifitas serta tidak didukung oleh keberadaan infrastruktur yang memadai, serta adanya kerusakan bangunan rumah *existing* sehingga menjadi tidak fungsional akibat bencana, terdampak pembangunan ataupun faktor lainnya.

Permasalahan tersebut tidak terlepas dari peran serta masyarakat di dalam pembangunan perumahan, peran dan partisipasi aktif Pemerintah Daerah dalam hal penyediaan perumahan khususnya bagi masyarakat berpenghasilan rendah sangat penting. Peran tersebut, yang meliputi pendataan, perencanaan, pelaksanaan, hingga pengawasan dan pengendalian pelaksanaan pembangunan perumahan dan kawasan permukiman, perlu dioptimalkan. Sebagai contoh, pemerintah daerah perlu memberikan dukungan dalam bentuk kesiapan sarana dan prasarana serta pembebasan tanah bagi pembangunan perumahan. Dukungan Pemerintah Daerah tersebut perlu ditingkatkan dalam kerangka sinergi pusat dan daerah.

Sedangkan masyarakat, khususnya kelompok berpenghasilan rendah, perlu diberdayakan secara terorganisir dan ditempatkan sebagai aktor penting pembangunan. Disisi lain, terdapat tantangan penyediaan perumahan yaitu;

- a. Dukungan kebijakan bidang perumahan dan kawasan permukiman belum memadai;
- b. Koordinasi dan kelembagaan pembangunan perumahan kurang optimal;
- c. Peran kontrol Pemerintah terhadap harga lahan dan harga perumahan belum optimal;
- d. Efisiensi proses dan mahal biaya perizinan untuk pembangunan perumahan kurang maksimal;
- e. Terbatasnya dan mahal harga bahan bangunan untuk pembangunan perumahan;
- f. Pengawasan dan pengendalian dalam penyelenggaraan pembangunan perumahan masih kurang maksimal; dan
- g. Pengembangan dan pemanfaatan teknologi untuk pembangunan perumahan perlu dikembangkan.

BAB 2

PERENCANAAN KINERJA

2.1. Uraian Singkat Renstra.

Laporan Kinerja memberikan informasi mengenai pencapaian misi sebagai upaya terukur mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan pada Rencana Strategis (Renstra) Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. Selain itu, Laporan Kinerja memuat informasi tentang kehematan (ekonomis), efisiensi dan efektivitas pemanfaatan dana publik terhadap jasa atau produk prima yang dihasilkan (excellency) dan yang dapat dirasakan oleh seluruh masyarakat tanpa terkecuali (equity).

Penyusunan laporan kinerja tahun 2020 ini mengacu pada Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2020-2024 Kementerian PUPR dan Ditjen Pembiayaan Perumahan serta berpedoman pada Rencana Strategis Bisnis (RSB) Tahun 2020-2024 PPDPP.

2.1.1. Kondisi Umum.

Beberapa capaian strategis bagi pengembangan pembiayaan perumahan dan kawasan permukiman antara lain: pengembangan kebijakan yang terkait dengan bantuan pembiayaan perumahan yang semula memakai skim subsidi menjadi bantuan Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP), disahkannya Undang-Undang (UU) No. 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman, dan UU No. 20 Tahun 2011 tentang Rumah Susun dimana substansi pendanaan dan sistem pembiayaan menjadi salah satu bab tersendiri dalam kedua UU tersebut.

Di samping capaian kinerja sebagaimana tersebut diatas, masih terdapat target- target pembangunan perumahan yang belum terpenuhi. Seperti belum sepenuhnya bantuan pembiayaan perumahan memfasilitasi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) yang belum memiliki atau menempati rumah layak huni. Kementerian PUPR memprediksi, pada awal tahun 2020 masih akan terjadi defisit sebesar $\pm 7,6$ juta *backlog* kepemilikan dan $\pm 2,38$ juta *backlog* rumah tidak layak huni (RTLH) dengan rincian *backlog* kepemilikan khusus MBR *non-fixed income* $\pm 6,5$ juta unit dan *backlog* rumah MBR *fixed income* $\pm 1,7$ juta unit. BPS mencatat, bahwa *backlog* kepemilikan perumahan di tahun 2014 sekitar 11,4 juta unit. Dalam lima tahun terakhir ada pengurangan baru sekitar 4,6 juta (per November 2019).

Sampai saat ini kondisi pasar pembiayaan primer perumahan di Indonesia masih belum efisien baik dari sisi penawaran maupun permintaan. Dari sisi penawaran diantaranya adalah masih tingginya biaya pengurusan perijinan dan sertifikasi tanah, belum tuntasnya permasalahan pengalihan hak tanggungan secara global dari kreditur lama ke kreditur baru, serta eksekusi hak tanggungan atas Kredit Pemilikan Rumah (KPR) macet atau gagal bayar yang membutuhkan waktu yang lama. Sedangkan dari sisi permintaan, diantaranya adalah belum adanya standarisasi dokumen KPR dan standarisasi desain KPR. Dengan kondisi itulah biaya pembangunan rumah yang dibangun oleh pengembang maupun perorangan dinilai masih cukup tinggi.

Secara garis besar permasalahan umum yang terjadi dalam pembiayaan perumahan dapat dikelompokkan sebagai berikut:

- 1) Masih terbatasnya bantuan pembiayaan perumahan bagi MBR untuk memiliki Rumah Sejahtera, termasuk masih terbatasnya skema/pola bantuan pembiayaan perumahan (availability) bagi masyarakat berpenghasilan rendah;
- 2) Masih rendahnya daya beli atau kemampuan (affordability) MBR pada sektor perumahan, baik untuk membeli rumah yang disediakan oleh pengembang maupun untuk meningkatkan kualitas rumah yang sudah tidak layak huni;
- 3) Masih terbatasnya akses MBR ke lembaga keuangan untuk mendapatkan KPR (accessibility);
- 4) Masih terjadinya mismatch dalam pembiayaan perumahan, akibat sedikitnya ketersediaan dana murah jangka panjang dalam pembiayaan perumahan (sustainability).

2.1.2. Visi Dan Misi.

VISI

Visi adalah harapan organisasi di masa mendatang untuk menjamin kesuksesan organisasi atau perusahaan dalam jangka Panjang. Pada Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 23 tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Tahun 2020-2024, disebutkan visi Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat periode 2020-2024 yaitu **Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat yang andal, responsif, inovatif, dan profesional dalam pelayanan kepada Presiden dan Wakil Presiden untuk mewujudkan visi dan misi Presiden dan Wakil Presiden: “Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong.”** yang

kemudian dijabarkan dalam misi Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat yang terkait dengan tugas BLU PPDPP yaitu:

- 1) Memberikan dukungan teknis dan administrasi kepada Presiden dalam menyelenggarakan pembangunan infrastruktur sumber daya air, konektivitas, permukiman, dan perumahan dalam suatu pengembangan infrastruktur wilayah yang terpadu.
- 2) Meningkatkan kualitas sumber daya manusia, penyelenggaraan jasa konstruksi, dan pembiayaan infrastruktur dalam mendukung penyelenggaraan infrastruktur PUPR.

Oleh karena itu Visi Pusat Pengelolaan Dana Pembiayaan Perumahan Rakyat adalah:

“Menjadi Lembaga Penyedia Layanan Pembiayaan Perumahan Dan Pengelola Dana Yang Profesional Dan Handal Dalam Mendukung Pemenuhan Kebutuhan Perumahan Bagi Rakyat”.

Uraian Visi:

- Pusat Pengelolaan Dana Pembiayaan Perumahan (PPDPP) merupakan Badan Layanan Usaha (BLU) yang kedudukannya berada di bawah Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat berdasarkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 14/PRT/M/2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pusat Pengelolaan Dana Pembiayaan Perumahan, Badan Layanan Umum Pusat Pengelolaan Dana Pembiayaan Perumahan merupakan unsur pendukung pelaksanaan program pengembangan pembiayaan perumahan. Pusat Pengelolaan Dana Pembiayaan Perumahan merupakan unit organisasi non eselon yang mempunyai tugas melaksanakan penyaluran dan pengelolaan dana pembiayaan perumahan, didirikan berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan No. 290/KMK.05/2010 yang pada saat itu masih menggunakan nama Pusat Pembiayaan Perumahan (PPP), ditetapkan sebagai Satuan Kerja dengan layanan berupa penyaluran Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP). Perubahan nama PPP menjadi PPDPP tercantum dalam Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 15 Tahun 2015 tanggal 21 April 2015 (peraturan Menteri ini sudah dicabut dan digantikan oleh Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 14/PRT/M/2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pusat Pengelolaan Dana Pembiayaan Perumahan tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat) yang selanjutnya melalui Keputusan Menteri Keuangan Nomor 112/KMK.05/2016 tanggal 19 Februari 2016 maka PPDPP ditetapkan sebagai Instansi Pemerintah yang menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum.

- Pengelolaan Dana Pembiayaan Perumahan merupakan manajemen pengelolaan dana investasi pembiayaan perumahan yang secara profesional berdasarkan prinsip-prinsip manajemen investasi untuk meningkatkan kuantitas, kualitas, efektivitas, dan efisiensi pembiayaan perumahan.
- Pembiayaan Perumahan yang dijalankan oleh PPDPP adalah melalui skema FLPP yang kemudian dikenal dengan Kredit Kepemilikan Rumah (KPR) Sejahtera dengan karakteristik (a) bersifat jangka panjang; (b) bunga tetap sepanjang masa kredit; (c) bunga relatif rendah; (d) bebas PPN; (e) bunga sudah termasuk premi asuransi jiwa, kebakaran dan kredit.

Terdapat 2 (dua) nilai yang menjadi tujuan utama dalam pembentukan lembaga pembiayaan perumahan, yaitu

Profesional.

- a. Pusat Pengelolaan Dana Pembiayaan Perumahan melaksanakan kewenangan, tugas dan fungsinya sesuai dengan amanah peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan memaksimalkan sumber daya dalam penyelenggaraan layanan fasilitasi likuiditas pembiayaan perumahan dan Pengelolaan dana untuk mewujudkan kinerja yang prima dalam operasionalisasi, penggalangan, pengelolaan, dan penyaluran dana bantuan pembiayaan perumahan kepada masyarakat berpenghasilan rendah.
- b. Pusat Pengelolaan Dana Pembiayaan Perumahan melakukan upaya peningkatan kapabilitas dan kompetensinya sebagai BLU yang bertanggung jawab dalam operasionalisasi, penggalangan, pengelolaan, dan penyaluran dana bantuan pembiayaan perumahan kepada masyarakat berpenghasilan rendah.
- c. Pusat Pengelolaan Dana Pembiayaan Perumahan menjadi lembaga BLU yang memiliki nilai ekonomis untuk menunjang keberlanjutan pendanaan yang kemudian dapat dimanfaatkan untuk memperluas jangkauan pembiayaan perumahan bagi masyarakat berpenghasilan rendah.

Handal.

Pusat Pengelolaan Dana Pembiayaan Perumahan yang handal diartikan sebagai tingkat dan kondisi ketersediaan, keterpaduan, serta kualitas dan cakupan pelayanan pembiayaan perumahan yang efektif, strategis, sinergis dan berkelanjutan. Pusat Pengelolaan Dana Pembiayaan Perumahan menjadi lembaga BLU strategis dalam Pengelolaan perumahan masyarakat berpenghasilan rendah secara efisien dan bernilai ekonomis dalam

mengkoordinasikan fungsi pada lembaga bank dan non bank.

MISI.

Misi merupakan hal-hal yang harus dilaksanakan oleh BLU PPDPP dalam rangka mewujudkan visi BLU PPDPP. Misi Pusat Pengelolaan Dana Pembiayaan Perumahan dirumuskan sebagai berikut:

- a. Memberikan layanan penyaluran FLPP yang unggul dan tepat sasaran;
- b. Mengoptimalkan pengelolaan dan pengembangan dana bergulir untuk mendukung kesinambungan pembiayaan perumahan rakyat;
- c. Mengembangkan dan mengoptimalkan dukungan teknologi informasi dalam meningkatkan efektifitas layanan FLPP dan pengelolaan dana bergulir;
- d. Meningkatkan kapasitas kelembagaan melalui penerapan prinsip tatakelola organisasi yang baik dengan dukungan SDM yang professional dan berintegritas.

TUJUAN.

Tujuan Pusat Pengelolaan Dana Pembiayaan Perumahan merupakan rumusan kondisi yang hendak dituju di akhir periode perencanaan. Tujuan ini merupakan penjabaran dari visi serta dilengkapi dengan rencana sasaran strategis yang hendak dicapai. Tujuan Pusat Pengelolaan Dana Pembiayaan Perumahan secara umum adalah menyelenggarakan pengelolaan pembiayaan perumahan sesuai dengan mandat, tugas, fungsi dan kewenangan, yang memenuhi tingkat ketersediaan, keterpaduan, serta kualitas dan cakupan pelayanan pembiayaan perumahan yang efektif, strategis, sinergis dan bernilai ekonomis. Lebih lanjut, tujuan tersebut dijabarkan sebagai berikut:

- **Menyelenggarakan Manajemen Pengelolaan Dana dan Pelayanan Pembiayaan Perumahan yang Profesional dan Handal.**

Tercapainya tujuan ini diindikasikan oleh terbentuk dan meningkatnya efektivitas sistem pengelolaan dana pembiayaan perumahan, efektivitas sistem layanan pembiayaan perumahan, meningkatnya pendapatan jasa layanan perbankan dan pendapatan lainnya, dan terkelolanya dana investasi Pemerintah secara efektif dan akuntabel.

- **Menyelenggarakan Manajemen Internal yang Efektif, Efisien dan Akuntabel.**

Tercapainya tujuan ini diindikasikan oleh terbentuknya organisasi yang berjalan sesuai fungsi dengan memperhatikan struktur, bisnis proses, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, meningkatnya efektifitas koordinasi perencanaan program, sumber daya, dan pengelolaan administrasi serta pemenuhan standar dan mutu sarana parasana kantor.

2.1.3. Kegiatan-Kegiatan Strategis.

Sesuai dengan hasil analisis internal dan eksternal, dalam RSB BLU PPDPP Tahun 2020-2024 dibuat roadmap dengan tema Strengthening Organization Capability yang dapat diartikan sebagai penguatan kapabilitas organisasi, inovasi, dan memelihara pertumbuhan organisasi yang dapat dijabarkan menjadi kegiatan-kegiatan strategis BLU PPDPP tahun 2020-2024 sebagai berikut:

- 1) Peningkatan kepuasan masyarakat terhadap layanan promosi, sosialisasi, edukasi dan advokasi masyarakat, peningkatan citra lembaga (customer perspective);
- 2) Eksplorasi sumber pendanaan lain, peningkatan penyaluran dana kelolaan, peningkatan PNBP, dan optimalisasi biaya (financial perspective);
- 3) Penguatan budaya organisasi, peningkatan kompetensi SDM, pengembangan teknologi informasi, pengembangan standar kompetensi SDM, dan penyempurnaan manajemen SDM (internal business process perspective);
- 4) Pengelolaan sistem registrasi pengembang yang optimal, pemantauan ketepatan sasaran penyaluran FLPP, penetapan standar kualitas rumah layak, riset pengembangan produk/skema, pembenahan dan pengelolaan database, penyempurnaan dan inovasi proses bisnis (learning and growth perspective);

2.2. Perjanjian Kinerja.

Perjanjian kinerja pada dasarnya adalah pernyataan komitmen yang merepresentasikan tekad dan janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur dalam rentang waktu satu tahun tertentu dengan mempertimbangkan sumber daya yang dikelolanya. Tujuan khusus perjanjian kinerja antara lain adalah untuk meningkatkan akuntabilitas, transparansi dan kinerja aparatur; sebagai wujud nyata komitmen antara penerima amanah dengan pemberi

amanah; sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi; menciptakan tolak ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur; dan sebagai dasar pemberian reward and punishment atau penghargaan dan sanksi.

PPDPP telah membuat Perjanjian Kinerja tahun 2020 sesuai amanah yang diembannya berdasarkan kedudukan, tugas dan fungsi yang ada. Perjanjian kinerja ini merupakan tolak ukur evaluasi akuntabilitas kinerja pada akhir tahun 2020. Perjanjian kinerja PPDPP tahun 2020 disusun dengan berdasarkan pada rencana kinerja tahun 2020 yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Direktur Utama dengan Direktur Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan dan Perjanjian Kinerja antara Direktur Utama PPDPP dengan Direktur Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan.

Tabel 2.1
Perjanjian Kinerja Dukungan Penyaluran Bantuan Pembiayaan
Perumahan (BA.033.08)

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
Dukungan Penyaluran Bantuan Pembiayaan Perumahan			
1	Layanan Promosi Kerjasama dan Verifikasi		102.500 Rumah Tangga
		1) Jumlah Laporan Pelaksanaan Promosi dan Sosialisasi	2 Laporan
		2) Jumlah Pelaksanaan Kerjasama Kelembagaan	30 Lembaga
		3) Jumlah Unit Rumah yang Diverifikasi Permohonan Bantuan Pembiayaan	102.500 Rumah Tangga
2	Layanan Bidang Perencanaan, Tata Laksana, dan Pelaporan		40 Lembaga
		1) Jumlah Dokumen Rencana Kerja Anggaran	3 Dokumen
		2) Jumlah Rekonsiliasi Lembaga Jasa Keuangan	40 Lembaga
		3) Jumlah Laporan Keuangan	32 Laporan
		4) Jumlah Laporan Kinerja	13 Laporan
3	Layanan Teknologi Informasi, Data dan Pemantauan Evaluasi		5 Laporan
		1) Jumlah Laporan Pemeliharaan dan Pendayagunaan Database	3 Laporan
		2) Jumlah Laporan Layanan Teknologi Informasi	1 Laporan
		3) Jumlah Laporan Pemantauan dan Evaluasi Penyaluran Bantuan	1 Laporan

4	Layanan Internal Kelembagaan		10	Laporan
		1) Jumlah Laporan Pengelolaan Sumber Daya Manusia (SDM)	3	Laporan
		2) Jumlah Laporan Publikasi dan Kehumasan	3	Laporan
		3) Jumlah Laporan Pengelolaan Aset BLU	3	Laporan
		4) Jumlah Laporan Layanan Bidang Hukum dan Kepatuhan	1	Laporan
5	Pengawasan Internal dan Pembinaan Manajemen	1) Jumlah Laporan Penyelenggaraan Pengawasan Internal	26	Laporan
		2) Jumlah Laporan Penyelenggaraan Pembinaan Manajemen	24	Laporan
			2	Laporan
6	Layanan sarana dan prasarana internal	1) Jumlah pengadaan perangkat pengolahan data dan komunikasi	1	Layanan
		2) Jumlah pengadaan peralatan fasilitas perkantoran	1	Layanan
7	Layanan Perkantoran	1) Pembayaran gaji dan tunjangan 2) Penyediaan layanan operasional dan pemeliharaan kantor		
	Kegiatan:	Dukungan Penyaluran Bantuan Pembiayaan Perumahan Anggaran Rp 71.953.524.000,-		

Tabel 2.2
Perjanjian Kinerja Penyaluran Bantuan Pembiayaan Perumahan
(BA.999.08)

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
Pengelolaan Dana Bergulir dan Pengembalian Pokok			
1	Subsidi Perumahan ke Bank Pelaksana untuk Rumah Tangga Berpenghasilan Rendah yang berasal dari DIPA TA 2020	Jumlah rumah tangga yang mendapatkan KPR FLPP	102.500 Rumah Tangga
2	Subsidi Perumahan ke Bank Pelaksana untuk Rumah Tangga Berpenghasilan Rendah yang berasal dari proyeksi pengembalian pokok yang diterima sampai dengan akhir tahun 2020	Jumlah rumah tangga yang mendapatkan KPR FLPP	102.500 Rumah Tangga

Sesuai Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2019 tentang APBN TA 2020, dialokasikan anggaran FLPP sejumlah Rp. 9.000.000.000.000,-. Dengan target penyaluran yang tercantum pada DIPA sebanyak 102.500 unit KPR Sejahtera sehingga proyeksi alokasi dana FLPP yang tersedia pada tahun 2020 adalah sejumlah Rp. 11.000.000.000.000,- yang terdiri dari DIPA Rp. 9.000.000.000.000,- dan proyeksi pengembalian pokok sebesar Rp. 2.000.000.000.000,-.

Tabel 2.3
Kontrak Kinerja Direktur Utama PPDPP dengan Dirjen
Perbendaharaan (BA.999.03)

No.	Sasaran Strategis	Uraian Indikator Kinerja Utama	Target
1	Pemantauan Ketepatan Sasaran Penyaluran FLPP	Persentase rumah yang dihuni MBR setelah 1 (satu) tahun sejak penandatanganan akad	100%
2	Penyaluran Dana Kelolaan	Realisasi jumlah dana kelolaan tersalurkan kepada MBR dalam bentuk KPR FLPP dalam unit rumah	102.500 unit
3	Penguatan Proses Bisnis	Persentase jumlah MBR yang mendaftar dan menerima KPR FLPP melalui aplikasi Sikasep	50%
4	Peningkatan PNBP	Persentase realisasi PNBP BLU	100%
5	Peningkatan Pengelolaan Badan Layanan Umum yang Berkesinambungan	Persentase penyelesaian rekomendasi hasil monitoring dan evaluasi dari Direktorat Pembinaan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum secara tepat waktu yang memadai dan sesuai dengan ketentuan	85%
6	Pengembangan Infrastruktur Teknologi Informasi	Persentase penyelesaian modernisasi pengelolaan BLU	100%

2.3. Metode Pengukuran

Pengukuran kinerja dilakukan dengan membandingkan pencapaian indikator yang tertuang di dalam Rencana Strategis Bisnis (RSB) dengan realisasi yang dihasilkan sepanjang tahun anggaran.

Sebagaimana tercermin dalam RSB PPDPP dan tertuang di dalam Renstra Direktorat Jenderal Pembiayaan Perumahan 2020-2024 tentang Program dan Kegiatan Teknis Bidang Pembiayaan, sekaligus dalam rangka mendukung pencapaian sasaran teknis/output sebagaimana tersebut di atas, maka PPDPP memiliki kegiatan teknis, yaitu dukungan penyaluran bantuan pembiayaan perumahan. Output dari kegiatan teknis tersebut adalah:

- a. Peningkatan fasilitasi pembiayaan perumahan;
- b. Meningkatnya penyaluran bantuan pembiayaan perumahan; dan
- c. Layanan informasi, evaluasi, pembinaan dan dukungan manajemen Pusat Pengelolaan Dana Pembiayaan Perumahan.

Indikator Kegiatan (Output) merupakan indikator yang digunakan untuk menilai keberhasilan dari pelaksanaan dan tercapainya output dari kegiatan tersebut. Penetapan indikator dilakukan dengan kriteria-kriteria tertentu sehingga mudah diukur, mudah dilaksanakan sesuai dengan waktu yang tersedia. Indikator Kinerja Utama (IKU) Output diukur berdasarkan Perjanjian Kerja dengan uraian sebagai berikut:

Dukungan Penyaluran Bantuan Pembiayaan Perumahan :

1. Layanan promosi, kerjasama dan verifikasi:
 - a. Jumlah laporan promosi dan sosialisasi;
 - b. Jumlah dokumen kerjasama kelembagaan;
 - c. Jumlah unit rumah yang diverifikasi permohonan bantuan pembiayaan.
2. Layanan bidang perencanaan, tata laksana dan pelaporan :
 - a. Jumlah dokumen rencana kerja anggaran;
 - b. Jumlah rekonsiliasi dengan Lembaga Jasa Keuangan;
 - c. Jumlah laporan keuangan;
 - d. Jumlah laporan kinerja.
3. Layanan teknologi informasi, data dan pemantauan evaluasi:
 - a. Jumlah laporan pemeliharaan dan pendayagunaan database;
 - b. Jumlah laporan layanan teknologi informasi;
 - c. Jumlah laporan pemantauan dan evaluasi penyaluran bantuan.
4. Layanan Internal kelembagaan :
 - a. Jumlah laporan pengelolaan sumber daya manusia (SDM);
 - b. Jumlah laporan publikasi dan kehumasan;
 - c. Jumlah laporan pengelolaan aset BLU;
 - d. Jumlah laporan layanan bidang hukum dan kepatuhan.

5. Pengawasan internal dan pembinaan manajemen:
 - a. Jumlah laporan penyelenggaraan pengawasan internal;
 - b. Jumlah laporan penyelenggaraan pembinaan manajemen

Penyaluran Bantuan Pembiayaan Perumahan:

1. Subsidi perumahan ke Bank Pelaksana untuk rumah tangga berpenghasilan rendah:
Jumlah rumah tangga yang mendapatkan KPR FLPP.
2. Bantuan Pembiayaan Perumahan yang berasal dari Proyeksi pengembalian pokok yang diterima sampai dengan akhir tahun 2020 :
Jumlah unit KPR sejahtera tapak yang difasilitasi bantuan pembiayaan.

Pengelolaan Dana Investasi :

1. Pencapaian Ketepatan Sasaran Penyaluran FLPP :
Presentase rumah yang ditempati MBR setelah masa I (satu) tahun sejak penandatanganan akad.
2. Penyaluran Dana Kelolaan :
Realisasi jumlah dana kelolaan tersalurkan kepada MBR dalam bentuk KPR FLPP dalam unit rumah.
3. Pendapatan Layanan dan Non Layanan :
Realisasi PNBPU BLU berupa pendapatan dari jasa layanan dan non layanan.
4. Modernisasi pengelolaan BLU :
Presentase penyelesaian modernisasi pengelolaan BLU.

Target kinerja dalam hal ini diartikan sebagai target kinerja sasaran, baik sasaran strategis, sasaran program maupun sasaran kegiatan yang dilengkapi dengan indikatornya. Target kinerja sasaran menunjukkan tingkat sasaran kinerja spesifik yang akan dicapai oleh PPDPP yang meliputi program dan kegiatan dalam periode Tahun Anggaran 2020.

2.4. Target Tahun Ini Menurut Rencana Strategis Bisnis.

Target kinerja dalam hal ini diartikan sebagai target kinerja sasaran, baik sasaran strategis, sasaran program maupun sasaran kegiatan yang dilengkapi dengan indikatornya. Target kinerja sasaran menunjukkan tingkat sasaran kinerja spesifik yang akan dicapai oleh PPDPP yang meliputi program dan kegiatan dalam periode Tahun Anggaran 2020. Dalam penyusunan target kinerja baik tingkat kegiatan, program maupun lembaga didasarkan pada kriteria-kriteria diantaranya:

- 1) Target menggambarkan angka kualitatif dan satuan yang akan dicapai dari setiap indikator kinerja sasaran; dan
- 2) Penetapan target relevan dengan indikator kinerjanya, logis dan berdasarkan baseline data yang jelas.

Indikator Kinerja Utama merupakan indikator sasaran strategis PPDPP yang didasarkan dari roadmap selama tahun anggaran 2020. Target sasaran PPDPP (outcome-impact), sasaran program (outcome), dan sasaran kegiatan (output) untuk Program Pengembangan Pembiayaan Perumahan (BA.033) dan Program Investasi Pemerintah (BA.999.03).

Berpedoman pada RSB BLU PPDPP target penyaluran FLPP 2020 adalah sebesar 102.500 unit rumah. Total pendanaan untuk Program Pengembangan Pembiayaan Perumahan (BA.033.08) selama tahun anggaran 2020 sebesar Rp. 71.953.524.000,- untuk dukungan penyaluran Bantuan Pembiayaan Perumahan.

Sedangkan untuk Program Investasi Pemerintah yang bersumber dari DIPA (BA.999.03) sebesar Rp. 9.000.000.000.000,- dan proyeksi pengembalian pokok yang akan diterima sampai akhir tahun 2020 sebesar Rp. 2.000.000.000.000,-. Dengan demikian target anggaran dana FLPP yang tersedia pada tahun 2020 adalah sebesar Rp. 11.000.000.000.000,- yang dipergunakan untuk target penyaluran bantuan perumahan sebanyak 102.500 unit KPR Sejahtera FLPP.

Kinerja capaian penyaluran dana FLPP sampai dengan bulan Desember 2020 sejumlah 109.253 unit atau telah mencapai 106,59% dari target sejumlah 102.500 unit, dengan nilai FLPP sebesar Rp 11.231.193.635.691,- atau mencapai 102,10% dari target Rp. 11.000.000.000.000,-. Akumulasi secara total penyaluran dana FLPP dari tahun 2010 sampai dengan bulan Desember tahun 2020 sebanyak 764.855 unit dengan nilai FLPP sebesar Rp 55.598.057.859.794,-. Angka realisasi ini sudah termasuk penyaluran KPR Sejahtera yang bersumber dari dana talangan bank pelaksana sebanyak 14.580 unit dengan nilai Rp 1.458.600.535.647,-.

BAB 3

KAPASITAS ORGANISASI

3.1. Sumber Daya Manusia Pusat Pengelolaan Dana Pembiayaan Perumahan.

Sebagai unit yang bergerak di bidang pembiayaan, kemampuan sumber daya manusia yang profesional menjadi suatu keharusan bagi PPDPP dalam menjalankan tugasnya yaitu melaksanakan penyaluran dan pengelolaan dana pembiayaan perumahan untuk memberikan akses kepada masyarakat berpenghasilan rendah agar dapat memiliki rumah yang layak huni melalui KPR Sejahtera FLPP. Diharapkan pengalaman yang sudah didapat selama ini dapat mendukung profesionalitas dalam pelaksanaan tugas untuk pencapaian target penyaluran KPR Sejahtera FLPP.

Jumlah pegawai di lingkungan PPDPP per tanggal 31 Desember 2020 sejumlah 124 orang pegawai, dengan rincian sebagai berikut :

A. Jumlah Pegawai PPDPP Menurut Status Kepegawaian.

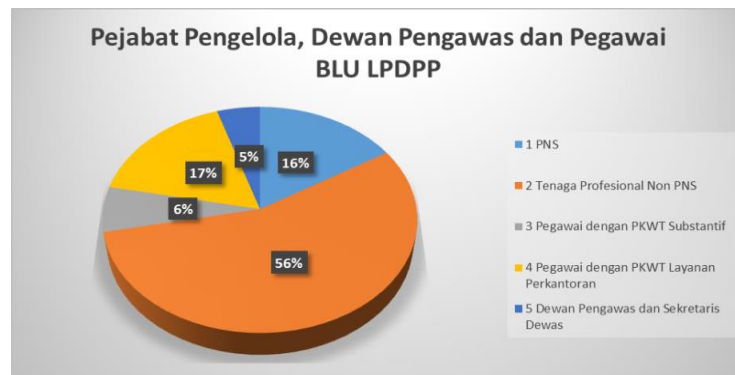
Jumlah pegawai PPDPP menurut status kepegawaian tercantum dalam tabel dan *chart* berikut ini:

Tabel 3.1.
Jumlah Pegawai PPDPP Menurut Status Kepegawaian

No.	STATUS PEGAWAI	JUMLAH	PERSENTASE
1	PNS	20	16%
2	Tenaga Profesional Non PNS	69	56%
3	Pegawai dengan PKWT Substantif	8	6%
4	Pegawai dengan PKWT Layanan Perkantoran	21	17%
5	Dewan Pengawas dan Sekretaris Dewas	6	5%
Total		124	100%

Sumber : Data Kepegawaian PPDPP updated per Desember 2020

Gambar 3.1.
Jumlah Pegawai PPDPP Menurut Status Kepegawaian



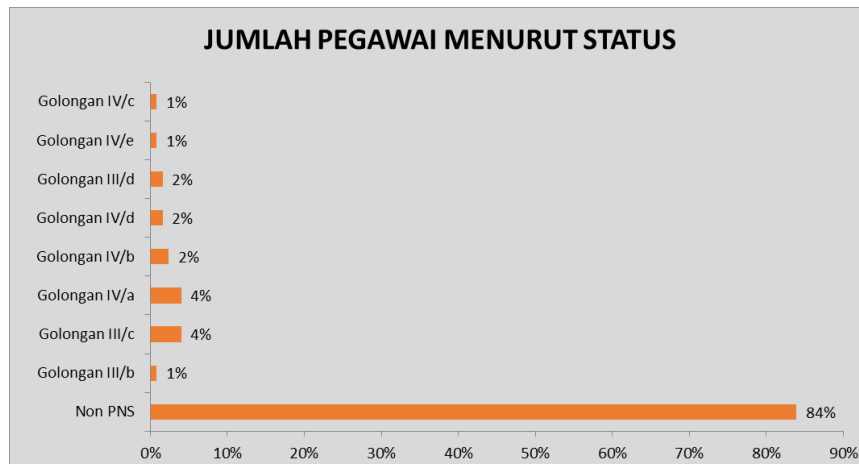
B. Jumlah Pegawai Menurut Status Kepegawaian.

Berdasarkan status kepegawaian terdapat 20 orang pegawai PNS dan 104 orang pegawai Non PNS dengan perincian sebagaimana berikut :

Tabel 3.2.
Jumlah Pegawai PPDPP Menurut Menurut Jabatan

No.	STATUS PEGAWAI	JUMLAH	PERSENTASE
1	PNS		
	Golongan IV/e	1	1%
	Golongan IV/d	2	2%
	Golongan IV/c	1	1%
	Golongan IV/b	3	2%
	Golongan IV/a	5	4%
	Golongan III/d	2	2%
	Golongan III/c	5	4%
	Golongan III/b	1	1%
	Golongan III/a	0	0%
2	Non PNS	104	84%
Total		124	100%

Gambar 3.2.
Jumlah Pegawai PPDPP Menurut Status Kepegawaian



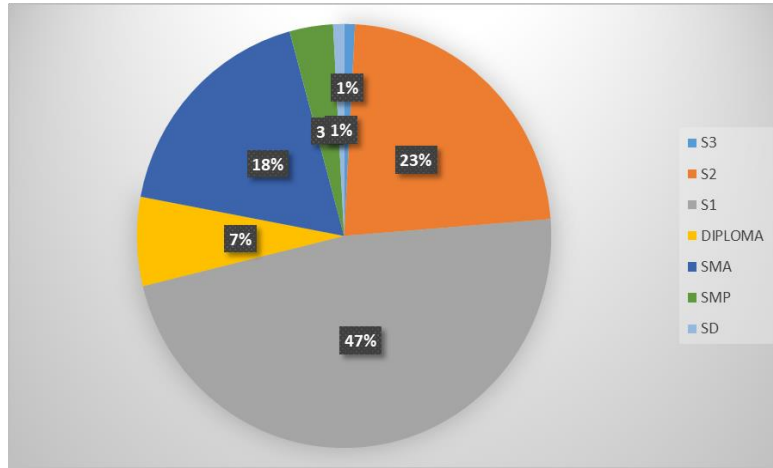
C. Jumlah Pegawai Menurut Tingkat Pendidikan.

Berdasarkan tingkat Pendidikan, pegawai PPDPP terdiri dari tingkat Pendidikan SMA sampai dengan S3 dengan perincian sebagaimana tabel berikut ini.

Tabel 3.3.
Jumlah Pegawai PPDPP Menurut Tingkat Pendidikan.

No.	PENDIDIKAN	JUMLAH	PERSENTASE
1	S3	1	1%
2	S2	27	23%
3	S1	56	47%
4	DIPLOMA	8	7%
5	SMA	21	18%
6	SMP	4	3%
7	SD	1	1%
Total (Tidak Termasuk Dewas)		118	100%

Gambar 3.3.
Jumlah Pegawai PPDPP Menurut Tingkat Pendidikan.



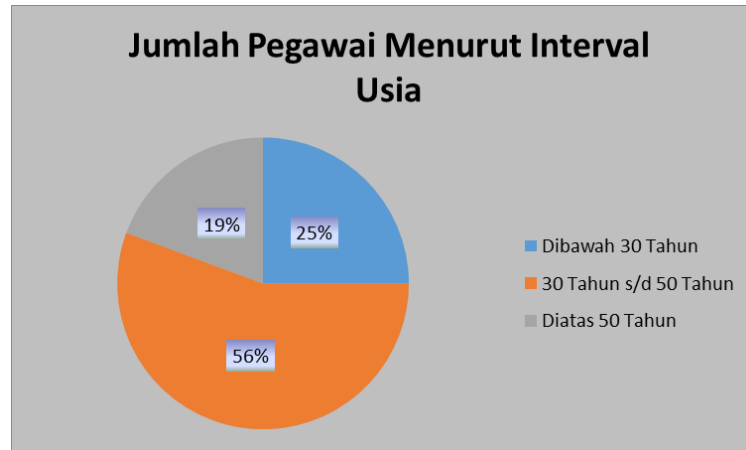
D. Jumlah Pegawai PPDPP berdasarkan Interval Usia.

Jumlah pegawai PPDPP terdiri dari PNS dan Non PNS berdasarkan interval usia dapat dikelompokkan sebagai berikut :

Tabel 3.4.
Jumlah Pegawai Berdasarkan Interval Usia.

NO	MENURUT USIA	PNS	NON PNS		JUMLAH	Persentase
			Substansi	Pendukung		
1	Dibawah 30 Tahun	0	27	4	31	25%
2	30 Tahun s/d 50 Tahun	6	47	16	69	56%
3	Diatas 50 Tahun	14	9	1	24	19%
TOTAL		20	83	21	124	100%

Gambar 3.4.
Jumlah Pegawai Berdasarkan Interval Usia



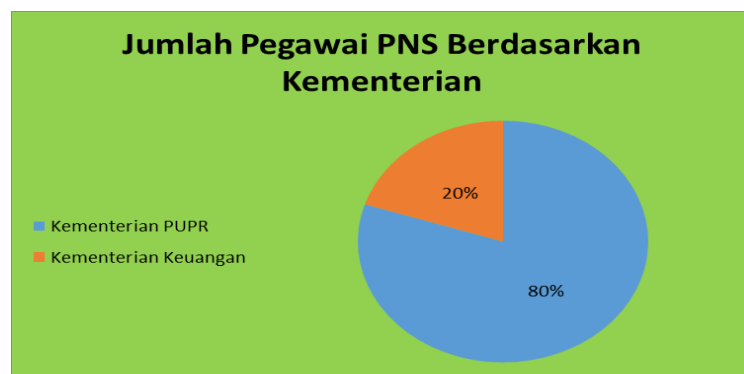
E. Jumlah Pegawai PNS Berdasarkan Kementerian.

Berdasarkan status kepegawaian PNS yang dipekerjakan pada PPDPP terdiri dari PNS Kementerian PUPR dan PNS Kementerian Keuangan dengan perincian sebagai berikut :

Tabel 3.5.
Jumlah Pegawai PNS Berdasarkan Kementerian.

No.	INSTANSI	JUMLAH	PERSENTASE
1	Kementerian PUPR	16	80%
2	Kementerian Keuangan	4	20%
Total		20	100%

Gambar 3.5.
Jumlah Pegawai PNS Berdasarkan Kementerian.



3.2. Sarana Prasarana.

Fasilitas kerja yang merupakan sarana dan prasarana menjadi salah satu faktor yang dapat mempengaruhi peningkatan produktivitas kinerja pegawai. Faktor yang diperhitungkan untuk meningkatkan gairah kerja pegawai adalah fasilitas kerja yang memadai dan dapat membantu pegawai dalam mengerjakan tugasnya. Hal ini cukup beralasan sebab fasilitas kerja merupakan faktor yang mempengaruhi manajemen sarana dan prasarana suatu organisasi dalam mendukung proses berjalannya suatu organisasi.

Sistem penyelenggaraan pemerintah secara menyeluruh telah mengalami perubahan baik di pusat maupun di daerah dengan berbasis kinerja, tingkat capaian yang berdasarkan pada kinerja serta pelayanan yang prima, untuk mencapai keberhasilan kinerja yang baik pegawai pemerintah diharapkan mampu menjalankan tugas dan fungsinya sebagaimana yang telah ditetapkan.

Sejalan dengan perkembangan teknologi membuka konsekuensi dengan tuntutan perubahan untuk mengikuti perkembangan teknologi, sarana dan prasarana jika tidak disiapkan untuk menghadapi perkembangan dan kemajuan teknologi akan mengalami ketertinggalan atau keterbelakangan di segala bidang. Oleh karena itu, diperlukan adanya suatu proses manajemen sarana dan prasarana agar lebih menjamin bahwa unit kerja ini sudah tersedia sarana dan prasarana yang cukup sesuai dengan kebutuhan untuk mendukung berbagai kegiatan, tugas dan fungsi yang sesuai, cepat, tepat dan bermanfaat.

Ketersediaan sarana dan prasarana yang memadai akan sangat mendukung pelaksanaan tugas PPDPP. Kondisi sarana dan prasarana yang ada pada saat ini sudah cukup memadai. Adapun gedung yang saat ini ditempati adalah gedung yang disewa oleh PPDPP yang beralamat di Jl. Palatehan I No. 27 Kebayoran Baru – Jakarta Selatan. Keberadaan gedung pada saat ini masih belum bisa mengakomodir seluruh kegiatan operasional. Untuk itu, perlu dilakukan penambahan ruangan terutama untuk ruangan penyimpanan arsip dan penyimpanan aset PPDPP. Selama ini PPDPP menyimpan arsip dan aset dengan menyewa gudang yang terletak jauh dari kantor PPDPP, yaitu yang berlokasi di Ciputat Tangerang Selatan. Ketersediaan ruangan untuk penyimpanan arsip saat ini tersedia juga di lantai 2 kantor BLU PPDPP yang berupa sebuah ruangan khusus penyimpanan arsip, walaupun sebagian besar arsip masih tersimpan di Ciputat Tangerang Selatan.

Laporan Barang Kuasa Pengguna Tahun Anggaran 2020 gabungan intrakomptabel dan ekstrakomptabel rincian per sub kelompok barang disajikan dalam lampiran laporan ini. Sistem ERP (*Enterprise Resource Planning*) juga menjadi kebutuhan yang harus segera dapat diimplementasikan untuk meningkatkan pencapaian target kinerja PPDPP dalam hal:

A. Pelayanan.

Dalam memberikan pelayanan pencairan dana kepada bank pelaksana, PPDPP berpedoman pada Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 20/PRT/M/2019 tentang Kemudahan dan/atau Bantuan Perolehan Rumah bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah, dengan penjelasan sebagai berikut:

- (1) Permintaan pembayaran dana FLPP oleh Bank Pelaksana kepada PPDPP disampaikan secara tertulis dan harus dilengkapi dengan:
 - a. Surat permintaan pembayaran dana FLPP yang ditandatangani oleh pejabat Bank Pelaksana yang berwenang;
 - b. Surat pernyataan verifikasi;
 - c. Daftar rekapitulasi debitur/nasabah KPR Sejahtera;
 - d. Surat tanda terima uang dan jadwal angsuran dari Bank Pelaksana terhadap pembayaran dana FLPP periode sebelumnya; dan,
 - e. Dokumen lain yang dipersyaratkan diatur dalam perjanjian kerjasama operasional antara Bank Pelaksana dengan PPDPP.
- (2) PPDPP melakukan pengujian terhadap dokumen permintaan pembayaran dana FLPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan hasil pengujian dituangkan dalam lembar hasil pengujian.
- (3) Pengujian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan selambat-lambatnya 3 (tiga) hari kerja setelah dokumen permintaan pembayaran dana FLPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam bentuk dokumen digital (*softcopy*) diterima lengkap dan benar oleh PPDPP yang dibuktikan dengan konfirmasi dari PPDPP.
- (4) Berdasarkan hasil pengujian sebagaimana dimaksud pada ayat (2), PPDPP melakukan pembayaran dana FLPP ke rekening program FLPP KPR Sejahtera.
- (5) Pembayaran dana FLPP sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilakukan selambat-lambatnya 2 (dua) hari kerja setelah hasil pengujian.
- (6) Dalam hal dokumen permintaan pembayaran dana FLPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan dalam bentuk dokumen digital (*softcopy*), maka dokumen cetak (*hardcopy*) harus disampaikan Bank Pelaksana paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah dokumen digital (*softcopy*) diterima lengkap dan benar oleh PPDPP.

- (7) Batas waktu pengajuan permintaan pembayaran dana FLPP dari Bank Pelaksana kepada PPDPP diatur lebih lanjut dalam perjanjian kerjasama operasional.

Ketentuan dalam rangka Perjanjian Kerjasama Operasional (PKO) antara PPDPP dan Bank Pelaksana dapat dijelaskan sebagai berikut :

Pengajuan Permintaan Pembayaran :

- (1) Bank Pelaksana menyampaikan dokumen permintaan pembayaran dana FLPP kepada PPDPP sesuai format yang berlaku yang dilengkapi dengan kelengkapan administrasi, KTP, dan NPWP pemohon dalam bentuk dokumen digital.
- (2) PPDPP melakukan pengujian permintaan dana FLPP yang diajukan oleh Bank Pelaksana menggunakan teknologi informasi yang ditetapkan oleh PPDPP.
- (3) Permintaan pembayaran dari Bank Pelaksana dilakukan paling lambat 1 (satu) bulan setelah tanggal akad kredit KPR Sejahtera.

Dalam rangka meningkatkan pelayanan pencairan dana kepada bank pelaksana, maka PPDPP melakukan pengujian dokumen permintaan dana FLPP melalui sistem e-FLPP dengan cara sebagai berikut:

- (1) Proses pengecekan kelengkapan dokumen:
 - a. Sistem akan menyimpan berkas (softcopy) dokumen yang telah diinput oleh bank pelaksana sebagai lampiran Permintaan Pembayaran Dana FLPP.
 - b. Sistem selanjutnya akan melakukan pengujian otomatis (automatic validation) terhadap "Format-h" setelah dilakukan persetujuan oleh Direktorat Layanan PPDPP.
- (2) Proses pengujian otomatis (*automatic validation*):
 - a. Field yang akan diuji dalam Sistem e-FLPP yaitu by Nama, No KTP, No NPWP dan No Rekening dengan Database Debitur e-FLPP yang sudah terekam sejak tahun 2010-2020.
 - b. Sistem e-FLPP juga akan melakukan summary secara otomatis, dengan menguji field by Gaji Pokok, Harga Jual Rumah dan Nilai Angsuran dengan nilai yang telah ditentukan.
 - c. Sistem hanya akan memproses Format-h yang sudah ditentukan sesuai dengan format sistem.
- (3) Pembayaran Dana FLPP. Dilakukan proses pembayaran dana FLPP kepada Bank Pelaksana sesuai dengan rekomendasi output dari hasil pengujian Sistem e-FLPP.

B. Keuangan

PPDPP telah menggunakan sistem informasi akuntansi yang mendukung pelaporan keuangan, sampai saat ini PPDPP sudah mengembangkan sistem monitoring pengembalian pokok dan tarif agar dapat memantau data *outstanding* dana dari masing-masing debitur dari setiap bank pelaksana yang telah mendapatkan bantuan dana FLPP.

Lebih lanjut pada tahun 2020, melalui kegiatan rekonsiliasi yang dilakukan di setiap bank pelaksana, PPDPP saat ini sudah dapat melakukan perhitungan proyeksi pengembalian pokok dan tarif jasa layanan untuk porsi pembiayaan 75:25 melalui sistem H2H (*Host to Host*) terhadap masing-masing bank pelaksana.

Saat ini, dana yang digunakan untuk bantuan pembiayaan perumahan bagi MBR, sebagian besar berasal dari dan APBN yang semakin lama semakin terbatas ketersediaannya. Oleh karena itu perlu dukungan berbagai aturan yang memberikan peluang untuk mengelola dana-dana secara lebih fleksibel, tidak hanya bersumber dari dan APBN, tetapi juga dari dan non APBN.

Dalam rangka menjawab persoalan tersebut, pemerintah perlu menyusun kebijakan dan strategi yang efektif dalam rangka menyalurkan bantuan pembiayaan perumahan agar bantuan pembiayaan perumahan dapat berjalan dengan efektif, efisien, dan tepat sasaran. Untuk dapat merumuskan kebijakan dan strategi yang tepat, maka pemerintah perlu meninjau kembali skema-skema bantuan pembiayaan perumahan yang dirasa tepat untuk di aplikasikan dengan kondisi Indonesia saat ini melalui berbagai analisis yang komprehensif sehingga program FLPP dapat terjamin keberlanjutannya.

3.3. DIPA Pusat Pengelolaan Dana Pembiayaan Perumahan

DIPA PPDPP berasal dari Anggaran Belanja dan Pendapatan Negara (APBN) dan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP). Pada tahun anggaran 2020, PPDPP memperoleh anggaran yang dialokasikan dalam 2 (dua) program yaitu:

A. Program Pengembangan Pembiayaan Perumahan (BA.033).

Untuk mendukung kegiatan operasional, pada tahun 2020 PPDPP menggunakan dana yang berasal dari pendapatan PNBP yang dituangkan dalam DIPA Nomor : SP DIPA-033.16.1.631021/2020, tanggal 12 November 2019 yang telah direvisi terakhir pada tanggal 23 Desember 2020 dengan alokasi dana sebesar Rp 71.953.524.000,- .DIPA BA 033 BLU PPDPP telah mengalami 7 (tujuh) kali perubahan dengan kronologis sebagai berikut:

1. Revisi ke-1 tanggal 14 Januari 2020 dilakukan karena adanya buka bintang pada DIPA awal;
2. Revisi ke-2 tanggal 16 April 2020 dilakukan karena adanya perubahan saldo awal;
3. Revisi ke-3 tanggal 5 Mei 2020 dilakukan karena pindahannya lokasi kantor bayar (KPPN);
4. Revisi ke-4 tanggal 11 September 2020 dilakukan karena adanya pergeseran anggaran belanja modal dan gaji;
5. Revisi ke-5 tanggal 25 September 2020 dilakukan karena adanya penyesuaian pagu sebagai akibat dari peningkatan kinerja;
6. Revisi ke-6 tanggal 12 November 2020 dilakukan karena adanya pagu minus;
7. Revisi ke-7 tanggal 23 Desember 2020 dilakukan karena adanya pagu minus.

B. Program Investasi Pemerintah (BA.999.03).

Pada tahun 2020 PPDPP mendapatkan alokasi dana bergulir melalui DIPA BUN Nomor SP DIPA- 999.03.1.984532/2020, tanggal 31 Desember 2019 dan direvisi tanggal 30 Juni 2020. Revisi ini dilakukan karena adanya perubahan penarikan Rencana Penarikan Dana (RPD) BLU PPDPP.

Program Investasi Pemerintah yang bersumber dari DIPA (BA.999.03) sebesar Rp9.000.000.000.000,- dan proyeksi pengembalian pokok yang akan diterima sampai akhir tahun 2020 sebesar Rp. 2.000.000.000.000,-. Dengan demikian target anggaran dana FLPP yang tersedia pada tahun 2020 adalah sebesar Rp. 11.000.000.000.000,-

yang dipergunakan untuk target penyaluran bantuan perumahan sebanyak 102.500 unit KPR Sejahtera FLPP.

Kinerja capaian penyaluran dana FLPP sampai dengan bulan Desember 2020 sejumlah 109.253 unit atau telah mencapai 106,59% dari target sejumlah 102.500 unit, dengan nilai FLPP sebesar Rp 11.231.193.635.691,- atau mencapai 102,10% dari target Rp. 11.000.000.000.000,-. Akumulasi secara total penyaluran dana FLPP dari tahun 2010 sampai dengan bulan Desember tahun 2020 sebanyak 764.855 unit dengan nilai FLPP sebesar Rp 55.598.057.859.794,-. Angka realisasi ini sudah termasuk penyaluran KPR Sejahtera yang bersumber dari dana talangan bank pelaksana sebanyak 14.580 unit dengan nilai Rp. 1.458.600.535.647,-.

3.1. POTENSI DAN HAMBATAN

Tabel 3.7.
Potensi dan Hambatan BLU PPDPP berdasarkan faktor *man, money, material, dan method*

No	Faktor	Potensi	Hambatan
1	Man	<ul style="list-style-type: none"> Ketersediaan SDM yang kompeten dalam pembiayaan perumahan yang berasal dari berbagai latar belakang pendidikan yang siap menjalankan tugas dan fungsinya dalam rangka memajukan BLU PPDPP Tingkat produktivitas SDM yang tinggi yang senantiasa menjalankan tugas dan fungsinya berdasarkan nilai-nilai <i>i-prove</i> 	<ul style="list-style-type: none"> Ketidakseimbangan jumlah pegawai yang didominasi oleh Non-PNS sehingga mengakibatkan kesulitan dalam penunjukan Pejabat Pengguna Anggaran ataupun Pejabat Perbendaharaan
2	Money	<ul style="list-style-type: none"> Ketersediaan dana APBN Rupiah Murni dan PNPB yang berasal dari tariff jasa layanan yang dapat digunakan untuk penyaluran dana FLPP kepada MBR Perluasan potensi pendapatan yang berasal dari TI layanan pembiayaan perumahan Pemanfaatan sumber dana di luar APBN/APBD 	<ul style="list-style-type: none"> adanya dana <i>idle cash</i> yang tidak bisa digunakan untuk penyaluran dana FLPP
3	Material	<ul style="list-style-type: none"> Penetapan PPDPP sebagai BLU Penuh yang memungkinkan BLU PPDPP mengelola keuangan nya secara fleksibel Diperolehnya Sertifikat SMM ISO SMM 9001:2015 dengan lingkup seluruh unit kerja 	<ul style="list-style-type: none"> Masih belum adanya gedung operasional milik sendiri. Selama ini gedung BLU PPDPP masih berstatus sewa

		<p>Direktorat BLU PPDPP</p> <ul style="list-style-type: none"> Penghargaan yang diterima baik untuk BLU PPDPP maupun untuk pimpinan BLU PPDPP sebagai bukti nyata keberhasilan kinerja BLU PPDPP dalam menjalankan tugas dan fungsinya 	
4	Method	<ul style="list-style-type: none"> Pengembangan layanan berbasis IT Sebagai bentuk pelayanan terkait pengaduan masyarakat mengenai FLPP, BLU PPDPP menyediakan <i>hotline</i> bebas pulsa dengan operasional setiap hari senin-jumat pukul 08.00 sd 22.00 WIB Diluncurkannya aplikasi SiKasep (Sistem Informasi KPR Bersubsidi) berbasis teknologi yang dapat memudahkan akses MBR terhadap kepemilikan rumah Diluncurkannya aplikasi SiKumbang (Sistem Informasi untuk Pengembang) yang memudahkan pengembang untuk mengintegrasikan data perumahan subsidinya ke dalam sistem aplikasi Sikasep. Diluncurkannya aplikasi SiPetrak Sistem Pemantauan Konstruksi) guna memastikan kualitas hunian yang dibangun pengembang sesuai dengan dengan ketentuan Pemerintah 	<ul style="list-style-type: none"> Masih diperlukannya pengembangan pengaturan regulasi internal BLU PPDPP

BAB 4

AKUNTABILITAS KINERJA

4.1. Capaian Kinerja Organisasi.

Tahun 2020 merupakan tahun pertama dalam pelaksanaan Rencana Strategis Pusat Pengelolaan Dana Pembiayaan Perumahan, Direktorat Jenderal Pembiayaan Perumahan, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat 2020-2024. Pengukuran kinerja dilakukan dengan membandingkan antara realisasi kinerja dengan target kinerja dari masing-masing indikator kinerja yang telah ditetapkan dalam perjanjian kinerja. Melalui pengukuran kinerja diperoleh gambaran pencapaian masing-masing indikator sehingga dapat ditindaklanjuti dalam perencanaan kegiatan di masa yang akan datang agar setiap kegiatan yang direncanakan dapat lebih berhasil guna dan berdaya guna. Capaian kinerja Pusat Pengelolaan Dana Pembiayaan Perumahan pada tahun 2020 akan diuraikan dengan cara membandingkan antara target dengan realisasi masing-masing indikator kinerja sasaran, serta melakukan analisis dan evaluasi atas pencapaian kinerja tahun 2020 ini untuk mendapatkan umpan-balik guna melakukan perbaikan pada tahun 2021. Pada Rencana Strategis Direktorat Jenderal Pembiayaan tahun 2020-2024 mempunyai program, yaitu “Program Pengembangan Pembiayaan Perumahan”. Tanggung jawab PPDPP atas sasaran strategis tersebut, yaitu sebagai berikut:

A. Dukungan Penyaluran Bantuan Pembiayaan Perumahan.

1. Sasaran 1 : Layanan Promosi, Kerjasama, dan Verifikasi.

Dalam kaitan dengan sasaran Layanan Promosi, Kerjasama, dan Verifikasi mengidentifikasi tiga indikator kinerja dengan hasil capaian sebagaimana tergambar dalam tabel berikut :

Tabel 4.1.
Capaian Kinerja Sasaran Strategis I.

No	Indikator Kinerja	Satuan	Capaian Kinerja		Capaian (%)
			Target	Realisasi	
I	Layanan Promosi, Kerjasama, dan Verifikasi				
	1) Jumlah Laporan Promosi dan Sosialisasi	Laporan	2	2	100,00
	2) Jumlah Dokumen Kerjasama Kelembagaan	Lembaga	30	46	153,00
	3) Jumlah unit rumah yang diverifikasi permohonan bantuan pembiayaan	Rumah Tangga	102.500	109.253	106,59

Dalam rangka tercapainya sasaran I ini tidak terlepas dari terlaksananya komponen kegiatan sebagai berikut:

- 1) Pelaksanaan Promosi dan Sosialisasi :
 - a. Pelaksanaan kegiatan pameran;
 - b. Pelaksanaan sosialisasi dan edukasi program aplikasi SiKasep;
 - c. Pelaksanaan sosialisasi dan edukasi pengembang (temu pengembang);
 - d. Pelaksanaan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat melalui sms *blast*, *mobile display ads*, media sosial, dan media cetak.
- 2) Jumlah dokumen kerjasama kelembagaan dilaksanakan dengan kegiatan sebagai berikut:
 - a. Melakukan kerjasama alternatif pendanaan dengan lembaga non-bank;
 - b. Melakukan kerjasama penguatan proses bisnis dengan lembaga non-bank;
 - c. Melakukan bimbingan teknis dan pelaksanaan *assesment* bank pelaksana;
 - d. Pelaksanaan penandatanganan Perjanjian Kerjasama Operasional (PKO) tahun 2020;
 - e. Pembahasan Persiapan Perjanjian Kerjasama (PKS) dengan Bank DKI;

- f. Pelaksanaan addendum PKO dan PKS bank pelaksana;
 - g. Pembahasan perjanjian kerjasama tahun 2021 dengan bank pelaksana.
- 3) Jumlah unit rumah yang diverifikasi permohonan bantuan pembiayaan dilaksanakan dengan kegiatan sebagai berikut:
- a. Melaksanakan kegiatan verifikasi, evaluasi, dan penyusunan laporan tagihan pembiayaan perumahan;
 - b. Inventarisir data dan informasi serta penyusunan laporan hasil pengujian FLPP;
 - c. Melakukan pengembangan sistem/proses pengujian FLPP;
 - d. Pelaksanaan kunjungan lapangan.

2. Sasaran 2 : Layanan Bidang Perencanaan, Tata Laksana, dan Pelaporan

Indikator kinerja dari sasaran 2 tersebut beserta target dan realisasinya sebagaimana tabel berikut ini.

Tabel 4.2.
Capaian Kinerja Sasaran Strategis 2.

No	Indikator Kinerja	Satuan	Capaian Kinerja		Capaian (%)
			Target	Realisasi	
2	Layanan Bidang Perencanaan, Tata Laksana, dan Pelaporan				
	1) Jumlah Dokumen Rencana Kerja Anggaran	Dokumen	3	3	100,00
	2) Jumlah Rekonsiliasi Lembaga Jasa Keuangan	Lembaga	40	40	100,00
	3) Jumlah Laporan Keuangan dan Laporan Kinerja	Laporan	45	46	102,22

Dalam rangka tercapainya sasaran 2 yaitu Layanan Bidang Perencanaan, Tata Kerja, dan Pelaporan tidak terlepas dari terlaksananya komponen kegiatan yang terdiri dari:

- 1) Jumlah dokumen rencana kerja anggaran dilaksanakan dengan kegiatan sebagai berikut:
 - a. Melakukan kajian indikasi kebutuhan dana BUN;
 - b. Melakukan penyusunan target PNBK;

- c. Melakukan proses penyusunan pagu indikatif, pagu anggaran sampai dengan alokasi anggaran;
 - d. Melakukan proses penyusunan RBA;
 - e. Melakukan proses penyusunan RSB.
 - 2) Jumlah rekonsiliasi Lembaga Jasa Keuangan dilaksanakan dengan kegiatan sebagai berikut:
 - a. Melakukan penyaluran dana FLPP;
 - b. Melakukan rekonsiliasi dengan bank pelaksana;
 - c. Melakukan pelayanan kinerja penyaluran FLPP dengan *Service Level Agreement (SLA)* rata-rata 1.07 hari;
 - d. Melakukan penyusunan Laporan Bulanan Penyaluran FLPP;
 - e. Melakukan pemenuhan target realisasi pendapatan BLU melalui PNBPN.
 - 3) Jumlah Laporan Keuangan dilaksanakan dengan kegiatan sebagai berikut:
 - a. Melakukan penyusunan Laporan Keuangan Investasi Pemerintah bagian anggaran BA 999 (dana kelolaan);
 - b. Melakukan penyusunan Laporan Keuangan bagian anggaran BA 033 (dana operasional).
 - 4) Jumlah Laporan Kinerja dilaksanakan dengan kegiatan sebagai berikut:
 - a. Melakukan penyusunan Laporan Monitoring Dan Evaluasi Kinerja Anggaran;
 - b. Melakukan penyusunan Laporan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
- 3. Sasaran 3 : Layanan Teknologi Informasi, Data, dan Pemantauan Evaluasi**

Indikator kinerja dari sasaran 3 tersebut beserta target dan realisasinya sebagaimana tabel berikut ini.

Tabel 4.3.
Capaian Kinerja Sasaran Strategis 3.

No	Indikator Kinerja	Satuan	Capaian Kinerja		Capaian (%)
			Target	Realisasi	
3	Layanan Teknologi Informasi, Data, dan Pemantauan Evaluasi				
	1) Jumlah Laporan Pemeliharaan dan Pendayagunaan Database	Laporan	3	3	100
	2) Jumlah Laporan Layanan Teknologi Informasi	Laporan	1	1	100
	3) Jumlah Laporan Pemantauan dan Evaluasi Penyaluran Bantuan	Laporan	1	1	100

Dalam rangka tercapainya sasaran 3 yaitu Layanan Teknologi Informasi, Data dan Pemantauan Evaluasi tidak terlepas dari terlaksananya komponen kegiatan yang terdiri dari:

- 1) Jumlah laporan pemeliharaan dan pendayagunaan database dilaksanakan dengan kegiatan sebagai berikut:
 - a. Mengelola jumlah data debitur FLPP BLU PPDPP dari tahun 2010-2020;
 - b. Melakukan analisa pendayagunaan data yang dihasilkan;
 - c. Melakukan pengelolaan sistem database;
 - d. Melakukan sertifikasi ISO 27001:2013 dan Re-Sertifikasi ISO 9001:2015;
 - e. Melakukan pemenuhan permintaan data dari pihak internal dan eksternal BLU PPDPP.
- 2) Jumlah laporan layanan teknologi informasi dilaksanakan dengan kegiatan sebagai berikut:
 - a. Melakukan penyusunan laporan kegiatan yang mencakup pengelolaan dan pengembangan teknologi informasi;
 - b. Melakukan pembaharuan sistem informasi PPDPP;
 - c. Melakukan pembaharuan infrastruktur jaringan PPDPP;
 - d. Melakukan pengelolaan terhadap sistem, aplikasi, dan web service yang sudah dibangun sehingga dapat digunakan dengan baik.
- 3) Jumlah laporan pemantauan dan evaluasi penyaluran bantuan dilaksanakan dengan kegiatan sebagai berikut:

- a. Melakukan pemantauan keterhunian dengan metode seluler, yaitu pengisian kuisioner online dan televalidasi;
- b. Melakukan dukungan teknis dalam rangka pemantauan kualitas rumah FLPP dengan integrasi aplikasi SiPetrak.

Untuk indikator sasaran Layanan Teknologi Informasi, Data, dan Pemantauan Evaluasi terdapat perbedaan target antara yang tercantum di DIPA BA 033 (10 laporan) dan RSB BLU PPDPP 2020-2024 (9 laporan). Perbedaan ini terletak pada kegiatan jumlah Laporan Pemeliharaan dan Pendayagunaan Database yang semula mencantumkan target di RSB BLU PPDPP 2020-2024 sebanyak 2 laporan menjadi 3 laporan. Penambahan dari 2 menjadi 3 laporan adalah laporan sertifikasi ISO 9001:2015 dan 27001:2013 yang tadinya digabung menjadi satu laporan sertifikasi dipisahkan menjadi dua laporan sertifikasi.

4. Sasaran 4 : Layanan Internal Kelembagaan

Indikator kinerja dari sasaran 4 tersebut beserta target dan realisasinya sebagaimana tabel berikut ini.

Tabel 4.4.
Capaian Kinerja Sasaran Strategis 4.

No	Indikator Kinerja	Satuan	Capaian Kinerja		Capaian (%)
			Target	Realisasi	
4	Layanan Internal Kelembagaan				
	1) Jumlah Laporan Pengelolaan Sumber Daya Manusia (SDM)	Laporan	3	3	100,00
	2) Jumlah Laporan Publikasi dan Kehumasan	Laporan	3	3	100,00
	3) Jumlah Laporan Pengelolaan Aset BLU	Laporan	3	3	100,00
	4) Jumlah Laporan Layanan Bidang Hukum dan Kepatuhan	Laporan	1	1	100,00

Dalam rangka tercapainya sasaran 4 yaitu Layanan Internal Kelembagaan tidak terlepas dari terlaksananya komponen kegiatan yang terdiri dari:

- 1) Jumlah laporan pengelolaan Sumber Daya Manusia (SDM) dilaksanakan dengan kegiatan sebagai berikut:

- a. Melakukan tata kelola SDM;
 - b. Melakukan pengembangan Human Resources Management System (HRMS);
 - c. Melakukan pembinaan pegawai;
 - d. Melakukan seleksi/rekrutmen/assessment/profiling pegawai;
 - e. Melakukan bimbingan teknis dan pelatihan untuk pegawai;
 - f. Melakukan penyusunan standar dan kamus kompetensi.
- 2) Jumlah laporan publikasi dan kehumasan dilaksanakan dengan kegiatan sebagai berikut:
 - a. Mengelola layanan informasi dan pengaduan masyarakat melalui *hotline* PPDPP;
 - b. Melakukan pengelolaan terhadap media sosial dan website PPDPP;
 - c. Memproduksi publikasi untuk media;
 - d. Melakukan survey kepuasan masyarakat;
 - e. Melakukan dukungan publikasi untuk aplikasi SiKasep melalui komik SiKasep;
 - f. Melakukan pemasangan iklan di radio;
 - g. Menyusun buletin Griya Sejahtera yang diterbitkan rutin setiap 3 bulan.
- 3) Jumlah laporan pengelolaan aset BLU dilaksanakan dengan kegiatan sebagai berikut:
 - a. Menyusun laporan BMN;
 - b. Pengelolaan data dan komunikasi;
 - c. Melakukan pengadaan peralatan dan fasilitas perkantoran;
 - d. Melakukan pembayaran gaji dan tunjangan pegawai;
 - e. Melakukan pemeliharaan peralatan dan mesin;
 - f. Melakukan penyelenggaraan operasional perkantoran;
 - g. Melakukan dukungan penanganan Covid-19
- 4) Jumlah laporan layanan bidang hukum dan kepatuhan dilaksanakan dengan kegiatan sebagai berikut:
 - a. Melakukan dukungan penyusunan peraturan perundang-undangan;
 - b. Melakukan dukungan penyusunan dan pengembangan SOP AP;

- c. Melakukan dukungan advokasi hukum;
- d. Melakukan dukungan penyusunan perjanjian;

Untuk indikator sasaran Layanan Internal Kelembagaan terdapat perbedaan target antara yang tercantum di DIPA BA 033 (10 laporan) dan RSB BLU PPDPP 2020-2024 (9 laporan). Perbedaan ini terletak pada kegiatan jumlah Laporan Publikasi dan Kehumasan yang semula mencantumkan target di RSB BLU PPDPP 2020-2024 sebanyak 2 laporan menjadi 3 laporan. Penambahan dari 2 menjadi 3 laporan adalah adanya penambahan Laporan Layanan Hotline BLU PPDPP dari semula hanya Laporan Publikasi dan Laporan Kehumasan.

5. Sasaran 5 : *Pengawasan Internal dan Pembinaan Manajemen*

Indikator kinerja dari sasaran 5 tersebut beserta target dan realisasinya sebagaimana tabel berikut ini.

Tabel 4.5.
Capaian Kinerja Sasaran Strategis 5.

No	Indikator Kinerja	Satuan	Capaian Kinerja		Capaian (%)
			Target	Realisasi	
5	Pengawasan Internal dan Pembinaan Manajemen				
	1) Jumlah Laporan Penyelenggaraan Pengawasan Internal	Laporan	24	31	129,00
	2) Jumlah Laporan Penyelenggaraan Pembinaan Manajemen	Laporan	2	2	100,00

Dalam rangka tercapainya sasaran 5 yaitu Pengawasan Internal dan Pembinaan Manajemen tidak terlepas dari terlaksananya komponen kegiatan yang terdiri dari:

- 1) Jumlah laporan penyelenggaraan pengawasan internal dilaksanakan dengan kegiatan sebagai berikut:
 - a. Melakukan pemantauan tindak lanjut hasil pengawasan;
 - b. Melakukan revidi Laporan Kinerja tahun 2019;
 - c. Melakukan revidi Laporan Keuangan BA 999 dan BA 033;
 - d. Melakukan revidi Buku Kas Umum (BKU) pada Satuan Kerja PPDPP tahun 2020;
 - e. Melakukan pendampingan kegiatan Rekonsiliasi Penyaluran

- Dana FLPP Triwulan IV Tahun 2019;
- f. Melakukan pendampingan penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK RI Tahun 2011-2019;
 - g. Melakukan pendampingan penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) BLU PPDPP Tahun 2019;
 - h. Melakukan pemantauan penyerapan anggaran tahun 2020 pada Satuan Kerja BLU PPDPP;
 - i. Melakukan pendampingan penilaian risiko *fraud* di lingkungan PPDPP;
 - j. Melakukan reviu atas revisi KAK dan RAB kegiatan Satuan Kerja PPDPP tahun anggaran 2020;
 - k. Melakukan audit Sistem Manajemen Keamanan Informasi berdasarkan ISO 27001:2013 pada BLU PPDPP;
 - l. Melakukan audit Sistem Manajemen Mutu berdasarkan ISO 9001:2015 pada BLU PPDPP;
 - m. Melakukan kegiatan Peningkatan Kapasitas Pegawai terkait Pengawasan;
 - n. Melakukan kegiatan Peningkatan Kapasitas Auditor SPI PPDPP tahun 2020.
- 2) Jumlah laporan penyelenggaraan pembinaan manajemen dilaksanakan dengan kegiatan sebagai berikut:
- a. Melakukan kegiatan Rapat Dewan Pengawas BLU PPDPP;
 - b. Melakukan penyusunan laporan Dewan Pengawas BLU PPDPP.

B. Pengelolaan Dana Bergulir dan Pengembalian Pokok.

1. Sasaran 1 : Subsidi Perumahan ke Bank Pelaksana untuk Rumah Tangga Berpenghasilan Rendah

Target kinerja subsidi perumahan ke bank pelaksana untuk rumah tangga berpenghasilan rendah yang berasal dari DIPA TA 2020 maupun bantuan pembiayaan perumahan yang berasal dari pengembalian pokok yang diterima sampai dengan akhir tahun 2020 adalah sebesar 109.253 unit atau mencapai 106,59% dari target 102.500 dengan nilai FLPP sebesar Rp 11.231.193.635.691,- dari target penyaluran FLPP tahun 2020 yang tersedia

sebesar Rp. 11.000.000.000.000,- atau mencapai 102,10%. Akumulasi secara total penyaluran dana FLPP dari tahun 2010 sampai dengan Akhir tahun 2020 sebanyak 764.855 unit dengan nilai FLPP sebesar Rp 55.598.057.859.794,-.

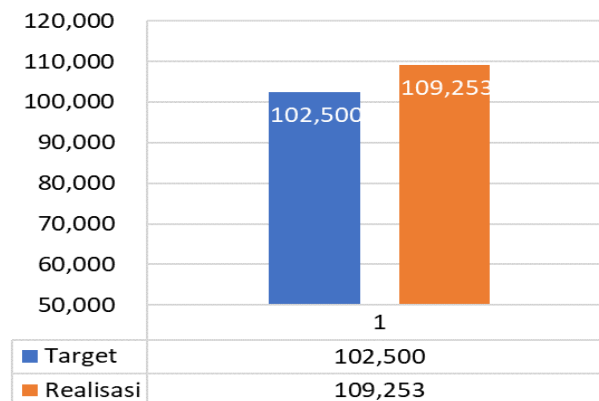
Pencapaian Perjanjian Kinerja Pusat Pengelolaan Dana Pembiayaan Perumahan tahun 2020 dalam rangka penyaluran bantuan pembiayaan perumahan dapat dilihat pada tabel Capaian Perjanjian Kinerja sebagai berikut :

Tabel 4.6.
Capaian Kinerja Pengelolaan Dana Bergulir dan
Pengembalian Pokok Tahun 2020.

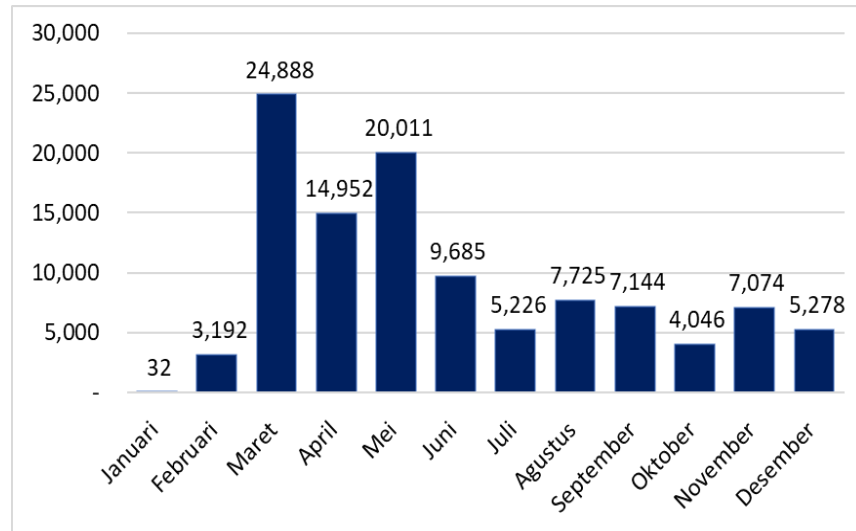
No.	Sasaran Kegiatan	Satuan	Capaian Kinerja		Capaian (%)
			Target	Realisasi	
1) Pengelolaan Dana Bergulir dan Pengembalian Pokok					
1	Subsidi perumahan ke bank pelaksana untuk rumah tangga berpenghasilan rendah yang berasal dari DIPA TA 2020	Rumah Tangga	102.500	109.253	106,59
2	Subsidi perumahan ke bank pelaksana untuk rumah tangga berpenghasilan rendah yang berasal dari proyeksi pengembalian pokok yang diterima sampai dengan akhir tahun 2020				

Target dan Realisasi Penyaluran Bantuan Pembiayaan Perumahan Tahun 2020 berdasarkan Jumlah Unit Rumah dapat dilihat pada Grafik 4.1. Sedangkan Target dan Realisasi Penyaluran Bantuan Pembiayaan Perumahan Tahun 2020 berdasarkan Jumlah Unit Rumah per Bulan dapat dilihat pada Grafik 4.2.

Grafik 4.1.
Penyaluran Bantuan Pembiayaan Perumahan Tahun 2020
berdasarkan Target dan Realisasi



Grafik 4.2.
Realisasi Penyaluran Bantuan Pembiayaan Perumahan Rumah Tapak dan Rumah Susun Tahun 2020 Per Bulan



Penyaluran bantuan pembiayaan perumahan tahun 2020 berdasarkan jumlah unit rumah untuk rumah tapak dan rumah susun mulai meningkat pada bulan Februari, dan mencapai puncaknya pada bulan Maret, kemudian pada bulan April terjadi penurunan diakibatkan adanya pandemi covid-19 yang mulai melanda Indonesia dan sedikit banyak berpengaruh terhadap kemampuan MBR untuk mengajukan pembiayaan perumahan subsidi. Terjadi kenaikan kembali pada bulan Mei dan berlanjut ke bulan-bulan berikutnya dengan tren kenaikan dan penurunan. Akan tetapi dibalik adanya tren kenaikan dan penurunan tersebut, BLU PPDPP selama tahun 2020 mampu menyalurkan sebanyak 109.253 unit rumah subsidi baik tapak maupun susun melebihi target yaitu 102.500 unit dengan persentase pencapaian sebesar 106,59%. Hal ini menunjukkan bahwa kinerja BLU PPDPP selama masa pandemi covid-19 dan melakukan sistem kerja *work from home* tetap dapat berjalan dengan baik bahkan melebihi target.

C. Dana Investasi PPDPP.

Sasaran I : Penyaluran Dana FLPP.

Untuk mewujudkan visi **“Menjadi Lembaga Penyedia Layanan Pembiayaan Perumahan Dan Pengelola Dana Yang Profesional Dan Handal Dalam Mendukung Pemenuhan Kebutuhan Perumahan Bagi Rakyat”**. Pusat Pengelolaan Dana Pembiayaan Perumahan selain mengadakan perjanjian kinerja dengan Direktur Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Kementerian PUPR, juga mengadakan kontrak kinerja dengan Direktorat Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan dengan target dan capaian kinerja sebagai berikut:

Tabel 4.5.
Capaian Program Kinerja Tahun 2020

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET	REALISASI	PRESENTASE	Penilaian Kontrak Kinerja dengan DJPB
1	Pemantauan Ketepatan Sasaran Penyaluran FLPP	Presentase rumah yang dihuni MBR setelah 1 (satu) tahun sejak penandatanganan akad	100 %	100 %	100 %	140%
2	Penyaluran Dana Kelolaan	Realisasi jumlah dana kelolaan tersalurkan kepada MBR dalam bentuk KPR FLPP dalam unit rumah	102,500 Unit	109,253 Unit	106.6 %	150%
3	Penguatan Proses Bisnis	Persentase jumlah MBR yang mendaftar dan menerima KPR FLPP melalui aplikasi SiKasep	50 %	86.70 %	173.4 %	150%
4	Peningkatan PNBP	Persentase realisasi PNBP BLU	100 %	120 %	120.0 %	150%

5	Peningkatan Pengelolaan Badan Layanan Umum yang Berkesinambungan	Persentase penyelesaian rekomendasi hasil monitoring dan evaluasi dari Direktorat Pembinaan Pengelolaan Keuangan BLU secara tepat waktu yang memadai	85 %	100 %	117.6 %	150%
6	Pengembangan Infrastruktur Teknologi Informasi	Persentase penyelesaian modernisasi pengelolaan BLU	100 %	125 %	125.0 %	150%

Ket: presentase penilaian kontrak kinerja dengan DJPB didapatkan berdasarkan perhitungan manual IKU di Kontrak Kinerja Direktur Utama PPDPP dengan DJPB Kemenkeu

Program kinerja tersebut diajukan dalam rangka mendukung misi PPDPP yaitu:

1. Memberikan layanan penyaluran FLPP yang unggul dan tepat sasaran;
2. Mengoptimalkan pengelolaan dan pengembangan dana bergulir untuk mendukung kesinambungan pembiayaan perumahan rakyat;
3. Mengembangkan dan mengoptimalkan dukungan teknologi informasi dalam meningkatkan efektifitas layanan FLPP dan pengelolaan dana bergulir;
4. Meningkatkan kapasitas kelembagaan melalui penerapan prinsip tatakelola organisasi yang baik dengan dukungan SDM yang professional dan berintegritas.

Penilaian terhadap kontrak kinerja akan dilakukan oleh Direktorat PPK BLU Kementerian Keuangan dengan formula penilaian sesuai manual kontrak kinerja. Penyusunan rencana kegiatan mempertimbangkan pada aspek prioritas untuk pengelolaan FLPP yang mencakup:

1. Arah kebijakan pembiayaan investasi:
 - Mendukung peningkatan akses masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) untuk mendapatkan tempat tinggal.
 - Meningkatkan efektifitas program pembiayaan pemilikan rumah yang layak dengan harga terjangkau dan tepat sasaran melalui peningkatan dana bergulir untuk program FLPP.
2. Sasaran output atas Dana Bergulir pada BLU-PPDPP:
 - kebijakan skema kredit untuk MBR yang mempunyai penghasilan tidak tetap.
 - menyempurnakan kebijakan skema rumah susun untuk pemenuhan hunian

- perkotaan.
- meningkatkan sosialisasi kebijakan program FLPP kepada masyarakat dan Bank pelaksana.
3. Potensi risiko dalam penyaluran dana FLPP :
 - ketidaktepatan sasaran pemberian KPR–FLPP (baik dalam proses seleksi, pemanfaatan rumah, maupun kelengkapan bangunan rumah).
 - ketidaksesuaian antara *demand* perumahan MBR dengan *supply* perumahan MBR pada masing-masing daerah.
 4. Mitigasi risiko yang dilakukan pemerintah:
 - Pemerintah memberikan penugasan kepada Badan Layanan Umum (BLU) Pusat Pengelolaan Dana Pembiayaan Perumahan (PPDPP) untuk menyalurkan FLPP bagi MBR.
 - Dukungan pembiayaan sekunder oleh PT SMF (Persero).
 - Perluasan manfaat oleh BPJS Ketenagakerjaan.
 - Rencana pemanfaatan dana Bapertarum PNS dan PT Taspen (Persero).
 5. Agar program pembiayaan tepat sasaran, salah satu langkah mitigasi risiko adalah menetapkan kriteria-kriteria debitur yang dapat memanfaatkan KPR-FLPP. Lebih lanjut, BLU PPDPP akan memeriksa apakah pemohon KPR-FLPP sesuai dengan kategori debitur MBR yang dapat memanfaatkan KPR dengan bunga 0,5 persen. Kegiatan ini akan mengurangi kemungkinan terjadinya salah sasaran penyaluran kredit KPR-FLPP.
 6. Selain itu dilakukan juga upaya melibatkan peran Pemda untuk memastikan calon penerima FLPP sesuai dengan kriteria yang ditetapkan dan untuk memitigasi agar terdapat kesesuaian antara *demand* dan *supply* perumahan MBR di seluruh wilayah Indonesia diperlukan pemetaan yang akurat.

4.2. Perbandingan Kinerja Organisasi.

Kinerja penyaluran dana FLPP sampai dengan 31 Desember 2019 sejumlah 77.835 unit atau mencapai 113,04% dari target sejumlah 68.858 unit, dengan nilai FLPP sebesar Rp7.545.288.389.505,- atau mencapai 106,27% dari target sebesar Rp. 7.100.000.000.000,-. Sedangkan penyaluran dana FLPP sampai dengan 31 Desember 2020 sejumlah 109.253 unit dari target 102.500 atau mencapai 106,59% dengan nilai FLPP sebesar Rp 11.231.193.635.691,- dari target sebesar Rp 11.000.000.000.000,- atau mencapai 102,10%. Akumulasi secara total penyaluran dana FLPP dari tahun 2010 sampai dengan akhir tahun 2020 sebanyak 764.855 unit dengan nilai FLPP sebesar Rp55.598.057.859.794,-. Perbandingan realisasi Pengelolaan Dana Bergulir FLPP dan Pengembalian Pokok tahun 2019 dan 2020 sebagaimana tabel berikut ini:

Tabel 4.6.
Kinerja Tahun 2019 dan 2020 Untuk Program Investasi Pemerintah (BA.999.03)

No.	Indikator Kinerja	Satuan	Capaian Kinerja 2019			Capaian Kinerja 2020		
			Target Porsi	Realisasi	%	Target Porsi	Realisasi	%
Pengelolaan Dana Bergulir dan Pengembalian Pokok								
1	Bantuan Pembiayaan Perumahan ke Bank Pelaksana untuk rumah tangga berpenghasilan rendah yang berasal dari DIPA TA 2020	Rumah Tangga	68.858	77.835	113.04	102.500	109.253	106,59
2	Bantuan Pembiayaan Perumahan yang berasal dari Proyeksi pengembalian pokok yang diterima sampai dengan akhir tahun 2020							
	TOTAL		68,858	77.835	113.04	102.500	109.253	106,59

Tabel 4.7.
Perbandingan Kinerja Tahun 2019 dan 2020 Untuk Operasional PPDPP (BA.033.08)

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Capaian Kinerja 2019			Satuan	Capaian Kinerja 2020			
				T	R	P		T	R	p	
Dukungan Penyaluran Bantuan Pembiayaan Perumahan											
I	Layanan Promosi, Perencanaan dan Bantuan Hukum Pusat Pengelolaan Dana Pembiayaan Perumahan (BLU)	1).	Jumlah Laporan Pelaksanaan Promosi dan Sosialisasi	Dokumen	14	14	100	Laporan	2	2	100
		2).	Jumlah Dokumen Perencanaan Anggaran Pusat Pengelolaan Dana Pembiayaan Perumahan	Dokumen	9	9	100	Dokumen	3	3	100
		3).	Jumlah Dokumen Legal dan Bantuan Hukum	Dokumen	8	8	100	Laporan	1	1	100

2	Layanan Kerjasama dan Rekonsiliasi Lembaga Jasa Keuangan (LJK)	1).	Jumlah Lembaga LJK yang bekerjasama dengan Pusat Pengelola Dana Pembiayaan	Lembaga	53	53	100	Lembaga	30	46	153
		2).	Jumlah Rekonsiliasi dengan LJK	Lembaga	31	31	100	Lembaga	40	45	100
3	Laporan Informasi, Evaluasi, Pembinaan dan Dukungan Manajemen Pusat Pengelolaan Dana Pembiayaan Perumahan	1).	Jumlah Laporan Keuangan	Dokumen	10	10	100	Laporan	32	33	103,12
		2).	Jumlah Verifikasi Permohonan Pencairan Dana dari Lembaga Jasa Keuangan (LJK) Pelaksana	Unit	2	2	100	Rumah Tangga	102.500	109.253	106,59
		3).	Jumlah Laporan Pemeliharaan Data Base dan Teknologi Informasi yang Terintegrasi	Dokumen	3	3	100	Laporan	3	3	100
		4).	Jumlah Laporan Pemantauan dan Evaluasi Penyaluran Bantuan Pembiayaan Perumahan	Dokumen	2	2	100	Laporan	1	1	100
		5).	Jumlah Laporan Pemenuhan SDM yang Berkualitas	Dokumen	6	6	100	Laporan	3	3	100
		6).	Jumlah Laporan Publikasi Kegiatan Pusat Pengelola Dana Bantuan Pembiayaan Perumahan	Dokumen	6	6	100	Laporan	3	3	100
		7).	Jumlah Laporan BMN	Dokumen	1	1	100	Laporan	3	3	100
		8).	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja	Dokumen	1	1	100	Laporan	12	12	100
4	Layanan Internal (Overhead)	1).	Pengadaan Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi	Layanan	1	1	100	Layanan	1	1	100
		2).	Pengadaan Peralatan dan Fasilitas Perkantoran	Layanan				Layanan			
5	Layanan Perkantoran	1).	Jumlah Layanan Perkantoran	Layanan	12	12	100	Layanan	1	1	100

*keterangan: T (target); R (realisasi); P (persentase)

Untuk mendukung operasional sehari-hari PPDPP menggunakan dana yang berasal dari pendapatan atas tarif layanan serta hasil pengelolaan kas atas dana yang belum digulirkan kepada MBR (*idle cash*). Akumulasi pendapatan operasional PPDPP sejak tahun 2010 sampai dengan Desember 2020 adalah sebesar Rp2.348.544.608.246,-. Sedangkan pendapatan sejak 1 Januari 2020 sampai dengan 31 Desember 2020 sebesar Rp435.042.780.741,- atau mencapai 161% dari estimasi pendapatan sebesar Rp270.189.000.000,-. Rincian pendapatan BLU PPDPP tahun 2019 dan tahun 2020 sebagaimana tabel berikut ini:

Tabel 4.8
Rincian Pendapatan Tahun 2019 dan 2020.

No.	Uraian Akun Pendapatan	Tahun 2019			Tahun 2020		
		Target (Rp.)	Realisasi (Rp.)	%	Target (Rp.)	Realisasi (Rp.)	%
1	Pendapatan Jasa Layanan PPDPP (tarif)	150.960.000.000	151.156.360.036	100.13	162.113.400.000	180.706.927.668	111
	A Pendapatan Program Dana Bergulir Sektoral	147,000,000,000	128,767,291,251	87.60	137.796.390.000	148.811.971.482	108
	B Pendapatan Program Dana Bergulir Syariah	3,960,000,000	22,389,068,785	565.38	24.317.010.000	31.894.956.186	131
2	Pendapatan PPDPP Lainnya (jasa giro dan bunga deposito)	95.040.000.000	168.481.142.885	177.27	108.075.600.000	254.335.853.072	235
	Pendapatan Jasa Perbankan PPDPP	95,040,000,000	168,481,142,885	177.27	108.075.600.000	243.518.124.129	235
Total		246,000,000,000	319,637,502,920	129.93	270.189.000.000	435.042.780.741	161

Data : 31 Desember 2020

Sesuai dengan pedoman penilaian kinerja yang dibuat oleh Direktorat Pembinaan Pengelolaan Keuangan BLU Kementerian Keuangan selaku pembina Satuan Kerja BLU, satuan kerja BLU untuk dana bergulir dikelompokkan sebagai BLU bidang pengelola dana khusus. Perkembangan pengelolaan dana FLPP oleh BLU PPDPP sejak tahun 2010 hingga 31 Desember 2020 dapat dilihat pada Tabel 4.9 di bawah ini.

Tabel 4.9
Perkembangan Pengelolaan Dana s.d 31 Desember 2020

Tahun	DIPA	Penyaluran FLPP		Pengembalian Pokok
		Unit	Rp	(Rp)
2010	2,683,049,000,000	7,959	242,656,944,516	43,789,900
2011	3,571,600,000,000	109,592	3,688,272,535,411	58,100,576,876
2012	4,709,253,000,000	64,785	2,587,256,538,729	208,986,757,420
2013	1,209,253,000,000	102,714	5,363,161,269,150	437,925,189,962
2014	3,000,000,000,000	76,057	4,655,625,834,824	700,004,741,057

2015	5,106,300,000,000	76,489	6,055,232,493,208	1,003,975,167,544
2016	4,295,659,000,000	58,469	5,627,538,999,307	1,262,801,035,360
2017	3,100,000,000,000	23,763	2,706,624,492,776	1,628,941,076,817
2018	2,180,000,000,000	57,939	5,895,206,726,677	2,057,606,606,829
2019	5,200,000,000,000	77,835	7,545,288,389,505	2,604,401,404,831
2020	9,000,000,000,000	109,253	11,231,193,635,691	3,039,264,699,364
TOTAL	44,055,114,000,000	764,855	55,598,057,859,794	13,002,051,045,960

*) data sampai dengan 31 Desember 2020

Untuk meningkatkan *leverage* dana FLPP dalam membantu kebutuhan MBR terhadap KPR perlu dilakukan upaya-upaya untuk percepatan *turn over* dana FLPP dan menambah porsi pembiayaan. Dalam rangka menurunkan porsi pembiayaan Pemerintah, dilakukan kerjasama untuk pemanfaatan/sinergi pembiayaan dana jangka panjang lain dengan PT Sarana Multigriya Finansial (SMF).

4.3. Realisasi Dan Evaluasi Pencapaian Anggaran Tahun 2020.

A. Dukungan Penyaluran Bantuan Pembiayaan Perumahan.

Anggaran Operasional PPDPP tahun 2020 untuk program Dukungan Penyaluran Bantuan Pembiayaan Perumahan berdasarkan alokasi belanja tahun 2020 sebesar Rp 71.953.524.000,- (Tujuh Puluh Satu Miliar Sembilan Ratus Lima Puluh Tiga Juta Lima Ratus Dua Puluh Empat Ribu Rupiah) dan realisasi mencapai Rp 68.672.498.238,- atau 95,44% dari DIPA.

Tabel 4.10.
Realisasi Anggaran Operasional PPDPP Tahun 2020 (BA.033.08)

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Pagu Anggaran Tahun 2020 (Rp.)	Realisasi Anggaran (Rp.)	Capaian (%)
Dukungan Penyaluran Bantuan Pembiayaan Perumahan					
I	Layanan Promosi, kerjasama, dan verifikasi	I). Jumlah Laporan Promosi dan Sosialisasi	2,800,000,000	2,777,184,742	99.19

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Pagu Anggaran Tahun 2020 (Rp.)	Realisasi Anggaran (Rp.)	Capaian (%)
		2). Jumlah Dokumen Kerjasama Kelembagaan	1,200,000,000	1,168,574,612	97.38
		3). Jumlah Unit Rumah yang Diverifikasi Permohonan Bantuan Pembiayaan	500,000,000	446,055,686	89.21
2	Layanan bidang perencanaan, tata laksana, dan pelaporan	1). Jumlah Dokumen Rencana Kerja Anggaran	590,369,000	563,319,650	95.42
		2). Jumlah Rekonsiliasi LJK	2,546,690,000	2,498,864,051	98.12
		3). Jumlah Laporan Keuangan	604,600,000	567,969,584	93.94
		4). Jumlah Laporan Kinerja	140,852,000	116,394,000	82.64
3	Layanan teknologi informasi, data, dan pemantauan evaluasi	1). Jumlah Laporan Pemeliharaan dan Pendayagunaan Database	1,000,000,000	799,075,025	79.91
		2). Jumlah Laporan Layanan Teknologi Informasi	2,600,000,000	2,582,738,300	99.34
		3). Jumlah Laporan Pemantauan dan Evaluasi Penyaluran Bantuan	2,100,000,000	1,296,432,696	61.73
4	Layanan internal kelembagaan	1). Jumlah Laporan Pengelolaan Sumber Daya Manusia (SDM)	1,504,140,000	1,402,068,100	93.21
		2). Jumlah Laporan Publikasi dan Kehumasan	3,019,843,000	2,872,338,138	95.12
		3). Jumlah Laporan Pengelolaan Aset BLU	215,760,000	167,736,000	77.74
		4). Jumlah Laporan Layanan Bidang Hukum dan Kepatuhan	260,492,000	231,274,700	88.78
5	Pengawasan internal dan pembinaan manajemen	1). Jumlah Laporan Penyelenggaraan Pengawasan Internal	263,740,000	227,103,000	86.11
		2). Jumlah Laporan Penyelenggaraan Pembinaan Manajemen	726,348,000	605,541,347	83.37
6	Layanan sarana dan prasarana internal	1). Pengadaan Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi	6,828,415,000	6,749,575,000	98.85

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja		Pagu Anggaran Tahun 2020 (Rp.)	Realisasi Anggaran (Rp.)	Capaian (%)
		2)	Pengadaan Peralatan dan Fasilitas Perkantoran	16,200,000	14,102,000	87.05
7	Layanan perkantoran	1)	Gaji dan Tunjangan	24,313,727,000	24,275,326,754	99.84
		2)	Operasional dan Pemeliharaan Kantor	20,722,348,000	19,311,824,853	93.19
Total				71.953.524.000	68.673.498.238	95.44

B. Pengelolaan Dana Bergulir dan Pengembalian Pokok.

Sesuai Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2019 tentang APBN TA 2020, dialokasikan anggaran FLPP sejumlah Rp 9.000.000.000.000,- dengan target yang tercantum pada DIPA sebanyak 102.500 unit KPR Sejahtera. Anggaran dana FLPP yang tersedia pada tahun 2020 adalah Rp. 11.000.000.000.000,- yang terdiri dari DIPA sebesar Rp 9.000.000.000.000,- dan proyeksi pengembalian pokok sebesar Rp. 2.000.000.000.000,- Jumlah dana tersebut ditargetkan dapat membiayai bantuan perumahan untuk 102.500 unit KPR Sejahtera.

Realisasi penyaluran dana FLPP sampai dengan 31 Desember 2020 sebanyak 109.253 unit dari target 102.500 atau mencapai 106,59% dengan nilai FLPP sebesar Rp 11.231.193.635.691,- dari proyeksi pendanaan sebesar Rp. 11.000.000.000.000,- atau mencapai 102,10% dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 4.11.
Realisasi Anggaran Dana Investasi PPDPP Tahun 2020 (BA.999.03)

No.	Sasaran Kegiatan	Pagu Anggaran Tahun 2020 (Rp.)	Realisasi Anggaran (Rp.)	Capaian (%)
Pengelolaan Dana Bergulir dan Pengembalian Pokok				
1	Bantuan Pembiayaan Perumahan ke Bank Pelaksana untuk rumah tangga berpenghasilan rendah yang berasal dari DIPA TA 2020	11.000.000.000.000	11.231.193.635.691	106,59
2	Bantuan Pembiayaan Perumahan yang berasal dari Proyeksi pengembalian pokok yang diterima sampai dengan akhir tahun 2020			

Tabel 4.12.
Realisasi Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP)
berdasarkan Provinsi Tahun 2020

NO	PROVINSI	REALISASI S.D DESEMBER 2020		%
		UNIT	NILAI FLPP	
1	JAWA BARAT	25,489	2,687,041,134,620	23.33
2	JAWA TIMUR	7,860	766,289,677,110	7.19
3	SULAWESI SELATAN	7,162	746,876,242,950	6.56
4	SUMATERA UTARA	6,547	633,288,040,491	5.99
5	KALIMANTAN BARAT	5,541	585,696,807,000	5.07
6	SUMATERA SELATAN	5,840	574,185,575,409	5.35
7	JAWA TENGAH	5,950	573,700,893,959	5.45
8	BANTEN	5,170	535,225,536,128	4.73
9	KALIMANTAN SELATAN	4,784	506,212,780,380	4.38
10	RIAU	4,455	425,482,057,500	4.08
11	JAMBI	3,786	372,634,753,960	3.47
12	NUSA TENGGARA BARAT	2,954	334,242,097,001	2.70
13	KALIMANTAN TENGAH	2,336	249,585,720,075	2.14
14	LAMPUNG	2,465	240,979,831,491	2.26
15	SUMATERA BARAT	2,248	220,257,912,000	2.06
16	SULAWESI TENGGARA	1,832	191,239,182,492	1.68
17	SULAWESI UTARA	1,749	181,228,402,500	1.60
18	KALIMANTAN TIMUR	1,463	158,542,078,560	1.34
19	KEPULAUAN RIAU	1,498	151,095,498,750	1.37
20	ACEH	1,368	134,379,541,500	1.25
21	KEPULAUAN BANGKA BELITUNG	1,237	128,832,269,250	1.13
22	PAPUA	829	122,035,587,000	0.76
23	SULAWESI BARAT	1,162	120,196,383,750	1.06
24	BENGKULU	1,198	110,384,583,750	1.10
25	SULAWESI TENGAH	1,048	108,719,072,250	0.96
26	NUSA TENGGARA TIMUR	755	85,393,357,875	0.69
27	GORONTALO	679	72,623,871,750	0.62
28	PAPUA BARAT	480	69,422,621,250	0.44
29	BALI	627	68,639,198,250	0.57

30	KALIMANTAN UTARA	280	29,874,896,940	0.26
31	DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA	275	26,363,235,750	0.25
32	MALUKU UTARA	96	10,168,181,250	0.09
33	DKI JAKARTA	43	5,214,830,250	0.04
34	MALUKU	47	5,141,782,500	0.04
TOTAL		109,253	11,231,193,635,691	100.00

Kinerja FLPP Tahun 2020 per 31 Desember 2020 berdasarkan sebaran per provinsi diperoleh lima provinsi dengan sebaran FLPP tertinggi yaitu provinsi Jawa Barat sebanyak 25.489 unit (23,33%), provinsi Jawa Timur sebanyak 7.860 unit (7,19%), Sulawesi Selatan 7.162 unit (6,56%), provinsi Sumatera Utara sebanyak 6.547 unit (5,99%), dan provinsi Kalimantan Barat sebanyak 5.541 unit (5,07%). Sebaran realisasi tersebut menunjukkan bahwa 5 (lima) provinsi tersebut merupakan pangsa pasar terbesar dalam penyaluran dana FLPP. Sedangkan realisasi terkecil dalam sebaran yaitu provinsi DKI Jakarta sebanyak 43 unit (0,04%).

Tabel 4.13.
Realisasi Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP)
berdasarkan Bank Pelaksana Tahun 2020

NO	BANK PELAKSANA	REALISASI S.D DESEMBER 2020		%
		UNIT	NILAI FLPP	
1	BTN	41,773	4,241,178,859,104	38.24
2	BNI	14,582	1,519,912,274,127	13.35
3	BRI SYARIAH	11,959	1,226,186,704,371	10.95
4	BTN SYARIAH	6,818	667,628,961,750	6.24
5	BANK BJB	5,386	563,340,602,146	4.93
6	BRI	4,959	531,891,142,800	4.54
7	MANDIRI	2,887	291,014,078,542	2.64
8	BPD NTB	1,685	192,509,130,000	1.54
9	ARTHA GRAHA	1,629	169,485,642,000	1.49
10	BPD KALBAR	1,503	160,859,017,500	1.38
11	BPD SUMSEL BABEL	1,470	149,444,287,500	1.35
12	BPD JATIM SYARIAH	1,355	134,429,737,500	1.24
13	BPD JAMBI	1,290	128,976,237,226	1.18
14	BANK SULSELBAR	1,150	120,867,318,750	1.05
15	BPD SUMUT SYARIAH	908	89,277,900,000	0.83
16	BPD NAGARI	847	83,053,481,250	0.78
17	BANK SULSELBAR SYARIAH	777	80,655,438,750	0.71

18	BPD ACEH	732	73,162,263,750	0.67
19	BANK BJB SYARIAH	670	71,727,442,500	0.61
20	BPD KALSEL SYARIAH	632	67,515,431,250	0.58
21	BNI SYARIAH	586	64,359,054,375	0.54
22	BPD KALSEL	576	63,614,692,500	0.53
23	BPD PAPUA	372	55,721,344,500	0.34
24	BRI AGRO	521	51,956,831,250	0.48
25	BPD NTT	421	47,860,323,750	0.39
26	BPD SUMUT	464	44,037,198,750	0.42
27	BPD SUMSELBABEL SYARIAH	420	42,944,943,750	0.38
28	BPD KALTIM	354	39,600,928,500	0.32
29	BPD JATIM	315	31,700,962,500	0.29
30	BPD SULTENG	278	29,330,737,500	0.25
31	BPD RIAU KEPRI	305	29,241,900,000	0.28
32	BPD KALTENG	266	28,778,426,250	0.24
33	BPD JAMBI SYARIAH	232	23,699,531,250	0.21
34	BPD NAGARI SYARIAH	217	21,489,187,500	0.20
35	BPD RIAU KEPRI SYARIAH	214	21,437,887,500	0.20
36	BPD JATENG SYARIAH	164	16,038,243,750	0.15
37	BPD JATENG	160	15,915,993,750	0.15
38	BPD KALBAR SYARIAH	128	13,652,475,000	0.12
39	BPD DIY	100	10,464,750,000	0.09
40	BANK SULUTGO	92	10,221,135,000	0.08
41	BANK KEB HANA	33	3,259,762,500	0.03
42	BANK DKI	23	2,751,375,000	0.02
TOTAL		109,253	11,231,193,635,691	100.00

Kinerja FLPP Tahun 2020 per 31 Desember 2020 berdasarkan bank pelaksana diperoleh lima bank dengan kinerja penyaluran FLPP tertinggi yaitu Bank BTN sebanyak 41.773 unit (38,24%), Bank BNI sebanyak 14.582 unit (13,35%), Bank BRI Syariah 11.959 unit (10,95%), Bank BTN Syariah sebanyak 6.818 unit (6,24%), dan Bank BJB sebanyak 5.386 unit (4,93%). Sebaran realisasi tersebut menunjukkan bahwa 5 (lima) bank tersebut merupakan mitra penyalur FLPP tertinggi. Sedangkan realisasi penyaluran FLPP terkecil yaitu Bank DKI sebanyak 23 unit (0,02%).

4.4. Evaluasi Pencapaian Kinerja.

Penilaian Kinerja dilakukan setiap tahun di lingkungan kerja Pusat Pengelolaan Dana Pembiayaan Perumahan. Evaluasi pencapaian kinerja dilakukan berdasarkan data indikator kinerja yang tertuang dalam Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LaKIP) BLU PPDPP. Sedangkan evaluasi pencapaian kinerja berdasarkan Renstra BLU PPDPP tidak ada data monitoring, tracking dan pencapaiannya. Untuk tahun 2020, penilaian kinerja BLU PPDPP didasarkan pada Renstra BLU PPDPP 2020-2024.

Evaluasi pencapaian kinerja BLU PPDPP sebaiknya mencakup hasil cascading dari Kementerian PUPR yang berasal dari Strategi Nasional. Dan juga mengakomodir hasil Rencana Strategi Bisnis BLU PPDPP. Sehingga seluruh perspective (financial perspective, customer perspective, internal business process perspective, dan learning and growth perspective) untuk pelaksanaan program kerja dan penetapan indikator dan target kinerja dapat terukur, dalam rangka mencapai tujuan strategis organisasi.

Untuk menggambarkan pencapaian kinerja BLU PPDPP di tahun 2020, maka berikut ini adalah tabel Hasil Kinerja Dukungan Penyaluran Bantuan Pembiayaan Perumahan tahun 2020:

Tabel 4.13.
Kinerja Dukungan Penyaluran Bantuan Pembiayaan Perumahan
Tahun 2020

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja		Pencapaian Kinerja 2020			
				Satuan	Target	Realisasi	%
Dukungan Penyaluran Bantuan Pembiayaan Perumahan							
1	Layanan Promosi. Kerjasama, dan Verifikasi	1	Jumlah Laporan Promosi dan Sosialisasi	Laporan	2	2	100
		2	Jumlah Dokumen Kerjasama Kelembagaan	Lembaga	30	46	153,33
		3	Jumlah Unit Rumah yang Diverifikasi Permohonan Bantuan Pembiayaan	Rumah Tangga	102.500	109.253	106,59
2	Layanan Bidang Perencanaan,	4	Jumlah Dokumen Rencana Kerja	Dokumen	3	3	100

	Tata Laksana, dan Pelaporan		Anggaran				
		5	Jumlah Rekonsiliasi LJK	Lembaga	40	45	112,5
		6	Jumlah Laporan Keuangan	Laporan	32	33	103,1
		7	Jumlah Laporan Kinerja	Laporan	13	13	100
3	Layanan Teknologi Informasi, Data, dan Pemantauan Evaluasi	8	Jumlah Laporan Pemeliharaan dan Pendayagunaan Database	Laporan	3	3	100
		9	Jumlah Laporan Layanan Teknologi Informasi	Laporan	1	1	100
		10	Jumlah Laporan Pemantauan dan Evaluasi Penyaluran Bantuan	Laporan	1	1	100
4	Layanan Internal Kelembagaan	11	Jumlah Laporan Pengelolaan SDM	Laporan	3	3	100
		12	Jumlah Laporan Publikasi dan Humas	Laporan	3	3	100
		13	Jumlah Laporan Pengelolaan Aset BLU	Laporan	3	3	100
		14	Jumlah Laporan Layanan Bidang Hukum dan Kepatuhan	Laporan	1	1	100
5	Pengawasan Internal dan Pembinaan Manajemen	15	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Pengawasan Internal	Laporan	24	31	129,16
		16	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Pembinaan Manajemen	Laporan	2	2	100
	Total Rata-rata						109,67

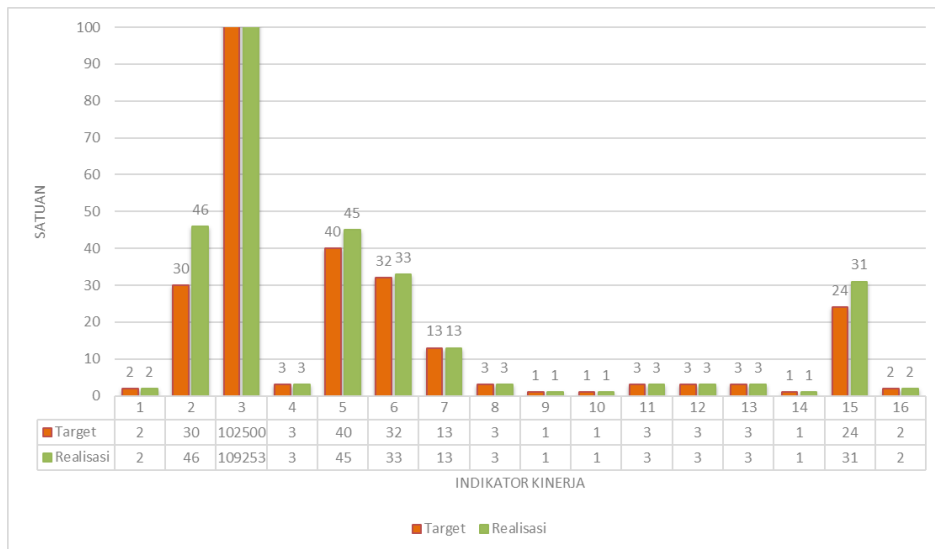
Berdasarkan tabel diatas terdapat 16 indikator kinerja yang terkait dengan Dukungan Penyaluran Bantuan Pembiayaan Perumahan Tahun 2020, yaitu sebagai berikut:

1. Jumlah laporan promosi dan sosialisasi;
2. Jumlah dokumen kerjasama kelembagaan;

3. Jumlah unit rumah yang diverifikasi permohonan bantuan pembiayaan;
4. Jumlah dokumen rencana kerja anggaran;
5. Jumlah rekonsiliasi LJK;
6. Jumlah laporan keuangan;
7. Jumlah laporan kinerja;
8. Jumlah laporan pemeliharaan dan pendayagunaan database;
9. Jumlah laporan layanan teknologi informasi;
10. Jumlah laporan pemantauan dan evaluasi penyaluran bantuan;
11. Jumlah laporan pengelolaan SDM;
12. Jumlah laporan publikasi dan kehumasan;
13. Jumlah laporan pengelolaan asset BLU;
14. Jumlah laporan layanan bidang hukum dan kepatuhan;
15. Jumlah laporan penyelenggaraan pengawasan internal;
16. Jumlah laporan penyelenggaraan pembinaan manajemen.

Target, realisasi dan persentase pencapaian dari 16 Indikator Kinerja Dukungan Penyaluran Bantuan Pembiayaan Perumahan Tahun 2020, dapat dilihat pada Grafik yang terdapat pada Gambar 4.1 berikut:

Gambar 4.1
Persentase Kinerja Dukungan Penyaluran Bantuan Pembiayaan
Perumahan Tahun 2020.



*batas maksimal satuan dalam grafik adalah 100

Capaian indikator di tahun 2020 hampir seluruh indikator mencapai 100% bahkan untuk aspek indikator Jumlah LJK yang bekerjasama dengan PPDPP mencapai 153,33% jauh

melampaui capaian di tahun 2019 yang hanya mencapai 100%. Hal ini menjadi kebanggaan tersendiri bagi PPDPP mengingat memasuki pertengahan Maret 2020 tepatnya tanggal 19 Maret PPDPP mulai memberlakukan sistem kerja *Work From Home* (WFH) bagi seluruh pejabat dan pegawai dikarenakan adanya pandemi Covid-19. Bahkan sejak diberlakukan sistem WFH sampai dengan akhir tahun 2020 PPDPP masih memberlakukan sistem kerja WFH dan *Work from Office* (WFO) dengan kapasitas pejabat dan pegawai yang masuk hanya diperbolehkan maksimal 25% dari total keseluruhan pegawai. Namun pemberlakuan sistem kerja yang berbeda ini tidak membuat produktivitas dan kinerja PPDPP menjadi menurun. Setiap pagi dan sore hari PPDPP mengadakan zoom meeting yang melibatkan seluruh pejabat dan pegawai PPDPP dan bersifat wajib karena dianggap sebagai pengganti absen kehadiran pagi dan sore hari. Zoom dilakukan sebagai upaya agar koordinasi antar seluruh pejabat dan pegawai tetap dapat terlaksana dengan baik walaupun melakukan pekerjaan secara WFH.

Berikut dibawah ini adalah tabel Kinerja Pengelolaan Dana Bergulir dan Pengembalian Pokok Tahun 2020.

Tabel 4.14.
Pengelolaan Dana Bergulir dan Pengembalian Pokok Tahun 2020.

No	Indikator Kinerja	Satuan	Capaian Kinerja 2020		
			Target Porsi	Realisasi	%
Pengelolaan Dana Bergulir dan Pengembalian Pokok					
1	Bantuan Pembiayaan Perumahan ke Bank Pelaksana untuk rumah tangga berpenghasilan rendah yang berasal dari DIPA TA 2020	Rumah Tangga	102.500	109.253	106,59
2	Bantuan Pembiayaan Perumahan yang berasal dari Proyeksi pengembalian pokok yang diterima sampai dengan akhir tahun 2020				
	TOTAL		102.500	109.253	106,59

Pada tahun 2020 PPDPP menargetkan 102.500 rumah tangga masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) untuk bisa mendapatkan bantuan pembiayaan perumahan. Dengan telah diluncurkan nya beberapa aplikasi berbasis digital yang dapat memudahkan proses penyaluran bantuan perumahan seperti aplikasi SiKasep dimana hanya dalam satu genggaman MBR dapat memilih sendiri lokasi perumahan dan bank penyalur yang

diinginkan tanpa harus datang ke perbankan, dan MBR juga dapat mengetahui status pengajuan permohonannya. Aplikasi SiKumbang juga hadir untuk menjembatani komunikasi antara MBR dengan pengembang, melalui aplikasi ini MBR dapat memilih pengembang untuk pilihan rumah subsidi yang diinginkan. Aplikasi SiPetrak juga hadir untuk memastikan bahan-bahan yang digunakan dalam pembangunan rumah subsidi sesuai dengan ketentuan Pemerintah. Peningkatan pencapaian kinerja disebabkan meningkatnya alokasi DIPA dan proyeksi pengembalian pokok didukung dengan berbagai aplikasi digital yang memudahkan proses penyaluran bantuan perumahan kepada MBR. Hal ini menegaskan kembali bahwa adanya pandemic covid-19 di tahun 2020 tidak menjadi halangan bagi PPDPP untuk terus bekerja dengan baik dan efektif.

Tabel 4.17.
Analisis Pencapaian Kinerja dan Keuangan BLU PPDPP
Tahun 2019-2020.

No	Periode (Tahun).	Analisis Kinerja Dukungan Penyaluran Bantuan Pembiayaan Perumahan.	Analisis Kinerja Keuangan.	Isu/Permasalahan.	Tindak Lanjut.
I.	2020.	<p>Rata rata pencapaian kinerja Dukungan Penyaluran Bantuan Pembiayaan Perumahan di tahun 2020 adalah memuaskan dengan nilai 109,67%.</p> <p>Rincian pencapaian tiap indikator kinerja Dukungan Penyaluran Bantuan Pembiayaan Perumahan seluruhnya termasuk kategori memuaskan ($\geq 90\%$),</p>	<p>Pencapaian Realisasi Anggaran Operasional di tahun 2020 sebesar 95,44%. Capaian ini melebihi capaian rata-rata nasional sebesar 92%. Capaian ini masuk dalam kategori memuaskan.</p> <p>Rincian pencapaian tiap indikator kinerja memuaskan, dengan indikator kinerja memuaskan (rata-rata diatas 95%)</p>	<p>Pada tahun 2020 BLU PPDPP menargetkan jumlah rumah tangga yang mendapatkan verifikasi permohonan bantuan pembiayaan FLPP adalah sejumlah 102.500 rumah tangga. Untuk dapat mencapai target tersebut, PPDPP menggunakan dana DIPA FLPP yang digulirkan oleh Kementerian Keuangan sebesar 9 Triliun ditambah dengan proyeksi pengembalian pokok sebesar 2 Triliun sehingga alokasi dana untuk penyaluran FLPP Tahun 2020 adalah 11 Triliun</p> <p>Memasuki minggu ketiga bulan Maret 2020 dikarenakan pandemi covid-19 yang melanda Indonesia, PPDPP memberlakukan sistem kerja WFH dan di bulan-bulan berikutnya sepanjang tahun 2020 juga diberlakukan sistem kerja WFO dengan kapasitas maksimal</p>	<p>Adanya pandemi covid-19 tidak mempengaruhi produktivitas kinerja PPDPP secara keseluruhan. Tugas dan fungsi utama PPDPP yaitu menyalurkan dana FLPP masih dapat terlaksana dengan baik dan sesuai target bahkan melebihi walaupun sebagian besar operasional dikerjakan secara WFH.</p> <p>PPDPP mengadakan zoom pagi dan sore bagi pejabat dan pegawai sebagai pengganti absen kehadiran.</p>

				25% dari total pegawai. Hal ini mengharuskan PPDPP merubah pelaksanaan kegiatan yang terjadwal dilakukan secara offline dialihkan menjadi online melalui aplikasi zoom meeting	
		Pencapaian Kinerja Pengelolaan Dana Bergulir dan Pengembalian Pokok Tahun 2020 adalah sangat memuaskan dengan nilai 106,59%.	Pencapaian Realisasi Anggaran Dana Investasi di tahun 2020 adalah memuaskan dengan nilai 106,59%		
2.	2019	<p>Rata rata pencapaian kinerja Dukungan Penyaluran Bantuan Pembiayaan Perumahan di tahun 2019 adalah memuaskan dengan nilai 101,25%.</p> <p>Rincian pencapaian tiap indikator kinerja termasuk kategori memuaskan ($\geq 90\%$), tetapi ada satu indikator kinerja memiliki nilai pencapaian kurang memuaskan (70% - 90%) yaitu:</p> <p>Jumlah lembaga yang bekerja Sama dengan Pusat Pengelola Dana Bantuan Pembiayaan Perumahan (BLU).</p> <p>Pencapaian Kinerja Pengelolaan Dana Bergulir dan Pengembalian Pokok Tahun 2019 adalah sangat memuaskan dengan nilai 105.63%.</p>	<p>Pencapaian Realisasi Anggaran Operasional di tahun 2019 sebesar 98%. Capaian ini melebihi capaian rata-rata nasional sebesar 92%. Capaian ini masuk dalam kategori memuaskan.</p> <p>Rincian pencapaian tiap indikator kinerja memuaskan, dengan indikator kinerja memuaskan (rata-rata diatas 95%):</p> <ul style="list-style-type: none"> Jumlah laporan pelaksanaan promosi dan sosialisasi. Jumlah laporan keuangan kinerja PPDPP. Jumlah dokumen pemeliharaan database dan teknologi informasi yang terintegrasi. Jumlah layanan perkantoran. <p>Rincian pencapaian indikator kinerja dengan nilai pencapaian tidak memuaskan ($\leq 70\%$) adalah:</p> <ul style="list-style-type: none"> Jumlah dokumen perencanaan anggaran Pusat Pengelola Dana Bantuan Pembiayaan Perumahan (BLU). Jumlah dokumen legal dan bantuan hukum. Jumlah laporan keuangan kinerja PPDPP. Jumlah verifikasi permohonan pencairan dana dari LJK. Jumlah dokumen publikasi kegiatan Pusat Pengelola Dana Bantuan Pembiayaan Perumahan (BLU). Jumlah dokumen BMN. Jumlah dokumen evaluasi 	<p>Pada bulan Oktober 2019 telah dilakukan penyesuaian besaran pemanfaatan dana yang bersumber dari pengembalian pokok, yaitu yang semula sebesar Rp 1,9 triliun menjadi Rp2,4 triliun. Dengan demikian plafon anggaran FLPP tahun 2019 adalah semula sebesar Rp 7,6 triliun dari sebelumnya menjadi 7,1 triliun dengan adanya tambahan pemanfaatan dana pengembalian pokok, maka target penyaluran KPR Sejahtera FLPP yang semula 68.858 unit menjadi 73.858 unit.</p>	

			kinerja.		
			Layanan Internal.		
			Pencapaian Realisasi Anggaran Dana Investasi di tahun 2019 adalah memuaskan dengan nilai 99.07.		

BAB 5

P E N U T U P

Laporan Kinerja BLU Pusat Pengelolaan Dana Pembiayaan Perumahan (PPDPP) Tahun 2020 disusun sebagai salah satu dokumen pertanggungjawaban di akhir tahun anggaran sehingga tujuan penyusunan laporan kinerja diharapkan mencerminkan kinerja BLU PPDPP di Tahun 2020.

Berbagai upaya yang ditempuh adalah dalam rangka mewujudkan rencana kinerja yang telah ditetapkan guna mewujudkan target pencapaian yang diamanatkan dan menjadi tugas serta tanggung jawab BLU PPDPP dan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.



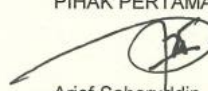
Rencana Strategis Bisnis Kementerian Pekerjaan Umum dan Rencana Bisnis dan Anggaran (RBA) BLU PPDPP merupakan rencana kerja dalam rentang waktu lima tahunan telah diimplementasikan pada rencana kerja tahunan dan dikemas dalam kontrak kinerja. Kegiatan-kegiatan yang telah dilakukan sebagai upaya mewujudkan visi dan misi unit kerja BLU PPDPP dalam rangka mendukung penyaluran pembiayaan perumahan dalam hal ini adalah kredit kepemilikan rumah Fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan bagi masyarakat berpenghasilan rendah (KPR FLPP) dengan capaian kinerja penyaluran diatas 100%. Namun demikian, cukup banyak pekerjaan internal yang harus dibenahi oleh PPDPP terkait dengan penataan kelembagaan jika PPDPP tidak lagi menyalurkan FLPP atau sebagai FLPP, penataan sumber daya manusia agar tercipta the right man and the right place, proses bisnis yang terintergrasi sehingga timbul sinergi diantara unit-unit kerja dalam tubuh PPDPP. Sementara itu dari sisi pelaporan kinerja PPDPP harus meningkatkan konsolidasi dalam hal penyusunan laporan melalui pelaporan bulan dan triwulanan dalam rangka inventaris dan validasi pelaporan kinerja melalui penyusunan pelaporan berkala untuk memudahkan validasi data laporan kinerja tahunan.

Dengan demikian, optimalisasi kegiatan dalam rencana kerja dapat menjadi daya ungkit pencapaian kinerja penyaluran dan pengelolaan dana untuk memberikan akses kepada masyarakat agar memiliki rumah yang layak huni melalui KPR Sejahtera FLPP dan upaya memastikan ketepatan sasaran penerima bantuan serta peningkatan kualitas rumah MBR.

Akhir kata, laporan kinerja ini diharapkan bisa menjadi sumber informasi dalam pengambilan keputusan guna peningkatan kinerja Badan Layanan Umum Pusat Pengelolaan Dana Pembiayaan Perumahan di tahun-tahun mendatang.

LAMPIRAN

Kontrak Kinerja DJBP Kemenkeu Dengan Dirut PPDPP Kementerian PUPR TA 2020

KONTRAK KINERJA			
ANTARA			
			
DIREKTUR JENDERAL PERBENDAHARAAN KEMENTERIAN KEUANGAN		DENGAN DIREKTUR UTAMA PUSAT PENGELOLAAN DANA PEMBIAYAAN PERUMAHAN KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT TAHUN 2020	
Nomor : PRJ-88 /PB/2020 Nomor : HK 0203-PG/ 895			
Dalam rangka mewujudkan tujuan Badan Layanan Umum yang efektif, transparan, akuntabel, serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini:			
1. Nama : Arief Sabaruddin Jabatan : Direktur Utama Pusat Pengelolaan Dana Pembiayaan Perumahan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat selanjutnya disebut sebagai PIHAK PERTAMA			
2. Nama : Andin Hadiyanto Jabatan : Direktur Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Menteri Keuangan selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA			
bersepakat bahwa untuk mencapai tujuan dimaksud, ditetapkan kontrak kinerja dengan ketentuan:			
1. PIHAK PERTAMA menyatakan kesanggupan untuk mencapai target pada Indikator Kinerja Utama sebagai berikut:			
No.	Sasaran Strategis	Uraian Indikator Kinerja Utama	Target
1.	Pemantauan Ketepatan Sasaran Penyaluran FLPP	Persentase rumah yang dihuni MBR setelah 1 (satu) tahun sejak penandatanganan akad	100%
2.	Penyaluran Dana Kelolaan	Realisasi jumlah dana kelolaan tersalurkan kepada MBR dalam bentuk KPR FLPP dalam unit rumah	102.500 unit
3.	Penguatan Proses Bisnis	Persentase jumlah MBR yang mendaftar dan menerima KPR FLPP melalui Aplikasi Sikasep	50%
4.	Peningkatan PNPB	Persentase Realisasi PNPB BLU	100%
5.	Peningkatan Pengelolaan Badan Layanan Umum yang Berkesinambungan	Persentase penyelesaian rekomendasi hasil monitoring dan evaluasi dari Direktorat Pembinaan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum secara tepat waktu yang memadai dan sesuai dengan ketentuan	85%
6.	Pengembangan Infrastruktur Teknologi Informasi	Persentase penyelesaian modernisasi pengelolaan BLU	100%
2. PIHAK PERTAMA bersedia menerima konsekuensi atas capaian dari target kinerja tersebut.			
3. PIHAK KEDUA akan melakukan reviu dan evaluasi atas capaian kinerja dan dipergunakan sebagai pertimbangan pemberian remunerasi.			
PIHAK KEDUA,  Andin Hadiyanto		Jakarta, 18 Maret 2020 PIHAK PERTAMA,  Arief Sabaruddin	

LAMPIRAN
KONTRAK KINERJA DIREKTUR JENDERAL
PERBENDAHARAAN KEMENTERIAN KEUANGAN
DAN DIREKTUR UTAMA PUSAT PENGELOLAAN
DANA PEMBIAYAAN PERUMAHAN
KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN
PERUMAHAN RAKYAT TAHUN 2020

MANUAL INDIKATOR KINERJA UTAMA Pusat Pengelolaan Dana Pembiayaan Perumahan

1. Persentase rumah yang dihuni MBR setelah 1 (satu) tahun sejak penandatanganan akad

Sasaran Strategis	:	Pencapaian Ketepatan Sasaran Penyaluran FLPP
Indikator Kinerja Utama	:	Persentase rumah yang dihuni MBR setelah 1 (satu) tahun sejak penandatanganan akad
Deskripsi	:	Pemantauan pemanfaatan Rumah Sejahtera yang dihuni MBR setelah 1 (satu) tahun sejak penandatanganan akad, merupakan bagian dari jumlah rumah yang perlu dipastikan tingkat huniannya, untuk mengupayakan dan menguji ketepatan penyaluran FLPP.
Formula	:	<p>Persentase rumah yang dihuni MBR setelah 1 (satu) tahun sejak penandatanganan akad = <i>Persentase Tingkat Hunian Rumah + Capaian Kinerja Tambahan</i></p> <p>Persentase Tingkat Hunian Rumah dihitung dengan formula sebagai berikut:</p> $\frac{(\Sigma \text{Rumah yang dihuni}) + (\Sigma \text{Koreksi})}{\Sigma \text{Target rumah yang akan dipantau}} \times 100 \%$ <ol style="list-style-type: none"> Jumlah Rumah yang Dihuni: adalah rumah yang digunakan dan dihuni oleh MBR penerima FLPP, dengan kriteria penghunian sesuai ketentuan dalam peraturan perundang-undangan mengenai petunjuk pelaksanaan FLPP. Jumlah Target Rumah yang akan Dipantau: adalah jumlah target unit Rumah Sejahtera yang akan dipantau selama tahun 2020, yaitu sejumlah 51.500 unit rumah atau 17,5% dari Realisasi FLPP dalam 5 (lima) tahun terakhir (tahun 2015 s.d. 2019). Jumlah Koreksi terdiri dari: <ol style="list-style-type: none"> Jumlah rumah yang sedang dalam tahap konfirmasi oleh Bank Pelaksana, dan; Jumlah rumah yang dihentikan pembiayaannya melalui FLPP, atas perintah Bank Pelaksana; sesuai dengan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan mengenai petunjuk pelaksanaan FLPP.
Tujuan	:	IKU ini bertujuan untuk mendorong BLU PPDPP melaksanakan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan mengenai petunjuk pelaksanaan FLPP, sehingga dana FLPP yang disalurkan kepada MBR (penerima KPR Sejahtera) dapat tepat sasaran.
Satuan Pengukuran	:	Persen (%)

Jenis Konsolidasi Periode	: Take last known value																				
Polarisasi Indikator Kinerja	: Maximize (semakin tinggi capaian semakin baik)																				
Periode Pelaporan	: Tahunan																				
Sumber Data	: Laporan Hasil Pemantauan dan Evaluasi Pemanfaatan Rumah Sejahtera, Laporan Hasil Koreksi, serangkaian SOP terkait pengelolaan FLPP, Hasil Evaluasi Bank Pelaksana, Laporan Keuangan																				
Skala Penilaian	<p>Pengukuran Capaian Kinerja terkait Persentase Tingkat Hunian Rumah sebagai berikut:</p> <table><thead><tr><th>Kategori Persentase Tingkat Hunian Rumah (PTKH)</th><th>Capaian Kinerja (%)</th></tr></thead><tbody><tr><td>PTKH < 100%</td><td>Sesuai % dari target</td></tr><tr><td>PTKH = 100%</td><td>100 %</td></tr></tbody></table> <p>Capaian Kinerja Tambahan dapat diberikan, dalam hal terpenuhi indikator sebagai berikut:</p> <table><thead><tr><th>Uraian</th><th>Kriteria</th><th>Tambahan Capaian Kinerja (%)</th></tr></thead><tbody><tr><td rowspan="2">BLU PPDPP dapat menyusun dan menerapkan pemantauan ketepatan sasaran penyaluran FLPP berbasis Teknologi Informasi</td><td>s.d. 30 Juni 2020</td><td>20%</td></tr><tr><td>s.d. 31 Desember 2020</td><td>10%</td></tr><tr><td>Pemberian peringatan dan/atau sanksi kepada Bank Pelaksana atas Penyaluran FLPP yang tidak tepat sasaran</td><td>s.d. 31 Desember 2020</td><td>10%</td></tr><tr><td>BLU PPDPP telah menerima kembali dari bank pelaksana seluruh dana FLPP yang disalurkan dikurangi angsuran pengembalian pokok sesuai ketentuan peraturan perundangan, dalam hal kelompok sasaran memberikan pernyataan tidak benar atau tidak melaksanakan kewajiban sehingga penyaluran FLPP menjadi tidak tepat sasaran</td><td>s.d. 31 Desember 2020</td><td>20%</td></tr></tbody></table> <p>Capaian maksimal untuk IKU ini adalah 150%.</p>	Kategori Persentase Tingkat Hunian Rumah (PTKH)	Capaian Kinerja (%)	PTKH < 100%	Sesuai % dari target	PTKH = 100%	100 %	Uraian	Kriteria	Tambahan Capaian Kinerja (%)	BLU PPDPP dapat menyusun dan menerapkan pemantauan ketepatan sasaran penyaluran FLPP berbasis Teknologi Informasi	s.d. 30 Juni 2020	20%	s.d. 31 Desember 2020	10%	Pemberian peringatan dan/atau sanksi kepada Bank Pelaksana atas Penyaluran FLPP yang tidak tepat sasaran	s.d. 31 Desember 2020	10%	BLU PPDPP telah menerima kembali dari bank pelaksana seluruh dana FLPP yang disalurkan dikurangi angsuran pengembalian pokok sesuai ketentuan peraturan perundangan, dalam hal kelompok sasaran memberikan pernyataan tidak benar atau tidak melaksanakan kewajiban sehingga penyaluran FLPP menjadi tidak tepat sasaran	s.d. 31 Desember 2020	20%
Kategori Persentase Tingkat Hunian Rumah (PTKH)	Capaian Kinerja (%)																				
PTKH < 100%	Sesuai % dari target																				
PTKH = 100%	100 %																				
Uraian	Kriteria	Tambahan Capaian Kinerja (%)																			
BLU PPDPP dapat menyusun dan menerapkan pemantauan ketepatan sasaran penyaluran FLPP berbasis Teknologi Informasi	s.d. 30 Juni 2020	20%																			
	s.d. 31 Desember 2020	10%																			
Pemberian peringatan dan/atau sanksi kepada Bank Pelaksana atas Penyaluran FLPP yang tidak tepat sasaran	s.d. 31 Desember 2020	10%																			
BLU PPDPP telah menerima kembali dari bank pelaksana seluruh dana FLPP yang disalurkan dikurangi angsuran pengembalian pokok sesuai ketentuan peraturan perundangan, dalam hal kelompok sasaran memberikan pernyataan tidak benar atau tidak melaksanakan kewajiban sehingga penyaluran FLPP menjadi tidak tepat sasaran	s.d. 31 Desember 2020	20%																			

2. Realisasi Jumlah Dana Kelolaan Tersalurkan kepada MBR dalam Bentuk KPR FLPP dalam Unit Rumah

Sasaran Strategis	: Penyaluran Dana Kelolaan
Indikator Kinerja Utama	: Realisasi dana kelolaan tersalurkan kepada MBR dalam bentuk KPR FLPP dalam unit rumah.
Deskripsi	: Realisasi dana kelolaan yang tersalurkan kepada MBR melalui KPR FLPP dalam unit rumah adalah realisasi atas penyaluran FLPP dalam unit rumah, yang dihitung berdasarkan perjanjian kerja sama operasional dengan bank pelaksana dan hasil verifikasi melalui sistem online.

Formula	:	Formula IKU = jumlah realisasi penyaluran dana kelolaan kepada MBR dengan skema KPR FLPP (satuan: unit rumah). Target penyaluran FLPP dalam unit rumah untuk periode 1 Januari 2020 s.d. 31 Desember 2020 adalah 102.500 unit rumah (100%) sesuai dengan target yang tertera dalam Nota Keuangan APBN TA 2020.																		
Tujuan	:	IKU ini bertujuan untuk mendorong BLU PPDPP dalam meningkatkan cakupan penerapan program FLPP sesuai dengan amanat dalam ketentuan peraturan perundang-undangan, dan dapat merealisasikan penyaluran dana kelolaan FLPP kepada MBR dapat terlaksana dengan tepat waktu sesuai dengan SOP dan Standar Pelayanan Minimum.																		
Satuan Pengukuran	:	Unit																		
Jenis Konsolidasi Periode	:	Take Last Known Value																		
Polarisasi Indikator Kinerja	:	Maximize (semakin tinggi capaian semakin baik)																		
Periode Pelaporan	:	Tahunan																		
Sumber Data	:	Data realisasi jumlah unit rumah yang diverifikasi dan diberikan bantuan pembiayaan perumahan KPR FLPP, Laporan Verifikasi, Laporan Penggunaan Dana Kelolaan Bulanan, Laporan Kinerja Tahunan																		
Skala Penilaian	:	<p>Pengukuran Capaian Kinerja terkait Realisasi Dana Kelolaan (dalam unit rumah) sebagai berikut:</p> <table><tr><th>Kriteria Realisasi Dana Kelolaan (unit rumah)</th><th>Capaian Kinerja (%)</th></tr><tr><td>< 102.500 unit rumah</td><td>Sesuai % dari target</td></tr><tr><td>> 102.500 unit rumah</td><td>100 %</td></tr></table> <p>Capaian Kinerja Tambahan dapat diberikan, dalam hal terpenuhi indikator sebagai berikut:</p> <table><tr><th>Uraian</th><th>Kriteria</th><th>Tambahan Capaian Kinerja (%)</th></tr><tr><td>Ketepatan waktu proses penyaluran dana kelolaan FLPP kepada bank pelaksana sesuai dengan SOP berdasarkan standar pelayanan minimum sepanjang tahun 2020</td><td>mencapai 90% dari total jumlah batch penyaluran dana kelolaan</td><td>20%</td></tr><tr><td>Realisasi penyaluran pengembalian pokok dari bank pelaksana</td><td>Lebih besar dari Rp2 triliun</td><td>20%</td></tr><tr><td>Tindak lanjut hasil evaluasi triwulanan selama tahun 2020</td><td>100%</td><td>10%</td></tr></table> <p>Capaian maksimal untuk IKU ini adalah 150%.</p>	Kriteria Realisasi Dana Kelolaan (unit rumah)	Capaian Kinerja (%)	< 102.500 unit rumah	Sesuai % dari target	> 102.500 unit rumah	100 %	Uraian	Kriteria	Tambahan Capaian Kinerja (%)	Ketepatan waktu proses penyaluran dana kelolaan FLPP kepada bank pelaksana sesuai dengan SOP berdasarkan standar pelayanan minimum sepanjang tahun 2020	mencapai 90% dari total jumlah batch penyaluran dana kelolaan	20%	Realisasi penyaluran pengembalian pokok dari bank pelaksana	Lebih besar dari Rp2 triliun	20%	Tindak lanjut hasil evaluasi triwulanan selama tahun 2020	100%	10%
Kriteria Realisasi Dana Kelolaan (unit rumah)	Capaian Kinerja (%)																			
< 102.500 unit rumah	Sesuai % dari target																			
> 102.500 unit rumah	100 %																			
Uraian	Kriteria	Tambahan Capaian Kinerja (%)																		
Ketepatan waktu proses penyaluran dana kelolaan FLPP kepada bank pelaksana sesuai dengan SOP berdasarkan standar pelayanan minimum sepanjang tahun 2020	mencapai 90% dari total jumlah batch penyaluran dana kelolaan	20%																		
Realisasi penyaluran pengembalian pokok dari bank pelaksana	Lebih besar dari Rp2 triliun	20%																		
Tindak lanjut hasil evaluasi triwulanan selama tahun 2020	100%	10%																		

3. Persentase Jumlah MBR yang Mendaftar dan Menerima KPR FLPP Melalui Aplikasi Sikasep

Sasaran Strategis	: Penguatan Proses Bisnis																
Indikator Kinerja Utama	: Persentase penyaluran KPR FLPP melalui Aplikasi Sikasep																
Deskripsi	: Aplikasi Sistem Informasi KPR Subsidi Perumahan (Aplikasi Sikasep) adalah inovasi aplikasi yang dikembangkan oleh BLU PPDPP dalam rangka penguatan proses bisnis. Inovasi proses bisnis dengan memanfaatkan sistem informasi teknologi ini menempatkan Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) sebagai subyek dalam proses penyaluran KPR FLPP.																
Formula	<p>Formula =</p> $\frac{\text{Jumlah Realisasi Penyaluran FLPP Melalui Aplikasi Sikasep}}{\text{Jumlah Realisasi Penyaluran FLPP Tahun 2020}} \times 100\%$ <p>Persentase Realisasi penyaluran FLPP melalui Aplikasi Sikasep pada tahun 2020 dihitung berdasarkan realisasi jumlah penyaluran KPR FLPP bagi MBR yang menggunakan Aplikasi Sikasep pada tahun 2020 dibagi jumlah realisasi penyaluran FLPP tahun 2020.</p>																
Tujuan	: IKU ini bertujuan untuk mendorong BLU PPDPP dalam meningkatkan inovasi penguatan proses bisnis.																
Satuan Pengukuran	: Persen (%)																
Jenis Konsolidasi Periode	: Take Last Known Value																
Polarisasi Indikator Kinerja	: Maximize (semakin tinggi capaian semakin baik)																
Periode Pelaporan	: Tahunan																
Sumber Data	: Laporan Realisasi Penyaluran FLPP, Laporan Kinerja BLU																
Skala Penilaian	<p>Penilaian ketercapaian kinerja atas Persentase Penyaluran FLPP Melalui Aplikasi Sikasep dihitung dengan panduan sebagai berikut:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Capaian Penyaluran FLPP melalui Sikasep (PS)</th><th>Penilaian Capaian</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>PS < 50%</td><td>(Sesuai % dari target) x 100%</td></tr> <tr> <td>PS = 50%</td><td>100%</td></tr> <tr> <td>PS > 50%</td><td>120%</td></tr> </tbody> </table> <p>Tambahan atas pengukuran capaian kinerja dapat diberikan dengan kriteria sebagai berikut:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Kriteria</th><th>Penilaian Tambahan</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Penambahan fitur pada Aplikasi Sikasep sesuai kebutuhan pengguna.</td><td>10%</td></tr> <tr> <td>Hasil Survei Kepuasan Pengguna atas Aplikasi Sikasep adalah "Sangat Baik".</td><td>10%</td></tr> <tr> <td>Penggunaan Aplikasi Sikasep mampu mengelola demand dan supply pembiayaan perumahan dengan baik sehingga tidak ada permintaan tambahan alokasi dana FLPP dari bank mitra sepanjang tahun anggaran 2020.</td><td>10%</td></tr> </tbody> </table> <p>Catatan: maksimal capaian kinerja untuk IKU ini adalah 150%</p>	Capaian Penyaluran FLPP melalui Sikasep (PS)	Penilaian Capaian	PS < 50%	(Sesuai % dari target) x 100%	PS = 50%	100%	PS > 50%	120%	Kriteria	Penilaian Tambahan	Penambahan fitur pada Aplikasi Sikasep sesuai kebutuhan pengguna.	10%	Hasil Survei Kepuasan Pengguna atas Aplikasi Sikasep adalah "Sangat Baik".	10%	Penggunaan Aplikasi Sikasep mampu mengelola demand dan supply pembiayaan perumahan dengan baik sehingga tidak ada permintaan tambahan alokasi dana FLPP dari bank mitra sepanjang tahun anggaran 2020.	10%
Capaian Penyaluran FLPP melalui Sikasep (PS)	Penilaian Capaian																
PS < 50%	(Sesuai % dari target) x 100%																
PS = 50%	100%																
PS > 50%	120%																
Kriteria	Penilaian Tambahan																
Penambahan fitur pada Aplikasi Sikasep sesuai kebutuhan pengguna.	10%																
Hasil Survei Kepuasan Pengguna atas Aplikasi Sikasep adalah "Sangat Baik".	10%																
Penggunaan Aplikasi Sikasep mampu mengelola demand dan supply pembiayaan perumahan dengan baik sehingga tidak ada permintaan tambahan alokasi dana FLPP dari bank mitra sepanjang tahun anggaran 2020.	10%																

4. Persentase Realisasi PNBPU BLU

Sasaran Strategis	: Peningkatan PNBPU																					
Indikator Kinerja Utama	: Persentase Realisasi PNBPU BLU																					
Deskripsi	: <p>Realisasi PNBPU BLU PPDPP mencakup realisasi pendapatan layanan dan realisasi pendapatan non-layanan.</p> <p>Realisasi PNBPU BLU PPDPP dari pendapatan layanan adalah PNBPU yang diperoleh sebagai imbal jasa atas dana yang disalurkan melalui bank pelaksana sebagai mitra penyalur dana bergulir FLPP kepada <i>end user</i> (MBR), sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan mengenai tarif layanan.</p> <p>Realisasi PNBPU BLU PPDPP dari pendapatan non-layanan adalah PNBPU yang diperoleh dari pengelolaan dana yang menganggur (<i>idle cash/fund</i>), baik yang bersumber dari dana kelolaan maupun dari surplus kas.</p>																					
Formula	: <div>$\text{Persentase Realisasi PNBPU} = \text{Persentase Capaian Pendapatan Layanan} + \text{Persentase Capaian Pendapatan NonLayanan}$</div> <p>Keterangan:</p> <ul style="list-style-type: none">Realisasi PNBPU ini merupakan PNBPU yang diterima dan dikelola oleh BLU PPDPP untuk periode 1 Januari 2020 s.d. 31 Desember 2020, yang kemudian disahkan kepada Kuasa BUN.Target Pendapatan Layanan BLU PPDPP Tahun 2020 adalah Rp153 Miliar.																					
Tujuan	: IKU ini bertujuan mendorong BLU PPDPP dalam melakukan langkah-langkah dalam optimalisasi PNBPU, baik dari layanan maupun non layanan.																					
Satuan Pengukuran	: Rupiah																					
Jenis Konsolidasi Periode	: <i>Take last known value</i>																					
Polarisasi Indikator Kinerja	: <i>Maximize</i> (semakin tinggi capaian semakin baik)																					
Periode Pelaporan	: Tahunan																					
Sumber Data	: Laporan Keuangan Tahunan, Aplikasi SPAN, dan Aplikasi OM SPAN																					
Skala Penilaian	: <ul style="list-style-type: none">Penilaian capaian pendapatan layanan diukur sebagai berikut:<table><tr><th>Kategori Realisasi (PL)</th><th>Penilaian Capaian</th></tr><tr><td>PL < Rp153 Miliar</td><td>Sesuai % dari target</td></tr><tr><td>PL = Rp153 Miliar</td><td>100%</td></tr><tr><td>Rp153 Miliar < PL ≤ Rp155 Miliar</td><td>110%</td></tr><tr><td>> Rp155 Miliar</td><td>120%</td></tr></table>Penilaian capaian pendapatan non-layanan diukur sebagai berikut:<table><tr><th colspan="2">Kriteria</th><th>Penilaian Capaian</th></tr><tr><td rowspan="2">Tingkat suku bunga (TB) rata-rata penempatan dana (deposito)</td><td>BI rate+0,5% < TB ≤ BI rate+1%</td><td>10%</td></tr><tr><td>TB > BI rate+1%</td><td>20%</td></tr><tr><td colspan="2">BLU PPDPP mematuhi pengaturan pengelolaan kas dan investasi dalam peraturan perundang-undangan di bidang pengelolaan keuangan BLU.</td><td>10%</td></tr></table>Catatan: maksimal capaian kinerja untuk IKU ini adalah 150%	Kategori Realisasi (PL)	Penilaian Capaian	PL < Rp153 Miliar	Sesuai % dari target	PL = Rp153 Miliar	100%	Rp153 Miliar < PL ≤ Rp155 Miliar	110%	> Rp155 Miliar	120%	Kriteria		Penilaian Capaian	Tingkat suku bunga (TB) rata-rata penempatan dana (deposito)	BI rate+0,5% < TB ≤ BI rate+1%	10%	TB > BI rate+1%	20%	BLU PPDPP mematuhi pengaturan pengelolaan kas dan investasi dalam peraturan perundang-undangan di bidang pengelolaan keuangan BLU.		10%
Kategori Realisasi (PL)	Penilaian Capaian																					
PL < Rp153 Miliar	Sesuai % dari target																					
PL = Rp153 Miliar	100%																					
Rp153 Miliar < PL ≤ Rp155 Miliar	110%																					
> Rp155 Miliar	120%																					
Kriteria		Penilaian Capaian																				
Tingkat suku bunga (TB) rata-rata penempatan dana (deposito)	BI rate+0,5% < TB ≤ BI rate+1%	10%																				
	TB > BI rate+1%	20%																				
BLU PPDPP mematuhi pengaturan pengelolaan kas dan investasi dalam peraturan perundang-undangan di bidang pengelolaan keuangan BLU.		10%																				

5. Persentase Penyelesaian Rekomendasi Hasil Monitoring dan Evaluasi dari Direktorat Pembinaan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum secara Tepat Waktu yang Memadai sesuai dengan Ketentuan

Sasaran Strategis	:	Peningkatan Pengelolaan Badan Layanan Umum yang Berkesinambungan
Indikator Kinerja Utama	:	Persentase penyelesaian rekomendasi hasil monitoring dan evaluasi dari Direktorat Pembinaan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum secara Tepat Waktu yang Memadai dan sesuai dengan ketentuan
Deskripsi	:	<p>Penyelesaian rekomendasi hasil monitoring dan evaluasi (monev) dari Direktorat Pembinaan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (PPK BLU) adalah tindak lanjut yang dilaksanakan oleh BLU atas saran dan masukan yang disampaikan dalam Laporan Monev Direktorat PPK BLU, berdasarkan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan.</p> <p>Penyelesaian rekomendasi ini dibobot antara yang bersifat substantif (bobot 75%) dan yang bersifat administratif (bobot 25%).</p> <p>Rekomendasi Substantif adalah rekomendasi yang perlu ditindaklanjuti oleh BLU dengan berkoordinasi dengan pihak lain, dan/atau menyusun atau mengubah peraturan intern BLU, dan/atau menyusun atau mengubah <i>Standard Operating Procedures</i>.</p> <p>Rekomendasi Administratif adalah rekomendasi yang dapat ditindaklanjuti oleh BLU dengan koreksi dokumen dan/atau pelaksanaan kegiatan operasional yang tidak mempengaruhi proses bisnis dan layanan BLU.</p>
Formula	:	<p>Perhitungan capaian kinerja penyelesaian rekomendasi hasil monitoring dan evaluasi dari Direktorat PPKBLU, dihitung sebagai berikut:</p> <p style="text-align: center;">Formula Capaian IKU (%):</p> $= \left[\frac{\text{Capaian Tindak Lanjut dalam persen}}{\text{Target Tindak Lanjut dalam persen}} \times 100\% \right] + \text{Tambahan Capaian}$ <p>Dalam hal tindak lanjut yang disampaikan belum memadai dan/atau tidak sesuai dengan ketentuan, maka tindak lanjut tersebut belum dapat dihitung sebagai capaian.</p> <p>Pengukuran nilai atas ketepatan waktu penyelesaian rekomendasi yang memadai dan sesuai dengan ketentuan sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Jenis Rekomendasi diklasifikasikan menjadi Substantif (S) dan Administratif (A). 2. Nilai diklasifikasikan menjadi 100 (Tepat Waktu), 70 (Terlambat), dan 0 (Belum Ditindaklanjuti). 3. Bobot Tindak Lanjut diklasifikasikan menjadi 75% (Substantif) dan 25% (Administratif) 4. Target Tindak Lanjut adalah 85 persen (%). <p>Formula untuk pengukuran Capaian Tindak Lanjut (CTL) sebagai berikut:</p> $CTL = \frac{\text{jumlah nilai substantif}}{\sum \text{rekomendasi substantif} \times 100} \times \text{bobot 75\%} + \frac{\text{jumlah nilai administratif}}{\sum \text{rekomendasi administratif} \times 100} \times \text{bobot 25\%}$ <p>Target minimum capaian tindak lanjut adalah 85% (penilaian capaian 100%).</p>
Tujuan	:	IKU ini bertujuan untuk meningkatkan respon BLU dan komitmen dalam perbaikan yang dilaksanakan terus menerus sesuai dengan ketentuan perundang-undangan, guna menunjang pelayanan BLU yang berkesinambungan dan peningkatan kinerja BLU.
Satuan Pengukuran	:	Persen (%)
Jenis Konsolidasi Periode	:	Take Last Known Value

Polarisasi Indikator Kinerja	:	Maximize														
Periode Pelaporan	:	Tahunan														
Sumber Data	:	Surat dan/atau laporan penyelesaian tindak lanjut atas rekomendasi hasil monitoring dan evaluasi, serta isian tindak lanjut atas rekomendasi hasil monitoring dan evaluasi di BIOS.														
Skala Penilaian	:	<p>Capaian kinerja IKU ini diukur sebagai berikut:</p> <table><tr><th>Capaian Tindak Lanjut (CTL)</th><th>Penilaian Capaian</th></tr><tr><td>CTL < 85%</td><td>Sesuai % target</td></tr><tr><td>CTL ≥ 85%</td><td>100%</td></tr></table> <p>Tambahan Capaian untuk kinerja atas IKU ini diukur sebagai berikut:</p> <table><tr><th>Kriteria</th><th>Tambahan Capaian (%)</th></tr><tr><td>Persentase tindak lanjut atas temuan BPK/KPK/Itjen mencapai minimal 90%.</td><td>25%</td></tr><tr><td>Hasil Audit KAP atas LK Tahun 2019 adalah WTP</td><td>25%</td></tr><tr><td>Hasil Audit KAP atas LK Tahun 2019 adalah WDP</td><td>5%</td></tr></table> <p>Catatan: maksimum capaian kinerja untuk IKU ini adalah 150%.</p>	Capaian Tindak Lanjut (CTL)	Penilaian Capaian	CTL < 85%	Sesuai % target	CTL ≥ 85%	100%	Kriteria	Tambahan Capaian (%)	Persentase tindak lanjut atas temuan BPK/KPK/Itjen mencapai minimal 90%.	25%	Hasil Audit KAP atas LK Tahun 2019 adalah WTP	25%	Hasil Audit KAP atas LK Tahun 2019 adalah WDP	5%
Capaian Tindak Lanjut (CTL)	Penilaian Capaian															
CTL < 85%	Sesuai % target															
CTL ≥ 85%	100%															
Kriteria	Tambahan Capaian (%)															
Persentase tindak lanjut atas temuan BPK/KPK/Itjen mencapai minimal 90%.	25%															
Hasil Audit KAP atas LK Tahun 2019 adalah WTP	25%															
Hasil Audit KAP atas LK Tahun 2019 adalah WDP	5%															

6. Persentase Penyelesaian Modernisasi Pengelolaan BLU

Sasaran Strategis	:	Pengembangan Sistem Informasi BLU																																	
Indikator Kinerja Utama	:	Persentase Penyelesaian Modernisasi Pengelolaan BLU																																	
Deskripsi	:	Modernisasi pengelolaan BLU adalah upaya penerapan teknologi informasi dalam pengembangan dan peningkatan kualitas layanan dan kinerja BLU, yang antara lain mencakup pemanfaatan BIOS, penggunaan Aplikasi Persuratan, pengembangan aplikasi untuk meningkatkan layanan utama BLU, dan pengintegrasian basis data (<i>database</i>) dana bergulir dengan Sistem Informasi Kredit Program.																																	
Formula	:	<p>Modernisasi pengelolaan BLU dihitung dari penyelesaian variable modernisasi pengelolaan BLU (tabel berikut), dengan tambahan penilaian untuk kelengkapan pengisian data BIOS dan ketepatan waktu penyampaian laporan/data melalui BIOS, untuk periode 1 Januari 2020 s.d. 31 Desember 2020.</p> <p style="text-align: center;">Formula:</p> <p style="text-align: center;">Capaian IKU = Capaian Penyelesaian Modernisasi Pengelolaan BLU + Capaian Tambahan</p> <p>Variabel penyelesaian modernisasi pengelolaan BLU sebagai berikut:</p> <table><tr><th>No.</th><th>Variabel</th><th>Nilai (%)</th></tr><tr><td>I</td><td>Operasionalisasi Aplikasi BIOS</td><td>25</td></tr><tr><td>II</td><td>Ketersediaan <i>website</i> yang representatif</td><td>10</td></tr><tr><td>III</td><td>Ketersediaan <i>database</i> yang terpusat</td><td>15</td></tr><tr><td>IV</td><td>Ketersediaan <i>dashboard</i> intern dan ekstern</td><td>10</td></tr><tr><td>V</td><td>Ketersediaan <i>web service</i> untuk transfer data ke Kementerian Keuangan</td><td>30</td></tr><tr><td>VI</td><td>Ketersediaan SOP terkait dengan Sistem yang Memanfaatkan Teknologi Informasi</td><td>10</td></tr><tr><td>VII</td><td>Ketersediaan dan implementasi Sistem Aplikasi untuk pengelolaan tata naskah dinas secara elektronik</td><td>10</td></tr><tr><td>VIII</td><td>Implementasi inovasi di bidang teknologi informasi untuk peningkatan layanan dan pengelolaan keuangan</td><td>15</td></tr></table> <p>Variabel tambahan sebagai berikut:</p> <table><tr><th>Periode Penerapan</th><th>Nilai (%)</th></tr><tr><td>Kelengkapan pengisian data BIOS</td><td>15</td></tr><tr><td>Ketepatan waktu penyampaian laporan/data melalui BIOS (sesuai dengan peraturan dan/atau surat permintaan dari Direktorat PPKBLU).</td><td>10</td></tr></table> <p>Capaian maksimum untuk IKU ini: 150%.</p>	No.	Variabel	Nilai (%)	I	Operasionalisasi Aplikasi BIOS	25	II	Ketersediaan <i>website</i> yang representatif	10	III	Ketersediaan <i>database</i> yang terpusat	15	IV	Ketersediaan <i>dashboard</i> intern dan ekstern	10	V	Ketersediaan <i>web service</i> untuk transfer data ke Kementerian Keuangan	30	VI	Ketersediaan SOP terkait dengan Sistem yang Memanfaatkan Teknologi Informasi	10	VII	Ketersediaan dan implementasi Sistem Aplikasi untuk pengelolaan tata naskah dinas secara elektronik	10	VIII	Implementasi inovasi di bidang teknologi informasi untuk peningkatan layanan dan pengelolaan keuangan	15	Periode Penerapan	Nilai (%)	Kelengkapan pengisian data BIOS	15	Ketepatan waktu penyampaian laporan/data melalui BIOS (sesuai dengan peraturan dan/atau surat permintaan dari Direktorat PPKBLU).	10
No.	Variabel	Nilai (%)																																	
I	Operasionalisasi Aplikasi BIOS	25																																	
II	Ketersediaan <i>website</i> yang representatif	10																																	
III	Ketersediaan <i>database</i> yang terpusat	15																																	
IV	Ketersediaan <i>dashboard</i> intern dan ekstern	10																																	
V	Ketersediaan <i>web service</i> untuk transfer data ke Kementerian Keuangan	30																																	
VI	Ketersediaan SOP terkait dengan Sistem yang Memanfaatkan Teknologi Informasi	10																																	
VII	Ketersediaan dan implementasi Sistem Aplikasi untuk pengelolaan tata naskah dinas secara elektronik	10																																	
VIII	Implementasi inovasi di bidang teknologi informasi untuk peningkatan layanan dan pengelolaan keuangan	15																																	
Periode Penerapan	Nilai (%)																																		
Kelengkapan pengisian data BIOS	15																																		
Ketepatan waktu penyampaian laporan/data melalui BIOS (sesuai dengan peraturan dan/atau surat permintaan dari Direktorat PPKBLU).	10																																		
Tujuan	:	IKU ini bertujuan untuk mengukur tingkat modernisasi pengelolaan BLU dalam mendukung peningkatan layanan, akuntabilitas dan akurasi manajemen dalam pengambilan keputusan.																																	
Satuan Pengukuran	:	Persen (%)																																	
Jenis Konsolidasi Periode	:	<i>Take Last Known Value</i>																																	
Polarisasi Indikator Kinerja	:	<i>Maximize</i> (semakin tinggi capaian semakin baik)																																	
Periode Pelaporan	:	Tahunan																																	
Sumber Data	:	1. Data pada BIOS dan data pada sistem informasi BLU; dan 2. Data primer sebagai pembanding/ penguji validitas data yang terekam pada sistem.																																	

PK PPDPP Semula**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020
PUSAT PENGELOLAAN DANA PEMBIAYAAN PERUMAHAN**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : **Arief Sabaruddin**
Jabatan : Pusat Pengelolaan Dana Pembiayaan Perumahan
Selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**

Nama : **Eko D. Heripoerwanto**
Jabatan : Direktur Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA sepakat untuk membuat Perjanjian Kinerja dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Pihak pertama pada tahun 2020 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak pertama.
2. Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua


EKO D. HERIPOERWANTO

Jakarta, Januari 2020
Pihak Pertama


ARIEF SABARUDDIN

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020
PUSAT PENGELOLAAN DANA PEMBIAYAAN PERUMAHAN

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
PENYALURAN BANTUAN PEMBIAYAAN PERUMAHAN			
1	Terselenggaranya dukungan penyaluran bantuan pembiayaan perumahan	1) Tingkat penyelenggaraan dukungan penyaluran bantuan pembiayaan perumahan	100 %

Kegiatan

1. BA 999.03

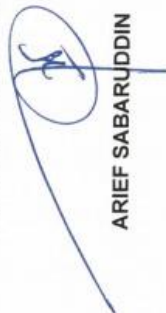
Anggaran
Rp9.000.000.000.000,00

Direktur Jenderal Pembiayaan Infrastruktur
Pekerjaan Umum dan Perumahan



EKO D. HERIPOERWANTO

Jakarta, Januari 2020
Direktur Utama Pusat Pengelolaan Dana
Pembiayaan Perumahan



ARIEF SABARUDDIN



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020 PUSAT PENGELOLAAN DANA PEMBIAYAAN PERUMAHAN

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : **Arief Sabaruddin**
Jabatan : Direktur Utama Pusat Pengelolaan Dana Pembiayaan Perumahan
Selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**

Nama : **Eko D. Heripoerwanto**
Jabatan : Direktur Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA sepakat untuk membuat Perjanjian Kinerja dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Pihak pertama pada tahun 2020 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak pertama.
2. Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua

EKO D. HERIPOERWANTO

Jakarta, Januari 2020
Pihak Pertama

ARIEF SABARUDDIN

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020
PUSAT PENGELOLAAN DANA PEMBIAYAAN PERUMAHAN

No. (1)	Sasaran Kegiatan (2)	Indikator Kinerja (3)	Target (4)
Dukungan Penyaluran Bantuan Pembiayaan Perumahan			
1	Terselenggaranya Dukungan Penyaluran Bantuan Pembiayaan Perumahan	1) Jumlah Unit Rumah yang diverifikasi untuk menerima pembiayaan perumahan 2) Jumlah Lembaga Jasa Keuangan yang menyalurkan pembiayaan perumahan 3) Dukungan penyaluran dan pengelolaan dana pembiayaan perumahan	110.000 Unit Rumah 40 Lembaga 41 Laporan

Kegiatan

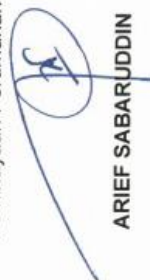
1. Dukungan Penyaluran Bantuan Pembiayaan Perumahan

Anggaran
Rp71.953.524.000,00

Direktur Jenderal Pembiayaan Infrastruktur
Pekerjaan Umum dan Perumahan


EKO D. HERIPOERWANTO

Jakarta, Januari 2020
Direktur Utama Pusat Pengelolaan Dana
Pembiayaan Perumahan


ARIEF SABARUDDIN



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020 PUSAT PENGELOLAAN DANA PEMBIAYAAN PERUMAHAN

REVISI

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : **Arief Sabaruddin**
Jabatan : Pusat Pengelolaan Dana Pembiayaan Perumahan
Selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**

Nama : **Eko D. Heripoerwanto**
Jabatan : Direktur Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA sepakat untuk membuat Perjanjian Kinerja dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Pihak pertama pada tahun 2020 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak pertama.
2. Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua


EKO D. HERIPOERWANTO

Jakarta, Juli 2020
Pihak Pertama


ARIEF SABARUDDIN

REVISI

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020
PUSAT PENGELOLAAN DANA PEMBIAYAAN PERUMAHAN

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
PENYALURAN BANTUAN PEMBIAYAAN PERUMAHAN			
1	Terselenggaranya dukungan penyaluran bantuan pembiayaan perumahan	1) Tingkat penyelenggaraan dukungan penyaluran bantuan pembiayaan perumahan	100 %

Kegiatan

1. BA 999.03

Anggaran
Rp9.000.000.000.000,00

Direktur Jenderal Pembiayaan Infrastruktur
Pekerjaan Umum dan Perumahan


EKO D. HERIPOERWANTO

Jakarta, Juli 2020
Direktur Utama Pusat Pengelolaan Dana
Pembiayaan Perumahan


ARIEF SABARUDDIN

REVISI



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020 PUSAT PENGELOLAAN DANA PEMBIAYAAN PERUMAHAN

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : **Arief Sabaruddin**
Jabatan : Direktur Utama Pusat Pengelolaan Dana Pembiayaan Perumahan
Selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**

Nama : **Eko D. Heripoerwanto**
Jabatan : Direktur Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA sepakat untuk membuat Perjanjian Kinerja dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Pihak pertama pada tahun 2020 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak pertama.
2. Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua

EKO D. HERIPOERWANTO

Jakarta, Juli 2020
Pihak Pertama

ARIEF SABARUDDIN

REVISI

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020
PUSAT PENGELOLAAN DANA PEMBIAYAAN PERUMAHAN

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
Dukungan Penyaluran Bantuan Pembiayaan Perumahan			
1	Terselenggaranya Dukungan Penyaluran Bantuan Pembiayaan Perumahan	1) Jumlah Unit Rumah yang diverifikasi untuk menerima pembiayaan perumahan 2) Jumlah Lembaga Jasa Keuangan yang menyalurkan pembiayaan perumahan 3) Dukungan penyaluran dan pengelolaan dana pembiayaan perumahan	102.500 Unit Rumah 40 Lembaga 41 Laporan

Kegiatan

1. Dukungan Penyaluran Bantuan Pembiayaan Perumahan

Anggaran
Rp71.953.524.000,00

Direktur Jenderal Pembiayaan Infrastruktur
Pekerjaan Umum dan Perumahan


EKO D. HERIPOERWANTO

Jakarta, Juli 2020
Direktur Utama Pusat Pengelolaan Dana
Pembiayaan Perumahan


ARIEF SABARUDDIN

PK PPDPP Revisi I

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020
PUSAT PENGELOLAAN DANA PEMBIAYAAN PERUMAHAN

REVISI

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : **Arief Sabaruddin**
Jabatan : Direktur Utama Pusat Pengelolaan Dana Pembiayaan Perumahan
Selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**

Nama : **Eko D. Heripoerwanto**
Jabatan : Direktur Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** sepakat untuk membuat Perjanjian Kinerja dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Pihak pertama pada tahun 2020 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak pertama.
2. Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua

EKO D. HERIPOERWANTO

Jakarta, September 2020
Pihak Pertama

ARIEF SABARUDDIN

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020
PUSAT PENGELOLAAN DANA PEMBIAYAAN PERUMAHAN
DIREKTORAT JENDERAL PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN

SASARAN PROGRAM/SASARAN KEGIATAN/INDIKATOR	BASLINE 2019	TARGET
(1)	(2)	(3)
SP. Meningkatkan Dukungan Manajemen dan Tugas Teknis Lainnya		
IKSP. Tingkat Dukungan Manajemen Kementerian PUPR	50,40%	55,92%
SK. Meningkatkan Efektivitas dan Efisiensi Tata Kelola Penyelenggaraan Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan		
IKK. Pemenuhan Sarana dan Prasarana Perkantoran yang Memenuhi Kebutuhan Tugas Teknis PPDPP	10%	10%
IKK. Tingkat Pemenuhan Belanja Pegawai dan Operasional Perkantoran yang mendukung Kelancaran Pelaksanaan Tugas Teknis PPDPP	15%	15%
SP. Meningkatkan Pelayanan Infrastruktur Perumahan dan Permukiman yang Layak dan Aman		
IKSP 1. Tingkat Pemenuhan Aksesibilitas Rumah Tangga Berpenghasilan Rendah yang mendapat Fasilitas dan Bantuan Pembiayaan Perumahan	71,44%	100%
SK. Meningkatkan Pelaksanaan Bantuan dan Fasilitas Pembiayaan Perumahan		
IKK. Tingkat Pencapaian Pelaksanaan Dukungan Penyaluran Bantuan Pembiayaan Perumahan	50%	50%

KEGIATAN

- Dukungan Penyaluran Bantuan Pembiayaan Perumahan
- Pengelolaan Dana Bergulir Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (BA. 999.03)

ANGGARAN

Rp71.953.524.000,00
Rp9.000.000.000.000,00

JAKARTA, SEPTEMBER 2020

DIREKTUR JENDERAL
PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM
DAN PERUMAHAN

EKO D. HERIPRERWANTO

DIREKTUR UTAMA PUSAT PENGELOLAAN DANA
PEMBIAYAAN PERUMAHAN

ARIEF SABARUDIN

PK PPDPP Revisi 2

REVISI

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020
PUSAT PENGELOLAAN DANA PEMBIAYAAN PERUMAHAN**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : **Arief Sabaruddin**
Jabatan : Direktur Utama Pusat Pengelolaan Dana Pembiayaan Perumahan
Selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**

Nama : **Eko D. Heripoerwanto**
Jabatan : Direktur Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA sepakat untuk membuat Perjanjian Kinerja dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Pihak pertama pada tahun 2020 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak pertama.
2. Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua



EKO D. HERIPOERWANTO

Jakarta, Oktober 2020
Pihak Pertama



ARIEF SABARUDDIN

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020
PUSAT PENGELOLAAN DANA PEMBIAYAAN PERUMAHAN
DIREKTORAT JENDERAL PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN

SASARAN PROGRAM/SASARAN KEGIATAN/INDIKATOR (1)	BASELINE 2019 (2)	TARGET (3)
SP. Meningkatkan Dukungan Manajemen dan Tugas Teknis Lainnya		
IKSP. Tingkat Dukungan Manajemen Kementerian PUPR	50,40%	55,92%
SK. Meningkatkan Efektivitas dan Efisiensi Tata Kelola Penyelenggaraan Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan		
IKK. Pemenuhan Sarana dan Prasarana Perkantoran yang Memenuhi Kebutuhan Tugas Teknis PPDPP	10%	10%
IKK. Tingkat Pemenuhan Belajar Pegawai dan Operasional Perkantoran yang mendukung Kelancaran Pelaksanaan Tugas Teknis PPDPP	15%	15%
SP. Meningkatkan Pelayanan Infrastruktur Perumahan dan Permukiman yang Layak dan Aman		
IKSP 1. Tingkat Pemenuhan Aksesibilitas Rumah Tangga Berpenghasilan Rendah yang mendapat Fasilitas dan Bantuan Pembiayaan Perumahan	71,44%	100%
SK. Meningkatkan Pelaksanaan Bantuan dan Fasilitas Pembiayaan Perumahan		
IKK. Tingkat Pencapaian Pelaksanaan Dukungan Penyaluran Bantuan Pembiayaan Perumahan	50%	50%

KEGIATAN

- Dukungan Penyaluran Bantuan Pembiayaan Perumahan
- Pengelolaan Dana Bergulir Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (BA. 999.03)

ANGGARAN

Rp71.953.524.000,00
Rp9.000.000.000.000,00

JAKARTA, OKTOBER 2020

DIREKTUR JENDERAL
PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM
DAN PERUMAHAN


EKO D. HERIPOERWANTO

DIREKTUR UTAMA PUSAT PENGELOLAAN DANA
PEMBIAYAAN PERUMAHAN


ARIEF SABARUDDIN

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN BENDAHARA UMUM NEGARA

TAHUN ANGGARAN 2020

NOMOR : DIPA- 999.03.1.984532/2020

IA. INFORMASI KINERJA



05.3884275-1996-3824

Kementerian Negara/Lembaga : [999]
 Unit Organisasi : [03]
 Provinsi : [01]
 Kode/Nama Saker : [984532]
 BENDAHARA UMUM NEGARA : [PPDPP]

Kuasa Pengguna Anggaran : Arief Rahman Hakim
 Bendahara Pengeluaran : Catur Budi Satriawan
 Pejabat Penanda Tangan SPM : Kurniawan Khristianto

		PERUMAHAN DAN FASILITAS UMUM		Halaman : IA.1	
1	Fungsi	08	PERUMAHAN DAN FASILITAS UMUM		9.000.000.000.000
	Sub Fungsi	08.90	PERUMAHAN DAN FASILITAS UMUM LAINNYA		9.000.000.000.000
2	Program	999.03.08	Program Investasi Pemerintah		9.000.000.000.000
	Sasaran Program	01	Terselenggaranya pengelolaan investasi pemerintah yang profesional, akuntabel, dan optimal		
	Indikator Kinerja Program	01	Persentase penyerapan anggaran investasi kepada BUMN	100	persen
		02	Persentase penyerapan anggaran investasi kepada Lembaga/Badan Lainnya	100	persen
		03	Penambahan investasi pemerintah kepada Organisasi/ Lembaga Keuangan Internasional/ Badan Usaha Internasional	8	Organisasi/ Lembaga Keuangan
		04	Persentase penyerapan anggaran investasi kepada BLU	100	persen
		05	Jumlah penugasan yang dijamin Pemerintah	2	Penugasan
	Output Program		Investasi pemerintah disalurkan secara profesional, akuntabel, dan optimal		
	Indikator Output Program	01	Persentase investasi pemerintah yang disalurkan secara profesional, akuntabel, dan optimal	100	persen
	Kegiatan	4099	Pengelolaan Dana Begulir Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan		9.000.000.000.000
	Sasaran Kegiatan	01	Tertaksananya Penyaluran dan Pengelolaan Dana Begulir Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan yang Akuntabel dan Tepat Sasaran		
	Indikator Kinerja Kegiatan	01	Jumlah Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) yang Memperoleh Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan	102.500	unit rumah
	Output Kegiatan	4099.001	Rumah yang Dibayai		9.000.000.000.000
	Indikator Output Kegiatan	01	Jumlah Rumah yang Dibayai	102500	unit rumah

Jakarta, 31 Desember 2019
 PEMIMPIN PEMBANTU PENGGUNA ANGGARAN

ISA RACHMATARWATA
 NIP. 196812301961021001

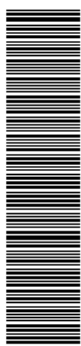
DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN BENDAHARA UMUM NEGARA

TAHUN ANGGARAN 2020

NOMOR : DIPA-999.03.1.984532/2020

II.A. RINCIAN PENGELUARAN

Kementerian Negara/Lembaga : (999) BENDAHARA UMUM NEGARA
 Unit Organisasi : (03) PENGELOLAAN INVESTASI PEMERINTAH
 Provinsi : (01) DKI JAKARTA
 Kode/Nama Satker : (984532) BADAN LAYANAN UMUM BLU PUSAT PENGELOLAAN DANA PEMBIAYAAN PERUMAHAN (PPOPP)
 Kewenangan : (KP)



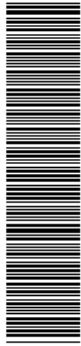
DS-3884275-1996-9824

Halaman : I A. 1

KODE	URAIAN SATKER / PROGRAM / KEGIATAN / OUTPUT / LOKASI / JENIS BELANJA / SUMBER DANA / KPPN	JUMLAH	@
1	2	3	4
984532	BADAN LAYANAN UMUM BLU PUSAT PENGELOLAAN DANA PEMBIAYAAN PERUMAHAN (PPOPP)	9.000.000.000.000	
72	PENGELUARAN PEMBIAYAAN	9.000.000.000.000	
999.03.06	Program Investasi Pemerintah	9.000.000.000.000	
72	PENGELUARAN PEMBIAYAAN	9.000.000.000.000	
4089	Pengelolaan Dana Bergulir Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan	9.000.000.000.000	
72	PENGELUARAN PEMBIAYAAN	9.000.000.000.000	
4098.001	Rumah yang Dibiayai	9.000.000.000.000	
72	LOKASI: 01.00- DKI JAKARTA	9.000.000.000.000	
01	PENGELUARAN PEMBIAYAAN	9.000.000.000.000	
	RM KPPN: 019	9.000.000.000.000	
	JUMLAH	9.000.000.000.000	

Jakarta, 31 Desember 2019
 PEMIMPIN PEMBANTU PENGGUNA ANGGARAN

ISA RACHMATARWATA
 NIP. 196812301991021001



DS-388-4275-1995-3824

**DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN BENDAHARA UMUM NEGARA
TAHUN ANGGARAN 2020
NOMOR : DIPA- 999.03.1.984532/2020
IB. SUMBER DANA**

Kementerian Negara/Lembaga : [999]
Unit Organisasi : [03]
Provinsi : [01]
Kode/Nama Saker : [984532]
BENDAHARA UMUM NEGARA
PENGELOLAAN INVESTASI PEMERINTAH
DKI JAKARTA
BADAN LAYANAN UMUM BLU PUSAT PENGELOLAAN DANA PEMBIAYAAN PERUMAHAN (PPDPP)

Halaman : 18. 1

1. Anggaran Tahun 2020		Rp.	9.000.000.000.000	Ket :	a. Pinjaman Luar Negeri	[1] Valuta Asing	US\$	Pagu	0 Rp.	Ekuivalen Rupiah	0
1. Rupiah Murni		Rp.	9.000.000.000.000		b. Hibah Luar Negeri	[1] Valuta Asing	US\$		0 Rp.		0
2. PNBP		Rp.	0			[2] RHLN	US\$		0 Rp.		0
3. Pinjaman/Hibah Luar Negeri		Rp.	0		c. Pinjaman Dalam Negeri		IDR		0 Rp.		0
4. Pinjaman/Hibah Dalam Negeri		Rp.	0		d. Hibah Dalam Negeri		IDR		0		0
5. Hibah Langsung		Rp.	0		e. Hibah Luar Negeri Langsung		IDR		0		0
6. SBSN PBS		Rp.	0		f. Hibah Dalam Negeri Langsung		IDR		0		0
2. Rincian Pinjaman / Hibah :											(dalam ribuan rupiah)
No.	SUMBER PINJAMAN DAN HIBAH No. NPPH per Tahun No. Register	PAGUTAHUN INI			RINCIAN DANA BERDASARKAN CARA PENARIKAN			DANA PENDAMPING			
	1. Pinjaman Luar Negeri 2. Hibah Luar Negeri 3. Pinjaman Dalam Negeri 4. Hibah Dalam Negeri	1) Mata Uang NPPH 2) Ekuivalen USD 3) Ekuivalen Rupiah	1) PP 2) PL 3) RK 4) LC 5) -								
		Kode	Dana	Kode	Dana			Rp. Pagu	Rp. LN	Rp. Loc. Cost	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		

NPPH : Naskah Penjelasan Pinjaman dan/atau Hibah



DS:3848-4275-1595-3624

DAFTAR ISI

TAHUN ANGGARAN 2020

NOMOR: DIPA-999.03.1.984532/2020

B. RINCIAN PENERIMAAN

Kementerian Nagara/Lembaga : [999]
 BENDAHARA UMUM NEGARA
 Unit Organisasi : [03]
 PENGELOLAAN INVESTASI PEMERINTAH
 Provinsi : [01]
 DKI JAKARTA
 Kode/Nama Srtker : [994532]
 BADAN LAYANAN UMUM BLU PUSAT PENG
 Kewenangan : [KP]

Halaman : II B. 1

KODE	URAIAN SATKER / PROGRAM / KEGIATAN / AKUN	JUMLAH
1	2	3
		JUMLAH

Jakarta, 31 Desember 2019

ISA RACHMATARWATA
NIP. 199812301991021001



05.3894275-1996-3824

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN BENDAHARA UMUM NEGARA

TAHUN ANGGARAN 2020

NOMOR : DIPA-999.03.1.984532/2020

III. RENCANA PENARIKAN DANA DAN PERKIRAAN PENERIMAAN

Kementerian Negara/Lembaga : (999) BENDAHARA UMUM NEGARA

Unit Organisasi : (03) PENGELOLAAN INVESTASI PEMERINTAH

Provinsi : (01) DKI JAKARTA

Kode/Nama Satker : (984532) BADAN LAYANAN UMUM BLU PUSAT PENGELOLAAN DANA PEMBIAYAAN PERUMAHAN (PPDP)

Halaman : II, 1
(dalam ribuan rupiah)

NO	KODE	URAIAN SATKER	RENCANA PENARIKAN												JUMLAH SELURUH
			JANUARI	FEBRUARI	MARET	APRIL	MEI	JUNI	JULI	AGUSTUS	SEPTEMBER	OKTOBER	NOVEMBER	DESEMBER	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	984532	BADAN LAYANAN UMUM BLU PUSAT PENGELOLAAN DANA PEMBIAYAAN PERUMAHAN (PPDP)													
		RENCANA PENARIKAN DANA													
		72 PENGELUARAN PEMBIAYAAN													
			0	3.000.000.000	0	0	3.000.000.000	0	0	0	3.000.000.000	0	0	0	9.000.000.000
			0	3.000.000.000	0	0	3.000.000.000	0	0	0	3.000.000.000	0	0	0	9.000.000.000
999.03.08.4039		Pengelolaan Dana Bergilir Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan													
		72 PENGELUARAN PEMBIAYAAN													
			0	3.000.000.000	0	0	3.000.000.000	0	0	0	3.000.000.000	0	0	0	9.000.000.000
			0	3.000.000.000	0	0	3.000.000.000	0	0	0	3.000.000.000	0	0	0	9.000.000.000

Jakarta, 31 Desember 2019

PEMIMPIN PEMBANTU PENGGUNA ANGGARAN

ISA RACHMATARWATA
NIP. 196812301991021001

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN BENDAHARA UMUM NEGARA
TAHUN ANGGARAN 2020
NOMOR : DIPA-999.03.1.984532/2020
W A B L O K I R



DS-3884275-1996-3824

Kementerian Negara/Lembaga : [999] BENDAHARA UMUM NEGARA
Unit Organisasi : [03] PENGELOLAAN INVESTASI PEMERINTAH
Provinsi : [01] DKI JAKARTA
Kode dan Nama Satker : [984532] BADAN LAYANAN UMUM BLU PUSAT PENGELOLAAN DANA PEMBIAYAAN PERUMAHAN (PPDPP)

Halaman : IV.A. 1
(dalam ribuan rupiah)

KODE	URAIAN	KODE	URAIAN

Jakarta, 31 Desember 2019
PEMIMPIN PEMBANTU PENGGUNA ANGGARAN

ISA RACHMATARWATA
NIP. 196812301991021001

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN BENDAHARA UMUM NEGARA
TAHUN ANGGARAN 2020
NOMOR : DIPA- 999.03.1.984532/2020
IV B. C A T A N



DS-3884275-1995-9824

Kementerian Negara/Lembaga : [999] BENDAHARA UMUM NEGARA
Unit Organisasi : [03] PENGELOLAAN INVESTASI PEMERINTAH
Provinsi : [01] DKI JAKARTA
Kode dan Nama Satker : [984532] BADAN LAYANAN UMUM BLU PUSAT PENGELOLAAN DANA PEMBIAYAAN PERUMAHAN (PPDPP)

Halaman : IV B. 1
(dalam ribuan rupiah)

KODE	URAIAN	KODE	URAIAN

Jakarta, 31 Desember 2019
PEMIMPIN PEMBANTU PENGGUNA ANGGARAN

ISA RACHMATARWATA
NIP. 196812301991021001

DIPA 99 Menjadi



05-3846.4275-1935-3824

Revisi ke 01
Tanggal : 30 Juni 2020

SURAT PENGESAHAN DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN BENDAHARA UMUM NEGARA TAHUN ANGGARAN 2020

NOMOR : SP DIPA- 999.03.1.984532/2020

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
LAMPIRAN : Satu set DIPA Petikan



A. Dasar Hukum:

1. UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
2. UU No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.
3. UU No. 20 Tahun 2019 tentang APBN TA 2020

B. Dengan ini disahkan Anggaran Untuk:

1. Kementerian Negara/Lembaga : **BENDAHARA UMUM NEGARA**
2. Unit Organisasi : **{03}** PENGELOLAAN INVESTASI PEMERINTAH
3. Provinsi : **{01}** DKI JAKARTA
4. Kode/ Nama Saker : **{994532}** BADAN LAYANAN UMUM BLU PUSAT PENGELOLAAN DANA PEMBIAYAAN PERUMAHAN (PPDPP)

Sebesar : Rp. 9.000.000.000.000 | SEMBILAN TRILUN RUPIAH }

Untuk kegiatan-kegiatan sebagai berikut :

Kode dan Nama Fungsi dan Sub Fungsi :
06 PERUMAHAN DAN FASILITAS UMUM
06.90 PERUMAHAN DAN FASILITAS UMUM LAINNYA

Kode dan Nama Program dan Kegiatan :
999.03.08 Program Investasi Pemeliharaan

999.03.08.4099 Pengadaan Dana Bergilir Fasilitas Pembiayaan Perumahan

C. Sumber Dana Berasal Dari :

1. Rupaiah Murni	Rp.	9.000.000.000.000	4. Pinjaman/Hibah Dalam Negeri	Rp.	0
2. PNB	Rp.	0	- Pinjaman Dalam Negeri	Rp.	0
3. Pinjaman/Hibah Luar Negeri	Rp.	0	- Hibah Dalam Negeri	Rp.	0
- Pinjaman Luar Negeri	Rp.	0	5. Hibah Langsung	Rp.	0
- Hibah Luar Negeri	Rp.	0	- Hibah Luar Negeri Langsung	Rp.	0
6. Pencatatan dana dilakukan melalui :	Rp.	0	- Hibah Dalam Negeri Langsung	Rp.	0
1. KPPN JAKARTA II	[019] Rp.	9.000.000.000.000	6. SBSN PBS	Rp.	0

E. Pernyataan Syarat dan Ketentuan (Disclaimer)

1. DIPA BUN ini dielast secara otomatis melalui sistem yang dilengkapi dengan kode pengaman berupa digital stamp dan ditandatangani oleh pemimpin PPA BUN.
2. DIPA BUN berfungsi sebagai dasar pelaksanaan kegiatan Saker dan pencatatan dana/penghasilan bagi Bendahara Umum Negara/Kuasa Bendahara Umum Negara.
3. Rencana Penarikan Dana dan Perkiraan Penerimaan yang tercantum dalam halaman III DIPA BUN ini sesuai dengan rencana pelaksanaan kegiatan.
4. Dalam hal terdapat perbedaan data antara DIPA BUN dengan database RIKAP/DIPA Kementerian Keuangan maka yang berlaku adalah data yang terdapat didalam database RIKAP/DIPA Kementerian Keuangan.
5. KPA DIPA BUN ini ditetapkan sebagaimana tercantum dalam halaman I A.
6. KPA BUN wajib menyampaikan lap. keuangan kepada Sekjen/Sekjama/Sekban/Pajabat yang ditetapkan sebagai entitas pelaporan, yang selanjutnya disampaikan kepada pemimpin PPA BUN atau koordinator penyusunan lap. perlanggungjawaban pengelolan BA BUN.
7. DIPA BUN berlaku sejak tanggal 1 Januari 2020 sampai dengan 31 Desember 2020.

Jakarta, 31 Desember 2019
A. N. MENTERI KEUANGAN
DIREKTUR JENDERAL ANGGARAN

ASKOLANI
NIP. 19600811192021001



09:3843-4275-1595-3624

DAFTAR ISI PELAKSANAAN ANGGARAN BENDAHARA UMUM NEGARA

TAHUN ANGGARAN 2020

NOMOR: DIPA-999.03.1.984532/2020

A. INFORMASI KINERJA

Kementerian Negara/Lembaga : 999} BENDAHARA UMUM NEGARA

Unit Organisasi : 103 PENGELOLAAN INVESTASI PEMERINTAH

DKI JAKARTA

Kode/Nama Salter

PPDPP}

Kuasa Penguna Anggaran : Arief Rahman Hakim

Bendahara Pengeluaran : Catur Budi Setiawan

Disiapkan Pananda Tangan SPM : Kurniawan Khisianto

Halaman : 1A.1				
1	Fungsi	06	PERUMAHAN DAN FASILITAS UMUM	9.000.000.000.000
	Sub Fungsi	06.90	PERUMAHAN DAN FASILITAS UMUM LAINNYA	9.000.000.000.000
2	Program	999.03.08	Program Investasi Pemerintah	9.000.000.000.000
	Sasaran Program	01	Terselenggara investasi pemerintah yang profesional, akuntabel, dan optimal	
	Indikator Kinerja Program	01	Persentase penyerapan anggaran investasi kepada BUMN	100
		02	Persentase penyerapan anggaran investasi kepada Lembaga/Badan Lainnya	100
		03	Penambahan investasi pemerintah kepada Organisasi/ Lembaga Keuangan Internasional/ Badan Usaha Internasional	7 Keuangan
		04	Persentase penyerapan anggaran investasi kepada BLU	100
		05	Jumlah penugasan yang dijamin Pemerintah	2 Penugasan
	Output Program	01	Investasi pemerintah disalurkan secara profesional, akuntabel, dan optimal	
	Indikator Output Program	01	Persentase investasi pemerintah yang disalurkan secara profesional, akuntabel, dan optimal	100
	Kegiatan	4099	Pengalokasian Dana Bergilir Fasilitas Ukuditas Pembiayaan Perumahan	
	Sasaran Kegiatan	01	Teraksananya Penyaluran dan Pengalokasian Dana Bergilir Fasilitas Ukuditas Pembiayaan Perumahan yang Akuntabel dan Tepat Sasaran	9.000.000.000.000
	Indikator Kinerja Kegiatan	01	Jumlah Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBRY) yang Memperoleh Fasilitas Ukuditas Pembiayaan Perumahan	
	Output Kegiatan	4099.001	Rumah yang Dibayai	102.500 unit rumah
	Indikator Output Kegiatan	01	Jumlah Rumah yang Dibayai	102500 unit rumah

Halaman : 151

Jakarta, 31 Desember 2019

ISA RACHMATARWATA
NIP. 198812301991021001



05.3884275-1995-3824

**DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN BENDAHARA UMUM NEGARA
TAHUN ANGGARAN 2020
NOMOR : DIPA- 999.03.1.984532/2020
IB. SUMBER DANA**

Kementerian Negara/Lembaga : [999]
Unit Organisasi : [03]
Provinsi : [01]
Kode/Nama Saker : [984532]
BENDAHARA UMUM NEGARA
PENGELOLAAN INVESTASI PEMERINTAH
DKI JAKARTA
BADAN LAYANAN UMUM BLU PUSAT PENGELOLAAN DANA PEMBIAYAAN PERUMAHAN (PPDPP)

Halaman : 18. 1

1. Anggaran Tahun 2020		Rp.		0.000.000.000.000		Kel :		a. Pinjaman Luar Negeri		[1] Valuta Asing		US\$		Pagu		Rp.		0		Ekuivalen Rupiah		0	
1. Rupiah Murni		Rp.		0.000.000.000.000						[2] RPLN		US\$				0		0		0		0	
2. PNBP		Rp.		0				b. Hibah Luar Negeri		[1] Valuta Asing		US\$				0		0		0		0	
3. Pinjaman/Hibah Luar Negeri		Rp.		0						[2] RHLN		US\$				0		0		0		0	
4. Pinjaman/Hibah Dalam Negeri		Rp.		0				c. Pinjaman Dalam Negeri				IDR				0		0		0		0	
5. Hibah Langsung		Rp.		0				d. Hibah Dalam Negeri				IDR				0		0		0		0	
6. SBSN PBS		Rp.		0				e. Hibah Luar Negeri Langsung				IDR				0		0		0		0	
2. Rincian Pinjaman / Hibah :								f. Hibah Dalam Negeri Langsung				IDR				0		0		0		0	
No.	SUMBER PINJAMAN DAN HIBAH No. NPPH per Tahun No. Register	PAGUTAHUN INI		RINCIAN DANA BERDASARKAN CARA PENARIKAN		DANA PENDAMPING																	
		Kode	Uraian	Kode	Dana	Kode	Dana	Kode	Dana	Kode	Dana	Kode	Dana	Kode	Dana	Kode	Dana	Kode	Dana	Kode	Dana	Kode	Dana
1	1. Pinjaman Luar Negeri 2. Hibah Luar Negeri 3. Pinjaman Dalam Negeri 4. Hibah Dalam Negeri	4	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23

NPPH : Naskah Penjelasan Pinjaman dan/atau Hibah

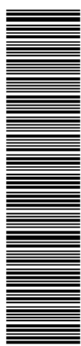
DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN BENDAHARA UMUM NEGARA

TAHUN ANGGARAN 2020

NOMOR : DIPA-999.03.1.984532/2020

II.A. RINCIAN PENGELUARAN

Kementerian Negara/Lembaga : (999) BENDAHARA UMUM NEGARA
Unit Organisasi : (03) PENGELOLAAN INVESTASI PEMERINTAH
Provinsi : (01) DKI JAKARTA
Kode/Nama Satker : (984532) BADAN LAYANAN UMUM BLU PUSAT PENGELOLAAN DANA PEMBIAYAAN PERUMAHAN (PPOPP)
Kewenangan : (KP)



DS-3884275-1996-9824

Halaman : I A. 1

KODE	URAIAN SATKER / PROGRAM / KEGIATAN / OUTPUT / LOKASI / JENIS BELANJA / SUMBER DANA / KPPN	JUMLAH	@
1	2	3	4
984532	BADAN LAYANAN UMUM BLU PUSAT PENGELOLAAN DANA PEMBIAYAAN PERUMAHAN (PPOPP)	9.000.000.000.000	
72	PENGELUARAN PEMBIAYAAN	9.000.000.000.000	
999.03.06	Program Investasi Pemerintah	9.000.000.000.000	
72	PENGELUARAN PEMBIAYAAN	9.000.000.000.000	
4089	Pengelolaan Dana Bergulir Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan	9.000.000.000.000	
72	PENGELUARAN PEMBIAYAAN	9.000.000.000.000	
4098.001	Rumah yang Dibiayai	9.000.000.000.000	
72	LOKASI: 01.00- DKI JAKARTA	9.000.000.000.000	
01	PENGELUARAN PEMBIAYAAN	9.000.000.000.000	
	RM KPPN: 019	9.000.000.000.000	
	JUMLAH	9.000.000.000.000	

Jakarta, 31 Desember 2019
PEMIMPIN PEMBANTU PENGGUNA ANGGARAN

ISA RACHMATARWATA
NIP. 196812301991021001

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN

TAHUN ANGGARAN 2020

NOMOR : DIPA. 999.03.1.984532/2020

B. RINCIAN PENERIMAAN

Kementerian Negara/Lembaga : (999) BENDAHARA UMUM NEGARA
 Unit Organisasi : (03) PENGELOLAAN INVESTASI PEMERINTAH
 Provinsi : (01) DKI JAKARTA
 Kode/Nama Sotter : (984532) BADAN LAYANAN UMUM BLU PUSAT PENGELOLAAN DANA PEMBIAYAAN PERUMAHAN (PPDPP)
 Kewenangan : (KP)



DS 3894275-1996-9824

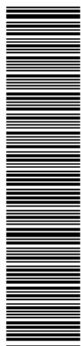
Halaman : II B. 1

KODE	URAIAN SATKER / PROGRAM / KEGIATAN / AKUN	JUMLAH
1	2	3
		JUMLAH

Jakarta, 31 Desember 2019
 PEMIMPIN PEMBANTU PENGGUNA ANGGARAN

ISA RACHMATARWATA
 NIP. 196812301991021001

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN BENDAHARA UMUM NEGARA
TAHUN ANGGARAN 2020
NOMOR : DIPA-999.03.1.984532/2020
W A. B L O K I R



DS-3884275-1996-3824

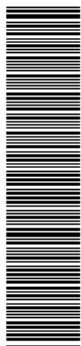
Kementerian Negara/Lembaga : [999] BENDAHARA UMUM NEGARA
Unit Organisasi : [03] PENGELOLAAN INVESTASI PEMERINTAH
Provinsi : [01] DKI JAKARTA
Kode dan Nama Satker : [984532] BADAN LAYANAN UMUM BLU PUSAT PENGELOLAAN DANA PEMBIAYAAN PERUMAHAN (PPDPP)

Halaman : IV.A. 1
(dalam ribuan rupiah)

KODE	URAIAN	KODE	URAIAN

Jakarta, 31 Desember 2019
PEMIMPIN PEMBANTU PENGGUNA ANGGARAN

ISA RACHMATARWATA
NIP. 196812301991021001



05.3894275-1996-3824

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN BENDAHARA UMUM NEGARA

TAHUN ANGGARAN 2020

NOMOR : DIPA-999.03.1.984532/2020

III. RENCANA PENARIKAN DANA DAN PERKIRAAN PENERIMAAN

Kementerian Negara/Lembaga : (999) BENDAHARA UMUM NEGARA

Unit Organisasi : (03) PENGELOLAAN INVESTASI PEMERINTAH

Provinsi : (01) DKI JAKARTA

Kode/Nama Satker : (984532) BADAN LAYANAN UMUM BLU PUSAT PENGELOLAAN DANA PEMBIAYAAN PERUMAHAN (PPDPP)

Halaman : II, 1
(dalam ribuan rupiah)

NO	KODE	URAIAN SATKER	RENCANA PENARIKAN												JUMLAH SELURUH
			JANUARI	FEBRUARI	MARET	APRIL	MEI	JUNI	JULI	AGUSTUS	SEPTEMBER	OKTOBER	NOVEMBER	DESEMBER	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	984532	BADAN LAYANAN UMUM BLU PUSAT PENGELOLAAN DANA PEMBIAYAAN PERUMAHAN (PPDPP)													
		RENCANA PENARIKAN DANA													
	72	PENGELUARAN PEMBIAYAAN													
			0	3.000.000.000	0	0	3.000.000.000	0	0	3.000.000.000	0	0	0	0	9.000.000.000
			0	3.000.000.000	0	0	3.000.000.000	0	0	3.000.000.000	0	0	0	0	9.000.000.000
999.03.08.4039		Pengelolaan Dana Bergilir Fasilitas Ukudias Pembayaan Perumahan													
		72 PENGELUARAN PEMBIAYAAN													
			0	3.000.000.000	0	0	3.000.000.000	0	0	3.000.000.000	0	0	0	0	9.000.000.000
			0	3.000.000.000	0	0	3.000.000.000	0	0	3.000.000.000	0	0	0	0	9.000.000.000

Jakarta, 31 Desember 2019

PEMIMPIN PEMBANTU PENGGUNA ANGGARAN

ISA RACHMATARWATA
NIP. 196812301991021001

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN BENDAHARA UMUM NEGARA
TAHUN ANGGARAN 2020
NOMOR : DIPA- 999.03.1.984532/2020
IV B. C A T A N



DS-3884275-1995-3824

Kementerian Negara/Lembaga : [999] BENDAHARA UMUM NEGARA
Unit Organisasi : [03] PENGELOLAAN INVESTASI PEMERINTAH
Provinsi : [01] DKI JAKARTA
Kode dan Nama Satker : [984532] BADAN LAYANAN UMUM BLU PUSAT PENGELOLAAN DANA PEMBIAYAAN PERUMAHAN (PPDPP)

Halaman : IV B. 1
(dalam ribuan rupiah)

KODE	URAIAN	KODE	URAIAN

Jakarta, 31 Desember 2019
PEMIMPIN PEMBANTU PENGGUNA ANGGARAN

ISA RACHMATARWATA
NIP. 196812301991021001

DIPA 033 Semula



03-9020-58224119823402

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
LAMPIRAN : Satu set DIPA Pelikan



SURAT PENGESAHAN DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN BADAN LAYANAN UMUM PETIKAN TAHUN ANGGARAN 2020

NOMOR : SP DIPA: 033.16.1.631021/2020

A. Dasar Hukum:

1. UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
2. UU No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.
3. UU No. 20 Tahun 2019 tentang APBN TA. 2020

B. Dengan ini disahkan Alokasi Anggaran Untuk:

1. Kementerian Negara/Lembaga : [033} KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
2. Unit Organisasi : [16} CITJEN PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN
3. Provinsi : [01} DKI JAKARTA
4. Kode/Nama Salkor : [631021} BADAN LAYANAN UMUM (BLU) PUSAT PENGELOLAAN DANA PEMBIAYAAN PERUMAHAN
 - a. Status BLU : Penit
 - b. Besar Persentase Ambang Batas : 50% dari PNB

Sebesar : Rp. 71.933.524.000 | TUUHH PULUH SATU MILIAR SEMBILAN RATUS LIMA PULUHTIGA JUTA LIMA RATUSDUA PULUH EMPAT RIBU RUPIAH }

Untuk kegiatan-kegiatan sebagai berikut :

Kode dan Nama Fungsi dan Sub Fungsi :

06 PERUMAHAN DAN FASILITAS UMUM

06.01 PEMBANGUNAN PERUMAHAN

Kode dan Nama Program dan Kegiatan :

033.16.16 Program Pengembangan Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan

033.16.16.4200 Dukungan Penyelenggaraan Pembiayaan Perumahan

C. Sumber Dana Berasal Dari :

1. Rupiah Murni	Rp.	0	4. Pinjaman/Hibah Dalam Negeri	Rp.	0	Jumlah Uang	Rp.	71.933.524.000
2. PNB	Rp.	71.933.524.000	- Pinjaman Dalam Negeri	Rp.	0		Rp.	71.933.524.000
PNBP TA Bejalan			- Hibah Dalam Negeri	Rp.	0			
- Penggunaan Saldo Awal BLU			PM \$ Hibah Langsung	Rp.	0			
3. Pinjaman/Hibah Luar Negeri	Rp.	0	- Hibah Luar Negeri Langsung	Rp.	0			
- Pinjaman Luar Negeri	Rp.	0	- Hibah Luar Negeri Langsung	Rp.	0			
- Hibah Luar Negeri	Rp.	0	8. SBSN PBS	Rp.	0			

D. Pencatatan dana dilakukan melalui :

1. KPPN JAKARTA V

E. Pernyataan Syarat dan Ketentuan [Disclaimer]

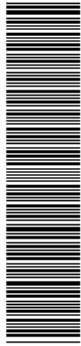
1. DIPA Pelikan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari DIPA Induk [Nama Program, Unit Organisasi dan Kementerian Negara/Lembaga].
2. DIPA Pelikan ini diotak secara otomatis melalui sistem yang terintegrasi dengan kode pengaman berupa digital stamp sebagai pengganti tanda tangan pengesahan [identifikasi].
3. DIPA Pelikan berfungsi sebagai dasar pelaksanaan kegiatan satker dan pencatatan dana/pengesahan bagi Bendahara Umum Negara/Kuasa Bendahara Umum Negara.
4. Rencana Penarikan Dana dan Pertarikan Penerimaan yang tercantum dalam Halaman III DIPA diisi sesuai dengan rencana pelaksanaan kegiatan.
5. Tanggung jawab terhadap penggunaan anggaran yang tertuang dalam DIPA Pelikan sepenuhnya berada pada Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran.
6. Dalam hal terdapat perbedaan data antara DIPA Pelikan dengan database RKA-K/L-DIPA Kementerian Keuangan maka yang berlaku adalah data yang terdapat di dalam database RKA-K/L-DIPA Kementerian Keuangan [berdasarkan bukti-bukti yang ada].
7. DIPA Pelikan berlaku sejak tanggal 1 Januari 2020 sampai dengan 31 Desember 2020.

Jakarta, 12 November 2019
A/N MENTERI KEUANGAN
DIREKTUR JENDERAL ANGGARAN

td.

ASKOLANI

NIP. 196806111992021001



05-9020-8222-4196-2402

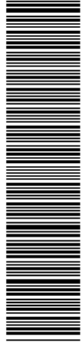
DAFTAR ISI
DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN BADAN LAYANAN UMUM PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2020
NOMOR : DIPA- 033.16.1.631021/2020
IA. INFORMASI KINERJA

Kuasa Penguna Anggaran : Ir. Monhial, Dipl. SE
Bendahara Pengeluaran : Eka Nisfian, SE
Pejabat Penanda Tangan SPM : Dede Solihin, SE

Kementerian Negara/Lembaga : (033) KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
Unit Organisasi : (116) DIREKTORAT PEMBAYARAN INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN
Provinsi : (01) DKI JAKARTA
Kode/Name Sdker : (1631021) BADAN LAYANAN UMUM (BLU) PUSAT PENGELOLAAN DANA PEMBIAYAAN PERUMAHAN

3. Saldo Awal Kas BLU : PM

Informasi BLU:		1. Status BLU		2. Besar Persentase Ambang Batas		3. Saldo Awal Kas BLU		PM		Halaman : IA.1	
1. Fungsi	08	PERUMAHAN DAN FASILITAS UMUM								71.953.524.000	
Sub Fungsi	08.01	PEMBANGUNAN PERUMAHAN								71.953.524.000	
2. Program	033.16.1.6	Program Pengembangan Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan								71.953.524.000	
Sasaran Program	01	Meningkatnya Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan									
Indikator Kinerja Program	01	Tingkat Ketersediaan Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan							18	%	
	02	Tingkat Aksesibilitas Rumah Tangga Berpenghasilan Rendah Terhadap Kemudahan dan/atau Bantuan serta Fasilitas Pembiayaan Perumahan							15	%	
Output Program	02	Jumlah MBR yang mendapat kemudahan dan/atau Bantuan serta Fasilitas Pembiayaan Perumahan									
Indikator Output Program	01	Rasio Rumah Tangga Berpenghasilan Rendah yang mendapat kemudahan dan/atau Bantuan serta Fasilitas Pembiayaan Perumahan							15	%	
	02	Jumlah Paket Pembiayaan Perumahan							1	Jumlah Paket Pembiayaan	
	03	Dukungan penyaluran dan pengelanaan dana pembiayaan perumahan							91	Laporan	
Kegiatan	4200	Dukungan Penyaluran Bantuan Pembiayaan Perumahan									71.953.524.000
Sasaran Kegiatan	01	Terselenggaranya dukungan penyaluran dan pengelanaan dana pembiayaan perumahan									
Indikator Kinerja Kegiatan	01	Jumlah Unit Rumah yang divestikasi untuk menerima pembiayaan perumahan									
	02	Jumlah Lembaga Jasa Keuangan yang menyalurkan pembiayaan perumahan									
	03	Dukungan penyaluran dan pengelanaan dana pembiayaan perumahan									
Output Kegiatan	4200.001	Layanan Promosi, Kejasama dan Verifikasi (PN)							12	Unit Rumah	8.550.000.000
Indikator Output Kegiatan	01	Layanan Promosi, Kejasama dan Verifikasi							110000	Unit Rumah	
Output Kegiatan	4200.002	Layanan Bidang Perencanaan, Tata Laksana dan Pelaporan							12	Lembaga	8.497.000.000
Indikator Output Kegiatan	01	Layanan Bidang Perencanaan, Tata Laksana dan Pelaporan							40	Lembaga	
Output Kegiatan	4200.003	Layanan Teknologi Informasi dan Pemantauan Evaluasi							5	Laporan	5.700.000.000
Indikator Output Kegiatan	01	Layanan Teknologi Informasi dan Pemantauan Evaluasi							5	Laporan	
Output Kegiatan	4200.004	Layanan Internal Kelembagaan							10	Laporan	5.095.933.000
Indikator Output Kegiatan	01	Layanan Internal Kelembagaan							10	Laporan	



05-9020-8222-4196-2402

**DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN BADAN LAYANAN UMUM PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2020
NOMOR : DIPA- 033.16.1.631021/2020
IA. INFORMASI KINERJA**

Kuasa Pengguna Anggaran : Ir. Monhial, Dipl. SE
Bendahara Pengeluaran : Eka Nisfiansi, SE
Pejabat Penanda Tangan SPM : Dede Solihin, SE

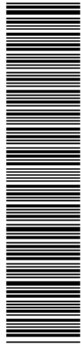
Kementerian Negara/Lembaga : [033] KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
Unit Organisasi : [116] DITJEN PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN
Provinsi : [01] DKI JAKARTA
Kode/Nama Satker : [1631021] BADAN LAYANAN UMUM (BLU) PUSAT PENGELOLAAN DANA PEMBIAYAAN PERUMAHAN

Informasi BLU:
1. Status BLU : Penuh
2. Besaran Persentase Ambang Batas : 50.00% dari PNB
3. Saldo Awal Kas BLU : PM

Output Kegiatan		28 Laporan		Halaman : IA. 2	
Indikator Output Kegiatan	4200.005	Pengawasan Internal dan Pembinaan Manajemen	Laporan	1.997.004.000	
Output Kegiatan	01	Pengawasan Internal dan Pembinaan Manajemen	28	500.000.000	
Indikator Output Kegiatan	4200.061	Layanan Sarana dan Prasarana Internal	1 Layanan		
Output Kegiatan	02	Jumlah Pengadaan perangkat pengolah data dan komunikasi = xx unit	1		
Indikator Output Kegiatan	03	Jumlah Pengadaan peralatan fasilitas perkantoran = xx unit	1		
Output Kegiatan	4200.064	Layanan Perkantoran	1 Layanan	43.813.487.000	
Indikator Output Kegiatan	01	Realisasi pembayaran Gaji dan Tunjangan = xx %	1		
Output Kegiatan	02	Realisasi penyediaan layanan operasional dan pemeliharaan kantor = xx %	1		

Jakarta, 12 November 2019
a.n. MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
SEKRETARIS JENDERAL

td.
Prof. ANITA FIRMANTI
NIP. 196008151987032001



05-9020-9322-4196-2402

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN BADAN LAYANAN UMUM PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2020
NOMOR : DIPA- 033.16.1.631021/2020

IB. SUMBER DANA

Kementerian Negara/Lembaga : [033]
Unit Organisasi : [16]
Provinsi : [01]
Kode/Nama Saker : [031021]
KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
DITJEN PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN
DKI JAKARTA
BADAN LAYANAN UMUM (BLU) PUSAT PENGELOLAAN DANA PEMBIAYAAN PERUMAHAN

Halaman : 18. 1

1. Anggaran Tahun 2020		Rp.		71.983.524.000		Kel :		US\$		Pagu		Ekuivalen Rupiah	
1. Rupiah Murni		Rp.		0		a. Pinjaman Luar Negeri		[1] Valuta Asing		0 Rp.		0	
2. PNBP		Rp.		71.983.524.000		b. Hibah Luar Negeri		[2] RPLN		0 Rp.		0	
3. Pinjaman/Hibah Luar Negeri		Rp.		0		c. Pinjaman Dalam Negeri		[1] Valuta Asing		0 Rp.		0	
4. Pinjaman/Hibah Dalam Negeri		Rp.		0		d. Hibah Dalam Negeri		[2] RHLN		0 Rp.		0	
5. Hibah Langsung		Rp.		0		e. Hibah Luar Negeri Langsung		IDR		0		0	
6. SBSN PBS		Rp.		0		f. Hibah Dalam Negeri Langsung		IDR		0		0	
2. Rincian Pinjaman / Hibah :													
No.	SUMBER PINJAMAN DAN HIBAH No. NPPH per Tahun No. Register	PAGUTAHUN INI		RINCIAN DANA BERDASARKAN CARA PENARIKAN		DANA PENDAMPING							
		1. Mata Uang NPPH 2. Hibah Luar Negeri 3. Pinjaman USD 4. Hibah Dalam Negeri		1) PP 2) PL 3) RK 4) LC 5) -									
1	Kode	Uraian	Kode	Dana	Kode	Dana	Rp. Pdp	Rp. LN	Rp. Loc. Cost				
	2	3	4	5	6	7	8	9	10				

NPPH : Naskah Pelanggaran Pinjaman dan/atau Hibah

**DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN BADAN LAYANAN UMUM PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2020
NOMOR : DIPA- 033.16.1.631021/2020**

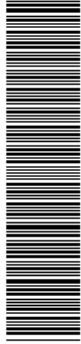
I. RINCIAN PENGELUARAN

Kementerian Negara/Lembaga : (033) KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
Unit Organisasi : (16) DIT-JEN PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN
Provinsi : (01) DKI JAKARTA
Kode/Name Server : (031021) BADAN LAYANAN UMUM (BLU) PUSAT PENGELOLAAN DANA PEMBIAYAAN PERUMAHAN
Kewenangan : (KP)

Halaman : II. 1
(dalam ribuan rupiah)

KODE	URAIAN SATKER/PROGRAM/KEGIATAN/OUTPUT/SUMBER DANA	BELANJA						LOKASI/ KPPN	CARA PENARIKAN/ REGISTER
		PEGAUAI (51)	BARANG (52)	MODAL (53)	BANTUAN SOSIAL (57)	LAIN-LAIN (58)	JUMLAH SELURUH		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
631021	BADAN LAYANAN UMUM (BLU) PUSAT PENGELOLAAN DANA PEMBIAYAAN PERUMAHAN	-	71.433.524	500.000	-	-	71.933.524	-	-
033.16.16	Program Pengembangan Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan	-	71.433.524	500.000	-	-	71.933.524	-	-
4200	Dukungan Penyelenggaraan Pembiayaan Perumahan	-	71.433.524	500.000	-	-	71.933.524	-	-
4200.001	Layanan Promosi, Kelasama dan Verifikasi (PN)	-	8.550.000	-	-	-	8.550.000	01.00	-
08	BLU	-	8.550.000	-	-	-	8.550.000	139@	-
4200.002	Layanan Bidang Perencanaan, Tata Laksana dan Pelaporan	-	8.497.000	-	-	-	8.497.000	01.00	-
08	BLU	-	8.497.000	-	-	-	8.497.000	139@	-
4200.003	Layanan Teknologi Informasi dan Pemantauan Evaluasi	-	5.700.000	-	-	-	5.700.000	01.00	-
08	BLU	-	5.700.000	-	-	-	5.700.000	139@	-
4200.004	Layanan Internal Kelembagaan	-	5.086.933	-	-	-	5.086.933	01.00	-
08	BLU	-	5.086.933	-	-	-	5.086.933	139@	-
4200.005	Pengawasan Internal dan Pembinaan Manajemen	-	1.997.094	-	-	-	1.997.094	01.00	-
08	BLU	-	1.997.094	-	-	-	1.997.094	139@	-

DS-9020-9822-4196-2402



DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN BADAN LAYANAN UMUM PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2020
NOMOR : DIPA- 033.16.1.631021/2020

I. RINCIAN PENGELUARAN

Kementerian Negara/Lembaga : [033] KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
Unit Organisasi : [16] DITJEN PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN
Provinsi : [01] DKI JAKARTA
Kode/Nama Sumber : [031021] BADAN LAYANAN UMUM (BLU) PUSAT PENGELOLAAN DANA PEMBIAYAAN PERUMAHAN
Kewenangan : [KP]

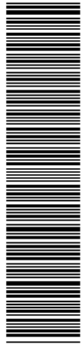
Halaman : II. 2
(dalam ribuan rupiah)

KODE	URAIAN SATKER/PROGRAM/KEGIATAN/OUTPUT/SUMBER DANA	BELANJA						LOKASI/ KPPN	CARA PENARIKAN/ REGISTER
		PEGAWAI [51]	BARANG [52]	MODAL [53]	BANTUAN SOSIAL [57]	LAIN-LAIN [58]	JUMLAH SELURUH [8]		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4200.951	Layanan Sarana dan Prasarana Internal	-	-	500.000	-	-	500.000	01.00	
08 BLU		-	-	500.000	-	-	500.000	139@	
4200.954	Layanan Perumahan	-	43.813.497	-	-	-	43.813.497	01.00	
08 BLU		-	43.813.497	-	-	-	43.813.497	139	
	JUMLAH	-	71.433.524	500.000	-	-	71.933.524		

Jakarta, 12 November 2019
a.n. MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
SEKRETARIS JENDERAL

fld.

Prof. ANITA FIRMANTI
NIP. 196009151957032001



05-9020-9822-4196-2402

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN BADAN LAYANAN UMUM PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2020

NOMOR : DIPA- 033.16.1.631021/2020

III. RENCANA PENARIKAN DANA DAN PERKIRAAN PENERIMAAN

Kementerian Negara/Lembaga : (033) KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT

Unit Organisasi : (18) CITJEN PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN

Provinsi : (01) DKI JAKARTA

Kode/Nama Satker : (R31021) BADAN LAYANAN UMUM (BLU) PUSAT PENGELOLAAN DANA PEMBIAYAAN PERUMAHAN

Halaman : II, 1
(dalam ribuan rupiah)

NO	KODE	URAIAN SATKER	RENCANA PENARIKAN												JUMLAH SELURUH	
			JANUARI	FEBRUARI	MARET	APRIL	MAY	JUNI	JULI	AGUSTUS	SEPTEMBER	OKTOBER	NOVEMBER	DESEMBER	15	18
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	18
1	631021	BADAN LAYANAN UMUM (BLU) PUSAT PENGELOLAAN DANA PEMBIAYAAN PERUMAHAN														
		RENCANA PENARIKAN DANA	689.422	1473.152	2.378.396	3.935.853	4.136.773	4.598.976	7.981.337	7.773.776	8.430.963	8.591.041	9.626.327	12.167.328	12.167.328	71.953.524
		52 BELANJA BARANG	689.422	1473.152	2.378.396	3.935.853	4.136.773	4.598.976	7.981.337	7.773.776	8.430.963	8.591.041	9.626.327	12.167.328	12.167.328	71.953.524
		53 BELANJA MODAL	2.030	15.900	20.390	20.200	21.090	25.960	43.090	49.650	56.600	45.200	98.700	14.1700	14.1700	900.000
		Dukungan Penyaluran Bantuan Pembiayaan Perumahan	689.422	1473.152	2.378.396	3.935.853	4.136.773	4.598.976	7.981.337	7.773.776	8.430.963	8.591.041	9.626.327	12.167.328	12.167.328	71.953.524
		52 BELANJA BARANG DAN BARANG	689.422	1473.152	2.378.396	3.935.853	4.136.773	4.598.976	7.981.337	7.773.776	8.430.963	8.591.041	9.626.327	12.167.328	12.167.328	71.953.524
		53 BELANJA MODAL	2.030	15.900	20.390	20.200	21.090	25.960	43.090	49.650	56.600	45.200	98.700	14.1700	14.1700	900.000
		PERKIRAAN PENERIMAAN	22.515.751	22.515.751	22.515.751	22.515.751	22.515.751	22.515.751	22.515.751	22.515.751	22.515.751	22.515.751	22.515.751	22.515.751	22.515.751	270.183.000
		- PNBP YANG DIGUNAKAN LANGSUNG (424134)	11.483.033	11.483.033	11.483.033	11.483.033	11.483.033	11.483.033	11.483.033	11.483.033	11.483.033	11.483.033	11.483.033	11.483.033	11.483.033	137.798.390
		- PNBP YANG DIGUNAKAN LANGSUNG (424135)	2.026.418	2.026.418	2.026.418	2.026.418	2.026.418	2.026.418	2.026.418	2.026.418	2.026.418	2.026.418	2.026.418	2.026.418	2.026.418	24.317.010
		- PNBP YANG DIGUNAKAN LANGSUNG (424911)	9.006.300	9.006.300	9.006.300	9.006.300	9.006.300	9.006.300	9.006.300	9.006.300	9.006.300	9.006.300	9.006.300	9.006.300	9.006.300	108.075.600

Jakarta, 12 November 2019
a.n. MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
SEKRETARIS JENDERAL

fld.

Pd. ANITA FIRMANTI
NIP. 196008151957033001

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN BADAN LAYANAN UMUM PETIKAN

TAHUN ANGGARAN 2020

NOMOR : DIPA- 033.16.1.631021/2020

W A B L O K I R



05-9020-9322-4196-2402

Kementerian Negara/Lembaga : [033] KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT

Unit Organisasi : [16] DITJEN PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN

Provinsi : [01] DKI JAKARTA

Kode dan Nama Satker : [831021] BADAN LAYANAN UMUM (BLU) PUSAT PENGELOLAAN DANA PEMBIAYAAN PERUMAHAN

Halaman : IV.A. 1
(dalam ribuan rupiah)

KODE	URAIAN	KODE	URAIAN
631021	BADAN LAYANAN UMUM (BLU) PUSAT PENGELOLAAN DANA PEMBIAYAAN PERUMAHAN		
	Jumlah Dana yang tidak dapat dicairkan		28.340.027
	52 Belanja Barang		Rp. 27.840.027
	53 Belanja Modal		Rp. 500.000
033.16.16	Program Pengembangan Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan		
4200	Dukungan Penyaluran Bantuan Pembiayaan Perumahan		
4200.001	Layanan Promosi, Kerjasama dan Verifikasi		
	525112 Belanja Barang		2.014.927
	Tidak Dapat Dicairkan		Rp. 2.014.927
	Belum dilengkapi dengan RBA untuk satker BLU		
	Disposisi: Alokasi harus dilengkapi dasar hukum pengalokasiannya dan/atau dokumen terkait		
	525113 Belanja Jasa		282.550
	Tidak Dapat Dicairkan		Rp. 282.550
	Belum dilengkapi dengan RBA untuk satker BLU		
	Disposisi: Alokasi harus dilengkapi dasar hukum pengalokasiannya dan/atau dokumen terkait		
	525115 Belanja Perjalanan		2.252.523
	Tidak Dapat Dicairkan		Rp. 2.252.523
	Belum dilengkapi dengan RBA untuk satker BLU		
	Disposisi: Alokasi harus dilengkapi dasar hukum pengalokasiannya dan/atau dokumen terkait		
	525119 Belanja Penyediaan Barang dan Jasa BLU Lainnya		4.000.000
	Tidak Dapat Dicairkan		Rp. 4.000.000
	Belum dilengkapi dengan RBA untuk satker BLU		
	Disposisi: Alokasi harus dilengkapi dasar hukum pengalokasiannya dan/atau dokumen terkait		
4200.002	Layanan Bidang Perencanaan, Tata Laksana dan Pelaporan		
	525112 Belanja Barang		3.538.220
	Tidak Dapat Dicairkan		Rp. 3.538.220
	Belum dilengkapi dengan RBA untuk satker BLU		
	Disposisi: Alokasi harus dilengkapi dasar hukum pengalokasiannya dan/atau dokumen terkait		
	525113 Belanja Jasa		519.800
	Tidak Dapat Dicairkan		Rp. 519.800
	Belum dilengkapi dengan RBA untuk satker BLU		
	Disposisi: Alokasi harus dilengkapi dasar hukum pengalokasiannya dan/atau dokumen terkait		
	525115 Belanja Perjalanan		1.500.512
	Tidak Dapat Dicairkan		Rp. 1.500.512
	Belum dilengkapi dengan RBA untuk satker BLU		
	Disposisi: Alokasi harus dilengkapi dasar hukum pengalokasiannya dan/atau dokumen terkait		
	525119 Belanja Penyediaan Barang dan Jasa BLU Lainnya		1.304.800
	Tidak Dapat Dicairkan		Rp. 1.304.800
	Belum dilengkapi dengan RBA untuk satker BLU		
	Disposisi: Alokasi harus dilengkapi dasar hukum pengalokasiannya dan/atau dokumen terkait		

**DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN BADAN LAYANAN UMUM PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2020
NOMOR : DIPA- 033.16.1.631021/2020
W A B L O K I R**



05-9020-8322-4196-2402

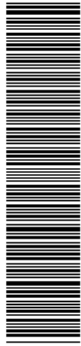
Kementerian Negara/Lembaga : [033] KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
Unit Organisasi : [16] DITJEN PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN
Provinsi : [01] DKI JAKARTA
Kode dan Nama Satker : [831021] BADAN LAYANAN UMUM (BLU) PUSAT PENGELOLAAN DANA PEMBIAYAAN PERUMAHAN

Halaman : IV.A. 2
(dalam ribuan rupiah)

KODE	URAIAN	KODE	URAIAN
4200.004	Layanan Internal Kelembagaan	4200.951	Disposisi: Alokasi harus dilengkapi dasar hukum pengalokasiannya dan/atau dokumen terkait
525112	Belanja Barang	2.317.435	Layanan Sarana dan Prasarana Internal
	Tidak Dapat Dicarikan	2.317.435	Belanja Modal Peralatan dan Mesin
	Belum dilengkapi dengan RBA untuk satker BLU		Tidak Dapat Dicarikan
Disposisi:	Alokasi harus dilengkapi dasar hukum pengalokasiannya dan/atau dokumen terkait		Belum dilengkapi dengan RBA untuk satker BLU
525113	Belanja Jasa	322.700	Rp.
	Tidak Dapat Dicarikan	322.700	
	Belum dilengkapi dengan RBA untuk satker BLU		Disposisi: Alokasi harus dilengkapi dasar hukum pengalokasiannya dan/atau dokumen terkait
Disposisi:	Alokasi harus dilengkapi dasar hukum pengalokasiannya dan/atau dokumen terkait		
525115	Belanja Perjalanan	292.154	
	Tidak Dapat Dicarikan	292.154	
	Belum dilengkapi dengan RBA untuk satker BLU		
Disposisi:	Alokasi harus dilengkapi dasar hukum pengalokasiannya dan/atau dokumen terkait		
525119	Belanja Penyediaan Barang dan Jasa BLU Lainnya	2.183.844	
	Tidak Dapat Dicarikan	2.183.844	
	Belum dilengkapi dengan RBA untuk satker BLU		
Disposisi:	Alokasi harus dilengkapi dasar hukum pengalokasiannya dan/atau dokumen terkait		
4200.005	Pengawasan Internal dan Pembinaan Manajemen		
525112	Belanja Barang	438.138	
	Tidak Dapat Dicarikan	438.138	
	Belum dilengkapi dengan RBA untuk satker BLU		
Disposisi:	Alokasi harus dilengkapi dasar hukum pengalokasiannya dan/atau dokumen terkait		
525113	Belanja Jasa	568.648	
	Tidak Dapat Dicarikan	568.648	
	Belum dilengkapi dengan RBA untuk satker BLU		
Disposisi:	Alokasi harus dilengkapi dasar hukum pengalokasiannya dan/atau dokumen terkait		
525115	Belanja Perjalanan	990.310	
	Tidak Dapat Dicarikan	990.310	
	Belum dilengkapi dengan RBA untuk satker BLU		

Jakarta, 12 November 2019
a.n. MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
SEKRETARIS JENDERAL
ttd.
Prof. ANITA FIRMANTI
NIP. 196008151967032001

**DAFTAR ISI PELAKSANAAN ANGGARAN BADAN LAYANAN UMUM PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2020
NOMOR : DIPA- 033.16.1.631021/2020
IV B. C A T A N**



DS-9020-93224196-2402

Kementerian Negara/Lembaga : [033] KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
Unit Organisasi : [16] DITJEN PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN
Provinsi : [01] DKI JAKARTA
Kode dan Nama Satker : [831021] BADAN LAYANAN UMUM (BLU) PUSAT PENGELOLAAN DANA PEMBIAYAAN PERUMAHAN

Halaman : IV B. 1
(dalam ribuan rupiah)

KODE	URAIAN	KODE	URAIAN

Jakarta, 12 November 2019
a.n. MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
SEKRETARIS JENDERAL

td.
Prof. ANITA FIRMANTI
NIP 196008151987032001

DIPA 033 Revisi I



05 3076 537 5 0423 0403

Revisi ke 01
Tanggal : 14 Januari 2020

SURAT PENGESAHAN DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN BADAN LAYANAN UMUM PETIKAN TAHUN ANGGARAN 2020

NOMOR : SP DIPA- 033.16.1.631021/2020

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
LAMPIRAN : Satu set DIPA Petikan



A. Dasar Hukum:

1. UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
2. UU No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.
3. UU No. 20 Tahun 2019 tentang APBN TA 2020

B. Dengan ini disahkan Alokasi Anggaran Untuk:

1. Kementerian Negara/Lembaga : [033} KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
2. Unit Organisasi : [16} CITJEN PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN
3. Provinsi : [01} DKI JAKARTA
4. Kode/Nama Sarker : [B31021} BADAN LAYANAN UMUM (BLU) PUSAT PENGELOLAAN DANA PEMBIAYAAN PERUMAHAN
 - a. Status BLU : Penun
 - b. Besaran Presentase Ambang Batas : 50% dari PNB

Sebesar : Rp. 71.953.524.000 | TUUHPULUH SATU MILIAR SEMBILAN RATUS LIMA PULUHTIGA JUTA LIMA RATUS DUA PULUH EMPAT RIBU RUPIAH }

Untuk kegiatan-kegiatan sebagai berikut :

Kode dan Nama Fungsi dan Sub Fungsi :

- 06 PERUMAHAN DAN FASILITAS UMUM
- 06.01 PEMBANGUNAN PERUMAHAN

Kode dan Nama Program dan Kegiatan :
033.16 Program Pengembangan Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan
033.16.4200 Dukungan Penyelenggaraan Pembiayaan Perumahan

C. Sumber Dana Bersifat Dari :

1. Rupiah Murni	Rp.	0	4. Pinjaman/Hibah Dalam Negeri	Rp.	0	Jumlah Uang	Rp.	71.953.524.000
2. PNB	Rp.	71.953.524.000	- Pinjaman Dalam Negeri	Rp.	0		Rp.	71.953.524.000
- Penggunaan Saldo Awal BLU			- Hibah Dalam Negeri	Rp.	0			
3. Pinjaman/Hibah Luar Negeri			PM 5. Hibah Langsung	Rp.	0			
- Pinjaman Luar Negeri			- Hibah Luar Negeri Langsung	Rp.	0			
- Hibah Luar Negeri			- Hibah Dalam Negeri Langsung	Rp.	0			
			6. SBSN PBS	Rp.	0			

D. Pencapaian data dilakukan melalui :

1. KPPN JAKARTA V

E. Pernyataan Syarat dan Ketentuan [Disclaimer]

1. DIPA Petikan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari DIPA Induk [Nama Program, Unit Organisasi dan Kementerian Negara/Lembaga].
2. DIPA Petikan ini dibuat secara otomatis melalui sistem yang dilengkapi dengan kode pengaman berupa digital stamp sebagai pengganti tanda tangan pengesahan [identifikasi].
3. DIPA Petikan berfungsi sebagai dasar pelaksanaan kegiatan salur dan pencairan dana/pengesahan bagi Bendahara Umum Negara/Kuasa Bendahara Umum Negara.
4. Rencana Penarikan Dana dan Petikan Penarikan yang tercantum dalam Halaman III DIPA diisi sesuai dengan rencana pelaksanaan kegiatan.
5. Tanggung jawab terhadap penggunaan anggaran yang tercantum dalam DIPA Petikan sepenuhnya berada pada Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran.
6. Dalam hal terdapat perbedaan data antara DIPA Petikan dengan database RKA-K/L-DIPA Kementerian Keuangan maka yang berlaku adalah data yang terdapat di dalam database RKA-K/L-DIPA Kementerian Keuangan [berdasarkan bukti-bukti yang ada].
7. DIPA Petikan berlaku sejak tanggal 1 Januari 2020 sampai dengan 31 Desember 2020.

Jakarta, 12 November 2019
A. N. MENTERI KEUANGAN
DIREKTUR JENDERAL ANGGARAN

td.
ASKOLANI
NIP. 196806111962021001

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN BADAN LAYANAN UMUM PETIKAN

TAHUN ANGGARAN 2020

NOMOR : DIPA- 033.16.1.631021/2020

IA. INFORMASI KINERJA



05 5075 237 5 0423 0408

Kuasa Pengguna Anggaran : Ir. Mohliat, Dipl. SE
Bendahara Pengeluaran : Bka Nisfasari, SE
Pejabat Penanda Tangan SPM : Dede Solihin, SE

Kementerian Negara/Lembaga : 0033 KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT

Unit Organisasi : 116 DIJEN PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN

Provinsi : 01 DKI JAKARTA

Kode/Nama Satker : 1031021 BADAN LAYANAN UMUM (BLU) PUSAT PENGELOLAAN DANA PEMBIAYAAN PERUMAHAN

Informasi BLU:

1. Status BLU : Peruli

2. Besaran Persentase Ambang Batas : 50,00% dan PNPB

3. Saldo Awal Kas BLU : RP. 1.252.902.898.833

PERUMAHAN DAN FASILITAS UMUM									
1 Fungsi	08	PERUMAHAN DAN FASILITAS UMUM							Halaman : IA.1
Sub Fungsi	08.01	PEMBANGUNAN PERUMAHAN							71.953.524.000
2 Program	033.16.16	Program Pengembangan Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan							71.953.524.000
Sasaran Program	01	Meningkatnya Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan							71.953.524.000
Indikator Kinerja Program	01	Tingkat Ketersediaan Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan						18	%
	02	Tingkat Aksesibilitas Rumah Tangga Berpenghasilan Rendah Terhadap Kemudahan dan/atau Bantuan serta Fasilitas Pembiayaan Perumahan						15	%
Output Program	02	Jumlah MBR yang mendapat Kemudahan dan/atau Bantuan serta Fasilitas Pembiayaan Perumahan							
	01	Rasio Rumah Tangga Berpenghasilan Rendah yang mendapat Kemudahan dan/atau Bantuan serta Fasilitas Pembiayaan Perumahan						15	%
Indikator Output Program	02	Jumlah Paket Pembiayaan Perumahan						1	Jumlah Paket Pembiayaan
	03	Dukungan penyaluran dan pengelodaan dana pembiayaan perumahan						91	Laporan
Kegiatan	4200	Dukungan Penyaluran Bantuan Pembiayaan Perumahan							71.953.524.000
	01	Terselenggaranya dukungan penyaluran dan pengelodaan dana pembiayaan perumahan							
Sasaran Kegiatan	01	Jumlah Unit Rumah yang diverifikasi untuk menerima pembiayaan perumahan							
	02	Jumlah Lembaga Jasa Keuangan yang menyalurkan pembiayaan perumahan							
Indikator Kinerja Kegiatan	03	Dukungan penyaluran dan pengelodaan dana pembiayaan perumahan							
	4200.001	Layanan Promosi, Kejasama dan Verifikasi [PNJ]						12 Unit Rumah	8.550.000.000
Output Kegiatan	01	Layanan Promosi, Kejasama dan Verifikasi						110000	Unit Rumah
	4200.002	Layanan Bidang Perencanaan, Tata Laksana dan Pelaporan						12 Lembaga	8.497.000.000
Indikator Output Kegiatan	01	Layanan Bidang Perencanaan, Tata Laksana dan Pelaporan						40	Lemba
	4200.003	Layanan Teknologi Informasi dan Pemantauan Evaluasi						\$ Laporan	\$ 700.000.000
Output Kegiatan	01	Layanan Teknologi Informasi dan Pemantauan Evaluasi						\$	Laporan
	4200.004	Layanan Internal Kelengkapan						10 Laporan	5.086.933.000
Indikator Output Kegiatan	01	Layanan Internal Kelengkapan						10	Laporan



05 5075 257 5-0423-0408

DAFTAR ISI/AN PELAKSANAAN ANGGARAN BADAN LAYANAN UMUM PETIKAN

TAHUN ANGGARAN 2020

NOMOR : DIPA - 033.16.1.631021/2020

IA. INFORMASI KINERJA

Kuasa Pengguna Anggaran : Ir. Monhial, Dipl. SE
Bendahara Pengeluaran : Bka Nisfian, SE
Pejabat Penanda Tangan SPM : Dede Solihin, SE

KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT

Unit Organisasi : [16] DITJEN PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN

Provinsi : [01] DKI JAKARTA

Kode/Nama Saker : [031021] BADAN LAYANAN UMUM [BLU] PUSAT PENGELOLAAN DANA PEMBIAYAAN PERUMAHAN

Informasi BLU:

1. Status BLU : Peruli

2. Besaran Persentase Ambang Batas : 50,00% dan PNPB

3. Saldo Awal Kas BLU : RP. 1.252.902.898.838

Output Kegiatan		4200.005	Pengawasan Internal dan Pembinaan Manajemen	28 Laporan	1.997.094.000
Indikator Output Kegiatan	01		Pengawasan Internal dan Pembinaan Manajemen	28	
Output Kegiatan	4200.951		Layanan Sarana dan Prasarana Internal	1 Layanan	500.000.000
Indikator Output Kegiatan	02		Jumlah Pengadaan perangkat pengolah data dan komunikasi = xx unit	1	
	03		Jumlah Pengadaan peralatan fasilitas perkantoran = xx unit	1	
Output Kegiatan	4200.994		Layanan Perkantoran	1 Layanan	43.813.497.000
Indikator Output Kegiatan	01		Realisasi pembayaran Gaji dan Tunjangan = xx %	1	
	02		Realisasi penyediaan layanan operasional dan pemeliharaan kantor = xx %	1	

Halaman : IA.2

Jakarta, 12 November 2019
a.n. MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
SEKRETARIS JENDERAL

td.

Prof. ANITA FIRMANTI
NIP. 196006151987032001

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN BADAN LAYANAN UMUM PETIKAN

TAHUN ANGGARAN 2020

NOMOR : DIPA- 033.16.1.631021/2020

IB. SUMBER DANA

Kementerian Negara/Lembaga : [033}

Unit Organisasi : [16}

Provinsi : [01}

Kode/Nama Satker : [031021}

KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT

DITJEN PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN

DKI JAKARTA

BADAN LAYANAN UMUM (BLU) PUSAT PENGELOLAAN DANA PEMBIAYAAN PERUMAHAN

Halaman : I B. 1



DS 5076-257-5-0423-0403

1. Anggaran Tahun 2020	Rp.	71.993.524.000	Kel :	a. Pinjaman Luar Negeri	(1) Valuta Asing	US\$	Pagu	0 Rp.	Ekuivalen Ru piah	0
1. Rupiah Mumi	Rp.	0			(2) RPLN	US\$		0 Rp.		0
2. PNBP	Rp.	71.993.524.000		b. Hibah Luar Negeri	(1) Valuta Asing	US\$		0 Rp.		0
3. Pinjaman/Hibah Luar Negeri	Rp.	0			(2) RHLN	US\$		0 Rp.		0
4. Pinjaman/Hibah Dalam Negeri	Rp.	0		c. Pinjaman Dalam Negeri		IDR		0 Rp.		0
5. Hibah Langsung	Rp.	0		d. Hibah Dalam Negeri		IDR		0 Rp.		0
6. SBSN PBS	Rp.	0		e. Hibah Luar Negeri Langsung		IDR		0 Rp.		0
2. Rincian Pinjaman / Hibah :				f. Hibah Dalam Negeri Langsung		IDR		0 Rp.		0

(dalam ribuan rupiah)

No.	SUMBER PINJAMAN DAN HIBAH No. NPPH per Tahun No. Register		PAGU TAHUN INI		RINCIAN DANA BERDASARKAN CARA PENARIKAN		DANA PENDAMPING			
	Kode	Uraian	Kode	Dana	Kode	Dana	Rp. Rdp	Rp. LN	Rp. Loc.Cost	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	

NPPH : Naskah Penjelasan Pinjaman dan/atau Hibah



05 5076 257 5-0423-0403

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN BADAN LAYANAN UMUM PETIKAN

TAHUN ANGGARAN 2020
NOMOR : DIPA- 033.16.1.631021/2020

I. RINCIAN PENGELUARAN

Kementerian Negara/Lembaga : [033] KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT

Unit Organisasi : [16] DITJEN PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN

Provinsi : [01] DKI JAKARTA

Kode/Nama Saker : [831021] BADAN LAYANAN UMUM (BLU) PUSAT PENGELOLAAN DANA PEMBIAYAAN PERUMAHAN

Kewenangan : [KP]

Halaman : II. 1

{dalam ribuan rupiah}

KODE	URAIAN SATKER/PROGRAM/KEGIATAN/OUTPUT/SUMBER DANA	BELANJA						LOKASI/ KPPN	CARA PENARIKAN/ REGISTER
		PEGAWAI [31]	BARANG [32]	MODAL [33]	BANTUAN SOSIAL [37]	LAIN-LAIN [38]	JUMLAH SELURUH		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
63.021	BADAN LAYANAN UMUM (BLU) PUSAT PENGELOLAAN DANA PEMBIAYAAN PERUMAHAN	-	71.433.324	500.000	-	-	71.933.324	-	-
033.16.16	Program Pengembangan Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan	-	71.433.324	500.000	-	-	71.933.324	-	-
42.00	Dukungan Penyaluran Bantuan Pembiayaan Perumahan	-	71.433.324	500.000	-	-	71.933.324	-	-
4200.001	Layanan Promosi, Kejasama dan Verifikasi [PN]	-	8.550.000	-	-	-	8.550.000	01.00	-
08 BLU		-	8.550.000	-	-	-	8.550.000	139	-
4200.002	Layanan Bidang Pencanaan, Tata Laksana dan Pelaporan	-	8.497.000	-	-	-	8.497.000	01.00	-
08 BLU		-	8.497.000	-	-	-	8.497.000	139	-
4200.003	Layanan Teknologi Informasi dan Pemantauan Evaluasi	-	5.700.000	-	-	-	5.700.000	01.00	-
08 BLU		-	5.700.000	-	-	-	5.700.000	139	-
4200.004	Layanan Internal Kelambagaan	-	5.095.933	-	-	-	5.095.933	01.00	-
08 BLU		-	5.095.933	-	-	-	5.095.933	139	-
4200.005	Pengawasan Internal dan Pembinaan Manajemen	-	1.997.094	-	-	-	1.997.094	01.00	-
08 BLU		-	1.997.094	-	-	-	1.997.094	139	-

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN BADAN LAYANAN UMUM PETIKAN

TAHUN ANGGARAN 2020

NOMOR : DIPA- 033.16.1.631021/2020

I. RINCIAN PENGELUARAN

Kementerian Negara/Lembaga : [033] KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
 Unit Organisasi : [16] DITJEN PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN
 Provinsi : [01] DKI JAKARTA
 Kode/Nama Satker : [831021] BADAN LAYANAN UMUM (BLU) PUSAT PENGELOLAAN DANA PEMBIAYAAN PERUMAHAN
 Kewenangan : [KP]

Halaman : II. 2

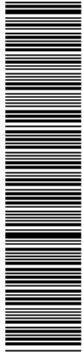
{dalam ribuan rupiah}

KODE	URAIAN SATKER/PROGRAM/KEGIATAN/OUTPUT/SUMBER DANA	BELANJA						LOKASI/ KPPN	CARA PENARIKAN/ REGISTER
		PEGAWAI [51]	BARANG [52]	MODAL [53]	BANTUAN SOSIAL [57]	LAIN-LAIN [58]	JUMLAH SELURUH [59]		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4200.951	Layanan Sarana dan Prasarana Internal	-	-	500.000	-	-	500.000	01.00	
08 BLU		-	-	500.000	-	-	500.000	139	
4200.994	Layanan Perkantoran	-	43.813.497	-	-	-	43.813.497	01.00	
08 BLU		-	43.813.497	-	-	-	43.813.497	139	
	JUMLAH	-	71.433.524	500.000	-	-	71.933.524		

Jakarta, 12 November 2019
 a.n. MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
 SEKRETARIS JENDERAL

td.

Prof. ANITA FIRMANTI
 NIP.196008151987032001



05 5076 257 5-0423-0408

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN BADAN LAYANAN UMUM PETIKAN

TAHUN ANGGARAN 2020

NOMOR : DIPA - 033.16.1.631021/2020

III. RENCANA PENARIKAN DANA DAN PERKIRAAN PENERIMAAN

Kementerian Negara/Lembaga : [033} KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT

Unit Organisasi : [18} DITJEN PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN

Provinsi : [01} DKI JAKARTA

Kode/Name Satker : [831021} BADAN LAYANAN UMUM (BLU) PUSAT PENGELOLAAN DANA PEMBIAYAAN PERUMAHAN

Halaman : II. 1
(dalam ribuan rupiah)

NO	KODE	URAIAN SATKER	RENCANA PENARIKAN												JUMLAH SELURUH
			JANUARI	FEBRUARI	MARET	APRIL	MAY	JUNI	JULI	AGUSTUS	SEPTEMBER	OKTOBER	NOVEMBER	DESEMBER	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
033.16.16.42.00	631021	BADAN LAYANAN UMUM (BLU) PUSAT PENGELOLAAN DANA PEMBIAYAAN PERUMAHAN													
		RENCANA PENARIKAN DANA	659.422	1.473.152	2.576.396	3.935.633	4.136.773	4.596.976	7.961.337	7.773.776	8.430.953	8.391.041	9.626.327	12.167.328	71.963.524
		52 BELANJA BARANG	667.372	1.457.652	2.589.036	3.915.633	4.115.723	4.573.026	7.938.467	7.724.126	8.374.353	8.345.841	9.567.627	12.025.628	71.463.524
		53 BELANJA MODAL	2.090	15.500	20.360	20.200	21.050	25.950	43.080	49.650	56.600	45.200	58.700	141.700	900.000
		Dukungan Penyelenggaraan Bantian	659.422	1.473.152	2.576.396	3.935.633	4.136.773	4.596.976	7.961.337	7.773.776	8.430.953	8.391.041	9.626.327	12.167.328	71.963.524
		Pembayaran Perumahan	667.372	1.457.652	2.589.036	3.915.633	4.115.723	4.573.026	7.938.467	7.724.126	8.374.353	8.345.841	9.567.627	12.025.628	71.463.524
		52 BELANJA BARANG DAN BARANG													
		53 BELANJA MODAL	2.090	15.500	20.360	20.200	21.050	25.950	43.080	49.650	56.600	45.200	58.700	141.700	900.000
		PERKIRAAN PENERIMAAN	22.515.751	22.515.751	22.515.751	22.515.751	22.515.751	22.515.751	22.515.751	22.515.751	22.515.751	22.515.751	22.515.751	22.515.751	270.890.000
		- PNBPP YANG DIGUNAKAN LANGSUNG	11.463.033	11.463.033	11.463.033	11.463.033	11.463.033	11.463.033	11.463.033	11.463.033	11.463.033	11.463.033	11.463.033	11.463.033	137.796.390
		[424134}													
		- PNBPP YANG DIGUNAKAN LANGSUNG	2.026.418	2.026.418	2.026.418	2.026.418	2.026.418	2.026.418	2.026.418	2.026.418	2.026.418	2.026.418	2.026.418	2.026.418	24.317.010
		[424135}													
		- PNBPP YANG DIGUNAKAN LANGSUNG	9.006.300	9.006.300	9.006.300	9.006.300	9.006.300	9.006.300	9.006.300	9.006.300	9.006.300	9.006.300	9.006.300	9.006.300	108.079.600
		[424911}													

Jakarta, 12 November 2019
a.n. MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
SEKRETARIS JENDERAL

td.

Prof. ANITA FIRMANTI
NIP 196008151987032001

DAFTAR ISI PELAKSANAAN ANGGARAN BADAN LAYANAN UMUM PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2020
NOMOR : DIPA - 033.16.1.631021/2020
W A. B L O K I R



DS 5076-2375-0423-0408

Kementerian Negara/Lembaga : [033] KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
Unit Organisasi : [16] DITJEN PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN
Provinsi : [01] DKI JAKARTA
Kode dan Nama Satker : [631 021] BADAN LAYANAN UMUM (BLU) PUSAT PENGELOLAAN DANA PEMBIAYAAN PERUMAHAN

Halaman : W.A. 1
(dalam ribuan rupiah)

KODE	URAIAN	KODE	URAIAN

Jakarta, 12 November 2019
a.n. MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
SEKRETARIS JENDERAL

td.
Prof. ANITA FIRMANTI
NIP. 196006151987032001

**DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN BADAN LAYANAN UMUM PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2020
NOMOR : DIPA - 033.16.1.631 021/2020
N B. C A T A N**



DS 5076 257 5-0423-0408

Kementerian Negara/Lembaga : [033] KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
Unit Organisasi : [16] DITJEN PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN
Provinsi : [01] DKI JAKARTA
Kode dan Nama Satker : [031 021] BADAN LAYANAN UMUM (BLU) PUSAT PENGELOLAAN DANA PEMBIAYAAN PERUMAHAN

Halaman : IV.B. 1
(dalam ribuan rupiah)

KODE	URAIAN	KODE	URAIAN

Jakarta, 12 November 2019
a.n. MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
SEKRETARIS JENDERAL

td.
Prof. ANITA FIRMANTI
NIP. 196006151987032001

DIPA 033 Revisi 2



05.07.27-0637-5835-6187

Revisi ke 02
Tanggal : 16 April 2020

SURAT PENGESAHAN DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN BADAN LAYANAN UMUM PETIKAN TAHUN ANGGARAN 2020

NOMOR : SP DIPA- 033.16.1.631021/2020

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
LAMPIRAN : Satu set DIPA Petikan



A. Dasar Hukum:

1. UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
2. UU No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.
3. UU No. 20 Tahun 2019 tentang APBN TA 2020

B. Dengan ini disahkan Alokasi Anggaran Untuk:

1. Kementerian Negara/Lembaga : [033} KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
2. Unit Organisasi : [16} CIT-JEN PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN
3. Provinsi : [01} DKI JAKARTA
4. Kode/Nama Sarker : [B31021} BADAN LAYANAN UMUM (BLU) PUSAT PENGELOLAAN DANA PEMBIAYAAN PERUMAHAN
 - a. Status BLU : Penun
 - b. Besaran Presentase Ambang Batas : 50% dari PNB

Sebesar : Rp. 71.953.524.000 | TUUHPULUH SATU MILIAR SEMBILAN RATUS LIMA PULUHTIGA JUTA LIMA RATUS DUA PULUH EMPAT RIBU RUPIAH }

Untuk kegiatan-kegiatan sebagai berikut :

Kode dan Nama Fungsi dan Sub Fungsi :

06 PERUMAHAN DAN FASILITAS UMUM

06.01 PEMBANGUNAN PERUMAHAN

Kode dan Nama Program dan Kegiatan :

033.16 Program Pengembangan Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan

033.16.18.4200 Dukungan Penyaluran Bantuan Pembiayaan Perumahan

C. Sumber Dana Bersifat Dari :

1. Rupiah Murni	Rp.	0	4. Pinjaman/Hibah Dalam Negeri	Rp.	0	Jumlah Uang	Rp.	71.953.524.000
2. PNB	Rp.	71.953.524.000	- Pinjaman Dalam Negeri	Rp.	0		Rp.	71.953.524.000
- Penggunaan Saldo Awal BLU	Rp.	0	- Hibah Dalam Negeri	Rp.	0			
3. Pinjaman/Hibah Luar Negeri	Rp.	0	5. Hibah Langsung	Rp.	0			
- Pinjaman Luar Negeri	Rp.	0	- Hibah Luar Negeri Langsung	Rp.	0			
- Hibah Luar Negeri	Rp.	0	- Hibah Dalam Negeri Langsung	Rp.	0			
	Rp.	0	6. SBSN PBS	Rp.	0			

D. Pencapaian data dilakukan melalui :

1. KPPN JAKARTA II

E. Pernyataan Syarat dan Ketentuan [Disclaimer]

1. DIPA Petikan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari DIPA Induk [Nama Program, Unit Organisasi dan Kementerian Negara/Lembaga].
2. DIPA Petikan ini dibuat secara otomatis melalui sistem yang dilengkapi dengan kode pengaman berupa digital stamp sebagai pengganti tanda tangan pengesahan [identifikasi].
3. DIPA Petikan berfungsi sebagai dasar pelaksanaan kegiatan satker dan pencairan dana/pengesahan bagi Bendahara Umum Negara/Kuasa Bendahara Umum Negara.
4. Rencana Penarikan Dana dan Petikan Penarikan yang tercantum dalam Halaman III DIPA diisi sesuai dengan rencana pelaksanaan kegiatan.
5. Tanggung jawab terhadap penggunaan anggaran yang tercantum dalam DIPA Petikan sepenuhnya berada pada Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran.
6. Dalam hal terdapat perbedaan data antara DIPA Petikan dengan database RKA-K/L-DIPA Kementerian Keuangan maka yang berlaku adalah data yang terdapat di dalam database RKA-K/L-DIPA Kementerian Keuangan [berdasarkan bukti-bukti yang ada].
7. DIPA Petikan berlaku sejak tanggal 1 Januari 2020 sampai dengan 31 Desember 2020.

Jakarta, 12 November 2019
A/N MENTERI KEUANGAN
DIREKTUR JENDERAL ANGGARAN

td.
ASKOLANI
NIP. 196808111992021001



03.07.27-0637-3835-6187

DAFTAR ISI/AN PELAKSANAAN ANGGARAN BADAN LAYANAN UMUM PETIKAN

TAHUN ANGGARAN 2020

NOMOR : DIPA - 033.16.1.631021/2020

IA. INFORMASI KINERJA

Kuasa Pengguna Anggaran : MONHILAL
Bendahara Pengeluaran : BKA NISFIASARI
Pejabat Penanda Tangan SPM : DEDE SOLIHIN

KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT

Unit Organisasi : [16] DITJEN PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN

Provinsi : [01] DKI JAKARTA

Kode/Nama Sektir : [031021] BADAN LAYANAN UMUM [BLU] PUSAT PENGELOLAAN DANA PEMBIAYAAN PERUMAHAN

Informasi BLU:

1. Status BLU : Peruli

2. Besaran Persentase Ambang Batas : 50,00% dan PNPB

3. Saldo Awal Kas BLU : RP. 1.252.902.898.833

Output Kegiatan		4200.005	Pengawasan Internal dan Pembinaan Manajemen	28 Laporan	Laporan	1.997.094.000
Indikator Output Kegiatan		01	Pengawasan Internal dan Pembinaan Manajemen	28		
Output Kegiatan		4200.951	Layanan Sarana dan Prasarana Internal	1 Layanan	Layanan	500.000.000
Indikator Output Kegiatan		02	Jumlah Pengadaan perangkat pengolah data dan komunikasi = xx unit	1	Layanan	
		03	Jumlah Pengadaan peralatan fasilitas perkantoran = xx unit	1	Layanan	
Output Kegiatan		4200.994	Layanan Perkantoran	1 Layanan	Layanan	43.813.497.000
Indikator Output Kegiatan		01	Realisasi pembayaran Gaji dan Tunjangan = xx %	1	Layanan	
		02	Realisasi penyediaan layanan operasional dan pemeliharaan kantor = xx %	1	Layanan	

Halaman : IA.2

Jakarta, 12 November 2019
a.n. MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
SEKRETARIS JENDERAL

td.

Prof. ANITA FIRMANTI
NIP. 196006151987032001

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN BADAN LAYANAN UMUM PETIKAN

TAHUN ANGGARAN 2020

NOMOR : DIPA- 033.16.1.631021/2020

IA. INFORMASI KINERJA



03.07.27-0637-5835-6187

Kuasa Pengguna Anggaran : MONHILAL
Bendahara Pengeluaran : EKA NISFIASARI
Pejabat Penanda Tangan SPM : DEDE SOLIHIN

Kementerian Negara/Lembaga : 0033 KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT

Unit Organisasi : 116 DIJEN PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN

Provinsi : 01 DKI JAKARTA

Kode/Nama Satker : 1831021 BADAN LAYANAN UMUM (BLU) PUSAT PENGELOLAAN DANA PEMBIAYAAN PERUMAHAN

Informasi BLU:

1. Status BLU : Peraih

2. Besaran Persentase Ambang Batas : 50,00% dan PNPB

3. Saldo Awal Kas BLU : RP. 1.252.902.898.833

PERUMAHAN DAN FASILITAS UMUM									
1 Fungsi	08	PERUMAHAN DAN FASILITAS UMUM							Halaman : IA.1
Sub Fungsi	08.01	PEMBANGUNAN PERUMAHAN							71.953.524.000
2 Program	033.16.18	Program Pengembangan Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan							71.953.524.000
Sasaran Program	01	Meningkatnya Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan							71.953.524.000
Indikator Kinerja Program	01	Tingkat Ketersediaan Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan						18	%
	02	Tingkat Aksesibilitas Rumah Tangga Berpenghasilan Rendah Terhadap Kemudahan dan/atau Bantuan serta Fasilitas Pembiayaan Perumahan						15	%
Output Program	02	Jumlah MBR yang mendapat Kemudahan dan/atau Bantuan serta Fasilitas Pembiayaan Perumahan							
	01	Rasio Rumah Tangga Berpenghasilan Rendah yang mendapat Kemudahan dan/atau Bantuan serta Fasilitas Pembiayaan Perumahan						15	%
Indikator Output Program	02	Jumlah Paket Pembiayaan Perumahan						1	Jumlah Paket Pembiayaan
	03	Dukungan penyaluran dan pengelanaan dana pembiayaan perumahan						91	Laporan
Kegiatan	4200	Dukungan Penyaluran Bantuan Pembiayaan Perumahan							71.953.524.000
Sasaran Kegiatan	01	Terselenggaranya dukungan penyaluran dan pengelanaan dana pembiayaan perumahan							
	01	Jumlah Unit Rumah yang diverifikasi untuk menerima pembiayaan perumahan							
Indikator Kinerja Kegiatan	02	Jumlah Lembaga Jasa Keuangan yang menyalurkan pembiayaan perumahan							
	03	Dukungan penyaluran dan pengelanaan dana pembiayaan perumahan							
Output Kegiatan	4200.001	Layanan Promosi, Kejasama dan Verifikasi [PNJ]						12 Unit Rumah	8.550.000.000
Indikator Output Kegiatan	01	Layanan Promosi, Kejasama dan Verifikasi						110000	Unit Rumah
	01	Layanan Bidang Perencanaan, Tata Laksana dan Pelaporan						12 Lembaga	8.497.000.000
Output Kegiatan	4200.003	Layanan Teknologi Informasi dan Pemantauan Evaluasi						5 Laporan	5.700.000.000
	01	Layanan Teknologi Informasi dan Pemantauan Evaluasi						5	Laporan
Output Kegiatan	4200.004	Layanan Internal Kelembagaan						10 Laporan	5.086.933.000
	01	Layanan Internal Kelembagaan						10	Laporan

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN BADAN LAYANAN UMUM PETIKAN

TAHUN ANGGARAN 2020

NOMOR : DIPA- 033.16.1.631021/2020

IB. SUMBER DANA

Kementerian Negara/Lembaga : [033}

Unit Organisasi : [16}

Provinsi : [01}

Kode/Nama Salter : [031021}

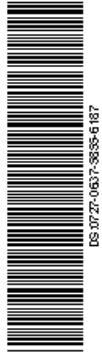
KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT

DITJEN PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN

DKI JAKARTA

BADAN LAYANAN UMUM (BLU) PUSAT PENGELOLAAN DANA PEMBIAYAAN PERUMAHAN

Halaman : I B. 1



03.07.27-0637-5835-6187

1. Anggaran Tahun 2020	Rp.	71.993.524.000	Kel :	a. Pinjaman Luar Negeri	(1) Valuta Asing	US\$	Pagu	0 Rp.	0 Rp.	Ekuivalen Ru piah	0
1. Ru piah Mumi	Rp.	0			(2) RPLN	US\$		0 Rp.	0 Rp.		0
2. PNB	Rp.	71.993.524.000		b. Hibah Luar Negeri	(1) Valuta Asing	US\$		0 Rp.	0 Rp.		0
3. Pinjaman/Hibah Luar Negeri	Rp.	0			(2) RHLN	US\$		0 Rp.	0 Rp.		0
4. Pinjaman/Hibah Dalam Negeri	Rp.	0		c. Pinjaman Dalam Negeri		IDR		0 Rp.	0 Rp.		0
5. Hibah Langsung	Rp.	0		d. Hibah Dalam Negeri		IDR		0 Rp.	0 Rp.		0
6. SBSN PBS	Rp.	0		e. Hibah Luar Negeri Langsung		IDR		0 Rp.	0 Rp.		0
2. Rincian Pinjaman / Hibah :				f. Hibah Dalam Negeri Langsung		IDR		0 Rp.	0 Rp.		0

(dalam ribuan rupiah)

No.	SUMBER PINJAMAN DAN HIBAH No. NPPH per Tahun No. Register		PAGU TAHUN INI		RINCIAN DANA BERDASARKAN CARA PENARIKAN		DANA PENDAMPING			
	Kode	Uraian	Kode	Dana	Kode	Dana	Rp. Rdp	Rp. LN	Rp. Loc.Cost	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	

NPPH : Naskah Perjanjian Pinjaman dan/atau Hibah

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN BADAN LAYANAN UMUM PETIKAN

TAHUN ANGGARAN 2020

NOMOR : DIPA- 033.16.1.631021/2020

I. RINCIAN PENGELUARAN

Kementerian Negara/Lembaga : [033} KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
 Unit Organisasi : [16} DIREKTORAT PEMBAYARAN INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN
 Provinsi : [01} DKI JAKARTA
 Kode/Nama Satker : [831021} BADAN LAYANAN UMUM (BLU) PUSAT PENGELOLAAN DANA PEMBIAYAAN PERUMAHAN
 Kewenangan : [KP}

Halaman : II. 2

{dalam ribuan rupiah}

KODE	URAIAN SATKER/PROGRAM/KEGIATAN/OUTPUT/SUMBER DANA	BELANJA						LOKASI/ KPPN	CARA PENARIKAN/ REGISTER
		PEGAWAI [31]	BARANG [32]	MODAL [33]	BANTUAN SOSIAL [37]	LAIN-LAIN [38]	JUMLAH SELURUH [39]		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4200.951	Layanan Sarana dan Prasarana Internal	-	-	500.000	-	-	500.000	01.00	
08 BLU		-	-	500.000	-	-	500.000	019	
4200.994	Layanan Perkantoran	-	43.813.497	-	-	-	43.813.497	01.00	
08 BLU		-	43.813.497	-	-	-	43.813.497	019	
	JUMLAH	-	71.433.524	500.000	-	-	71.933.524		

Jakarta, 12 November 2019
 a.n. MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
 SEKRETARIS JENDERAL

td.

Prof. ANITA FIRMANTI
 NIP.196008151987032001

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN BADAN LAYANAN UMUM PETIKAN

TAHUN ANGGARAN 2020

NOMOR : DIPA- 033.16.1.631021/2020

I. RINCIAN PENGELUARAN

Kementerian Negara/Lembaga : [033] KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT

Unit Organisasi : [16] DITJEN PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN

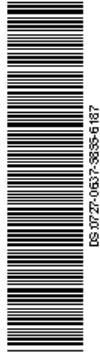
Provinsi : [01] DKI JAKARTA

Kode/Nama Saker : [831021] BADAN LAYANAN UMUM (BLU) PUSAT PENGELOLAAN DANA PEMBIAYAAN PERUMAHAN

Kewenangan : [KP]

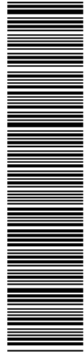
Halaman : II. 1

{dalam ribuan rupiah}



03.07.27-0637-3835-6187

KODE	URAIAN SATKER/PROGRAM/KEGIATAN/OUTPUT/SUMBER DANA	BELANJA						LOKASI/ KPPN	CARA PENARIKAN/ REGISTER
		PEGAWAI [31]	BARANG [32]	MODAL [33]	BANTUAN SOSIAL [37]	LAIN-LAIN [38]	JUMLAH SELURUH		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
63.021	BADAN LAYANAN UMUM (BLU) PUSAT PENGELOLAAN DANA PEMBIAYAAN PERUMAHAN	-	71.433.324	500.000	-	-	71.933.324	-	-
033.16.16	Program Pengembangan Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan	-	71.433.324	500.000	-	-	71.933.324	-	-
42.00	Dukungan Penyaluran Bantuan Pembiayaan Perumahan	-	71.433.324	500.000	-	-	71.933.324	-	-
4200.001	Layanan Promosi, Kejasama dan Verifikasi [PN]	-	8.550.000	-	-	-	8.550.000	01.00	-
08 BLU		-	8.550.000	-	-	-	8.550.000	019	-
4200.002	Layanan Bidang Pencanaaan, Tata Laksana dan Pelaporan	-	8.497.000	-	-	-	8.497.000	01.00	-
08 BLU		-	8.497.000	-	-	-	8.497.000	019	-
4200.003	Layanan Teknologi Informasi dan Pemantauan Evaluasi	-	5.700.000	-	-	-	5.700.000	01.00	-
08 BLU		-	5.700.000	-	-	-	5.700.000	019	-
4200.004	Layanan Internal Kelambagaan	-	5.095.933	-	-	-	5.095.933	01.00	-
08 BLU		-	5.095.933	-	-	-	5.095.933	019	-
4200.005	Pengawasan Internal dan Pembinaan Manajemen	-	1.997.094	-	-	-	1.997.094	01.00	-
08 BLU		-	1.997.094	-	-	-	1.997.094	019	-



05.07.27-0637-5835-6187

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN BADAN LAYANAN UMUM PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2020

NOMOR : DIPA - 033.16.1.631021/2020

III. RENCANA PENARIKAN DANA DAN PERKIRAAN PENERIMAAN

Kementerian Negara/Lembaga : [033] KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT

Unit Organisasi : [16] DITJEN PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN

Provinsi : [01] DKI JAKARTA

Kode/Nama Satker : [831021] BADAN LAYANAN UMUM (BLU) PUSAT PENGELOLAAN DANA PEMBIAYAAN PERUMAHAN

Halaman : II. 1
(dalam ribuan rupiah)

NO	KODE	URAIAN SATKER	RENCANA PENARIKAN												JUMLAH SELURUH
			JANUARI	FEBRUARI	MARET	APRIL	MAY	JUNI	JULI	AGUSTUS	SEPTEMBER	OKTOBER	NOVEMBER	DESEMBER	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
033.16.16.42.00	631021	BADAN LAYANAN UMUM (BLU) PUSAT PENGELOLAAN DANA PEMBIAYAAN PERUMAHAN													
		RENCANA PENARIKAN DANA	5.995.641	5.995.641	5.995.641	5.995.641	5.995.641	5.995.641	5.995.641	5.995.641	5.995.641	5.995.641	5.995.641	5.995.641	71.963.524
		52 BELANJA BARANG	5.995.641	5.995.641	5.995.641	5.995.641	5.995.641	5.995.641	5.995.641	5.995.641	5.995.641	5.995.641	5.995.641	5.995.641	71.963.524
		53 BELANJA MODAL	41.664	41.664	41.664	41.664	41.664	41.664	41.664	41.664	41.664	41.664	41.664	41.664	300.000
		Dukungan Penyaluran Bantuan Pembiayaan Perumahan	5.995.641	5.995.641	5.995.641	5.995.641	5.995.641	5.995.641	5.995.641	5.995.641	5.995.641	5.995.641	5.995.641	5.995.641	71.963.524
033.16.16.42.00	631021	PERKIRAAN PENERIMAAN													
		Dukungan Penyaluran Bantuan Pembiayaan Perumahan	22.315.751	22.315.751	22.315.751	22.315.751	22.315.751	22.315.751	22.315.751	22.315.751	22.315.751	22.315.751	22.315.751	22.315.751	270.890.000
		- PNBYP YANG DIGUNAKAN LANGSUNG	11.463.033	11.463.033	11.463.033	11.463.033	11.463.033	11.463.033	11.463.033	11.463.033	11.463.033	11.463.033	11.463.033	11.463.033	137.796.390
		- PNBYP YANG DIGUNAKAN LANGSUNG	2.026.418	2.026.418	2.026.418	2.026.418	2.026.418	2.026.418	2.026.418	2.026.418	2.026.418	2.026.418	2.026.418	2.026.418	24.317.010
		- PNBYP YANG DIGUNAKAN LANGSUNG	9.006.300	9.006.300	9.006.300	9.006.300	9.006.300	9.006.300	9.006.300	9.006.300	9.006.300	9.006.300	9.006.300	9.006.300	108.075.600

Jakarta, 12 November 2019
a.n. MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
SEKRETARIS JENDERAL

td.

Prof. ANITA FIRMANTI
NIP.196008151987032001

DAFTAR ISI PELAKSANAAN ANGGARAN BADAN LAYANAN UMUM PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2020
NOMOR : DIPA - 033.16.1.631021/2020
W A. B L O K I R



DS 07.27-0637-5835-6187

Kementerian Negara/Lembaga : [033] KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
Unit Organisasi : [16] DITJEN PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN
Provinsi : [01] DKI JAKARTA
Kode dan Nama Satker : [631 021] BADAN LAYANAN UMUM (BLU) PUSAT PENGELOLAAN DANA PEMBIAYAAN PERUMAHAN

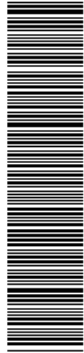
Halaman : W.A. 1
(dalam ribuan rupiah)

KODE	URAIAN	KODE	URAIAN

Jakarta, 12 November 2019
a.n. MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
SEKRETARIS JENDERAL

td.
Prof. ANITA FIRMANTI
NIP. 196006151987032001

**DAFTAR ISI PELAKSANAAN ANGGARAN BADAN LAYANAN UMUM PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2020
NOMOR : DIPA - 033.16.1.631021/2020
W B. C A T A N**



DS 07.27-0637-5835-6187

Kementerian Negara/Lembaga : [033] KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
Unit Organisasi : [16] DITJEN PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN
Provinsi : [01] DKI JAKARTA
Kode dan Nama Satker : [631 021] BADAN LAYANAN UMUM (BLU) PUSAT PENGELOLAAN DANA PEMBIAYAAN PERUMAHAN

Halaman : IV.B. 1
(dalam ribuan rupiah)

KODE	URAIAN	KODE	URAIAN

Jakarta, 12 November 2019
a.n. MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
SEKRETARIS JENDERAL

td.
Prof. ANITA FIRMANTI
NIP. 196006151987032001

DIPA 033 Revisi 3



05.07.27-0637-5835-6187

Revisi ke 03
Tanggal : 05 Mei 2020

SURAT PENGESAHAN DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN BADAN LAYANAN UMUM PETIKAN TAHUN ANGGARAN 2020

NOMOR : SP DIPA- 033.16.1.631021/2020

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
LAMPIRAN : Satu set DIPA Petikan



A. Dasar Hukum:

1. UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
2. UU No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.
3. UU No. 20 Tahun 2019 tentang APBN TA 2020

B. Dengan ini disahkan Alokasi Anggaran Untuk:

1. Kementerian Negara/Lembaga : [033} KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
2. Unit Organisasi : [16} CIT-JEN PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN
3. Provinsi : [01} DKI JAKARTA
4. Kode/Nama Saker : [B31021} BADAN LAYANAN UMUM (BLU) PUSAT PENGELOLAAN DANA PEMBIAYAAN PERUMAHAN
 - a. Status BLU : Pen u h
 - b. Besaran Presentase Ambang Batas : 50% dari PNB

Sebesar : Rp. 71.953.524.000 | TUUHPULUH SATU MILIAR SEMBILAN RATUS LIMA PULUHTIGA JUTA LIMA RATUS DUA PULUH EMPAT RIBU RUPIAH }

Untuk kegiatan-kegiatan sebagai berikut :

Kode dan Nama Fungsi dan Sub Fungsi :

06 PERUMAHAN DAN FASILITAS UMUM

06.01 PEMBANGUNAN PERUMAHAN

Kode dan Nama Program dan Kegiatan :

033.16 Program Pengembangan Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan

033.16.16.4200 Dukungan Penyaluran Bantuan Pembiayaan Perumahan

C. Sumber Dana Bersas Dari :

1. Rupiah Murni	Rp.	0	4. Pinjaman/Hibah Dalam Negeri	Rp.	0	Jumlah Uang	Rp.	71.953.524.000
2. PNB	Rp.	71.953.524.000	- Pinjaman Dalam Negeri	Rp.	0		Rp.	71.953.524.000
- Penggunaan Saldo Awal BLU	Rp.	0	- Hibah Dalam Negeri	Rp.	0			
3. Pinjaman/Hibah Luar Negeri	Rp.	0	5. Hibah Langsung	Rp.	0			
- Pinjaman Luar Negeri	Rp.	0	- Hibah Luar Negeri Langsung	Rp.	0			
- Hibah Luar Negeri	Rp.	0	- Hibah Dalam Negeri Langsung	Rp.	0			
	Rp.	0	6. SBSN PBS	Rp.	0			

D. Pencapaian data dilakukan melalui :

1. KPPN JAKARTA II

E. Pernyataan Syarat dan Ketentuan [Disclaimer]

1. DIPA Petikan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari DIPA Induk [Nama Program, Unit Organisasi dan Kementerian Negara/Lembaga].
2. DIPA Petikan ini dibuat secara otomatis melalui sistem yang dilengkapi dengan kode pengaman berupa digital stamp sebagai pengganti tanda tangan pengesahan [identifikasi].
3. DIPA Petikan berfungsi sebagai dasar pelaksanaan kegiatan satker dan pencairan dana/pengesahan bagi Bendahara Umum Negara/Kuasa Bendahara Umum Negara.
4. Rencana Penarikan Dana dan Petikan Penarikan yang tercantum dalam Halaman III DIPA diisi sesuai dengan rencana pelaksanaan kegiatan.
5. Tanggung jawab terhadap penggunaan anggaran yang tercantum dalam DIPA Petikan sepenuhnya berada pada Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran.
6. Dalam hal terdapat perbedaan data antara DIPA Petikan dengan database RKA-K/L-DIPA Kementerian Keuangan maka yang berlaku adalah data yang terdapat di dalam database RKA-K/L-DIPA Kementerian Keuangan [berdasarkan bukti-bukti yang ada].
7. DIPA Petikan berlaku sejak tanggal 1 Januari 2020 sampai dengan 31 Desember 2020.

Jakarta, 12 November 2019
A/N MENTERI KEUANGAN
DIREKTUR JENDERAL ANGGARAN

td.
ASKOLANI
NIP. 196806111992021001



03.07.27-0637-3835-6187

DAFTAR ISI/AN PELAKSANAAN ANGGARAN BADAN LAYANAN UMUM PETIKAN

TAHUN ANGGARAN 2020

NOMOR : DIPA - 033.16.1.631021/2020

IA. INFORMASI KINERJA

Kementerian Negara/Lembaga : [033] KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
 Unit Organisasi : [16] DITJEN PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN
 Provinsi : [01] DKI JAKARTA
 Kode/Nama Saklar : [031021] BADAN LAYANAN UMUM [BLU] PUSAT PENGELOLAAN DANA PEMBIAYAAN PERUMAHAN
 Informasi BLU:
 1. Status BLU : Peruli
 2. Besaran Persentase Ambang Batas : 50,00% dan PNPB

Kuasa Pengguna Anggaran : MONHILAL
 Bendahara Pengeluaran : BKA NISFIASARI
 Pejabat Penanda Tangan SPM : DEDE SOLIHIN

3. Saldo Awal Kas BLU : RP.
 4. Saldo Akhir Kas BLU : RP.

Halaman : IA.2

Output Kegiatan	4200.004	Layanan Internal Kelembagaan	10 Laporan	Laporan	5.086.933.000
Indikator Output Kegiatan	01	Layanan Internal Kelembagaan	10	Laporan	
Output Kegiatan	4200.005	Pengawasan Internal dan Pembinaan Manajemen	28 Laporan	Laporan	1.997.094.000
Indikator Output Kegiatan	01	Pengawasan Internal dan Pembinaan Manajemen	28	Laporan	
Output Kegiatan	4200.961	Layanan Sarana dan Prasarana Internal	1 Layanan	Layanan	500.000.000
Indikator Output Kegiatan	02	Jumlah Pengadaan perangkat pengolah data dan komunikasi = xx unit	1	Layanan	
	03	Jumlah Pengadaan peralatan fasilitas perkantoran = xx unit	1	Layanan	
Output Kegiatan	4200.964	Layanan Perkantoran	1 Layanan	Layanan	43.813.497.000
Indikator Output Kegiatan	01	Realisasi pembayaran Gaji dan Tunjangan = xx %	1	Layanan	
	02	Realisasi penyediaan layanan operasional dan pemeliharaan kantor = xx %	1	Layanan	

Jakarta, 12 November 2019
 a.n. MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
 SEKRETARIS JENDERAL

td.
 Prof. ANITA FIRMANTI
 NIP. 196006151987032001

DAFTAR ISI/AN PELAKSANAAN ANGGARAN BADAN LAYANAN UMUM PETIKAN

TAHUN ANGGARAN 2020

NOMOR : DIPA- 033.16.1.631021/2020

IA. INFORMASI KINERJA



03.07.27-0637-3835-6187

Kuasa Pengguna Anggaran : MONHILAL
Bendahara Pengeluaran : BKA NISFIASARI
Pejabat Penanda Tangan SPM : DEDE SOLIHIN

Kementerian Negara/Lembaga : [033] KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT

Unit Organisasi : [116] DITJEN PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN

Provinsi : [01] DKI JAKARTA

Kode/Nama Satker : [031021] BADAN LAYANAN UMUM (BLU) PUSAT PENGELOLAAN DANA PEMBIAYAAN PERUMAHAN

Informasi BLU:

1. Status BLU : Perulu

2. Besaran Persentase Ambang Batas : 50,00% dan PNPB

3. Saldo Awal Kas BLU : RP. 1.506.034.144,451

4. Saldo Akhir Kas BLU : RP. 1.506.034.144,451

Halaman : IA.1

1	Fungsi	06	PERUMAHAN DAN FASILITAS UMUM				71.953.524.000
	Sub Fungsi	06.01	PEMBANGUNAN PERUMAHAN				71.953.524.000
2	Program	033.16.16	Program Pengembangan Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan				71.953.524.000
	Sasaran Program	01	Meningkatnya Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan				
	Indikator Kinerja Program	01	Tingkat Ketersediaan Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan	18	%		
		02	Tingkat Aksesibilitas Rumah Tangga Berpenghasilan Rendah Terhadap Kemudahan dan/atau Bantuan serta Fasilitas Pembiayaan Perumahan	15	%		
	Output Program	02	Jumlah MBR yang mendapat Kemudahan dan/atau Bantuan serta Fasilitas Pembiayaan Perumahan				
	Indikator Output Program	01	Rasio Rumah Tangga Berpenghasilan Rendah yang mendapat Kemudahan dan/atau Bantuan serta Fasilitas Pembiayaan Perumahan	15	%		
		02	Jumlah Paket Pembiayaan Perumahan	1	Jumlah Paket Pembiayaan		
		03	Dukungan penyaluran dan pengelanaan dana pembiayaan perumahan	91	Laporan		
	Kegiatan	4200	Dukungan Penyaluran Bantuan Pembiayaan Perumahan				71.953.524.000
	Sasaran Kegiatan	01	Terselenggaranya dukungan penyaluran dan pengelanaan dana pembiayaan perumahan				
	Indikator Kinerja Kegiatan	01	Jumlah Unit Rumah yang diverifikasi untuk menerima pembiayaan perumahan				
		02	Jumlah Lembaga Jasa Keuangan yang menyalurkan pembiayaan perumahan				
		03	Dukungan penyaluran dan pengelanaan dana pembiayaan perumahan				
		01	Jumlah Unit Rumah yang diverifikasi untuk menerima pembiayaan perumahan				
		02	Jumlah Lembaga Jasa Keuangan yang menyalurkan pembiayaan perumahan				
		03	Dukungan penyaluran dan pengelanaan dana pembiayaan perumahan				
	Output Kegiatan	4200.001	Layanan Promosi, Kejasama dan Verifikasi [PN]	12	Unit Rumah		8.550.000.000
	Indikator Output Kegiatan	01	Layanan Promosi, Kejasama dan Verifikasi	110000	Unit Rumah		
	Output Kegiatan	4200.002	Layanan Bidang Perencanaan, Tata Laksana dan Pelaporan	12	Lembaga		8.497.000.000
	Indikator Output Kegiatan	01	Layanan Bidang Perencanaan, Tata Laksana dan Pelaporan	40	Lembaga		
	Output Kegiatan	4200.003	Layanan Teknologi Informasi dan Pemantauan Evaluasi	5	Laporan		5.700.000.000
	Indikator Output Kegiatan	01	Layanan Teknologi Informasi dan Pemantauan Evaluasi	5	Laporan		

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN BADAN LAYANAN UMUM PETIKAN

TAHUN ANGGARAN 2020

NOMOR : DIPA- 033.16.1.631021/2020

IB. SUMBER DANA

Kementerian Negara/Lembaga : [033}

Unit Organisasi : [16}

Provinsi : [01}

Kode/Nama Salter : [031021}

KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT

DITJEN PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN

DKI JAKARTA

BADAN LAYANAN UMUM (BLU) PUSAT PENGELOLAAN DANA PEMBIAYAAN PERUMAHAN

Halaman : I B. 1



03.07.27-0637-5835-6187

1. Anggaran Tahun 2020	Rp.	71.993.524.000	Kel :	a. Pinjaman Luar Negeri	(1) Valuta Asing	US\$	Pagu	0 Rp.	Ekuivalen Ru piah	0
1. Rupiah Mumi	Rp.	0			(2) RPLN	US\$		0 Rp.		0
2. PNBP	Rp.	71.993.524.000		b. Hibah Luar Negeri	(1) Valuta Asing	US\$		0 Rp.		0
3. Pinjaman/Hibah Luar Negeri	Rp.	0			(2) RHLN	US\$		0 Rp.		0
4. Pinjaman/Hibah Dalam Negeri	Rp.	0		c. Pinjaman Dalam Negeri		IDR		0 Rp.		0
5. Hibah Langsung	Rp.	0		d. Hibah Dalam Negeri		IDR		0 Rp.		0
6. SBSN PBS	Rp.	0		e. Hibah Luar Negeri Langsung		IDR		0 Rp.		0
2. Rincian Pinjaman / Hibah :				f. Hibah Dalam Negeri Langsung		IDR		0 Rp.		0

(dalam ribuan rupiah)

No.	SUMBER PINJAMAN DAN HIBAH No. NPPH per Tahun No. Register		PAGU TAHUN INI		RINCIAN DANA BERDASARKAN CARA PENARIKAN		DANA PENDAMPING			
	Kode	Uraian	Kode	Dana	Kode	Dana	Rp. Rdp	Rp. LN	Rp. Loc.Cost	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	

NPPH : Naskah Perjanjian Pinjaman dan/atau Hibah

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN BADAN LAYANAN UMUM PETIKAN

TAHUN ANGGARAN 2020

NOMOR : DIPA- 033.16.1.631021/2020

I. RINCIAN PENGELUARAN

Kementerian Negara/Lembaga : [033] KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT

Unit Organisasi : [16] DITJEN PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN

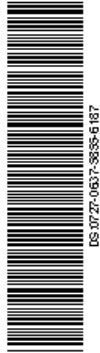
Provinsi : [01] DKI JAKARTA

Kode/Nama Saker : [831021] BADAN LAYANAN UMUM (BLU) PUSAT PENGELOLAAN DANA PEMBIAYAAN PERUMAHAN

Kewenangan : [KP]

Halaman : II. 1

{dalam ribuan rupiah}



03.07.27-0637-3835-6187

KODE	URAIAN SATKER/PROGRAM/KEGIATAN/OUTPUT/SUMBER DANA	BELANJA						LOKASI/ KPPN	CARA PENARIKAN/ REGISTER
		PEGAWAI [31]	BARANG [32]	MODAL [33]	BANTUAN SOSIAL [37]	LAIN-LAIN [38]	JUMLAH SELURUH		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
63.021	BADAN LAYANAN UMUM (BLU) PUSAT PENGELOLAAN DANA PEMBIAYAAN PERUMAHAN	-	71.433.324	500.000	-	-	71.933.324	-	-
033.16.16	Program Pengembangan Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan	-	71.433.324	500.000	-	-	71.933.324	-	-
42.00	Dukungan Penyaluran Bantuan Pembiayaan Perumahan	-	71.433.324	500.000	-	-	71.933.324	-	-
4200.001	Layanan Promosi, Kejasama dan Verifikasi [PN]	-	8.550.000	-	-	-	8.550.000	01.00	-
08 BLU		-	8.550.000	-	-	-	8.550.000	019	-
4200.002	Layanan Bidang Pencanaaan, Tata Laksana dan Pelaporan	-	8.497.000	-	-	-	8.497.000	01.00	-
08 BLU		-	8.497.000	-	-	-	8.497.000	019	-
4200.003	Layanan Teknologi Informasi dan Pemantauan Evaluasi	-	5.700.000	-	-	-	5.700.000	01.00	-
08 BLU		-	5.700.000	-	-	-	5.700.000	019	-
4200.004	Layanan Internal Kelambagaan	-	5.095.933	-	-	-	5.095.933	01.00	-
08 BLU		-	5.095.933	-	-	-	5.095.933	019	-
4200.005	Pengawasan Internal dan Pembinaan Manajemen	-	1.997.094	-	-	-	1.997.094	01.00	-
08 BLU		-	1.997.094	-	-	-	1.997.094	019	-

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN BADAN LAYANAN UMUM PETIKAN

TAHUN ANGGARAN 2020

NOMOR : DIPA- 033.16.1.631021/2020

I. RINCIAN PENGELUARAN

Kementerian Negara/Lembaga : [033] KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
 Unit Organisasi : [16] DITJEN PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN
 Provinsi : [01] DKI JAKARTA
 Kode/Nama Satker : [831021] BADAN LAYANAN UMUM (BLU) PUSAT PENGELOLAAN DANA PEMBIAYAAN PERUMAHAN
 Kewenangan : [KP]

Halaman : II. 2

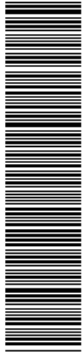
{dalam ribuan rupiah}

KODE	URAIAN SATKER/PROGRAM/KEGIATAN/OUTPUT/SUMBER DANA	BELANJA						LOKASI/ KPPN	CARA PENARIKAN/ REGISTER
		PEGAWAI [31]	BARANG [32]	MODAL [33]	BANTUAN SOSIAL [37]	LAIN-LAIN [38]	JUMLAH SELURUH [39]		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4200.951	Layanan Sarana dan Prasarana Internal	-	-	500.000	-	-	500.000	01.00	
08 BLU		-	-	500.000	-	-	500.000	019	
4200.994	Layanan Perkantoran	-	43.813.497	-	-	-	43.813.497	01.00	
08 BLU		-	43.813.497	-	-	-	43.813.497	019	
	JUMLAH	-	71.433.524	500.000	-	-	71.933.524		

Jakarta, 12 November 2019
 a.n. MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
 SEKRETARIS JENDERAL

td.

Prof. ANITA FIRMANTI
 NIP.196008151987032001



03.07.27-0637-3835-6187

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN BADAN LAYANAN UMUM PETIKAN

TAHUN ANGGARAN 2020

NOMOR : DIPA - 033.16.1.631021/2020

III. RENCANA PENARIKAN DANA DAN PERKIRAAN PENERIMAAN

Kementerian Negara/Lembaga : [033] KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT

Unit Organisasi : [118] DITJEN PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN

Provinsi : [01] DKI JAKARTA

Kode/Name Satker : [831021] BADAN LAYANAN UMUM (BLU) PUSAT PENGELOLAAN DANA PEMBIAYAAN PERUMAHAN

Halaman : II. 1
(dalam ribuan rupiah)

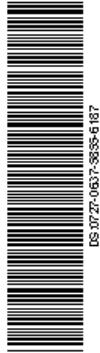
NO	KODE	URAIAN SATKER	RENCANA PENARIKAN												JUMLAH SELURUH
			JANUARI	FEBRUARI	MARET	APRIL	MAY	JUNI	JULI	AGUSTUS	SEPTEMBER	OKTOBER	NOVEMBER	DESEMBER	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
033.16.18.42.00	631021	BADAN LAYANAN UMUM (BLU) PUSAT PENGELOLAAN DANA PEMBIAYAAN PERUMAHAN													
		RENCANA PENARIKAN DANA	5.995.641	5.995.641	5.995.641	5.995.641	5.995.641	5.995.641	5.995.641	5.995.641	5.995.641	5.995.641	5.995.641	5.995.641	71.963.524
		52 BELANJA BARANG	5.995.641	5.995.641	5.995.641	5.995.641	5.995.641	5.995.641	5.995.641	5.995.641	5.995.641	5.995.641	5.995.641	5.995.641	71.963.524
		53 BELANJA MODAL	41.664	41.664	41.664	41.664	41.664	41.664	41.664	41.664	41.664	41.664	41.664	41.664	300.000
		Dukungan Penyaluran Bantuan Pembiayaan Perumahan	5.995.641	5.995.641	5.995.641	5.995.641	5.995.641	5.995.641	5.995.641	5.995.641	5.995.641	5.995.641	5.995.641	5.995.641	71.963.524
033.16.18.42.00	631021	PERKIRAAN PENERIMAAN													
		Dukungan Penyaluran Bantuan Pembiayaan Perumahan	22.315.751	22.315.751	22.315.751	22.315.751	22.315.751	22.315.751	22.315.751	22.315.751	22.315.751	22.315.751	22.315.751	22.315.751	270.890.000
		- PNBYP YANG DIGUNAKAN LANGSUNG	11.483.033	11.483.033	11.483.033	11.483.033	11.483.033	11.483.033	11.483.033	11.483.033	11.483.033	11.483.033	11.483.033	11.483.033	137.796.390
		- PNBYP YANG DIGUNAKAN LANGSUNG	2.026.418	2.026.418	2.026.418	2.026.418	2.026.418	2.026.418	2.026.418	2.026.418	2.026.418	2.026.418	2.026.418	2.026.418	24.317.010
		- PNBYP YANG DIGUNAKAN LANGSUNG	9.006.300	9.006.300	9.006.300	9.006.300	9.006.300	9.006.300	9.006.300	9.006.300	9.006.300	9.006.300	9.006.300	9.006.300	108.075.600

Jakarta, 12 November 2019
a.n. MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
SEKRETARIS JENDERAL

td.

Prof. ANITA FIRMANTI
NIP.196008151987032001

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN BADAN LAYANAN UMUM PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2020
NOMOR : DIPA - 033.16.1.631021/2020
W A. B L O K I R



DS 07.27-0637-5835-6187

Kementerian Negara/Lembaga : [033] KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
Unit Organisasi : [16] DITJEN PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN
Provinsi : [01] DKI JAKARTA
Kode dan Nama Satker : [631 021] BADAN LAYANAN UMUM (BLU) PUSAT PENGELOLAAN DANA PEMBIAYAAN PERUMAHAN

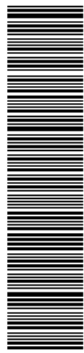
Halaman : W.A. 1
(dalam ribuan rupiah)

KODE	URAIAN	KODE	URAIAN

Jakarta, 12 November 2019
a.n. MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
SEKRETARIS JENDERAL

td.
Prof. ANITA FIRMANTI
NIP. 196006151987032001

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN BADAN LAYANAN UMUM PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2020
NOMOR : DIPA - 033.16.1.631021/2020
N B. C A T A N



DS 07.27-0637-5835-6187

Kementerian Negara/Lembaga : [033] KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
Unit Organisasi : [16] DITJEN PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN
Provinsi : [01] DKI JAKARTA
Kode dan Nama Satker : [631 021] BADAN LAYANAN UMUM (BLU) PUSAT PENGELOLAAN DANA PEMBIAYAAN PERUMAHAN

Halaman : IV.B. 1
(dalam ribuan rupiah)

KODE	URAIAN	KODE	URAIAN

Jakarta, 12 November 2019
a.n. MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
SEKRETARIS JENDERAL

td.
Prof. ANITA FIRMANTI
NIP. 196006151987032001

DIPA 033 Revisi 4



03 06 09 900 5 53 02 2450

Revisi ke 04
Tanggal : 14 Juni 2020

SURAT PENGESAHAN DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN BADAN LAYANAN UMUM PETIKAN TAHUN ANGGARAN 2020

NOMOR : SP DIPA- 033.16.1.631021/2020

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
LAMPIRAN : Satu set DIPA Petikan



A. Dasar Hukum:

1. UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
2. UU No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.
3. UU No. 20 Tahun 2019 tentang APBN TA 2020

B. Dengan ini disahkan Alokasi Anggaran Untuk:

1. Kementerian Negara/Lembaga : [033} KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
2. Unit Organisasi : [16} CIT-JEN PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN
3. Provinsi : [01} DKI JAKARTA
4. Kode/Nama Sarker : [B31021} BADAN LAYANAN UMUM (BLU) PUSAT PENGELOLAAN DANA PEMBIAYAAN PERUMAHAN
 - a. Status BLU : Pen u h
 - b. Besaran Presentase Ambang Batas : 50% dari PNB

Sebesar : Rp. 71.953.524.000 | TUUHPULUH SATU MILIAR SEMBILAN RATUS LIMA PULUHTIGA JUTA LIMA RATUS DUA PULUH EMPAT RIBU RUPIAH }

Untuk kegiatan-kegiatan sebagai berikut :

Kode dan Nama Fungsi dan Sub Fungsi :

06 PERUMAHAN DAN FASILITAS UMUM

06.01 PEMBANGUNAN PERUMAHAN

Kode dan Nama Program dan Kegiatan :

033.16 Program Pengembangan Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan

033.16.18-4200 Dukungan Penyaluran Bantuan Pembiayaan Perumahan

C. Sumber Dana Bersas Dari :

1. Rupiah Murni	Rp.	0	4. Pinjaman/Hibah Dalam Negeri	Rp.	0	Jumlah Uang	Rp.	71.953.524.000
2. PNB	Rp.	71.953.524.000	- Pinjaman Dalam Negeri	Rp.	0		Rp.	71.953.524.000
- Penggunaan Saldo Awal BLU	Rp.	0	- Hibah Dalam Negeri	Rp.	0			
3. Pinjaman/Hibah Luar Negeri	Rp.	0	5. Hibah Langsung	Rp.	0			
- Pinjaman Luar Negeri	Rp.	0	- Hibah Luar Negeri Langsung	Rp.	0			
- Hibah Luar Negeri	Rp.	0	- Hibah Dalam Negeri Langsung	Rp.	0			
	Rp.	0	6. SBSN PBS	Rp.	0			

D. Pencapaian data dilakukan melalui :

1. KPPN JAKARTA II

E. Pernyataan Syarat dan Ketentuan [Disclaimer]

1. DIPA Petikan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari DIPA Induk [Nama Program, Unit Organisasi dan Kementerian Negara/Lembaga].
2. DIPA Petikan ini dibuat secara otomatis melalui sistem yang dilengkapi dengan kode pengaman berupa digital stamp sebagai pengganti tanda tangan pengesahan [identifikasi].
3. DIPA Petikan berfungsi sebagai dasar pelaksanaan kegiatan satker dan pencairan dana/pengesahan bagi Bendahara Umum Negara/Kuasa Bendahara Umum Negara.
4. Rencana Penarikan Dana dan Petikan Penarikan yang tercantum dalam Halaman III DIPA diisi sesuai dengan rencana pelaksanaan kegiatan.
5. Tanggung jawab terhadap penggunaan anggaran yang tercantum dalam DIPA Petikan sepenuhnya berada pada Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran.
6. Dalam hal terdapat perbedaan data antara DIPA Petikan dengan database RKA-K/L-DIPA Kementerian Keuangan maka yang berlaku adalah data yang terdapat di dalam database RKA-K/L-DIPA Kementerian Keuangan [berdasarkan bukti-bukti yang ada].
7. DIPA Petikan berlaku sejak tanggal 1 Januari 2020 sampai dengan 31 Desember 2020.

Jakarta, 12 November 2019
A/N MENTERI KEUANGAN
DIREKTUR JENDERAL ANGGARAN

td.
ASKOLANI
NIP. 196808111992021001

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN BADAN LAYANAN UMUM PETIKAN

TAHUN ANGGARAN 2020

NOMOR : DIPA- 033.16.1.631021/2020

IA. INFORMASI KINERJA



05 0639-9805-8380-2450

Kuasa Pengguna Anggaran : MONHILAL
Bendahara Pengeluaran : BKA NISFIASARI
Pejabat Penanda Tangan SPM : DEDE SOLIHIN

Kementerian Negara/Lembaga : 0033 KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT

Unit Organisasi : 116 DIJEN PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN

Provinsi : 01 DKI JAKARTA

Kode/Nama Satker : 1831021 BADAN LAYANAN UMUM (BLU) PUSAT PENGELOLAAN DANA PEMBIAYAAN PERUMAHAN

Informasi BLU:

1. Status BLU : Perulu

2. Besaran Persentase Ambang Batas : 50,00% dan PNPB

3. Saldo Awal Kas BLU : RP. 1.506.034.144,451
4. Saldo Akhir Kas BLU : RP. 1.506.034.144,451

Halaman : IA.1

PERUMAHAN DAN FASILITAS UMUM									
1 Fungsi	08								71.953.524.000
Sub Fungsi	08.01								71.953.524.000
2 Program	033.16.16								71.953.524.000
Sasaran Program	01								
Indikator Kinerja Program	01								
	02								
Output Program	02								
Indikator Output Program	01								
	02								
	03								
Kegiatan	4200								71.953.524.000
Sasaran Kegiatan	01								
Indikator Kinerja Kegiatan	01								
	02								
	03								
Output Kegiatan	4200.001								4.500.000.000
Indikator Output Kegiatan	01								
Output Kegiatan	4200.002								3.882.511.000
Indikator Output Kegiatan	01								
Output Kegiatan	4200.003								5.700.000.000
Indikator Output Kegiatan	01								
Output Kegiatan	4200.004								5.000.235.000
Indikator Output Kegiatan	01								



05 0639-9805-8380-2450

DAFTAR ISI/AN PELAKSANAAN ANGGARAN BADAN LAYANAN UMUM PETIKAN

TAHUN ANGGARAN 2020
NOMOR : DIPA - 033.16.1.631021/2020

IA. INFORMASI KINERJA

Kementerian Negara/Lembaga : [033] KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
Unit Organisasi : [16] DITJEN PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN
Provinsi : [01] DKI JAKARTA
Kode/Nama Saklar : [031021] BADAN LAYANAN UMUM [BLU] PUSAT PENGELOLAAN DANA PEMBIAYAAN PERUMAHAN
Informasi BLU:
1. Status BLU : Penuh
2. Besaran Persentase Ambang Batas : 50,00% dan PNPB

Kuasa Penguna Anggaran : MONHILAL
Bendahara Pengeluaran : BKA NISFIASARI
Pejabat Penanda Tangan SPM : DEDE SOLIHIN

3. Saldo Awal Kas BLU : RP. 1.506.034.144,451
4. Saldo Akhir Kas BLU : RP. 1.506.034.144,451

Output Kegiatan	4200.005	Pengawasan Internal dan Pembinaan Manajemen	28 Laporan	Laporan	990.088.000
Indikator Output Kegiatan	01	Pengawasan Internal dan Pembinaan Manajemen	28		
Output Kegiatan	4200.951	Layanan Sarana dan Prasarana Internal	1 Layanan	Layanan	8.844.815.000
Indikator Output Kegiatan	02	Jumlah Pengadaan perangkat pengolah data dan komunikasi = xx unit	1	Layanan	
	03	Jumlah Pengadaan peralatan fasilitas perkantoran = xx unit	1	Layanan	
Output Kegiatan	4200.994	Layanan Perkantoran	1 Layanan	Layanan	45.038.075.000
Indikator Output Kegiatan	01	Realisasi pembayaran Gaji dan Tunjangan = xx %	1	Layanan	
	02	Realisasi penyediaan layanan operasional dan pemeliharaan kantor = xx %	1	Layanan	

Halaman : IA.2

Jakarta, 12 November 2019
a.n. MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
SEKRETARIS JENDERAL

td.
Prof. ANITA FIRMANITI
NIP. 196006151987032001

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN BADAN LAYANAN UMUM PETIKAN

TAHUN ANGGARAN 2020

NOMOR : DIPA- 033.16.1.631021/2020

IB. SUMBER DANA

Kementerian Negara/Lembaga : [033}

Unit Organisasi : [16}

Provinsi : [01}

Kode/Nama Salter : [031021}

KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT

DITJEN PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN

DKI JAKARTA

BADAN LAYANAN UMUM (BLU) PUSAT PENGELOLAAN DANA PEMBIAYAAN PERUMAHAN

Halaman : I B. 1

1. Anggaran Tahun 2020		Rp.	71.993.524.000	Ket :	a. Pinjaman Luar Negeri	(1) Valuta Asing	US\$	Pagu	0	Rp.	0	Ekuivalen Rupiah
1. Rupiah Mumi		Rp.	0			(2) RPLN	US\$		0	Rp.	0	
2. PNBP		Rp.	71.993.524.000		b. Hibah Luar Negeri	(1) Valuta Asing	US\$		0	Rp.	0	
3. Pinjaman/Hibah Luar Negeri		Rp.	0			(2) RHLN	US\$		0	Rp.	0	
4. Pinjaman/Hibah Dalam Negeri		Rp.	0		c. Pinjaman Dalam Negeri		IDR		0			
5. Hibah Langsung		Rp.	0		d. Hibah Dalam Negeri		IDR		0			
6. SBSN PBS		Rp.	0		e. Hibah Luar Negeri	Langsung	IDR		0			
Rincian Pinjaman / Hibah :					f. Hibah Dalam Negeri	Langsung	IDR		0			
(dalam ribuan rupiah)												

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN BADAN LAYANAN UMUM PETIKAN

TAHUN ANGGARAN 2020

NOMOR : DIPA- 033.16.1.631021/2020

I. RINCIAN PENGELUARAN

Kementerian Negara/Lembaga : [033] KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT

Unit Organisasi : [16] DITJEN PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN

Provinsi : [01] DKI JAKARTA

Kode/Nama Saker : [831021] BADAN LAYANAN UMUM (BLU) PUSAT PENGELOLAAN DANA PEMBIAYAAN PERUMAHAN

Kewenangan : [KP]

Halaman : II. 1
{dalam ribuan rupiah}



03 0639-9805-8380-2450

KODE	URAIAN SATKER/PROGRAM/KEGIATAN/OUTPUT/SUMBER DANA	BELANJA						LOKASI/ KPPN	CARA PENARIKAN/ REGISTER
		PEGAJAWAI [31]	BARANG [32]	MODAL [33]	BANTUAN SOSIAL [37]	LAIN-LAIN [38]	JUMLAH SELURUH [39]		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
631021	BADAN LAYANAN UMUM (BLU) PUSAT PENGELOLAAN DANA PEMBIAYAAN PERUMAHAN	-	65.108.909	6.844.615	-	-	71.953.524	-	-
033.16.16	Program Pengembangan Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan	-	65.108.909	6.844.615	-	-	71.953.524	-	-
4200	Dukungan Penyaluran Bantuan Pembiayaan Perumahan	-	65.108.909	6.844.615	-	-	71.953.524	-	-
4200.001	Layanan Promosi, Kejasama dan Verifikasi [PN]	-	4.500.000	-	-	-	4.500.000	01.00	-
08 BLU		-	4.500.000	-	-	-	4.500.000	019	-
4200.002	Layanan Bidang Perencanaan, Tata Laksana dan Pelaporan	-	3.882.511	-	-	-	3.882.511	01.00	-
08 BLU		-	3.882.511	-	-	-	3.882.511	019	-
4200.003	Layanan Teknologi Informasi dan Pemantauan Evaluasi	-	5.700.000	-	-	-	5.700.000	01.00	-
08 BLU		-	5.700.000	-	-	-	5.700.000	019	-
4200.004	Layanan Internal Kelambagaan	-	5.000.235	-	-	-	5.000.235	01.00	-
08 BLU		-	5.000.235	-	-	-	5.000.235	019	-
4200.005	Pengawasan Internal dan Pembinaan Manajemen	-	990.088	-	-	-	990.088	01.00	-
08 BLU		-	990.088	-	-	-	990.088	019	-

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN BADAN LAYANAN UMUM PETIKAN

TAHUN ANGGARAN 2020

NOMOR : DIPA- 033.16.1.631021/2020

I. RINCIAN PENGELUARAN

Kementerian Negara/Lembaga : [033] KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT

Unit Organisasi : [16] DITJEN PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN

Provinsi : [01] DKI JAKARTA

Kode/Nama Satker : [631021] BADAN LAYANAN UMUM (BLU) PUSAT PENGELOLAAN DANA PEMBIAYAAN PERUMAHAN

Kewenangan : [KP]

Halaman : II. 2

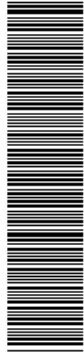
{dalam ribuan rupiah}

KODE	URAIAN SATKER/PROGRAM/KEGIATAN/OUTPUT/SUMBER DANA	BELANJA						LOKASI/ KPPN	CARA PENARIKAN/ REGISTER
		PEGAWAI [51]	BARANG [52]	MODAL [53]	BANTUAN SOSIAL [57]	LAIN-LAIN [58]	JUMLAH SELURUH [59]		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4200.951	Layanan Sarana dan Prasarana Internal	-	-	8.844.815	-	-	8.844.815	01 00	
06 BLU		-	-	8.844.815	-	-	8.844.815	019	
4200.994	Layanan Perkantoran	-	45.038.075	-	-	-	45.038.075	01 00	
06 BLU		-	45.038.075	-	-	-	45.038.075	019	
	JUMLAH	-	65.108.909	6.844.815	-	-	71.953.724		

Jakarta, 12 November 2019
a.n. MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
SEKRETARIS JENDERAL

td.

Prof. ANITA FIRMANTI
NIP 196008151987032001



05 10639-9805-8380-2450

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN BADAN LAYANAN UMUM PETIKAN

TAHUN ANGGARAN 2020

NOMOR : DIPA - 033.16.1.631021/2020

III. RENCANA PENARIKAN DANA DAN PERKIRAAN PENERIMAAN

Kementerian Negara/Lembaga : [033] KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT

Unit Organisasi : [118] DITJEN PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN

Provinsi : [01] DKI JAKARTA

Kode/Name Satker : [831021] BADAN LAYANAN UMUM (BLU) PUSAT PENGELOLAAN DANA PEMBIAYAAN PERUMAHAN

Halaman : II. 1
(dalam ribuan rupiah)

NO	KODE	URAIAN SATKER	RENCANA PENARIKAN												JUMLAH SELURUH
			JANUARI	FEBRUARI	MARET	APRIL	MAY	JUNI	JULI	AGUSTUS	SEPTEMBER	OKTOBER	NOVEMBER	DESEMBER	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
033.16.16.4200	631021	BADAN LAYANAN UMUM (BLU) PUSAT PENGELOLAAN DANA PEMBIAYAAN PERUMAHAN													
		RENCANA PENARIKAN DANA	5.751.383	5.751.383	5.751.383	5.751.383	5.751.383	5.751.383	5.751.383	5.751.383	5.751.383	5.751.383	5.751.383	5.751.383	5.751.383
		52 BELANJA BARANG	5.181.001	5.181.001	5.181.001	5.181.001	5.181.001	5.181.001	5.181.001	5.181.001	5.181.001	5.181.001	5.181.001	5.181.001	5.181.001
		53 BELANJA MODAL	570.382	570.382	570.382	570.382	570.382	570.382	570.382	570.382	570.382	570.382	570.382	570.382	570.382
		Dukungan Penyelenggaraan Bantian	5.751.383	5.751.383	5.751.383	5.751.383	5.751.383	5.751.383	5.751.383	5.751.383	5.751.383	5.751.383	5.751.383	5.751.383	5.751.383
033.16.16.4200	631021	Pembayaran Perumahan													
		52 BELANJA BARANG DAN BARANG	5.181.001	5.181.001	5.181.001	5.181.001	5.181.001	5.181.001	5.181.001	5.181.001	5.181.001	5.181.001	5.181.001	5.181.001	5.181.001
		53 BELANJA MODAL	570.382	570.382	570.382	570.382	570.382	570.382	570.382	570.382	570.382	570.382	570.382	570.382	570.382
		PERKIRAAN PENERIMAAN	22.515.751	22.515.751	22.515.751	22.515.751	22.515.751	22.515.751	22.515.751	22.515.751	22.515.751	22.515.751	22.515.751	22.515.751	22.515.751
		Dukungan Penyelenggaraan Bantian	22.515.751	22.515.751	22.515.751	22.515.751	22.515.751	22.515.751	22.515.751	22.515.751	22.515.751	22.515.751	22.515.751	22.515.751	22.515.751
033.16.16.4200	631021	Pembayaran Perumahan													
		- PNB yang digunakan langsung	11.483.033	11.483.033	11.483.033	11.483.033	11.483.033	11.483.033	11.483.033	11.483.033	11.483.033	11.483.033	11.483.033	11.483.033	11.483.033
		[424134]													
		- PNB yang digunakan langsung	2.026.418	2.026.418	2.026.418	2.026.418	2.026.418	2.026.418	2.026.418	2.026.418	2.026.418	2.026.418	2.026.418	2.026.418	2.026.418
		[424135]													
033.16.16.4200	631021	Pembayaran Perumahan													
		- PNB yang digunakan langsung	9.006.300	9.006.300	9.006.300	9.006.300	9.006.300	9.006.300	9.006.300	9.006.300	9.006.300	9.006.300	9.006.300	9.006.300	9.006.300
		[424911]													
		- PNB yang digunakan langsung													
		[424911]													

Jakarta, 12 November 2019
a.n. MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
SEKRETARIS JENDERAL

td.

Prof. ANITA FIRMANTI
NIP. 196008151987032001

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN BADAN LAYANAN UMUM PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2020
NOMOR : DIPA - 033.16.1.631021/2020
W A. B L O K I R



DS 0639-9805-8380-2450

Kementerian Negara/Lembaga : [033] KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
Unit Organisasi : [16] DITJEN PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN
Provinsi : [01] DKI JAKARTA
Kode dan Nama Satker : [631 021] BADAN LAYANAN UMUM (BLU) PUSAT PENGELOLAAN DANA PEMBIAYAAN PERUMAHAN

Halaman : W.A. 1
(dalam ribuan rupiah)

KODE	URAIAN	KODE	URAIAN

Jakarta, 12 November 2019
a.n. MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
SEKRETARIS JENDERAL

td.
Prof. ANITA FIRMANTI
NIP. 196006151987032001

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN BADAN LAYANAN UMUM PETIKAN

TAHUN ANGGARAN 2020
NOMOR : DIPA - 033.16.1.631 021/2020
N B. C A T A N



DS 0639-9805-8380-2450

Kementerian Negara/Lembaga : [033] KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
Unit Organisasi : [16] DITJEN PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN
Provinsi : [01] DKI JAKARTA
Kode dan Nama Satker : [631 021] BADAN LAYANAN UMUM (BLU) PUSAT PENGELOLAAN DANA PEMBIAYAAN PERUMAHAN

Halaman : IV.B. 1
(dalam ribuan rupiah)

KODE	URAIAN	KODE	URAIAN

Jakarta, 12 November 2019
a.n. MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
SEKRETARIS JENDERAL

td.
Prof. ANITA FIRMANTI
NIP. 196006151987032001

DIPA 033 Revisi 5



03.06.19-900.5-6389-2450

Revisi ke 05
Tanggal : 25 September 2020

SURAT PENGESAHAN DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN BADAN LAYANAN UMUM PETIKAN TAHUN ANGGARAN 2020

NOMOR : SP DIPA- 033.16.1.631021/2020

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
LAMPIRAN : Satu set DIPA Petikan



A. Dasar Hukum:

1. UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
2. UU No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.
3. UU No. 20 Tahun 2019 tentang APBN TA 2020

B. Dengan ini disahkan Alokasi Anggaran Untuk:

1. Kementerian Negara/Lembaga : [033} KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
2. Unit Organisasi : [16} CITJEN PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN
3. Provinsi : [01} DKI JAKARTA
4. Kode/Nama Sarker : [B31021} BADAN LAYANAN UMUM (BLU) PUSAT PENGELOLAAN DANA PEMBIAYAAN PERUMAHAN
 - a. Status BLU : Penun
 - b. Besaran Presentase Ambang Batas : 50% dari PNB

Sebesar : Rp. 71.953.524.000 | TUUHPULUH SATU MILIAR SEMBILAN RATUS LIMA PULUHTIGA JUTA LIMA RATUS DUA PULUH EMPAT RIBU RUPIAH }

Untuk kegiatan-kegiatan sebagai berikut :

Kode dan Nama Fungsi dan Sub Fungsi :

06 PERUMAHAN DAN FASILITAS UMUM

06.01 PEMBANGUNAN PERUMAHAN

Kode dan Nama Program dan Kegiatan :

033.16 Program Pengembangan Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan

033.16.4200 Dukungan Penyaluran Bantuan Pembiayaan Perumahan

C. Sumber Dana Bersasat Dari :

1. Rupiah Murni	Rp.	0	4. Pinjaman/Hibah Dalam Negeri	Rp.	0	Jumlah Uang	Rp.	71.953.524.000
2. PNB	Rp.	71.953.524.000	- Pinjaman Dalam Negeri	Rp.	0		Rp.	71.953.524.000
PNBP TA Bejalan	Rp.	0	- Hibah Dalam Negeri	Rp.	0			
- Penggunaan Saldo Awal BLU	Rp.	0	5. Hibah Langsung	Rp.	0			
3. Pinjaman/Hibah Luar Negeri	Rp.	0	- Hibah Luar Negeri Langsung	Rp.	0			
- Pinjaman Luar Negeri	Rp.	0	- Hibah Dalam Negeri Langsung	Rp.	0			
- Hibah Luar Negeri	Rp.	0	6. SBSN PBS	Rp.	0			
D. Pencapaian dana dilakukan melalui :								
1. KPPN JAKARTA II	[019]	Rp.						

E. Pernyataan Syarat dan Ketentuan [Disclaimer]

1. DIPA Petikan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari DIPA Induk [Nama Program, Unit Organisasi dan Kementerian Negara/Lembaga].
2. DIPA Petikan ini dibuat secara otomatis melalui sistem yang dilengkapi dengan kode pengaman berupa digital stamp sebagai pengganti tanda tangan pengesahan [identifikasi].
3. DIPA Petikan berfungsi sebagai dasar pelaksanaan kegiatan salter dan pencairan dana/pengesahan bagi Bendahara Umum Negara/Kuasa Bendahara Umum Negara.
4. Rencana Penarikan Dana dan Petikan Penarikan yang tercantum dalam Halaman III DIPA diisi sesuai dengan rencana pelaksanaan kegiatan.
5. Tanggung jawab terhadap penggunaan anggaran yang tercantum dalam DIPA Petikan sepenuhnya berada pada Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran.
6. Dalam hal terdapat perbedaan data antara DIPA Petikan dengan database RKA-K/L-DIPA Kementerian Keuangan maka yang berlaku adalah data yang terdapat di dalam database RKA-K/L-DIPA Kementerian Keuangan [berdasarkan bukti-bukti yang ada].
7. DIPA Petikan berlaku sejak tanggal 1 Januari 2020 sampai dengan 31 Desember 2020.

Jakarta, 12 November 2019
A. N. WENTERI KEUANGAN
DIREKTUR JENDERAL ANGGARAN

td.
ASKOLANI
NIP. 196808111992021001

DAFTAR ISI/AN PELAKSANAAN ANGGARAN BADAN LAYANAN UMUM PETIKAN

TAHUN ANGGARAN 2020
 NOMOR : DIPA- 033.16.1.631021/2020

IA. INFORMASI KINERJA

Kementerian Negara/Lembaga : [033} KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
 Unit Organisasi : [16} DITJEN PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN
 Provinsi : [01} DKI JAKARTA
 Kode/Nama Satker : [831021} BADAN LAYANAN UMUM [BLU] PUSAT PENGELOLAAN DANA PEMBIAYAAN PERUMAHAN
 Informasi BLU:
 1. Status BLU : Peruli
 2. Besaran Persentase Ambang Batas : 50,00% dan PNPB

Kuasa Pengguna Anggaran : MONHILAL
 Bendahara Pengeluaran : BKA NISFIASARI
 Pejabat Penanda Tangan SPM : DEDE SOLIHIN

3. Saldo Awal Kas BLU : RP. 1.506.034.144,451
 4. Saldo Akhir Kas BLU : RP. 1.506.034.144,451



05 0639-9805-8380-2450

PERUMAHAN DAN FASILITAS UMUM									
1 Fungsi	08								71.953.524.000
Sub Fungsi	08.01								71.953.524.000
2 Program	033.16.16								71.953.524.000
Sasaran Program	01								
Indikator Kinerja Program	01								
	02								
Output Program	02								
Indikator Output Program	01								
	02								
	03								
Kegiatan	4200								71.953.524.000
Sasaran Kegiatan	01								
Indikator Kinerja Kegiatan	01								
	02								
	03								
Output Kegiatan	4200.001								
Indikator Output Kegiatan	01								
Output Kegiatan	4200.002								
Indikator Output Kegiatan	01								
Output Kegiatan	4200.003								
Indikator Output Kegiatan	01								
Output Kegiatan	4200.004								
Indikator Output Kegiatan	01								

102.500 Unit Rumah
 110000
 40 Lambag a
 40
 \$ Laporan
 \$
 10 Laporan
 10

Unit Rumah
 110000
 40 Lambag a
 40
 \$ Laporan
 \$
 10 Laporan
 10

4.500.000.000
 3.882.511.000
 5.700.000.000
 5.000.235.000



05 0639-9805-8380-2450

DAFTAR ISI/AN PELAKSANAAN ANGGARAN BADAN LAYANAN UMUM PETIKAN

TAHUN ANGGARAN 2020

NOMOR : DIPA - 033.16.1.631021/2020

IA. INFORMASI KINERJA

Kementerian Negara/Lembaga : [033] KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
 Unit Organisasi : [16] DITJEN PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN
 Provinsi : [01] DKI JAKARTA
 Kode/Nama Saklar : [031021] BADAN LAYANAN UMUM [BLU] PUSAT PENGELOLAAN DANA PEMBIAYAAN PERUMAHAN
 Informasi BLU:
 1. Status BLU : Penuh
 2. Besaran Persentase Ambang Batas : 50,00% dan PNPB

Kuasa Pengguna Anggaran : MONHILAL
 Bendahara Pengeluaran : BKA NISFIASARI
 Pejabat Penanda Tangan SPM : DEDE SOLIHIN

3. Saldo Awal Kas BLU : RP. 1.506.034.144,451
 4. Saldo Akhir Kas BLU : RP. 1.506.034.144,451

Output Kegiatan	4200.005	Pengawasan Internal dan Pembinaan Manajemen	28 Laporan	Laporan	990.088.000
Indikator Output Kegiatan	01	Pengawasan Internal dan Pembinaan Manajemen	28		
Output Kegiatan	4200.951	Layanan Sarana dan Prasarana Internal	1 Layanan	Layanan	8.844.815.000
Indikator Output Kegiatan	02	Jumlah Pengadaan perangkat pengolah data dan komunikasi = xx unit	1	Layanan	
	03	Jumlah Pengadaan peralatan fasilitas perkantoran = xx unit	1	Layanan	
Output Kegiatan	4200.994	Layanan Perkantoran	1 Layanan	Layanan	45.038.075.000
Indikator Output Kegiatan	01	Realisasi pembayaran Gaji dan Tunjangan = xx %	1	Layanan	
	02	Realisasi penyediaan layanan operasional dan pemeliharaan kantor = xx %	1	Layanan	

Halaman : IA.2

Jakarta, 12 November 2019
 a.n. MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
 SEKRETARIS JENDERAL

td.
 Prof. ANITA FIRMANTI
 NIP. 196006151987032001

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN BADAN LAYANAN UMUM PETIKAN

TAHUN ANGGARAN 2020

NOMOR : DIPA- 033.16.1.631021/2020

IB. SUMBER DANA

Kementerian Negara/Lembaga : [033}

Unit Organisasi : [16}

Provinsi : [01}

Kode/Nama Satker : [031021}

KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT

DITJEN PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN

DKI JAKARTA

BADAN LAYANAN UMUM (BLU) PUSAT PENGELOLAAN DANA PEMBIAYAAN PERUMAHAN

Halaman : I B. 1

1. Anggaran Tahun 2020		Rp.	71.993.524.000	Kef :	a. Pinjaman Luar Negeri	11) Valuta Asing	US\$	Pagu	0 Rp.	Ekuivalen Ru piah	0
1. Ru piah Mumi		Rp.	0			12) RPLN	US\$		0 Rp.		0
2. PNBP		Rp.	71.993.524.000		b. Hibah Luar Negeri	11) Valuta Asing	US\$		0 Rp.		0
3. Pinjaman/Hibah Luar Negeri		Rp.	0			12) RHLN	US\$		0 Rp.		0
4. Pinjaman/Hibah Dalam Negeri		Rp.	0		c. Pinjaman Dalam Negeri		IDR	0			
5. Hibah Langsung		Rp.	0		d. Hibah Dalam Negeri		IDR	0			
6. SBSN PBS		Rp.	0		e. Hibah Luar Negeri	Langsung	IDR	0			
7. Rincian Pinjaman / Hibah :					f. Hibah Dalam Negeri	Langsung	IDR	0			
											(dalam ribuan rupiah)

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN BADAN LAYANAN UMUM PETIKAN

TAHUN ANGGARAN 2020

NOMOR : DIPA- 033.16.1.631021/2020

I. RINCIAN PENGELUARAN

Kementerian Negara/Lembaga : [033] KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT

Unit Organisasi : [16] DITJEN PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN

Provinsi : [01] DKI JAKARTA

Kode/Nama Satker : [831021] BADAN LAYANAN UMUM (BLU) PUSAT PENGELOLAAN DANA PEMBIAYAAN PERUMAHAN

Kewenangan : [KP]

Halaman : II. 1

(dalam ribuan rupiah)



03 0639-9805-8380-2450

KODE	URAIAN SATKER/PROGRAM/KEGIATAN/OUTPUT/SUMBER DANA	BELANJA						LOKASI/ KPPN	CARA PENARIKAN/ REGISTER
		PEGAWAI [31]	BARANG [32]	MODAL [33]	BANTUAN SOSIAL [37]	LAIN-LAIN [38]	JUMLAH SELURUH [39]		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
631021	BADAN LAYANAN UMUM (BLU) PUSAT PENGELOLAAN DANA PEMBIAYAAN PERUMAHAN	-	65.108.909	6.844.615	-	-	71.953.524	-	-
033.16.16	Program Pengembangan Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan	-	65.108.909	6.844.615	-	-	71.953.524	-	-
4200	Dukungan Penyaluran Bantuan Pembiayaan Perumahan	-	65.108.909	6.844.615	-	-	71.953.524	-	-
4200.001	Layanan Promosi, Kejasama dan Verifikasi	-	4.500.000	-	-	-	4.500.000	01.00	-
08 BLU		-	4.500.000	-	-	-	4.500.000	019	-
4200.002	Layanan Bidang Perencanaan, Tata Laksana dan Pelaporan	-	3.882.511	-	-	-	3.882.511	01.00	-
08 BLU		-	3.882.511	-	-	-	3.882.511	019	-
4200.003	Layanan Teknologi Informasi dan Pemantauan Evaluasi	-	5.700.000	-	-	-	5.700.000	01.00	-
08 BLU		-	5.700.000	-	-	-	5.700.000	019	-
4200.004	Layanan Internal Kelembagaan	-	5.000.235	-	-	-	5.000.235	01.00	-
08 BLU		-	5.000.235	-	-	-	5.000.235	019	-
4200.005	Pengawasan Internal dan Pembinaan Manajemen	-	990.088	-	-	-	990.088	01.00	-
08 BLU		-	990.088	-	-	-	990.088	019	-
4200.951	Layanan Sarana dan Prasarana Internal	-	-	6.844.615	-	-	6.844.615	01.00	-

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN BADAN LAYANAN UMUM PETIKAN

TAHUN ANGGARAN 2020

NOMOR : DIPA- 033.16.1.631021/2020

I. RINCIAN PENGELUARAN

Kementerian Negara/Lembaga : [033] KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT

Unit Organisasi : [16] DITJEN PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN

Provinsi : [01] DKI JAKARTA

Kode/Nama Satker : [831021] BADAN LAYANAN UMUM (BLU) PUSAT PENGELOLAAN DANA PEMBIAYAAN PERUMAHAN

Kewenangan : [KP]

Halaman : II. 2

{dalam ribuan rupiah}

KODE	URAIAN SATKER/PROGRAM/KEGIATAN/OUTPUT/SUMBER DANA	BELANJA						LOKASI/ KPPN	CARA PENARIKAN/ REGISTER
		PEGAWAI [31]	BARANG [32]	MODAL [33]	BANTUAN SOSIAL [37]	LAIN-LAIN [38]	JUMLAH SELURUH [39]		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
08 BLU		-	-	6.844.815	-	-	6.844.815	019	
4200.994 Layanan Perumahan		-	45.038.075	-	-	-	45.038.075	01 00	
08 BLU		-	45.038.075	-	-	-	45.038.075	019	
	JUMLAH	-	65.108.909	6.844.815	-	-	71.953.724		

Jakarta, 12 November 2019
a.n. MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
SEKRETARIS JENDERAL

td.

Prof. ANITA FIRMANTI
NIP.196008151987032001

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN BADAN LAYANAN UMUM PETIKAN

TAHUN ANGGARAN 2020

NOMOR : DIPA - 033.16.1.631021/2020

III. RENCANA PENARIKAN DANA DAN PERKIRAAN PENERIMAAN

Kementerian Negara/Lembaga : [033] KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT

Unit Organisasi : [16] DITJEN PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN

Provinsi : [01] DKI JAKARTA

Kode/Name Satker : [831021] BADAN LAYANAN UMUM (BLU) PUSAT PENGELOLAAN DANA PEMBIAYAAN PERUMAHAN

Halaman : II. 1
(dalam ribuan rupiah)

NO	KODE	URAIAN SATKER	RENCANA PENARIKAN												JUMLAH SELURUH
			JANUARI	FEBRUARI	MARET	APRIL	MAY	JUNI	JULI	AGUSTUS	SEPTEMBER	OKTOBER	NOVEMBER	DESEMBER	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
033.16.16.42.00	631021	BADAN LAYANAN UMUM (BLU) PUSAT PENGELOLAAN DANA PEMBIAYAAN PERUMAHAN													
		RENCANA PENARIKAN DANA	5.559.225	5.559.225	5.559.225	5.559.225	5.559.225	5.577.472	6.149.645	6.482.916	6.482.916	6.445.825	6.445.825	5.850.773	71.953.524
		52 BELANJA BARANG	4.988.843	4.988.843	4.988.843	4.988.843	5.310.869	5.107.090	5.579.263	5.912.528	5.912.528	5.875.437	5.875.437	5.280.388	65.108.908
		53 BELANJA MODAL	570.382	570.382	570.382	570.382	570.382	570.382	570.382	570.382	570.382	570.382	570.382	570.382	6.844.616
		Dukungan Penyaluran Bantuan Pembiayaan Perumahan	5.559.225	5.559.225	5.559.225	5.559.225	5.559.225	5.577.472	6.149.645	6.482.916	6.482.916	6.445.825	6.445.825	5.850.773	71.953.524
033.16.16.42.00	52	BELANJA BARANG DAN BARANG	4.988.843	4.988.843	4.988.843	4.988.843	5.310.869	5.107.090	5.579.263	5.912.528	5.912.528	5.875.437	5.875.437	5.280.388	65.108.908
		53 BELANJA MODAL	570.382	570.382	570.382	570.382	570.382	570.382	570.382	570.382	570.382	570.382	570.382	570.382	6.844.616
		PERKIRAAN PENERIMAAN	22.515.751	22.515.751	22.515.751	22.515.751	22.515.751	22.515.751	22.515.751	22.515.751	22.515.751	22.515.751	22.515.751	22.515.751	270.890.000
		Dukungan Penyaluran Bantuan Pembiayaan Perumahan	22.515.751	22.515.751	22.515.751	22.515.751	22.515.751	22.515.751	22.515.751	22.515.751	22.515.751	22.515.751	22.515.751	22.515.751	270.890.000
		- PNBYP YANG DIGUNAKAN LANGSUNG	11.483.033	11.483.033	11.483.033	11.483.033	11.483.033	11.483.033	11.483.033	11.483.033	11.483.033	11.483.033	11.483.033	11.483.033	137.796.390
033.16.16.42.00	424134	PNBYP YANG DIGUNAKAN LANGSUNG	2.026.418	2.026.418	2.026.418	2.026.418	2.026.418	2.026.418	2.026.418	2.026.418	2.026.418	2.026.418	2.026.418	2.026.418	24.317.010
		424135	9.006.300	9.006.300	9.006.300	9.006.300	9.006.300	9.006.300	9.006.300	9.006.300	9.006.300	9.006.300	9.006.300	9.006.300	108.073.600
		424911													

Jakarta, 12 November 2019
a.n. MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
SEKRETARIS JENDERAL

td.

Prof. ANITA FIRMANTI
NIP.196008151987032001

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN BADAN LAYANAN UMUM PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2020
NOMOR : DIPA - 033.16.1.631021/2020
W A. B L O K I R



DS 0639-9805-8380-2450

Kementerian Negara/Lembaga : [033] KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
Unit Organisasi : [16] DITJEN PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN
Provinsi : [01] DKI JAKARTA
Kode dan Nama Satker : [631 021] BADAN LAYANAN UMUM (BLU) PUSAT PENGELOLAAN DANA PEMBIAYAAN PERUMAHAN

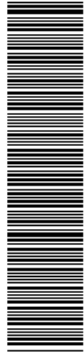
Halaman : W.A. 1
(dalam ribuan rupiah)

KODE	URAIAN	KODE	URAIAN

Jakarta, 12 November 2019
a.n. MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
SEKRETARIS JENDERAL

td.
Prof. ANITA FIRMANTI
NIP. 196006151987032001

DAFTAR ISI PELAKSANAAN ANGGARAN BADAN LAYANAN UMUM PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2020
NOMOR : DIPA - 033.16.1.631 021/2020
N B. C A T A N



DS 0639-9805-8380-2450

Kementerian Negara/Lembaga : [033] KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
Unit Organisasi : [16] DITJEN PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN
Provinsi : [01] DKI JAKARTA
Kode dan Nama Satker : [631 021] BADAN LAYANAN UMUM (BLU) PUSAT PENGELOLAAN DANA PEMBIAYAAN PERUMAHAN

Halaman : IV.B. 1
(dalam ribuan rupiah)

KODE	URAIAN	KODE	URAIAN

Jakarta, 12 November 2019
a.n. MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
SEKRETARIS JENDERAL

td.
Prof. ANITA FIRMANTI
NIP. 196006151987032001

DIPA 033 Revisi 6



03 06 09 900 5 53 09 2450

Revisi ke 06
Tanggal : 12 November 2020

SURAT PENGESAHAN DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN BADAN LAYANAN UMUM PETIKAN TAHUN ANGGARAN 2020

NOMOR : SP DIPA- 033.16.1.631021/2020

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
LAMPIRAN : Satu set DIPA Petikan



A. Dasar Hukum:

1. UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
2. UU No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.
3. UU No. 20 Tahun 2019 tentang APBN TA 2020

B. Dengan ini disahkan Alokasi Anggaran Untuk:

1. Kementerian Negara/Lembaga : [033} KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
2. Unit Organisasi : [16} CIT-JEN PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN
3. Provinsi : [01} DKI JAKARTA
4. Kode/Nama Sarker : [B31021} BADAN LAYANAN UMUM (BLU) PUSAT PENGELOLAAN DANA PEMBIAYAAN PERUMAHAN
- a. Status BLU : Pen u h
- b. Besaran Persentase Ambang Batas : 50% dari PNB

Sebesar : Rp. 71.953.524.000 | TUUHPULUH SATU MILIAR SEMBILAN RATUS LIMA PULUHTIGA JUTA LIMA RATUS DUA PULUH EMPAT RIBU RUPIAH }

Untuk kegiatan-kegiatan sebagai berikut :

Kode dan Nama Fungsi dan Sub Fungsi :

06 PERUMAHAN DAN FASILITAS UMUM

06.01 PEMBANGUNAN PERUMAHAN

Kode dan Nama Program dan Kegiatan :

033.16.16 Program Pengembangan Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan

033.16.16.4200 Dukungan Penyaluran Bantuan Pembiayaan Perumahan

C. Sumber Dana Bersas Dari :

1. Rupiah Murni	Rp.	0	4. Pinjaman/Hibah Dalam Negeri	Rp.	0	Jumlah Uang	Rp.	71.953.524.000
2. PNB	Rp.	71.953.524.000	- Pinjaman Dalam Negeri	Rp.	0		Rp.	71.953.524.000
- Penggunaan Saldo Awal BLU	Rp.	0	- Hibah Dalam Negeri	Rp.	0			
3. Pinjaman/Hibah Luar Negeri	Rp.	0	5. Hibah Langsung	Rp.	0			
- Pinjaman Luar Negeri	Rp.	0	- Hibah Luar Negeri Langsung	Rp.	0			
- Hibah Luar Negeri	Rp.	0	- Hibah Dalam Negeri Langsung	Rp.	0			
	Rp.	0	6. SBSN PBS	Rp.	0			

D. Pencapaian dana dilakukan melalui :

1. KPPN JAKARTA II

E. Pernyataan Syarat dan Ketentuan [Disclaimer]

1. DIPA Petikan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari DIPA Induk [Nama Program, Unit Organisasi dan Kementerian Negara/Lembaga].
2. DIPA Petikan ini dibuat secara otomatis melalui sistem yang dilengkapi dengan kode pengaman berupa digital stamp sebagai pengganti tanda tangan pengesahan [identifikasi].
3. DIPA Petikan berfungsi sebagai dasar pelaksanaan kegiatan satker dan pencairan dana/pengesahan bagi Bendahara Umum Negara/Kuasa Bendahara Umum Negara.
4. Rencana Penarikan Dana dan Petikan Penarikan yang tercantum dalam Halaman III DIPA diisi sesuai dengan rencana pelaksanaan kegiatan.
5. Tanggung jawab terhadap penggunaan anggaran yang tercantum dalam DIPA Petikan sepenuhnya berada pada Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran.
6. Dalam hal terdapat perbedaan data antara DIPA Petikan dengan database RKA-K/L-DIPA Kementerian Keuangan maka yang berlaku adalah data yang terdapat di dalam database RKA-K/L-DIPA Kementerian Keuangan [berdasarkan bukti-bukti yang ada].
7. DIPA Petikan berlaku sejak tanggal 1 Januari 2020 sampai dengan 31 Desember 2020.

Jakarta, 12 November 2019
A/N MENTERI KEUANGAN
DIREKTUR JENDERAL ANGGARAN

td.
ASKOLANI
NIP. 196808111992021001

DAFTAR ISI PELAKSANAAN ANGGARAN BADAN LAYANAN UMUM PETIKAN

TAHUN ANGGARAN 2020

NOMOR : DIPA - 033.16.1.631021/2020

IA. INFORMASI KINERJA

Kementerian Negara/Lembaga : [033} KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
 Unit Organisasi : [16} DITJEN PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN
 Provinsi : [01} DKI JAKARTA
 Kode/Nama Saker : [031021} BADAN LAYANAN UMUM [BLU] PUSAT PENGELOLAAN DANA PEMBIAYAAN PERUMAHAN
 Informasi BLU:
 1. Status BLU : Penuh
 2. Besaran Persentase Ambang Batas : 50,00% dan PNPB

Kuasa Pengguna Anggaran : MONHILAL
 Bendahara Pengeluaran : BKA NISFIASARI
 Pejabat Penanda Tangan SPM : DEDE SOLIHIN

3. Saldo Awal Kas BLU : RP.
 4. Saldo Akhir Kas BLU : RP.

1.506.034.144,451
 1.506.034.144,451

Halaman : IA. 1

71.953.524.000

71.953.524.000

71.953.524.000

PERUMAHAN DAN FASILITAS UMUM

PEMBANGUNAN PERUMAHAN

Program Pengembangan Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan

Dukungan Penyaluran Bantuan Pembiayaan Perumahan

Layanan Promosi, Ketjasama dan Verifikasi

Layanan Bidang Perencanaan, Tata Laksana dan Pelaporan

Layanan Teknologi Informasi dan Pemantauan Evaluasi

Layanan Internal Kalembaragan

Pengawasan Internal dan Pembinaan Manajemen

Layanan Sarana dan Prasarana Internal

Layanan Perencanaan

102.500,00 Unit Rumah

40,00 Lembaga

5,00 Laporan

10,00 Laporan

28,00 Laporan

1,00 Layanan

1,00 Layanan

71.953.524.000

4.500.000.000

3.882.511.000

5.700.000.000

5.000.235.000

990.085.000

8.844.815.000

45.036.075.000

Jakarta, 12 November 2019

a.n. MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
 SEKRETARIS JENDERAL

td.

Prof. ANITA FIRMANTI
 NIP 196006151987032001

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN BADAN LAYANAN UMUM PETIKAN

TAHUN ANGGARAN 2020

NOMOR : DIPA- 033.16.1.631021/2020

IB. SUMBER DANA

Kementerian Negara/Lembaga : [033}

Unit Organisasi : [16}

Provinsi : [01}

Kode/Nama Salter : [031021}

KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT

DITJEN PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN

DKI JAKARTA

BADAN LAYANAN UMUM (BLU) PUSAT PENGELOLAAN DANA PEMBIAYAAN PERUMAHAN

Halaman : IB. 1



03.0639-9805-8380-2450

1. Anggaran Tahun 2020	Rp.	71.863.524.000	Kel :	a. Pinjaman Luar Negeri	(1) Valuta Asing	US\$	Pagu	0 Rp.	0 Rp.	Ekivalen Ru piah	0
1. Ru piah Mumi	Rp.	0			(2) RPLN	US\$		0 Rp.	0 Rp.		0
2. PNBP	Rp.	71.863.524.000		b. Hibah Luar Negeri	(1) Valuta Asing	US\$		0 Rp.	0 Rp.		0
3. Pinjaman/Hibah Luar Negeri	Rp.	0			(2) RHLN	US\$		0 Rp.	0 Rp.		0
4. Pinjaman/Hibah Dalam Negeri	Rp.	0		c. Pinjaman Dalam Negeri		IDR		0 Rp.	0 Rp.		0
5. Hibah Langsung	Rp.	0		d. Hibah Dalam Negeri		IDR		0 Rp.	0 Rp.		0
6. SBSN PBS	Rp.	0		e. Hibah Luar Negeri Langsung		IDR		0 Rp.	0 Rp.		0
2. Rincian Pinjaman / Hibah :				f. Hibah Dalam Negeri Langsung		IDR		0 Rp.	0 Rp.		0

(dalam ribuan rupiah)

No.	SUMBER PINJAMAN DAN HIBAH No. NPPH per Tahun No. Register		PAGU TAHUN INI		RINCIAN DANA BERDASARKAN CARA PENARIKAN		DANA PENDAMPING			
	Kode	Uraian	Kode	Dana	Kode	Dana	Rp. Rdp	Rp. LN	Rp. Loc.Cost	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	

NPPH : Naskah Perjanjian Pinjaman dan/atau Hibah

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN BADAN LAYANAN UMUM PETIKAN

TAHUN ANGGARAN 2020

NOMOR : DIPA- 033.16.1.631021/2020

I. RINCIAN PENGELUARAN

Kementerian Negara/Lembaga : [033] KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT

Unit Organisasi : [16] DITJEN PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN

Provinsi : [01] DKI JAKARTA

Kode/Nama Satker : [831021] BADAN LAYANAN UMUM (BLU) PUSAT PENGELOLAAN DANA PEMBIAYAAN PERUMAHAN

Kewenangan : [KP]

Halaman : II. 1

{dalam ribuan rupiah}



03 0639-9805-8380-2450

KODE	URAIAN SATKER/PROGRAM/KEGIATAN/OUTPUT/SUMBER DANA	BELANJA						LOKASI/ KPPN	CARA PENARIKAN/ REGISTER
		PEGAWAI [31]	BARANG [32]	MODAL [33]	BANTUAN SOSIAL [37]	LAIN-LAIN [38]	JUMLAH SELURUH		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
631021	BADAN LAYANAN UMUM (BLU) PUSAT PENGELOLAAN DANA PEMBIAYAAN PERUMAHAN	-	65.108.909	6.844.615	-	-	71.953.524	-	-
033.16.16	Program Pengembangan Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan	-	65.108.909	6.844.615	-	-	71.953.524	-	-
4200	Dukungan Penyaluran Bantuan Pembiayaan Perumahan	-	65.108.909	6.844.615	-	-	71.953.524	-	-
4200.001	Layanan Promosi, Kejasama dan Verifikasi	-	4.500.000	-	-	-	4.500.000	01.00	-
08 BLU		-	4.500.000	-	-	-	4.500.000	019	-
4200.002	Layanan Bidang Perencanaan, Tata Laksana dan Pelaporan	-	3.882.511	-	-	-	3.882.511	01.00	-
08 BLU		-	3.882.511	-	-	-	3.882.511	019	-
4200.003	Layanan Teknologi Informasi dan Pemantauan Evaluasi	-	5.700.000	-	-	-	5.700.000	01.00	-
08 BLU		-	5.700.000	-	-	-	5.700.000	019	-
4200.004	Layanan Internal Kelembagaan	-	5.000.235	-	-	-	5.000.235	01.00	-
08 BLU		-	5.000.235	-	-	-	5.000.235	019	-
4200.005	Pengawasan Internal dan Pembinaan Manajemen	-	990.088	-	-	-	990.088	01.00	-
08 BLU		-	990.088	-	-	-	990.088	019	-
4200.951	Layanan Sarana dan Prasarana Internal	-	-	6.844.615	-	-	6.844.615	01.00	-

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN BADAN LAYANAN UMUM PETIKAN

TAHUN ANGGARAN 2020

NOMOR : DIPA- 033.16.1.631021/2020

I. RINCIAN PENGELUARAN

Kementerian Negara/Lembaga : [033} KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT

Unit Organisasi : [16} DITJEN PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN

Provinsi : [01} DKI JAKARTA

Kode/Nama Satker : [831021} BADAN LAYANAN UMUM (BLU) PUSAT PENGELOLAAN DANA PEMBIAYAAN PERUMAHAN

Kewenangan : [KP}

Halaman : II. 2

{dalam ribuan rupiah}

KODE	URAIAN SATKER/PROGRAM/KEGIATAN/OUTPUT/SUMBER DANA	BELANJA						LOKASI/ KPPN	CARA PENARIKAN/ REGISTER
		PEGAWAI [31]	BARANG [32]	MODAL [33]	BANTUAN SOSIAL [37]	LAIN-LAIN [38]	JUMLAH SELURUH [39]		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
08 BLU		-	-	6.844.815	-	-	6.844.815	019	
4200.994 Layanan Perumahan		-	45.038.075	-	-	-	45.038.075	01 00	
08 BLU		-	45.038.075	-	-	-	45.038.075	019	
	JUMLAH	-	65.108.909	6.844.815	-	-	71.953.724		

Jakarta, 12 November 2019

a.n. MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
SEKRETARIS JENDERAL

td.

Prof. ANITA FIRMANTI
NIP.196008151987032001



05 3039-9805-8380-2450

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN BADAN LAYANAN UMUM PETIKAN

TAHUN ANGGARAN 2020

NOMOR : DIPA - 033.16.1.631021/2020

III. RENCANA PENARIKAN DANA DAN PERKIRAAN PENERIMAAN

Kementerian Negara/Lembaga : [033] KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT

Unit Organisasi : [18] DITJEN PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN

Provinsi : [01] DKI JAKARTA

Kode/Name Satker : [831021] BADAN LAYANAN UMUM (BLU) PUSAT PENGELOLAAN DANA PEMBIAYAAN PERUMAHAN

Halaman : II. 1
(dalam ribuan rupiah)

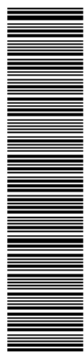
NO	KODE	URAIAN SATKER	RENCANA PENARIKAN												JUMLAH SELURUH
			JANUARI	FEBRUARI	MARET	APRIL	MAY	JUNI	JULI	AGUSTUS	SEPTEMBER	OKTOBER	NOVEMBER	DESEMBER	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
033.16.18.42.00	631021	BADAN LAYANAN UMUM (BLU) PUSAT PENGELOLAAN DANA PEMBIAYAAN PERUMAHAN													
		RENCANA PENARIKAN DANA	4.806.894	5.288.326	5.288.326	5.288.326	5.539.696	5.622.390	5.778.908	6.077.430	6.077.420	6.045.440	6.001.944	7.537.944	71.963.524
		52 BELANJA BARANG	4.475.473	4.956.574	4.956.574	4.956.574	5.207.734	5.290.428	5.446.856	5.756.422	5.756.412	5.724.432	6.274.443	6.306.994	65.108.908
		53 BELANJA MODAL	331.419	331.952	331.952	331.952	331.962	331.962	331.952	321.008	321.008	321.008	2.327.499	1.230.950	6.844.616
		Dukungan Penyaluran Bantuan Pembiayaan Perumahan	4.806.894	5.288.326	5.288.326	5.288.326	5.539.696	5.622.390	5.778.908	6.077.430	6.077.420	6.045.440	6.001.944	7.537.944	71.963.524
033.16.18.42.00	631021	PERKIRAAN PENERIMAAN													
		Dukungan Penyaluran Bantuan Pembiayaan Perumahan	4.475.473	4.956.574	4.956.574	4.956.574	5.207.734	5.290.428	5.446.856	5.756.422	5.756.412	5.724.432	6.274.443	6.306.994	65.108.908
		52 BELANJA BARANG DAN BARANG	331.419	331.952	331.952	331.952	331.962	331.962	331.952	321.008	321.008	321.008	2.327.499	1.230.950	6.844.616
		53 BELANJA MODAL	22.515.749	22.515.749	22.515.749	22.515.749	22.515.749	22.515.749	22.515.749	22.515.749	22.515.749	22.515.749	22.515.749	22.515.749	270.890.000
		PERKIRAAN PENERIMAAN	22.515.749	22.515.749	22.515.749	22.515.749	22.515.749	22.515.749	22.515.749	22.515.749	22.515.749	22.515.749	22.515.749	22.515.749	270.890.000
033.16.18.42.00	631021	Dukungan Penyaluran Bantuan Pembiayaan Perumahan	11.483.032	11.483.032	11.483.032	11.483.032	11.483.032	11.483.032	11.483.032	11.483.032	11.483.032	11.483.032	11.483.032	11.483.032	137.796.390
		- PNBYP YANG DIGUNAKAN LANGSUNG													
		[424134]	2.026.417	2.026.417	2.026.417	2.026.417	2.026.417	2.026.417	2.026.417	2.026.417	2.026.417	2.026.417	2.026.417	2.026.417	24.317.010
		[424135]													
		[424911]	9.006.300	9.006.300	9.006.300	9.006.300	9.006.300	9.006.300	9.006.300	9.006.300	9.006.300	9.006.300	9.006.300	9.006.300	108.079.600

Jakarta, 12 November 2019
a.n. MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
SEKRETARIS JENDERAL

td.

Prof. ANITA FIRMANTI
NIP 196008151987032001

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN BADAN LAYANAN UMUM PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2020
NOMOR : DIPA - 033.16.1.631021/2020
IV. C A T A T A N



DS 0639-9805-8380-2450

Kementerian Negara/Lembaga : [033] KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
Unit Organisasi : [16] DITJEN PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN
Provinsi : [01] DKI JAKARTA
Kode dan Nama Satker : [631 021] BADAN LAYANAN UMUM (BLU) PUSAT PENGELOLAAN DANA PEMBIAYAAN PERUMAHAN

Halaman : IV. 1
(dalam ribuan rupiah)

KODE	URAIAN	KODE	URAIAN

Jakarta, 12 November 2019
a.n. MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
SEKRETARIS JENDERAL

td.
Prof. ANITA FIRMANTI
NIP. 196006151987032001

DIPA 033 Revisi 7



05.05.39-9805-5339-2450

SURAT PENGESAHAN DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN BADAN LAYANAN UMUM PETIKAN TAHUN ANGGARAN 2020

NOMOR : SP DIPA- 033.16.1.631021/2020

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
LAMPIRAN : Satu set DIPA Petikan



A. Dasar Hukum:

1. UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
2. UU No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.
3. UU No. 20 Tahun 2019 tentang APBN TA 2020

B. Dengan ini disahkan Alokasi Anggaran Untuk:

1. Kementerian Negara/Lembaga : [033] KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
2. Unit Organisasi : [16] CITI/EN PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN
3. Provinsi : [01] DKI JAKARTA
4. Kode/Nama Satker : [631021] BADAN LAYANAN UMUM (BLU) PUSAT PENGELOLAAN DANA PEMBIAYAAN PERUMAHAN
 - a. Status BLU : Penuh
 - b. Besaran Persentase Ambang Batas : 50% dari PNB

Sebesar : Rp. 71.933.524.000 | TUU/PULUH SATU MILIAR SEMBILAN RATUS LIMA PULUH TIGA JUTA LIMA RATUS DUA PULUH EMPAT RIBU RUPIAH }

Untuk kegiatan-kegiatan sebagai berikut :

Kode dan Nama Fungsi dan Sub Fungsi :

06 PERUMAHAN DAN FASILITAS UMUM

06.01 PEMBANGUNAN PERUMAHAN

Kode dan Nama Program dan Kegiatan :

033.16.16 Program Pengembangan Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan

033.16.16.4020 Dukung Penyaluran Bantuan Pembiayaan Perumahan

C. Sumber Dana Berasal Dari :

1. Rupiah Murni	Rp.	0	4. Pinjaman/Hibah Dalam Negeri	Rp.	0
2. PNB	Rp.	71.933.524.000	- Pinjaman Dalam Negeri	Rp.	0
PNBP TA Bejalan	Rp.	0	- Hibah Dalam Negeri	Rp.	0
- Penggunaan Saldo Awal BLU	Rp.	0	5. Hibah Langsung	Rp.	0
3. Pinjaman/Hibah Luar Negeri	Rp.	0	- Hibah Luar Negeri Langsung	Rp.	0
- Pinjaman Luar Negeri	Rp.	0	- Hibah Dalam Negeri Langsung	Rp.	0
- Hibah Luar Negeri	Rp.	0	8. SBN PBS	Rp.	0

D. Pencairan dana dilakukan melalui :

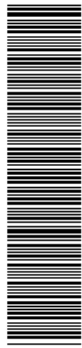
1. KPPN JAKARTA II

E. Pernyataan Syarat dan Ketentuan (Disclaimer)

1. DIPA Petikan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari DIPA Induk (Nama Program, Unit Organisasi dan Kementerian Negara/Lembaga).
2. DIPA Petikan ini dibuat secara otomatis melalui sistem yang terintegrasi dengan kode pengaman berupa digital stamp sebagai pengganti tanda tangan pengesahan (identifikasi).
3. DIPA Petikan berfungsi sebagai dasar pelaksanaan kegiatan satker dan pencairan dana/pengesahan bagi Bendahara Umum Negara/Kuasa Bendahara Umum Negara.
4. Rencana Penarikan Dana dan Penarikan Penarikan yang tercantum dalam Halaman III DIPA ini sesuai dengan rencana pelaksanaan kegiatan.
5. Tanggung jawab terhadap penggunaan anggaran yang tercantum dalam DIPA Petikan sepenuhnya berada pada Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran.
6. Dalam hal terdapat perbedaan data antara DIPA Petikan dengan database RKA-K/L-DIPA Kementerian Keuangan maka yang berlaku adalah data yang terdapat di dalam database RKA-K/L-DIPA Kementerian Keuangan (berdasarkan bukti-bukti yang ada).
7. DIPA Petikan berlaku sejak tanggal 1 Januari 2020 sampai dengan 31 Desember 2020.

Jakarta, 12 November 2019
A. N. MENTERI KEUANGAN
DIREKTUR JENDERAL ANGGARAN

Id.
ASKOLANI
NIP. 196806111992021001



05.0639-9805-5390-2450

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN BADAN LAYANAN UMUM PETIKAN

TAHUN ANGGARAN 2020

NOMOR : DIPA- 033.16.1.631021/2020

IA. INFORMASI KINERJA

Kementerian Negara/Lembaga : (033)		KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT		Kuasas Pengguna Anggaran : MONHILAL		
Unit Organisasi : (116)		DITJEN PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN		Bendahara Pengeluaran : EKA NISFIASARI		
Provinsi : (01)		DKI JAKARTA		Pejabat Penanda Tangan SPM : DEDE SOLIHIN		
Kode/Name Sdker : (1631021)		BADAN LAYANAN UMUM (BLU) PUSAT PENGELOLAAN DANA PEMBIAYAAN PERUMAHAN				
Informasi BLU:						
1. Status BLU :		: Penuh		3. Saldo Awal Kas BLU : RP.		
2. Besaran Persentase Ambang Batas :		: 50,00% dari PNPB		4. Saldo Akhir Kas BLU : RP.		
				Halaman : IA.1		
1 Fungsi	08	PERUMAHAN DAN FASILITAS UMUM				71.953.524.000
Sub Fungsi	08.01	PEMBANGUNAN PERUMAHAN				71.953.524.000
2 Program	033.16.16	Program Pengembangan Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan				71.953.524.000
Sasaran Program	01	Meningkatnya Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan				
Indikator Kinerja Program	01	Tingkat Ketersediaan Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan				16 %
	02	Tingkat Aksesibilitas Rumah Tangga Berpenghasilan Rendah Terhadap Kemudahan dan/atau Bantuan serta Fasilitas Pembiayaan Perumahan				15 %
Output Program	02	Jumlah MBR yang mendapat Kemudahan dan/atau Bantuan serta Fasilitas Pembiayaan Perumahan				
Indikator Output Program	01	Rasio Rumah Tangga Berpenghasilan Rendah yang mendapat Kemudahan dan/atau Bantuan serta Fasilitas Pembiayaan Perumahan				15 %
	02	Jumlah Paket Pembiayaan Perumahan				1 Jumlah Paket Pembiayaan
	03	Dukungan penyaluran dan pengelnaan dana pembiayaan perumahan				91 Laporan
Kegiatan	4200	Dukungan Penyaluran Bantuan Pembiayaan Perumahan				
Sasaran Kegiatan	01	Terselenggaranya dukungan penyaluran dan pengelnaan dana pembiayaan perumahan				
Indikator Kinerja Kegiatan	01	Jumlah Unit Rumah yang divestikasi untuk menerima pembiayaan perumahan				
	02	Jumlah Lembaga Jasa Keuangan yang menyalurkan pembiayaan perumahan				
	03	Dukungan penyaluran dan pengelnaan dana pembiayaan perumahan				
Output Kegiatan	4200.001	Layanan Promosi, Kejasama dan Verifikasi (PNJ)				102.500 Unit Rumah
Indikator Output Kegiatan	01	Layanan Promosi, Kejasama dan Verifikasi				
Output Kegiatan	4200.002	Layanan Bidang Perencanaan, Tata Laksana dan Pelaporan				110000 Unit Rumah
Indikator Output Kegiatan	01	Layanan Bidang Perencanaan, Tata Laksana dan Pelaporan				40 Lembaga
Output Kegiatan	4200.003	Layanan Teknologi Informasi dan Pemantauan Evaluasi				40 Lembaga
Indikator Output Kegiatan	01	Layanan Teknologi Informasi dan Pemantauan Evaluasi				5 Laporan
Output Kegiatan	4200.004	Layanan Internal Kelembagaan				5 Laporan
Indikator Output Kegiatan	01	Layanan Internal Kelembagaan				10 Laporan
						5.000.235.000
						71.953.524.000



05 0639-9805-5390-2450

DAFTAR ISI PELAKSANAAN ANGGARAN BADAN LAYANAN UMUM PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2020
NOMOR : DIPA- 033.16.1.631021/2020
IA. INFORMASI KINERJA

Kementerian Negara/Lembaga : [033] KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
Unit Organisasi : [116] DITJEN PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN
Provinsi : [01] DKI JAKARTA
Kode/Nama Satker : [1631021] BADAN LAYANAN UMUM (BLU) PUSAT PENGELOLAAN DANA PEMBIAYAAN PERUMAHAN
Informasi BLU:
1. Status BLU : Penuh
2. Besaran Persentase Ambang Batas : 50.00% dari PNPB

Kuasa Penguna Anggaran : MONHILAL
Bendahara Pengeluaran : EKA NISFIASARI
Pejabat Penanda Tangan SPM : DEDE SOLIHIN

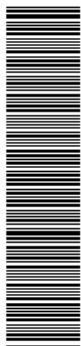
3. Saldo Awal Kas BLU : RP. 1.508.034.144.451
4. Saldo Akhir Kas BLU : RP. 1.508.034.144.451

Halaman : IA. 2

Output Kegiatan	4200.005	Pengawasan Internal dan Pembinaan Manajemen	28 Laporan	990.085.000
Indikator Output Kegiatan	01	Pengawasan Internal dan Pembinaan Manajemen	28 Laporan	
Output Kegiatan	4200.061	Layanan Sarana dan Prasarana Internal	1 Layanan	8.844.815.000
Indikator Output Kegiatan	02	Jumlah Pengadaan perangkat pengadai data dan komunikasi = xx unit	1 Layanan	
	03	Jumlah Pengadaan peralatan fasilitas perkantoran = xx unit	1 Layanan	
Output Kegiatan	4200.064	Layanan Perkantoran	1 Layanan	45.038.075.000
Indikator Output Kegiatan	01	Realisasi pembayaran Gaji dan Tunjangan = xx %	1 Layanan	
	02	Realisasi penyediaan layanan operasional dan pemeliharaan kantor = xx %	1 Layanan	

Jakarta, 12 November 2019
a.n. MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
SEKRETARIS JENDERAL

td.
Prof. ANITA FIRMANTI
NIP. 196008151987032001



DS 0639-9805-8380-2450

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN BADAN LAYANAN UMUM PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2020

TAHUN ANGGARAN 2020

NOMOR: DIPA-033.16.1.631021/2020

IB. SUMBER DANA

Kementerian Negara/Lembaga : |033| KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT

Unit Organisasi : 1183
 CITJEN PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN

Provinsi : DKI JAKARTA

Kode/Nama Satker : 16310211 BADAN LAYANAN UMUM (BLU) PUSAT PENGELOLAAN DANA PEMBIAYAAN PERUMAHAN

Halaman : 18. 1

[illegible]

NPP/H : Naskah Penjaminan Pinjaman dan/atau Hibah

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN BADAN LAYANAN UMUM PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2020
NOMOR : DIPA- 033.16.1.631021/2020

I. RINCIAN PENGELUARAN

Kementerian Negara/Lembaga : (033) KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
Unit Organisasi : (16) DIT-JEN PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN
Provinsi : (01) DKI JAKARTA
Kode/Nama Selver : (B31021) BADAN LAYANAN UMUM (BLU) PUSAT PENGELOLAAN DANA PEMBIAYAAN PERUMAHAN
Kewenangan : (KP)

Halaman : II. 1
(dalam ribuan rupiah)

KODE	URAIAN SATKER/PROGRAM/KEGIATAN/OUTPUT/SUMBER DANA	BELANJA						LOKASI/ KPPN	CARA PENARIKAN/ REGISTER
		PEGAWAYI [51]	BARANG [52]	MODAL [53]	BANTUAN SOSIAL [57]	LAIN-LAIN [58]	JUMLAH SELURUH		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
631021	BADAN LAYANAN UMUM (BLU) PUSAT PENGELOLAAN DANA PEMBIAYAAN PERUMAHAN	-	65.108.909	6.844.615	-	-	71.953.524	-	-
033.16.16	Program Pengembangan Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan	-	65.108.909	6.844.615	-	-	71.953.524	-	-
4200	Dukungan Penyelenggaraan Pembiayaan Perumahan	-	65.108.909	6.844.615	-	-	71.953.524	-	-
4200.001	Layanan Promosi, Kelasama dan Verifikasi (PN)	-	4.500.000	-	-	-	4.500.000	01.00	-
08	BLU	-	4.500.000	-	-	-	4.500.000	019	-
4200.002	Layanan Bidang Perencanaan, Tata Laksana dan Pelaporan	-	3.882.511	-	-	-	3.882.511	01.00	-
08	BLU	-	3.882.511	-	-	-	3.882.511	019	-
4200.003	Layanan Teknologi Informasi dan Pemantauan Evaluasi	-	5.700.000	-	-	-	5.700.000	01.00	-
08	BLU	-	5.700.000	-	-	-	5.700.000	019	-
4200.004	Layanan Internal Kelembagaan	-	5.000.238	-	-	-	5.000.238	01.00	-
08	BLU	-	5.000.238	-	-	-	5.000.238	019	-
4200.005	Pengawasan Internal dan Pembinaan Manajemen	-	990.088	-	-	-	990.088	01.00	-
08	BLU	-	990.088	-	-	-	990.088	019	-



DS 0639-9805-5390-2450

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN BADAN LAYANAN UMUM PETIKAN

TAHUN ANGGARAN 2020

NOMOR : DIPA- 033.16.1.631021/2020

I. RINCIAN PENGELUARAN

Kementerian Negara/Lembaga : (033) KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
 Unit Organisasi : (16) DITJEN PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN
 Provinsi : (01) DKI JAKARTA
 Kode/Nama Sifer : (B31021) BADAN LAYANAN UMUM (BLU) PUSAT PENGELOLAAN DANA PEMBIAYAAN PERUMAHAN
 Kewenangan : (KP)

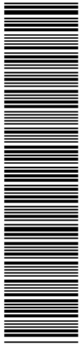
Halaman : II. 2
 (dalam ribuan rupiah)

KODE	URAIAN SATKER/PROGRAM/KEGIATAN/OUTPUT/SUMBER DANA	BELANJA						LOKASI/ KPPN	CARA PENARIKAN/ REGISTER
		PEGAUAI [51]	BARANG [52]	MODAL [53]	BANTUAN SOSIAL [57]	LAIN-LAIN [58]	JUMLAH SELURUH [59]		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4200.951	Layanan Sarana dan Prasarana Internal	-	-	8.844.815	-	-	8.844.815	01.00	
08	BLU	-	-	8.844.815	-	-	8.844.815	019	
4200.954	Layanan Perkantoran	-	45.036.075	-	-	-	45.036.075	01.00	
08	BLU	-	45.036.075	-	-	-	45.036.075	019	
	JUMLAH	-	65.106.909	8.844.815	-	-	71.953.524		

Jakarta, 12 November 2019
 a.n. MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
 SEKRETARIS JENDERAL

fld.

Prof. ANITA FIRMANTI
 NIP. 196009151957032001



05.0639-9805-5380-2450

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN BADAN LAYANAN UMUM PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2020

NOMOR : DIPA- 033.16.1.631021/2020

III. RENCANA PENARIKAN DANA DAN PERKIRAAN PENERIMAAN

Kementerian Negara/Lembaga : (033) KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT

Unit Organisasi : (18) CITJEN PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN

Provinsi : (01) DKI JAKARTA

Kode/Name Satker : (R31021) BADAN LAYANAN UMUM (BLU) PUSAT PENGELOLAAN DANA PEMBIAYAAN PERUMAHAN

Halaman : II, 1
(dalam ribuan rupiah)

NO	KODE	URAIAN SATKER	RENCANA PENARIKAN												JUMLAH SELURUH
			JANUARI	FEBRUARI	MARET	APRIL	MAY	JUNI	JULI	AGUSTUS	SEPTEMBER	OKTOBER	NOVEMBER	DESEMBER	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	631021	BADAN LAYANAN UMUM (BLU) PUSAT PENGELOLAAN DANA PEMBIAYAAN PERUMAHAN													
		RENCANA PENARIKAN DANA	4.806.894	5.288.526	5.288.526	5.288.526	5.339.686	5.622.380	5.778.808	6.077.430	6.077.420	6.045.440	6.801.944	7.337.945	71.953.524
		52 BELANJA BARANG	4.475.475	4.956.574	4.956.574	4.956.574	5.207.734	5.290.428	5.446.856	5.756.422	5.756.413	5.724.432	6.274.445	6.306.984	65.103.908
		53 BELANJA MODAL	331.419	331.952	331.952	331.952	331.952	331.952	331.952	321.008	321.008	321.008	2.327.499	1.230.961	6.844.615
		Dukungan Penyaluran Bantuan Pembiayaan Perumahan	4.806.894	5.288.526	5.288.526	5.288.526	5.339.686	5.622.380	5.778.808	6.077.430	6.077.420	6.045.440	6.801.944	7.337.945	71.953.524
033.18.18.4200		52 BELANJA BARANG DAN BARANG	4.475.475	4.956.574	4.956.574	4.956.574	5.207.734	5.290.428	5.446.856	5.756.422	5.756.413	5.724.432	6.274.445	6.306.984	65.103.908
		53 BELANJA MODAL	331.419	331.952	331.952	331.952	331.952	331.952	331.952	321.008	321.008	321.008	2.327.499	1.230.961	6.844.615
		PERKIRAAN PENERIMAAN	22.515.749	22.515.749	22.515.749	22.515.749	22.515.749	22.515.749	22.515.749	22.515.749	22.515.749	22.515.749	22.515.749	22.515.761	270.183.000
		Dukungan Penyaluran Bantuan Pembiayaan Perumahan	22.515.749	22.515.749	22.515.749	22.515.749	22.515.749	22.515.749	22.515.749	22.515.749	22.515.749	22.515.749	22.515.749	22.515.761	270.183.000
		- PNBP YANG DIGUNAKAN LANGSUNG (424134)	11.483.032	11.483.032	11.483.032	11.483.032	11.483.032	11.483.032	11.483.032	11.483.032	11.483.032	11.483.032	11.483.032	11.483.038	137.796.390
033.18.18.4200		- PNBP YANG DIGUNAKAN LANGSUNG (424135)	2.026.417	2.026.417	2.026.417	2.026.417	2.026.417	2.026.417	2.026.417	2.026.417	2.026.417	2.026.417	2.026.417	2.026.423	24.317.010
		- PNBP YANG DIGUNAKAN LANGSUNG (424911)	9.006.300	9.006.300	9.006.300	9.006.300	9.006.300	9.006.300	9.006.300	9.006.300	9.006.300	9.006.300	9.006.300	9.006.300	108.075.600

Jakarta, 12 November 2019
a.n. MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
SEKRETARIS JENDERAL

fld.

Pd. ANITA FIRMANITI
NIP. 196008151957033001

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN BADAN LAYANAN UMUM PETIKAN

TAHUN ANGGARAN 2020
NOMOR : DIPA-033.16.1.631021/2020
IV A. B L O K I R

Kementerian Neg aralLembaga : [033] KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
Unit Organisasi : [16] DITJEN PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN
Provinsi : [01] DKI JAKARTA
Kode dan Nama Salter : [631 021] BADAN LAYANAN UMUM (BLU) PUSAT PENGELOLAAN DANA PEMBIAYAAN PERUMAHAN

Halaman : IV A. 1
(dalam ribuan rupiah)



DS 0639-9805-6380-2450

KODE	URAIAN	KODE	URAIAN

Jakarta, 12 November 2019
a.n. MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
SEKRETARIS JENDERAL

td.
Prof. ANITA FIRMANTI
NIP. 196008151987032001

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN BADAN LAYANAN UMUM PETIKAN

TAHUN ANGGARAN 2020
NOMOR : DIPA- 033.16.1.631021/2020
IV B. C A T A T A N

Kementerian Neg aralLembaga : [033] KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
Unit Organisasi : [16] DITJEN PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN
Provinsi : [01] DKI JAKARTA
Kode dan Nama Salter : [631 021] BADAN LAYANAN UMUM (BLU) PUSAT PENGELOLAAN DANA PEMBIAYAAN PERUMAHAN

Halaman : IV B. 1
(dalam ribuan rupiah)



DS 0639-9805-5380-2450

KODE	URAIAN	KODE	URAIAN

Jakarta, 12 November 2019
a.n. MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
SEKRETARIS JENDERAL

td.
Prof. ANITA FIRMANTI
NIP 196008151987032001

Laporan Barang Kuasa Pengguna 2020

KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM
DITJEN PEMBAYARAN INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN
INSTANSI PUSAT

LAPORAN BARANG KUASA PENGGUNA TAHUNAN
GABUNGAN INTRAKOMPTABEL DAN EKSTRAKOMPTABEL
RINCIAN PER SUB-SUB KELOMPOK BARANG
TAHUN ANGGARAN 2020

Tanggal : 29-12-2020
Halaman : 1
Kode Lap. : LB.SGSSKT

NAMA UAKPB : 033.16.00.63102] PUSAT PENGELOLAAN DANA PEMBIAYAAN PERUMAHAN

[illegible]

KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM
DITJEN PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN
INSTANSI PUSAT

LAPORAN BARANG KUASA PENGGUNA TAHUNAN
GABUNGAN INTRAKOMPTABEL DAN EKSTRAKOMPTABEL
RINCIAN PER SUB-SUB KELOMPOK BARANG
TAHUN ANGGARAN 2020

Tanggal : 29-12-2020
Halaman : 2
Kode Lap. : LBSGSKT

NAMA UAKPB : 033.16.00.631021 PUSAT PENGELOLAAN DANA PEMBIAYAAN PERUMAHAN

AKUN NERACA/SUB-SUB KELOMPOK BARANG		SAT	SALDO PER 1 JANUARI 2020		MUTASI		BERKURANG		SALDO PER 31 DESEMBER 2020	
KODE	URAIAN		KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3.05.01.05.038	Laser Pointer	Buah	0	0	0	4.800,000	0	0	0	4.800,000
3.05.01.05.047	Lampu Lampu Kiri	Buah	0	0	2	10,120,000	0	0	2	10,120,000
3.05.01.05.048	LCD Projector Infocus	Buah	0	0	9	95,946,000	0	49,074,000	5	46,890,000
3.05.01.05.051	Software	Buah	0	0	3	292,500	3	292,500	0	0
3.05.01.05.052	Alat Perikam Suara (Voice Pen)	Buah	0	0	6	6,900,000	2	2,500,000	4	4,400,000
3.05.01.05.057	Pinlu Elektrik (yang Menakut Alas)	Buah	0	0	5	202,500,000	0	0	5	202,500,000
3.05.01.99.999	Alat Kendor Lainnya	Buah	0	0	13	190,070,000	0	0	13	190,070,000
3.05.02.01.002	Meja Kayu Kayu	Buah	0	0	119	569,566,262	30	47,685,000	89	521,881,262
3.05.02.01.003	Kursi Besi Metal	Buah	0	0	224	400,115,680	10	17,000,000	214	383,115,680
3.05.02.01.004	Kursi Kayu	Buah	0	0	36	242,599,455	0	0	36	242,599,455
3.05.02.01.005	Stor	Buah	0	0	1	9,946,000	1	9,946,000	0	0
3.05.02.01.008	Meja Rapi	Buah	0	0	7	92,650,000	2	5,465,000	5	87,185,000
3.05.02.01.014	Meja Resepsi	Buah	0	0	2	29,227,000	0	0	2	29,227,000
3.05.02.01.020	Kursi Fier/Glas/Plastik	Buah	0	0	36	28,965,110	6	7,395,000	27	21,570,110
3.05.02.01.027	Choral	Buah	0	0	2	19,800,000	0	0	2	19,800,000
3.05.02.01.999	Meubelur Lainnya	Buah	0	0	17	69,918,178	0	0	17	69,918,178
3.05.02.02.001	Meubelur Perghasaq Deou Vacuum Cleaner	Buah	0	0	1	19,800,000	1	19,800,000	0	0
3.05.02.04.004	A.C. Split	Buah	0	0	28	201,250,000	4	30,550,000	24	170,700,000
3.05.02.04.006	Kipas Angin	Buah	0	0	7	27,157,000	1	268,000	6	26,889,000
3.05.02.04.999	Alat Pendingin Lainnya	Buah	0	0	2	6,850,000	0	0	2	6,850,000
3.05.02.06.002	Televisi	Buah	0	0	17	107,990,000	2	14,820,000	15	93,170,000
3.05.02.06.008	Sound System	Buah	0	0	1	119,257,000	0	0	1	119,257,000
3.05.02.06.020	Camera Video	Buah	0	0	1	23,850,000	0	0	1	23,850,000
3.05.02.06.036	Duplexer	Buah	0	0	5	12,850,000	1	1,250,000	4	11,600,000

KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM
DITJEN PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN
INSTANSI PUSAT

LAPORAN BARANG KUASA PENGGUNA TAHUNAN
GABUNGAN INTRAKOMPTABEL DAN EKSTRAKOMPTABEL
RINCIAN PER SUB-SUB KELOMPOK BARANG
TAHUN ANGGARAN 2020

Tanggal : 29-12-2020
Halaman : 3
Kode Lap. : LBSCSKT

NAMA UAKPB : 033.16.00.631021 PUSAT PENGELOLAAN DANA PEMBIAYAAN PERUMAHAN

AKUN NERACA/SUB-SUB KELOMPOK BARANG		SAT	SALDO PER 1 JANUARI 2020		MUTASI		BERKURANG		SALDO PER 31 DESEMBER 2020	
KODE	URAIAN		KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3.05.02.06.006	Handy Cam	Buah	0	0	1	7.550,000	0	0	1	7.550,000
3.05.02.06.056	Kamera	Buah	0	0	15	12.498,585	0	3.000,000	11	9.498,585
3.05.02.06.080	Bracket Standing Perabian	Buah	0	0	1	20.330,000	0	0	1	20.330,000
3.05.02.99.999	Alat Rumah Tangga Lainnya	Buah	0	0	1	5.556,210	0	0	1	5.556,210
3.06.01.01.048	Uninterruptible Power Supply (UPS)	Buah	0	0	7	190.808,000	2	8.765,000	5	182.043,000
3.06.01.01.999	Perabian Studio Audio Lainnya	Buah	0	0	1	199.100,000	0	0	1	199.100,000
3.06.01.02.107	Layar Film Projector	Buah	0	0	2	12.000,000	0	0	2	12.000,000
3.06.01.02.128	Camera Digital	Buah	0	0	7	96.560,000	0	0	7	96.560,000
3.06.01.02.132	Video Conference	Buah	0	0	2	42.900,000	0	0	2	42.900,000
3.06.02.01.001	Telephone (PABX)	Buah	0	0	26	48.680,000	0	0	26	48.680,000
3.06.02.01.004	Telephone Mobile	Buah	0	0	6	94.050,000	0	0	6	94.050,000
3.06.02.01.006	Handy Tally (HT)	Buah	0	0	12	49.440,000	6	21.000,000	6	28.440,000
3.06.02.01.010	Facsimile	Buah	0	0	1	2.508,000	1	2.508,000	0	0
3.06.02.06.002	Wireless Amplifier	Buah	0	0	1	3.100,000	1	3.100,000	0	0
3.06.02.99.999	Alat Komunikasi Lainnya	Buah	0	0	2	197.375,000	0	0	2	197.375,000
3.06.03.19.001	Switcher Comanalon	Buah	0	0	2	64.841,900	0	0	2	64.841,900
3.07.01.01.127	Kursi Dorong	Buah	0	0	1	1.892,000	0	0	1	1.892,000
3.08.01.56.083	Thermometer Digital (Alat Laboratorium Lainnya)	Buah	0	0	1	1.980,000	0	0	1	1.980,000
3.09.04.02.031	Kamera Digital	Buah	0	0	5	21.125,000	5	21.125,000	0	0
3.09.04.07.035	Finger Print Camera	Buah	0	0	2	8.800,000	0	0	2	8.800,000
3.10.01.02.001	P.C Unit	Buah	0	0	118	1.609.668,500	13	145.689,000	105	1.463.979,500
3.10.01.02.003	Note Book	Buah	0	0	62	1.025.262,400	6	87.186,800	56	938.075,600
3.10.01.02.009	Tablet PC	Buah	0	0	1	9.900,000	0	0	1	9.900,000
3.10.02.01.004	Storage Modul Disk (Perabian Mainframe)	Buah	0	0	3	965.455,000	0	0	3	965.455,000

KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM
DITJEN PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN
INSTANSI PUSAT

LAPORAN BARANG KUASA PENGGUNA TAHUNAN
GABUNGAN INTRAKOMPTABEL DAN EKSTRAKOMPTABEL
RINCIAN PER SUB-SUB KELOMPOK BARANG
TAHUN ANGGARAN 2020

Tanggal : 29-12-2020
Halaman : 4
Kode Lap. : LBSGSKT

NAMA UAKPB : 033.16.00.631021 PUSAT PENGELOLAAN DANA PEMBIAYAAN PERUMAHAN

AKUN NERACA/SUB-SUB KELOMPOK BARANG		SALDO PER 1 JANUARI 2020		MUTASI		SALDO PER 31 DESEMBER 2020	
KODE	URAIAN	SAT	KUANTITAS	NILAI	BERTAMBAH	BERKURANG	NILAI
1	2	3	4	5	6	7	8
3.10.02.01.012	Hard Disk	Buah	0	0	12	111.540,000	0
3.10.02.01.015	Data Patch Panel	Buah	0	0	6	36.500,000	0
3.10.02.03.003	Printer (Perabian Personal Komputer)	Buah	0	0	83	391.828,000	13
3.10.02.03.004	Scanner (Perabian Personal Komputer)	Buah	0	0	5	53.232,000	0
3.10.02.04.001	Server	Buah	0	0	11	5.014.939,100	1
3.10.02.04.002	Rouler	Buah	0	0	7	178.775,900	2
3.10.02.04.014	Rat Server	Buah	0	0	3	41.514,000	0
3.10.02.04.023	Wireless Access Point	Buah	0	0	18	65.000,000	1
3.10.02.04.024	Switch	Buah	0	0	11	397.570,000	0
3.10.02.04.999	Perabian Jaringan Lainnya	Buah	0	0	2	35.255,000	0
3.19.01.02.001	Alat Teno Meja	Buah	0	0	1	4.475,000	1
3.19.01.04.999	Perabian Olah Raga Lainnya	Buah	0	0	5	92.400,000	0
151111	ASET TETAP DALAM RENOVASI		0	0	4	5.711.714,400	2
6.07.03.01.001	Gedung dan Bangunan Dalam Renovasi		0	0	4	5.711.714,400	2
15121	ASET TETAP LAINNYA		0	0	6	17.884,700	0
6.01.03.03.003	Ukiran Kayu dan sejenisnya	Buah	0	0	6	17.884,700	0
166112	ASET TETAP YANG TIDAK DIGUNAKAN		0	0	150	999.596,800	0
3.02.01.01.003	Stasiun Wagon	Unit	0	0	1	245.100,000	0
3.03.03.07.010	Scanner (Universal Tester)	Buah	0	0	4	26.000,000	0
3.04.01.04.004	Lemari Penyiraman	Buah	0	0	1	3.976,500	0
3.05.01.04.002	Lemari Kayu	Buah	0	0	4	8.256,000	0
3.05.01.04.003	Rak Besi	Buah	0	0	5	34.835,000	0
3.05.01.04.015	Locker	Buah	0	0	4	9.240,000	0
3.05.01.05.013	Cat Board/Ekt. Irs White Board	Buah	0	0	1	27.150,000	0

KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM
DITJEN PEMBAYARAN INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN
INSTANSI PUSAT

LAPORAN BARANG KUSA PENGGUNA TAHUNAN
GABUNGAN INTRAKOMPTABEL DAN EKSTRAKOMPTABEL
RINCIAN PER SUB-SUB KELOMPOK BARANG
TAHUN ANGGARAN 2020

Tanggal : 29-12-2020
Halaman : 5
Kode Lap. : LBSGSSKT

NAMA UAKPB : 033.16.00.631021 PUSAT PENGELOLAAN DANA PEMBIAYAAN PERUMAHAN

AKUN NERACA SUB-SUB KELOMPOK BARANG			SAT	SALDO PER 1 JANUARI 2020		MUTASI				SALDO PER 31 DESEMBER 2020	
KODE	URAIAN			KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
3.05.01.05.015	Alat Penghangat Kertas	Buah	0	0	2	4.290.000	0	0	2	4.290.000	
3.05.01.05.016	LCD Proyektor in focus	Buah	0	0	4	49.076.000	0	0	4	49.076.000	
3.05.01.05.051	Softboard	Buah	0	0	3	292.500	0	0	3	292.500	
3.05.01.05.052	Alat Peretas Suara (Voice Pen)	Buah	0	0	2	2.200.000	0	0	2	2.200.000	
3.05.02.01.002	Meja Kerja Kayu	Buah	0	0	30	47.685.000	0	0	30	47.685.000	
3.05.02.01.003	Kursi Besi Metal	Buah	0	0	10	17.000.000	0	0	10	17.000.000	
3.05.02.01.005	Stor	Buah	0	0	1	9.966.000	0	0	1	9.966.000	
3.05.02.01.008	Meja Rapat	Buah	0	0	2	5.465.000	0	0	2	5.465.000	
3.05.02.01.020	Kursi Plastik Plastik	Buah	0	0	9	7.293.000	0	0	9	7.293.000	
3.05.02.03.001	Mesin Penghapas Desu Vacuum Cleaner	Buah	0	0	1	19.800.000	0	0	1	19.800.000	
3.05.02.04.004	A.C. Split	Buah	0	0	4	30.550.000	0	0	4	30.550.000	
3.05.02.04.006	Kipas Angin	Buah	0	0	1	268.000	0	0	1	268.000	
3.05.02.06.002	Televisi	Buah	0	0	2	14.820.000	0	0	2	14.820.000	
3.05.02.06.026	Displayer	Buah	0	0	1	1.250.000	0	0	1	1.250.000	
3.05.02.06.036	Kamera	Buah	0	0	4	3.000.000	0	0	4	3.000.000	
3.06.01.01.018	Uninterruptible Power Supply (UPS)	Buah	0	0	2	8.765.000	0	0	2	8.765.000	
3.06.02.01.006	Hardy Tally (HT)	Buah	0	0	6	21.000.000	0	0	6	21.000.000	
3.06.02.01.010	Facsimile	Buah	0	0	1	2.208.000	0	0	1	2.208.000	
3.06.02.06.002	Wireless Amplifier	Buah	0	0	1	3.100.000	0	0	1	3.100.000	
3.09.04.02.031	Kamera Digital	Buah	0	0	5	21.125.000	0	0	5	21.125.000	
3.10.01.02.001	P.C Uml	Buah	0	0	6	145.689.000	0	0	6	145.689.000	
3.10.01.02.003	Nete Book	Buah	0	0	16	87.186.800	0	0	16	87.186.800	
3.10.02.02.003	Printer (Perabian Personal Komputer)	Buah	0	0	15	84.580.000	0	0	15	84.580.000	
3.10.02.04.001	Server	Buah	0	0	1	39.435.000	0	0	1	39.435.000	

KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM
DITJEN PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN
INSTANSI PUSAT

LAPORAN BARANG KUASA PENGGUNA TAHUNAN
GABUNGAN INTRAKOMPTABEL DAN EKSTRAKOMPTABEL
RINCIAN PER SUB-SUB KELOMPOK BARANG
TAHUN ANGGARAN 2020

Tanggal : 29-12-2020
Halaman : 6
Kode Lap. : LBSCSKT

NAMA UAKPB : 033.16.00.631021 PUSAT PENGELOLAAN DANA PEMBIAYAAN PERUMAHAN

1	KODE	URAIAN	SAT	SALDO PER 1 JANUARI 2020		BERTAMBAH		MUTASI		BERKURANG		SALDO PER 31 DESEMBER 2020	
				KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI
				4	5	6	7	8	9	10	11		
			Buah										
	3.10.02.04.002	Router	Buah	0	0	2	12.220.000	0	0	0	0	2	12.220.000
	3.10.02.04.023	Wireless Access Point	Buah	0	0	1	1.320.000	0	0	0	0	1	1.320.000
	3.19.01.02.001	Abi Terno Okeja	Buah	0	0	1	4.475.000	0	0	0	0	1	4.475.000
		TOTAL			0		23.694.942.220		3.855.254.000				19.838.988.220

Jakarta, 12 Oktober 2020
Penanggung Jawab UAKPB
Kuasa Pengguna Anggaran/Barang

Ir. Monhila Djipt, SE
196103221992031002

BA Capaian Kinerja



KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT PUSAT PENGELOLAAN DANA PEMBIAYAAN PERUMAHAN

Jl. Palatehan I No. 27 Kebayoran Baru, Jakarta Selatan - 12110, Telp. 021- 27510964 Fax. 021-7220050

BERITA ACARA KESEPAKATAN

No : 344/BA/Pg/2021

CAPAIAN REALISASI KINERJA ANGGARAN, CAPAIAN KINERJA DAN PENYALURAN FLPP BADAN LAYANAN UMUM PUSAT PENGELOLAAN DANA PEMBIAYAAN PERUMAHAN (BLU PPDPP) TAHUN 2020

Pada hari Kamis tanggal 7 Januari 2021 bertempat di Kantor BLU PPDPP Jakarta telah diadakan Rapat Pembahasan Berita Acara Capaian Kinerja Realisasi Kinerja, Capaian Kinerja dan Penyaluran Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) Badan Layanan Umum Pusat Pengelolaan Dana Pembiayaan Perumahan Tahun Anggaran 2020. Rapat pembahasan dimaksud untuk menghasilkan kesepakatan capaian kinerja realisasi anggaran Badan Layanan Umum Pusat Pengelolaan Dana Pembiayaan Perumahan Tahun Anggaran 2020 sebagai berikut:

1. Capaian Realisasi Anggaran Operasional BLU PPDPP (BA 033.16)

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Pagu Anggaran (Rp.)	Realisasi Anggaran (Rp.)	Capaian (%)
Dukungan Penyaluran Bantuan Pembiayaan Perumahan			71,953,524,000	68,673,498,238	95.44
1	Layanan Promosi, kerjasama, dan verifikasi	1). Jumlah Laporan Promosi dan Sosialisasi	2,800,000,000	2,777,184,742	99.19
		2). Jumlah Dokumen Kerjasama Kelembagaan	1,200,000,000	1,168,574,612	97.38
		3). Jumlah Unit Rumah yang Diverifikasi Permohonan Bantuan Pembiayaan	500,000,000	446,055,686	89.21
2	Layanan bidang perencanaan, tata laksana, dan pelaporan	1). Jumlah Dokumen Rencana Kerja Anggaran	590,369,000	563,319,650	95.42
		2). Jumlah Rekonsiliasi LJK	2,546,690,000	2,498,864,051	98.12
		3). Jumlah Laporan Keuangan	604,600,000	567,969,584	93.94
		4). Jumlah Laporan Kinerja	140,852,000	116,394,000	82.64
3	Layanan teknologi informasi, data, dan pemantauan evaluasi	1). Jumlah Laporan Pemeliharaan dan Pendayagunaan Database	1,000,000,000	799,075,025	79.91
		2). Jumlah Laporan Layanan Teknologi Informasi	2,600,000,000	2,582,738,300	99.34
		3). Jumlah Laporan Pemantauan dan Evaluasi Penyaluran Bantuan	2,100,000,000	1,296,432,696	61.73
4	Layanan internal kelembagaan	1). Jumlah Laporan Pengelolaan Sumber Daya Manusia (SDM)	1,504,140,000	1,402,068,100	93.21

		2).	Jumlah Laporan Publikasi dan Kehumasan	3,019,843,000	2,872,338,138	95.12
		3).	Jumlah Laporan Pengelolaan Aset BLU	215,760,000	167,736,000	77.74
		4).	Jumlah Laporan Layanan Bidang Hukum dan Kepatuhan	260,492,000	231,274,700	88.78
5	Pengawasan internal dan pembinaan manajemen	1).	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Pengawasan Internal	263,740,000	227,103,000	86.11
		2).	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Pembinaan Manajemen	726,348,000	605,541,347	83.37
6	Layanan sarana dan prasarana internal	1)	Pengadaan Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi	6,828,415,000	6,749,575,000	98.85
		2).	Pengadaan Peralatan dan Fasilitas Perkantoran	16,200,000	14,102,000	87.05
7	Layanan perkantoran	1)	Gaji dan Tunjangan	24,313,727,000	24,275,326,754	99.84
		2).	Operasional dan Pemeliharaan Kantor	20,722,348,000	19,311,824,853	93.19
Total				71,953,524,000	68,673,498,238	95.44

2. Capaian Kinerja Program Investasi Pemerintah BLU PPDPP (BA 999.03)

No.	Indikator Kinerja	Satuan	Capaian Kinerja 2020 (unit)		
			Target	Realisasi	%
Pengelolaan Dana Bergulir dan Pengembalian Pokok					
1	Bantuan Pembiayaan Perumahan ke Bank Pelaksana untuk rumah tangga berpenghasilan rendah yang berasal dari DIPA TA 2020 dan Pengembalian Pokok	Rumah Tangga	102,500	109,253	106.59
	TOTAL		102,500	109,253	106.59

3. Capaian Kinerja BLU PPDPP berdasarkan Kontrak Kinerja Direktur Utama dengan Menteri Keuangan /Direktur Jenderal Perbendaharaan sbb:

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET		REALISASI		PRESENTASE	
1	Pemantauan Ketepatan Sasaran Penyaluran FLPP	Presentase rumah yang dihuni MBR setelah 1 (satu) tahun sejak penandatanganan akad	100	%	100	%	100	%
2	Penyaluran Dana Kelolaan	Realisasi jumlah dana kelolaan tersalurkan kepada MBR dalam bentuk KPR FLPP dalam unit rumah	102,500	Unit	109,253	Unit	106.6	%

3	Penguatan Proses Bisnis	Persentase jumlah MBR yang mendaftar dan menerima KPR FLPP melalui aplikasi SiKasep	50	%	86.70	%	173.4	%
4	Peningkatan PNBP	Persentase realisasi PNBP BLU	100	%	120	%	120.0	%
5	Peningkatan Pengelolaan Badan Layanan Umum yang Berkesinambungan	Persentase penyelesaian rekomendasi hasil monitoring dan evaluasi dari Direktorat Pembinaan Pengelolaan Keuangan BLU secara tepat waktu yang memadai	85	%	100	%	117.6	%
6	Pengembangan Infrastruktur Teknologi Informasi	Persentase penyelesaian modernisasi pengelolaan BLU	100	%	125	%	125.0	%

Demikian Berita Acara Kesepakatan Capaian Kinerja Realisasi Anggaran, Capaian Kinerja dan Penyaluran FLPP Badan Layanan Umum Pusat Pengelolaan Dana Pembiayaan Perumahan TA. 2020 ini dibuat dengan sebenarnya dan dapat dipertanggungjawabkan.

Jakarta, 7 Januari 2021


Yang Menyepakati,

Direktur Layanan



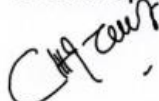
Christ Robert Panusunan M.

Direktur Keuangan



Arief Rahman Hakim

Direktur Operasi



Martanto Boedi J.

Direktur Umum dan Hukum



Atik Niene Nirani I.

Mengetahui,

Direktur Utama



Arief Sabaruddin

Penghargaan

Kinerja Optimal Penyaluran Subsidi Perumahan Melalui Teknologi Aplikatif Property & Bank Award 2020



The Best Leadership in the Distribution of Affordable Housing Subsidies Property & Bank Award 2020



The Most Innovative Public Service Agency for Affordable Housing Estate Awards 2020




Pemenang TOP Digital Awards 2020


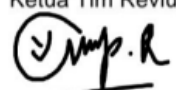
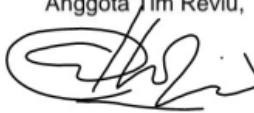


ISO Sistem Manajemen Mutu (SMM) 9001:2015



Catatan Hasil Reviu Laporan Kinerja BLU PPDPP 2020

	KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT SPI – PPDPP	Disusun oleh / Tanggal : Nur Syamsi 6 Jan '21
		Direviu oleh / Tanggal : Yusep R. / Jan '21
OBYEK REVIU : LAPORAN KINERJA PPDPP TAHUN 2020		
Uraian Catatan Hasil Reviu		Indeks KKR
I. Format Laporan Kinerja		KKR/Form
Format Laporan Kinerja telah mengacu pada Permenpan RB Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri PUPR Nomor 09/PRT/M/2018 Tentang Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Di Kementerian Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat.		
II. Mekanisme Penyusunan		KKR/Ssn
Laporan Kinerja disusun oleh tim penyusun di Divisi Akuntansi pada unit kerja Direktur Keuangan. Dari pengamatan selama proses reviu diketahui bahwa tim penyusun Laporan Kinerja belum sepenuhnya memperoleh secara lengkap data/informasi terkini yang diperlukan dalam penyusunan Laporan Kinerja PPDPP dari masing-masing unit kerja di lingkungan PPDPP. Untuk lebih menjamin keakuratan dan keandalan data/informasi yang disajikan dalam Laporan Kinerja, perlu ditetapkan metode pengumpulan data/informasi dari seluruh unit kerja di lingkungan PPDPP.		
III. Substansi Penyajian Laporan Kinerja		KKR/Subst
IV. Lain-lain		KKR/Ln
<ul style="list-style-type: none"> a. Pada paragraf 3 ringkasan eksekutif (halaman iii) sudah menyampaikan saldo awal FLPP tahun 2020, namun belum menyampaikan saldo akhir dana FLPP tahun 2020. b. Beberapa nomor halaman yang tercantum pada Daftar Isi berbeda dengan halaman riil. c. Terdapat kesalahan redaksional pada Daftar Isi, yaitu pada 4.3 Realisasi Anggaran Tahun 2019 seharusnya Realisasi Anggaran Tahun 2020. Begitupula pada 4.4 Evaluasi Pencapaian Kinerja Tahun 2015-2019 seharusnya Evaluasi Pencapaian Kinerja Tahun 2016-2020 atau disesuaikan dengan yang disajikan pada Bab IV. d. Terdapat kesalahan redaksional yaitu pencantuman halaman 19 terdapat pada 2 lembar halaman, seharusnya halaman 19 yang kedua adalah halaman 20. e. Pada halaman 37-70 tidak menampilkan <i>page number</i> dan garis sebagaimana yang tercantum pada halaman sebelumnya. f. Pada Halaman 50, kalimat terakhir paragraf pertama terdapat 		

kesalahan redaksional yaitu "Rincian pendapatan BLU PPDPP tahun 2019 dan tahun 2018 " seharusnya Rincian pendapatan BLU PPDPP tahun 2019 dan tahun 2020.	
Tanggapan:	
II. Mekanisme Penyusunan Data sudah diperbaharui	
III. Substansi Penyajian Laporan Kinerja Bab Pendahuluan Butir a.1 s.d 5 telah dilakukan perbaikan Bab Akuntabilitas Butir angka 1 s.d 6 telah dilakukan perbaikan	
IV. Lain Lain Butir a s.d f sudah dilakukan perbaikan	
Masukan dan koreksi tersebut untuk point II, III a1-a5, dan III d1-d6 sudah ditindaklanjuti dengan rincian perubahan sebagaimana terlampir sesuai hasil klarifikasi yang disepakati kedua belah pihak antara Tim SPI dengan Tim Divisi Akuntansi melalui zoom meeting pembahasan Reviu Laporan Kinerja Tahun 2020 pada tanggal 12 Januari 2020 pukul 10.00 s.d selesai.	
Perbaikan yang Belum Dilakukan/Tidak Disetujui:	
<div style="border: 1px solid black; height: 40px; width: 100%;"></div> <div style="border: 1px solid black; height: 40px; width: 100%;"></div> <div style="border: 1px solid black; height: 40px; width: 100%;"></div> <div style="border: 1px solid black; height: 40px; width: 100%;"></div>	
Penanggungjawab Penyusunan Laporan Kinerja PPDPP  Arief Rahman Hakim NIP.196704091988021001	Jakarta, Januari 2021 Ketua Tim Reviu,  Yusep Rusmana NRP.1977030320170601-01 Anggota Tim Reviu,  Nur Syamsi Rajab NRP.1992010520170601-02

Lampiran Catatan Hasil Review Laporan Kinerja BLU PPDPP Tahun 2020

V. Format Laporan Kinerja	
Format Laporan Kinerja telah mengacu pada Permenpan RB Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri PUPR Nomor 09/PRT/M/2018 Tentang Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Di Kementerian Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat.	
VI. Mekanisme Penyusunan	
<p>Laporan Kinerja disusun oleh tim penyusun di Divisi Akuntansi pada unit kerja Direktur Keuangan.</p> <p>Dari pengamatan selama proses reviu diketahui bahwa tim penyusun Laporan Kinerja belum sepenuhnya memperoleh secara lengkap data/informasi terkini yang diperlukan dalam penyusunan Laporan Kinerja PPDPP dari masing-masing unit kerja di lingkungan PPDPP.</p> <p>Untuk lebih menjamin keakuratan dan keandalan data/informasi yang disajikan dalam Laporan Kinerja, perlu ditetapkan metode pengumpulan data/informasi dari seluruh unit kerja di lingkungan PPDPP.</p>	Data/informasi yang belum lengkap sudah dilengkapi oleh tim
VII. Substansi Penyajian Laporan Kinerja	
<p>a. Bab I Pendahuluan</p> <p>1) Dalam uraian struktur organisasi terdapat pernyataan, <i>Berdasarkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 15/PRT/M/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 14/PRT/M/2019.....</i></p> <p>Uraian tersebut tidak tepat sebab Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 14/PRT/M/2019 bukan tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, akan tetapi tentang Organisasi dan Tata Kerja Pusat Pengelolaan Dana Pembiayaan Perumahan,</p> <p>2) Uraian-uraian pada Laporan Kinerja Tahun 2020 masih didasarkan pada Peraturan Menteri PUPR Nomor 15/PRT/M/2015 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kementerian Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat, sehingga perlu diperbaiki dengan mengacu pada peraturan terbaru, yaitu Peraturan Menteri PUPR Nomor 13/PRT/M/2020 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kementerian Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat.</p> <p>3) Penyajian Pejabat Pengelola dan Dewan Pengawas PPDPP sebaiknya cukup menginformasikan nama Pejabat pada posisi</p>	<p>1) Sudah ditindaklanjuti dengan hanya mencantumkan Peraturan Menteri PUPR No 14/PRT/M/2019 (hal.3)</p> <p>2) Sudah ditindaklanjuti secara parallel</p> <p>3) Sudah ditindaklanjuti dengan mengubah</p>

<p>tahun 2020. Sedangkan pergantian Pejabat Pengelola dan Dewan Pengawas PPDPP yang terjadi pada tahun 2019 sudah kurang relevan diuraikan dalam Laporan Kinerja Tahun 2020;</p> <p>4) Pada uraian isu strategis terdapat pengambilan kutipan yang menyatakan bahwa BPS mencatat, bahwa backlog kepemilikan perumahan di tahun 2014 sekitar 11,4 juta unit. Dalam lima tahun terakhir ada pengurangan baru sekitar 4,6 juta (per November 2019), tapi tak berarti sisanya persis di angka 6,8 juta.</p> <p>Terkait kutipan tersebut sebaiknya dijadikan lampiran pada bagian akhir Laporan Kinerja, baik itu berupa jurnal BPS ataupun yang lainnya;</p> <p>5) Selanjutnya pada uraian isu strategis terdapat pernyataan bahwa Disamping Pemerintah Daerah, pelaku yang juga perlu diberdayakan adalah masyarakat dan dunia usaha, termasuk BUMN yang bergerak di bidang infrastruktur perumahan dan kawasan permukiman yang selama ini belum didorong secara maksimal. Peran dunia usaha seharusnya dikembalikan sebagai investor yang efektif dan sebagai generator pengembangan kawasan. BUMN harus didorong untuk dapat melaksanakan pelayanan kepada masyarakat sekaligus membantu Pemerintah untuk menyelesaikan target-target yang telah ditetapkan.</p> <p>Atas pernyataan tersebut sebaiknya disampaikan referensi yang menjadi dasar pernyataan/kutipan tersebut sehingga pernyataan tersebut dapat dipertanggungjawabkan.</p> <p>b. Bab II Perencanaan Kinerja ---</p> <p>c. Bab III Kapasitas Organisasi ---</p> <p>d. Bab IV Akuntabilitas Kinerja</p> <p>1) Tim penyusun Laporan Kinerja belum sepenuhnya memperoleh secara lengkap data/informasi terkini yang diperlukan dalam penyusunan Laporan Kinerja PPDPP dari masing-masing unit kerja di lingkungan PPDPP sehingga terdapat data/informasi yang disajikan sifatnya masih sementara maupun belum terisi.</p> <p>2) Pada Gambar 4.1 (Halaman 57) terdapat ketidaksinkronan antara judul yaitu "Persentase Kinerja Dukungan Penyaluran Bantuan Pembiayaan Perumahan Tahun 2020" dengan penyajian dalam tabel (menyajikan perbandingan antara Target dan Realisasi Kinerja namun tidak menyajikan persentase).</p>	<p>penyajian pejabat pengelola dan Dewan PPDPP hanya periode tahun berjalan, kecuali untuk SPI karena pergantian jabatan terjadi pada tahun berjalan (hal 7-8)</p> <p>4) Sudah ditindaklanjuti dengan mencantumkan sumber kutipan (hal.9)</p> <p>5) Sudah ditindaklanjuti dengan mencantumkan sumber kutipan (hal.9)</p> <p>1) Data yang kurang sudah dapat kami lengkapi per 12 Januari 2020</p> <p>2) Sudah ditindaklanjuti dengan grafik 4.1 tentang Penyaluran Bantuan Pembiayaan Perumahan Tahun 2020 berdasarkan target dan realisasi</p>
--	---

<p>3) Tabel 4.17 Analisis Kinerja dan Keuangan BLU PPDPP Tahun 2019-2020 belum seluruhnya diperbaharui.</p> <p>4) Pada paragraf 1 Bagian B. Pengelolaan Dana Bergulir dan Pengembalian Pokok (Halaman 53) Istilah <i>proyeksi</i> pada kalimat "proyeksi pengembalian pokok yang diterima sampai dengan akhir tahun 2020 adalah sebesar 109.253 unit" dapat dihilangkan karena nilai tersebut adalah nilai riil yang sudah direalisasikan bukan merupakan proyeksi (perkiraan di masa depan). Selain itu kalimat selanjutnya yaitu "proyeksi dana yang tersedia sebesar Rp11.000.000.000.000,00" dapat diubah menjadi "target penyaluran FLPP tahun 2020 sebesar Rp11.000.000.000.000,00" sebagaimana yang tercantum dalam ringkasan eksekutif.</p> <p>5) Tabel 4.12 belum menyajikan informasi realisasi FLPP berdasarkan Provinsi Tahun 2020, selain itu sebaiknya ditambahkan juga tabel terkait informasi realisasi FLPP berdasarkan Bank Pelaksana Tahun 2020.</p> <p>6) Terdapat ketidaksinkronan antara Daftar Isi dengan yang tercantum pada Bab IV Akuntabilitas Kinerja, yaitu tidak terdapat Sub Bab 4.5. Evaluasi Pencapaian Kinerja Keuangan pada Bab IV.</p> <p>e. Bab V Penutup</p> <p>---</p>	<p>(hal.54)</p> <p>3) Tabel 4.17 sudah diperbarui dengan data terkini (hal.70-71)</p> <p>4) Sudah ditindaklanjuti dengan merubah redaksi sesuai masukan (hal.52)</p> <p>5) Tabel 4.12 sudah dilengkapi ditambah dengan tabel 4.13 terkait informasi realisasi FLPP berdasarkan Bank Pelaksana (hal.62-65)</p> <p>6) Ketidaksinkronan terjadi karena daftar halaman yang belum terupdate, akan segera dilakukan penyesuaian</p>
<p>VIII. Lain-lain</p>	
<p>a. Pada paragraf 3 ringkasan eksekutif (halaman iii) sudah menyampaikan saldo awal FLPP tahun 2020, namun belum menyampaikan saldo akhir dana FLPP tahun 2020.</p> <p>b. Beberapa nomor halaman yang tercantum pada Daftar Isi berbeda dengan halaman riil.</p> <p>c. Terdapat kesalahan redaksional pada Daftar Isi, yaitu pada 4.3 Realisasi Anggaran Tahun 2019 seharusnya Realisasi Anggaran Tahun 2020. Begitupula pada 4.4 Evaluasi Pencapaian Kinerja Tahun 2015-2019 seharusnya Evaluasi Pencapaian Kinerja Tahun 2016-2020 atau disesuaikan dengan yang disajikan pada Bab IV.</p> <p>d. Terdapat kesalahan redaksional yaitu pencantuman halaman 19 terdapat pada 2 lembar halaman, seharusnya halaman 19 yang kedua adalah halaman 20.</p>	<p>a.) Sudah ditindaklanjuti dengan mencantumkan saldo akhir pada paragraf dimaksud</p> <p>b-e Untuk masukan point b-e akan dilakukan penyesuaian readaksional, daftar isi, dan penomoran halaman</p>

e. Pada halaman 37-70 tidak menampilkan <i>page number</i> dan garis sebagaimana yang tercantum pada halaman sebelumnya.	f). Sudah ditindaklanjuti dengan merubah redaksi (hal.59)
f. Pada Halaman 50, kalimat terakhir paragraf pertama terdapat kesalahan redaksional yaitu "Rincian pendapatan BLU PPDPP tahun 2019 dan tahun 2018 " seharusnya Rincian pendapatan BLU PPDPP tahun 2019 dan tahun 2020.	